



FISIP  
MENYAPA  
PEDULI  
BERBAGI

# PROSIDING

## RESILIENSI INDONESIA DALAM PUSARAN DISRUPSI GLOBAL



**SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER  
FISIP UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2024**

22 Agustus 2024

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

## Daftar Isi

Daftar isi.....	i
Analisa E-Government dalam Penggunaan Aplikasi Srikandi pada Dinas Pariwisata Kota Palembang <i>Delfiazi Puji Lestari, Destyana Ramadhanti</i> .....	1
Analisis Nilai Patriarki dalam Putusan Sidang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sawahlunto <i>Ghina Reftantia, Kurnia Asni Sari, Deni Aries Kurniawan, Yuanita Dwi Hapsari</i> .....	11
Collaborative Governance dalam Pengembangan Agrowisata di Kota Palembang: Studi Kasus Agrowisata Edukasi Sungai Jawi Kecamatan Kalidoni Kota Palembang <i>Rahmawati, Rizki Marsalina</i> .....	31
Collaborative Governance: Model Implementasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Kota Palembang <i>Delfiazi Puji Lestari, Rusdi</i> .....	43
Collaborative Governance Dinas Perhubungan Kota Palembang: Penerapan dan Penegakkan Retribusi <i>M. Wicky Dwi Nando, Rika Apriliani, Siti Zubaidah</i> .....	51
Digitalisasi Pelayanan Publik dalam Sektor Pelayanan Kependudukan <i>Muhammad Iqbal, Tony Mirza</i> .....	62
Disrupsi Global Pernikahan Sesama Jenis Solusi Pendekatan Sosio Hukum Agama di Indonesia <i>Murry Darmoko Moersidin</i> .....	69
Efektivitas Kinerja Pegawai pada Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Ilir Timur Satu Palembang <i>Ainun Aisyah, Ade Uswatun Hasanah, Wina Aurelia</i> .....	78
Peran Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Lais <i>Trecy Austin, Febby Shamudra, Arif Rahman Hakim</i> .....	83
Evaluasi Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Era Revolusi Industri 4.0 <i>Alvina Seotiani, Zailani Surya Marpaung</i> .....	107
Hegemoni “Clash of Champions Ruang Guru” di Tengah Maraknya Tayangan Non Edukatif <i>Kurnia Asni Sari, Ghina Reftantia</i> .....	130

Hiperrealitas Pengunjung Objek Wisata Ala Luar Negeri di Instagram <i>Hayana Muslimah</i> .....	146
Implementasi dan Tantangan Anggaran Responsif Gender: Studi Literature <i>Harrey Hadi</i> .....	157
Implementasi Kebijakan Sosial dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru <i>Masrul Ikhsan, Kamaruddin, Fadhiilatun Nisaa, Resa Vio Vani, Rahmanul5</i> .....	170
Implementasi Permendikbudristek No. 17 Tahun 2021 tentang Ujian ANBK di SD Sumsel Jaya Palembang <i>Solha Dwi Fadillah, Feni Huspita Sari, Gusti Ayu</i> .....	179
Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Principles in PDAM Tirta Ogan, Ogan Ilir District <i>Hendra, Arry Halbadika Fahlevi</i> .....	187
Kesiapan Implementasi Layanan Penerbitan Sertifikat Elektronik di kantor wilayah BPN Provinsi Bengkulu <i>Ezi Syafitri, Jatmiko Yogopriyatno, Abdul Aziz Zulhakim</i> .....	196
Efektivitas Layanan Self- Servise Bahan Bakar SPBU Stasiun Pertamina Menggunakan Analisis Blbliometrik <i>Nur Misnah Azhari, Suratman, Is Susanti</i> .....	216
Kinerja Perwakilan Ombudsman RI Bengkulu dalam Penyelesaian Sengketa Pelayanan Publik <i>Dinda Afriani, Suratman, Nursanty</i> .....	231
Konstruksi Sosial Berbasis Gender Pengemudi Ojek Online Perempuan di Kota Surabaya <i>Deni Aries Kurniawan</i> .....	250
Pelaksanaan Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin <i>Rizki Akbar Susanto, Maharani Budi Setiawan</i> .....	269
Pemanfaatan Media Sosial untuk Kampanye Sosial dan Keterlibatan Masyarakat: Studi Kasus Mahasiswa Di Kota Palembang <i>Ahmad Dwi, Ahmad Syaban Zulfiqar, Siti Zubaidah</i> .....	278
Peran Komunikasi Digital dalam Pembentukan Opini Publik: Studi Kasus Media Sosial <i>Suhendra, Feny Selly Pratiwi</i> .....	293

Analisis UUJN tentang Standar Honor Notaris dalam Menjalankan Kewenangan selain Membuat Akta Otentik <i>Rahma Faedhatu, Sapto Hermawan, Mulyanto</i> .....	316
Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Palembang <i>Annisa Larasati Chairani</i> .....	325
Konflik Palestina dan Israel dalam Perspektif Hak Asasi Manusia <i>Darto Wahidin, Ikmah Wati</i> .....	338
Implementasi Sistem Pelayanan dan Pengaduan di Satpol PP Kabupaten Oku Timur <i>Rindy Putri Hapsari</i> .....	355
Stakeholder Mapping dalam Formulasi Kebijakan Tentang Pengelolaan Persampahan di Kota Lubuklinggau <i>Sartika, Jatmiko Yogopriyatno</i> .....	375
Second Account Instagram sebagai Identitas Digital: Fenomena Kultural dalam Ekspresi Diri pada Generasi Z <i>Ika Nugraha, Andi Vita Sukmarini, Muhammad Yusuf AR</i> .....	388
Tinjauan Kritis terhadap Penggunaan Aplikasi Sirekap dalam Proses Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 <i>Rizka Azzahri</i> .....	398

## **Analisa *E-Government* dalam Penggunaan Aplikasi Srikandi pada Dinas Pariwisata Kota Palembang**

**Delfiazi Puji Lestari<sup>1</sup>, Destyana Ramadhanti<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Prodi Ilmu Administrasi Negara, STIA & Pemerintahan Annisa Dwi Salfarizi, Indonesia.

(email: [fiazuhdi@gmail.com](mailto:fiazuhdi@gmail.com), [destyanarr13@gmail.com](mailto:destyanarr13@gmail.com))

### **Abstrak**

Sejak berdirinya PDAM Tirta Ogan didapati adanya fenomena kelemahan pelaksanaan Good Pengembangan Elektronik Government bertujuan membuka peluang bagi pengaksesan pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara tepat dan akurat serta meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu pengembangan E-Government dalam pelayanan publik ada adalah aplikasi srikandi. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa serta mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dari Analisa E-Government Dalam Penggunaan Aplikasi Srikandi Versi 2 di Dinas Pariwisata Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian ini tentang Analisa E-Government dalam penggunaan Aplikasi Srikandi Versi 2 di Dinas Pariwisata Kota Palembang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dengan informan untuk mendapatkan hasil data yang valid. Hasil penelitian menyimpulkan 3 hal yaitu: Aplikasi Srikandi telah mendapat dukung (support) dari pemerintah kota, kapasitas sumber daya finansial telah dianggarkan, sumber daya teknis belum memadai, namun telah memiliki anggaran. masi telah di dapat mempermudah pegawai kantor (capacity); aplikasi srikandi telah memenuhi nilai-nilai efektifitas dalam pelayanan publik.

### **Kata kunci:**

e-government; srikandi; support; capacity; value

### **Pendahuluan**

Era digitalisasi dan teknologi informasi yang semakin canggih membuat seluruh kegiatan saat ini selalu menggunakan dan memanfaatkan teknologi tak terkecuali dalam lembaga pemerintahan dan pelayanan publik. Pengembangan inovasi pelayanan publik terus disalurkan kepada pihak internal maupun eksternal dalam pemerintahan dengan tujuan memberikan pelayanan terbaik khususnya untuk masyarakat. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan instruksi presiden republik Indonesia nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan Elektronik *Government* dengan tujuan membuka peluang bagi pengaksesan pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara tepat dan akurat serta meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan *E-Government* sebagai bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan, besar harapan pemerintahan

untuk dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam berbagai bidang penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik.

Menurut Indrajit (2002:36) E-government merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi Informasi dengan tujuan memperbaiki kualitas mutu pelayanan. E- government adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis Elektronik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif. Dimana pada, E-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak lain (penduduk, penguasa, maupun instansi lain). Sementara itu Heeks (2002) mendefinisikan secara luas *E- government* dapat didefinisikan sebagai penggunaan *Information and Communication Technologies (ICT)* untuk memperbaiki aktivitas organisasi pemerintahan. Pengertian yang senada diungkapkan juga oleh Devadoss dkk (2002) yang mendefinisikan *E-government* sebagai pemanfaatan *Information Technology (IT)* seperti internet untuk mendukung, mempermudah dan mengotomatisasikan transaksi antara pemerintah dengan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah lainnya. Lalu Budi Rianto dkk (2012:36) menyimpulkan bahwa *E-government* merupakan bentuk aplikasi pelaksanaan tugas dan tata laksana pemerintahan menggunakan teknologi telematika atau teknologi informasi dan komunikasi.

Aplikasi *e-government* memberikan peluang meningkatkan dan mengoptimalkan hubungan antar instansi pemerintah, hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat. Mekanisme hubungan itu melalui pemanfaatan teknologi informasi yang merupakan kolaborasi atau penggabungan antara komputer dan sistem jaringan komunikasi. Berdasarkan definisi para ahli tersebut, *E-government* mengacu pada hal yang berbasis teknologi informasi dalam suatu lembaga pemerintahan maupun lembaga publik. Jadi *E-government* merupakan salah satu aplikasi teknologi informasi yang sekarang ini banyak digunakan di beberapa kantor atau lembaga pemerintah baik di tingkat Provinsi maupun Kota/Kabupaten.

Selain itu sistem *E-government* juga tidak hanya menjadi kemampuan dalam mengubah hubungan antara pemerintah dengan masyarakat saja (*Government to Citizens*), akan tetapi juga penghubung antara *Government to Government (G2G)*, *Government to Business (G2B)* serta *Government to Employees (G2E)*. (Zhiyuan 2022)

Pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *Electronic Government*, dimana dalam hal ini *E-government* diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan antara lain:

1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan public (*website presence*), yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat secara luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah pada setiap saat, tanpa dibatasi oleh waktu dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
2. Pembentukan hubungan interaksi dengan dunia usaha (*interaction*), untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan mempercepat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga lembaga negara (*transaction*), serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.
4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja (*transformation*), yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Selanjutnya Anwar Oetojo (2024) menyatakan 4 tujuan *e-government* lainnya menurut yaitu: (1) Terciptanya hubungan secara elektronik antara pemerintah dengan masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai informasi dan layanan dari pemerintah. (2) Melaksanakan perbaikan dan peningkatan pelayanan masyarakat ke arah lebih baik dari apa yang telah berjalan saat ini dan sebelumnya; (3) Menunjang *good government* dan keterbukaan; (4) Meningkatkan pendapatan asli daerah.

Harvard *JFK School of Government* (Indrajit, 2004) dalam sebuah riset menemukan bahwa untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Masing- masing elemen sukses tersebut adalah: **Support**, **Capacity** dan **Value**.

Elemen **support** adalah elemen paling penting dalam pengembangan *E-government* perlu dukungan atau yang disebut *political will* dari pejabat publik. Hal ini agar konsep *E-government* dapat diterapkan, tanpa adanya itu berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *E-government* dapat terlaksana.

Elemen **capacity** merupakan sumber daya yang diperlukan dalam pembangunan dan pengembangan *E-government* agar konsep yang telah diciptakan dapat menjadi kenyataan. Terdapat tiga sumber daya yang harus dimiliki, yaitu:

- a. Ketersediaan sumber daya finansial yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *E-government*.

- b. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan *EGovernment*.
- c. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *E-government* dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.

Elemen **value** berdasarkan pada manfaat yang didapat oleh pemerintah sebagai pemberi pelayanan dan juga masyarakat sebagai penerima pelayanan *E-government*. Dalam elemen **value** yang menentukan besar tidaknya manfaat *E-government* adalah masyarakat sebagai penerima pelayanan.

Kecanggihan teknologi dan informasi membuat penerapan elektronik government dalam lembaga pemerintahan semakin kompleks salah satunya dengan sistem pengolahan arsip sistem pengolahan arsip yang semakin kompleks tersebut membuat arsip juga bertransformasi ke pengintegrasian semua data yang menghasilkan informasi yang disebut arsip digital. Aplikasi Srikandi merupakan aplikasi umum untuk mengelola arsip yang bersifat dinamis, arsip dinamis merupakan arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan perkantoran sehari-hari. Dalam Perpres ini bahwa semua aplikasi harus bersifat umum semua instansi, lembaga kementerian baik pusat maupun daerah semua aplikasi yang ada harus bertransformasi kepada aplikasi umum untuk mendukung arsitektur yang ada dalam SPBE maka dari itu ANRI (arsip nasional) mengeluarkan peraturan arsip Nasional Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang pedoman penerapan SRIKANDI (sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi) yang menjadi aplikasi umum di bidang kearsipan.

Aplikasi Srikandi merupakan aplikasi umum untuk mengelola arsip yang bersifat dinamis, arsip dinamis merupakan arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan perkantoran sehari-hari. Arsip dinamis menurut Fanida (2016) itu arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam kegiatan perkantoran sehari-hari arsip dinamis dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu arsip aktif, arsip semi aktif, dan arsip inaktif. Arsip dinamis juga diartikan sebagai arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu, sedangkan pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien efektif dan sistematis yang meliputi penciptaan penggunaan dan pemeliharaan serta penyusutan arsip. Srikandi bertujuan untuk melakukan inovasi perihal kearsipan sehingga mempermudah dalam membuat naskah dan proses pengiriman keluar, menerima serta menjadwalkan naskah yang telah diterima sehingga dapat mendisposisikan naskah yang diterima. Selain itu juga, proses penandatanganan draft untuk pemberian nomor sebelum proses

pengiriman naskah keluar dan proses pengklasifikasian naskah diterima dan keluar akan diarsipkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau SRIKANDI merupakan aplikasi yang diluncurkan Pemerintah sebagai aplikasi umum bidang kearsipan yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa aplikasi srikandi merupakan aplikasi yang dapat membantu proses pengarsipan menjadi lebih mudah untuk menatanya. Aplikasi Srikandi dalam Pengarsipan bertujuan menciptakan kelancaran dalam persyaratan dan kearsipan secara elektronik yang efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aplikasi ini dapat memenuhi kebutuhan pembuatan surat menyurat dan arsip elektronik secara online secara integrasi serta terekam pada pusat data nasional dengan adanya aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi ini mampu meningkatkan pemahaman kapasitas dan keterampilan aparatur sipil negara pada sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Melalui kearsipan berbasis digital dapat terekam dengan baik sehingga nantinya akan menjadi akuntabilitas dan memori kolektif bangsa dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik. Aplikasi Srikandi ini upaya pemerintah meningkatkan kinerja, produktivitas, efektivitas, untuk mempermudah pekerjaan serta bermanfaat dalam mewujudkan pengelolaan arsip yang baik dan profesional.



*Sumber: Website srikandi.arsip.go.id*

Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) mulai diterapkan di lingkungan Pemerintah Kota (pemkot) Palembang. Launching/peluncuran penerapan aplikasi Srikandi Pemkot Palembang dibuka langsung Wali Kota Palembang, H Harnojoyo, di rumah dinas Wali Kota Palembang, Selasa 14 Februari 2023. Pemerintah kota Palembang melaunching penerapan aplikasi Srikandi sehingga diharapkan tidak ada lagi arsip kertas berceceran dan semua terdata secara online.

Salah satu organisasi pemerintahan yang menerapkan aplikasi Srikandi adalah pemerintah Kota Palembang yaitu di Dinas Pariwisata Kota Palembang. Dinas Pariwisata Kota Palembang menggunakan aplikasi ini karena banyak sekali tupoksi yang di salurkan kepada pegawai yang ada di dinas tersebut. Dengan adanya Aplikasi Srikandi ini dapat memudahkan para pegawai dalam memberikan surat ataupun pemberitahuan lain kepada instansi lain dengan mudah dan cepat. Meskipun demikian, terdapat juga pengembangan E-government di daerahnya

yang masih belum berjalan dengan maksimal. Beberapa diantaranya dikarenakan konten pesan aduan masih belum lengkap, belum seriusnya organisasi pemerintah dalam menerapkan dan pengelola system E- government tersebut, terlebih lagi hampir semua penelitian terdahulu yang dibaca penulis memiliki permasalahan yang sama yakni kurangnya atau keterbatasannya SDM yang dimiliki oleh instansi dalam bidang kemampuan IT, baik secara kuantitas maupun kualitas. Sehingga pengembangan dan peningkatan pada *hardware* dan *software* pun tidak optimal yang menjadikan aspek layanan publik tidak berjalan secara efektif dan efisien sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kinerja pelayanan Dinas pariwisata yang berbasis Elektronik melalui aplikasi SRIKANDI di Kota Palembang. Permasalahan ini penting untuk diteliti karena akan membantu pelaksanaan administrasi terutama kearsipan menjadi lebih efektif. Atas dasar permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian mengangkat judul **Analisa E- Government dalam Penggunaan Aplikasi Srikandi pada Dinas Pariwisata Kota Palembang.**

### **Metode**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah. Data yang dikumpulkan yakni data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo dan dokumen resmi lainnya seperti artikel, jurnal, buku dan surat kabar (Moleong, 2015). Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan deduktif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang berisi kutipan – kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan. (Moleong dalam Tami & Putri, 2019)..Adapun data penelitian, peneliti menggunakan data primer berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait, serta data sekunder yang berasal dari laporan-laporan, catatan, atau dokumen dari para informan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada Aparatur Sipil Negara pada lingkungan Dinas Pariwisata kota Palembang. Penelitian ini mengadaptasi tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan dalam pelaksanaan bersasarkan riset yang dilakukan oleh Government Harvard *JFK School of Government* yaitu **Support, Capacity dan Value.**

## Hasil dan Pembahasan

### A. Elemen *Support*.

Penerapan aplikasi SRIKANDI didukung secara penuh dari sisi kebijakan yaitu termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis. Selain itu terdapat Perundang-undangan lain sebagai regulasi pendukung implementasi E Government :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional tentang pengembangan e-government
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Integritas Pegawai Aparatur Sipil Negara Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
5. Perpres No 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Sedangkan untuk implementasi SPBE di kota Palembang di atur dalam Peraturan Wali Kota Palembang no 25 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Berbasis Elektronik sebagai bentuk dukungan pemerintah kota dalam pelaksanaan aplikasi SRIKANDI di lingkungan pemerintah kota Palembang.

### B. Elemen *Capacity*

Elemen capacity merupakan sumber daya yang diperlukan dalam pembangunan dan pengembangan *E-government* agar konsep yang telah diciptakan dapat menjadi kenyataan. Terdapat tiga sumber daya yang harus dimiliki, yaitu ketersediaan sumber daya finansial yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *E-government*, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi, ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan E-government dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.

- a. Ketersediaan Sumber Daya Finansial. Rencana dan anggaran SPBE pemerintah kota diatur rencana dan anggaran spbe pemerintah kota Pasal 7 (1) Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Kota. (2) Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan berkoordinasi dengan Badan yang membidangi

perencanaan pembangunan daerah. Dalam pandangan Grindle, keberhasilan implementasi kebijakan juga tidak terlepas dari sumber-sumber yang dapat disediakan (Sunggono, 1994). Hal ini termasuk unsur pendanaan.

*b. Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi*

Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai sangat penting dalam pelaksanaan karena merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan E Government. Internet merupakan salah satu faktor pengaruh yang dapat mengendalikan aplikasi tersebut. Jika seseorang mengirim surat tetapi lama merespon Hal ini dapat mengganggu terhambatnya proses pengarsipan yang akan dilaksanakan karena membuat pesan masuk tersebut menumpuk. Kurangnya fasilitas komputer dalam instansi Dalam hal ini pun sangat mempengaruhi terhambatnya proses kegiatan karena aplikasi ini hanya dapat diakses melalui komputer. Masalah lainnya terdapat pada kendala teknis seperti tidak adanya alat scanner untuk memindai data, terjadinya gangguan koneksi internet dapat menyebabkan lambatnya respon aplikasi, dan aplikasi SRIKANDI yang terkadang mengalami server down yang di mana hal ini menyebabkan pegawai tidak tahu bahwasannya ada surat yang masuk, sehingga dalam masalah ini juga menyebabkan penggunaan aplikasi SRIKANDI tidak berjalan secara maksimal. Selain itu masih banyak juga OPD yang belum menggunakan aplikasi srikandi. Faktor penghambat lainnya adalah kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam menggunakan SRIKANDI. Menurut hasil penelitian primer, terkait SDM di dinas pariwisata belum melek teknologi sehingga merasa kesulitan untuk menggunakan SRIKANDI karena belum siap beralih ke mekanisme kerja secara digital.

*c. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memahami teknologi dan informatika serta substansi kearsipan* Grindle mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi isu kebijakan yang di dalamnya meliputi pelaksana-pelaksana program (Sunggono, 1994). Dinas Pariwisata memiliki sumber daya manusia sebagai pelaksana program yang secara kuantitas cukup memadai untuk melaksanakan penerapan aplikasi SRIKANDI. Implementasi aplikasi SRIKANDI didukung juga dengan sumber daya manusia meskipun tidak berlatar belakang pendidikan di bidang teknologi dan informatika, mumpuni dalam substansi kearsipan, serta mumpuni juga memahami dan dapat memberikan pemahaman terkait penerapan aplikasi SRIKANDI pada instansi baik pusat maupun daerah. Namun sayangnya Dinas Pariwisata kota Palembang tidak memiliki teknisi dalam bidang elektronik maka infrastruktur yang ada akan mengalami kerusakan yang lebih cepat dan lamanya perbaikan infrastruktur jika harus menyewa teknisi jika terjadi kerusakan

### **C. Elemen Value**

Srikandi bertujuan menciptakan kelancaran dalam persyaratan dan kearsipan secara elektronik yang efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aplikasi ini dapat memenuhi kebutuhan pembuatan surat menyurat dan arsip elektronik secara online secara integrasi serta terekam pada pusat data nasional dengan adanya aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi ini mampu meningkatkan pemahaman kapasitas dan keterampilan aparatur sipil negara pada sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Melalui kearsipan berbasis digital dapat terekam dengan baik sehingga nantinya akan menjadi akuntabilitas dan memori kolektif bangsa dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik.

SRIKANDI merupakan aplikasi yang merekam secara utuh proses bisnis kearsipan, tidak hanya terkait dengan penciptaan naskah dinas (arsip), tetapi juga pemberkasan/pengelompokan arsip, pengaturan penggunaan atau layanan arsip sesuai dengan kategori klasifikasi keamanan dan hak aksesnya, serta penyusutan arsip sesuai retensi atau jangka simpan arsip tersebut. Dengan demikian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang menerapkan aplikasi SRIKANDI akan mendukung tertib administrasi di lingkungannya. Hal ini sebagaimana diungkapkan Grindle bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi juga oleh jenis manfaat yang bisa diperoleh (Sunggono, 1994). Dalam penerapan SRIKANDI, manfaat atas terkelolanya arsip akan optimal dirasakan apabila proses pelaksanaan aplikasi secara utuh tersedia dan dapat diterapkan. Keutuhan proses ini menjadi salah satu keunggulan SRIKANDI dibandingkan dengan aplikasi serupa yang hanya mengatur sampai dengan penciptaan dan pendistribusian surat. Implementasi SRIKANDI pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah akan lebih mudah diterapkan ketika instansi tersebut belum memiliki aplikasi persuratan atau aplikasi kearsipan karena SRIKANDI menjadi aplikasi baru dalam rangka mendukung tertib administrasi di lingkungan mereka. Namun, akan berbeda ketika suatu instansi sudah memiliki aplikasi persuratan atau kearsipan, instansi tersebut cenderung enggan untuk migrasi ke aplikasi SRIKANDI dengan pertimbangan instansi sudah terbiasa dengan aplikasi lama, aplikasi lama telah mengakomodasi kebutuhan mereka di bidang kearsipan, dan kecepatan penanganan jika terkendala sistem karena hanya perlu koordinasi dengan unit kerja yang membidangi urusan teknologi dan informatika di internal instansi tersebut.

### **Kesimpulan**

Dukungan yang diberikan oleh pemerintah kota Palembang adalah adanya regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Palembang serta adanya anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah kota Palembang, namun sumber daya manusianya harus memiliki

kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan Kominfo. Berawal dari sikap dalam pemberian pelayanan, kecekatan dalam melaksanakan tugas, dan memiliki ilmu pengetahuan dalam bidang tugas yang diemban. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah jumlah sumber daya manusia yang diperlukan khususnya teknisi yang dapat menangani kerusakan dengan cepat.

### Daftar Pustaka

- ANRI. (2011). *Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Fang, Zhiyuan (2022) "*E-government in Digital Era: Concept, Practice, and Development*",
- Fathurrahman, M (2018). Pentingnya Arsip sebagai sumber Informasi. *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi* 3 (2) :215 -225.
- Indrajit, Eko (2006) *Electronic Government : Konsep Pelayanan Public Berbasis Internet dan Teknologi Informasi*, APTIKOM
- Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional tentang pengembangan e-government
- International Journal of The Computer, The Internet and Management*, Vol 10, No. 2, 2002 Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the third world*. New Jersey: Princeton
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2021). <https://kbbi.web.id/galeri>, diakses 08 Juli 2023.
- Maleong, L.J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*: Bandung: PT Remaja Sungsongo, B. (1994). *Hukum dan kebijaksanaan publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Integritas Pegawai Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
- Peraturan Wali Kota Palembang no 25 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Berbasis Elektronik.
- Perpres No 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- University Press.

## **Analisis Nilai Patriarki dalam Putusan Sidang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sawahlunto**

**Ghina Reftantia<sup>1</sup>, Kurnia Asni Sari<sup>2</sup>, Deni Aries Kurniawan<sup>3</sup>, Yuanita Dwi Hapsari<sup>4</sup>**

<sup>1, 2, 3, 4</sup>Universitas Sriwijaya, Indonesia. (email: ghinareftantia@fisip.unsri.ac.id)

### **Abstrak**

Cerai gugat merupakan putusannya hubungan perkawinan karena adanya gugatan yang diajukan oleh pihak istri. Jumlah perkara cerai gugat jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah perkara cerai talak. Tidak dapat dipungkiri baik secara sadar atau pun tidak sadar dan langsung mau pun tidak langsung bahwa nilai-nilai patriarki telah menyebabkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender seperti adanya subordinasi, dominasi, pelecehan seksual, perceraian, dll. Tulisan ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis nilai-nilai patriarki dalam hasil putusan sidang perkara cerai gugat Pengadilan Agama Sawahlunto tahun 2022-2023. Teori yang digunakan untuk membahas penelitian ini ialah teori strukturasi Anthony Giddens, sementara metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan metode kuantitatif dan kualitatif, yang mana metode kuantitatif digunakan untuk memperoleh data angka berupa hasil persentase dari keseluruhan putusan sidang cerai gugat. Sementara metode kualitatif digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis nilai-nilai patriarki yang menyebabkan terjadinya cerai gugat tersebut. Ada pun data yang dianalisis dalam penelitian ini ialah seluruh data hasil putusan sidang perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sawahlunto Tahun 2022-2023. Hasil dari penelitian ini adalah nilai-nilai patriarki telah mempengaruhi kehidupan rumahtangga pasangan suami istri dan menyebabkan beberapa masalah dalam rumahtangga seperti adanya KDRT, poligami, perselingkuhan, campur tangan keluarga, dll.

### **Kata kunci:**

perceraian; cerai gugat; nilai; patriarki

### **Pendahuluan**

Perceraian merupakan putusannya ikatan pernikahan antara suami dengan istri. Jenis perceraian di Indonesia terbagi ke dalam dua jenis yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak merupakan putusannya ikatan pernikahan antara suami dengan istri yang disebabkan karena suami menjatuhkan talak (kalimat cerai) terhadap istrinya, sementara cerai gugat ialah putusannya ikatan pernikahan antara suami dengan istri karena adanya gugatan dari pihak istri melalui hakim pengadilan agama. Berdasarkan portal berita nasional Databoks yang terbit pada Februari 2024 angka pernikahan di Indonesia dalam kurun waktu sepuluh tahun belakangan ini bersifat fluktuatif dan cenderung menurun dalam lima tahun belakangan dari tahun 2019. Menurut laporan Statistik Indonesia, terdapat 1,58 juta pernikahan di Indonesia pada 2023, turun 7,51%

dibanding 2022. Angka pernikahan ini merupakan rekor terendah selama satu dekade terakhir. Dalam 10 tahun belakangan, angka pernikahan nasional sempat mencapai rekor tertinggi pada 2013, yakni 2,21 juta pernikahan. (Annur, 2024)

Begitu pula dengan angka perceraianya, merujuk pada data Statistik Indonesia 2023 dan 2024 angka perceraian di Indonesia cenderung turun dalam dua tahun terakhir tetapi angka cerai gugatnya justru naik. Tahun 2022 terdapat 127.986 cerai talak dan 388.358 cerai gugat dengan total perceraian 516.344 dari 1.705.348 pernikahan, artinya angka perceraian pada tahun tersebut adalah 30,28% dengan persentase cerai gugatnya 75,21% dan cerai talaknya 24,79%. Tahun 2023 terdapat 463.654 jumlah perceraian dengan cerai talak sebesar 111.251 dan cerai gugat 352.403 dari total pernikahan 1.577.255, persentase angka perceraian pada tahun tersebut adalah 29,40% dengan 76,01% merupakan cerai gugat dan 23,99% merupakan cerai talak. (BPS Indonesia, 2023) (BPS Indonesia, 2024)

Perceraian terjadi di seluruh wilayah baik provinsi, kabupaten/kota, bahkan pada wilayah perdesaan sekali pun. Perceraian terjadi pada keluarga dengan sistem patrilineal mau pun matrilineal. Ada pun wilayah dengan sistem matrilineal terbesar di Indonesia adalah Sumatra Barat. Beberapa penelitian mengenai perceraian telah banyak dilakukan di beberapa kota di Sumatra Barat diantaranya adalah penelitian Nurhasanah (2014) yang menyebutkan bahwa angka cerai gugat di Kota Padang mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sekitar 62-67%, peningkatan itu terjadi karena adanya perubahan persepsi mengenai perceraian yang mana perceraian bukan lagi dianggap sebagai hal tabu dan memalukan. Penyebab tingginya angka perceraian tersebut adalah karena meningkatnya akses pendidikan perempuan, perempuan telah memiliki kesadaran hukum, dan telah mandiri secara ekonomi.

Penelitian Almizan dan Amri (2021) disebutkan bahwa penyebab perceraian di Sumatra Barat adalah karena meningkatnya cerai gugat karena nusyuz: ketidaktaatan istri terhadap suami atau kurangnya istri dalam menjalankan hak dan kewajiban. Kemandirian perempuan menjadi faktor utama meningkatnya cerai gugat karena syiqaq: bertengkarnya suami dan istri dan saling berselisih. Ketidakharmonisan menjadi alasan terbanyak yang diajukan para penggugat. Faktor-faktor penyebab perceraian merupakan bentuk penyimpangan sosial.

Penelitian Dalvi dan Hermaleni (2020) menyebutkan bahwa ada dua faktor yang menyebabkan perempuan mengajukan perceraian di Kota Bukittinggi selama masa pandemi covid-19 yaitu faktor internal seperti masalah ekonomi, KDRT, perselisihan dan pertengkarang yang terus menerus. Sedangkan faktor eksternal terjadi karena adanya perselingkuhan.

Ada banyak penelitian yang telah membahas mengenai fenomena perceraian yang terjadi di Indonesia baik secara nasional, provinsi, kota atau kabupaten, bahkan pada tingkat desa. Namun, penelitian yang membahas mengenai pengaruh nilai-nilai patriarki yang menyebabkan terjadi perceraian khususnya cerai gugat masih sangat jarang dibahas. Patriarki secara sederhana adalah relasi kuasa yang mengesampingkan peran perempuan dan menempatkan laki-laki pada posisi utama dan unggul (Mukminto, 2020). Dari banyaknya penelitian yang membahas mengenai fenomena perceraian di Indonesia khususnya di wilayah perkotaan yang ada di Provinsi Sumatra Barat dari berbagai perspektif, penulis belum menemukan satu pun penelitian mengenai perceraian yang terjadi di Kota Sawahlunto Sumatra Barat. Penelitian-penelitian tersebut hanya terfokus pada perceraian yang terjadi di kota-kota besar dengan jumlah penduduk yang padat saja seperti Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Selain itu pembahasan mengenai nilai patriarki dengan penyebab perceraian pun masih sangat jarang dibahas sebelumnya. Untuk itu, melalui penelitian ini penulis bertujuan untuk menjelaskan bagaimana budaya patriarki bahkan dalam ranah suku matrilineal sekali pun dapat mempengaruhi kehidupan rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian khususnya di Kota Sawahlunto Sumatra Barat.

## **Tinjauan Literatur**

### **Kosep Perceraian**

Perceraian terdiri dari kata cerai yang berarti pisah, dalam kata tersebut terdapat imbuhan per-an yang secara bahasa berarti putusnya hubungan antara salah satu hal yang menyebabkan putusnya perkawinan. Secara umum terdapat dua jenis perceraian, yaitu cerai talak dan cerai cerai gugat. Berdasarkan istilah agama kata talak berasal dari kata “ithlaq”, yang memiliki arti “meninggalkan atau melepaskan”, sehingga talak dapat didefinisikan dengan bubarnya hubungan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan tersebut. Cerai talak merupakan perceraian yang terjadi akibat dijatuhkannya kalimat talak oleh suami kepada istrinya, hal inilah yang menyebabkan putusnya hubungan perkawinan mereka. Jika saja seorang suami hendak menceraikan istrinya, maka ia harus mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama yang berada di wilayah tempat tinggalnya. Sementara itu cerai gugat ialah perceraian yang terjadi karena adanya gugatan dari pihak istri agar perkawinan ia dan suaminya terputus. Istri yang hendak bercerai dengan suaminya harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama yang berada di wilayah tempat tinggalnya (Bakhtiar, 2014).

## Konsep Nilai Patriarki

Nilai menurut Marhijanto (1999: 253) dalam (Nurachmana et al., 2020) adalah harga atau ukuran; sifat-sifat yang berguna bagi manusia dalam menjalani hidupnya. Nilai merupakan sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Sesuatu dikatakan bernilai bila sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia. Pengertian nilai menurut (Susanti et al., 2019) dalam (Elwijaya, 2021) adalah suatu hal yang merujuk terhadap tuntunan sikap yang membedakan perilaku baik dan buruk atau dalam arti lain nilai atau harga kebaikan yang ada pada sesuatu. Sementara itu (Maharani, 2014) mendefinisikan nilai sebagai suatu yang dipercaya, diyakini, dan dirasakan serta diwujudkan dalam sikap atau perilaku. Biasanya, nilai bermuatan pengalaman emosional masa lalu yang mewarnai cita-cita seseorang, kelompok atau masyarakat. Jadi dari sini penulis menyimpulkan bahwa nilai ialah pandangan mengenai benar salah, baik buruk, dan layak atau pun tidak layaknya sesuatu yang berkaca dengan pengalaman masyarakat.

Ada pun pengertian patriarki ialah “kekuasaan ayah”, dimana perempuan berada dalam dominasi laki-laki (Novarisa, 2019). Sementara itu (Rakoczy, 2004) dalam (Novarisa, 2019) menjelaskan bahwa patriarki merupakan sistem dominasi laki-laki baik di ruang publik dan mau pun privat. Ideologi patriarki telah mengaburkan perbedaan biologis antara pria dan wanita dan memosisikan laki-laki sebagai sosok yang memiliki peran dominan atau maskulin dan wanita berada di posisi subordinat atau feminin. Mereka melakukannya melalui struktur lembaga seperti akademi, gereja, dan keluarga, yang masing-masing lembaga tersebut membenarkan dan memperkuat subordinasi perempuan terhadap laki-laki.

Dari berbagai definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa nilai patriarki merupakan nilai-nilai yang mengadopsi patokan kebenaran benar salah, baik buruk, dan layak tidak layaknya sesuatu didasarkan dari sudut pandang laki-laki yang memosisikan laki-laki lebih tinggi dan lebih dominan dari perempuan dalam struktur kehidupan sosial.

## Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif merupakan metode yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran statistic data berupa angka (Sugiyono, 2014). Metode kuantitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan angka persentase dari beberapa data yang berkaitan dengan penelitian ini seperti data hasil putusan sidang cerai gugat di Pengadilan Agama sawahlunto tahun 2022-2023. Sementara metode kualitatif ialah metode analisis data yang didapatkan tanpa

prosedur statistic (Afrizal, 2014). Adapun metode kualitatif digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis penyebab terjadinya cerai gugat di Sawahlunto. Jenis data yang digunakan dan dianalisis dalam penelitian ini merupakan data sekunder seperti data hasil putusan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto 2022-2023, jurnal, buku, dan bahasan lainnya yang sesuai dengan tema penelitian ini.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sawahlunto**

Berdasarkan Laporan Kegiatan Tahun 2022 Pengadilan Agama Sawahlunto terdapat 37 perkara cerai talak, 131 perkara cerai gugat, dan tiga perkara cerai gugat yang tersisa pada tahun 2021. Sehingga jumlah perkara perceraian yang telah diputus sepanjang tahun 2022 adalah 171 perkara pada tahun 2022. Sementara pada tahun 2023 terdapat 43 perkara cerai talak dan 131 perkara cerai gugat yang masuk, sehingga terdapat 174 perkara perceraian yang telah diputus sepanjang tahun 2023. Ada pun data cerai gugat yang tersedia dan dapat diakses dari web mahkamah agung (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-sawahlunto/kategori/perceraian.html>) hanya sebanyak 275 perkara dengan jumlah 129 perkara cerai gugat dan 29 cerai talak di tahun 2022 dan 91 perkara cerai gugat dan 26 perkara cerai talak tahun 2023. Jumlah data putusan Pengadilan Agama Sawahlunto yang telah dianalisis dalam penelitian ini adalah 220 perkara dengan rincian 129 perkara cerai gugat tahun 2022 dan 91 perkara cerai gugat tahun 2023. (*Putusan Mahkamah Agung, 2024*), (*PA Sawahlunto, 2022*), dan (*PA Sawahlunto, 2023*).

### **Jabaran Permasalahan Rumahtangga Sebelum Bercerai**

#### **1.1 Menikah Tanpa Persiapan Yang Matang**

Persentase hasil data statistik yang telah diolah oleh penulis berdasarkan putusan sidang perkara cerai gugat Pengadilan Agama Sawahlunto Tahun 2022-2023 ditemukan bahwa sebagian besar perceraian yang terjadi di Sawahlunto ialah karena usia pernikahan yang terlalu muda, pendidikan yang rendah, dan pekerjaan yang tidak memadai. Ada pun gambaran data statistik mengenai hal tersebut ialah sebagai berikut.

**Tabel 1.**  
**Perbandingan Usia Pernikahan Pasangan Bercerai di Sawahlunto**

No	Usia Menikah (Perempuan)	Jumlah	Persentase (%)	No	Usia Menikah (Laki-Laki)	Jumlah	Persentase (%)
1	14-18	32	14,55	1	17-21	23	10,45
2	19-23	86	39,09	2	22-26	73	33,18
3	24-28	48	21,82	3	27-31	65	29,55
4	29-34	21	9,55	4	32-36	20	9,09
5	35-39	12	5,45	5	37-41	8	3,64
6	40-44	14	6,36	6	42-46	16	7,27
7	45-49	3	1,36	7	47-51	4	1,82
8	50-54	1	0,45	8	52-56	4	1,82
9	55-59	1	0,45	9	57-61	5	2,27
10	Tidak disebutkan	2	0,91	10	Tidak Disebutkan	2	0,91
	Total	220	100		Total	220	100

Sumber: Data Putusan Cerai Gugat PA Sawahlunto Tahun 2022-2023 yang diolah penulis

Dari data di atas terlihat bahwa perempuan yang mengajukan cerai gugat di Sawahlunto telah menikah pada usia paling muda yaitu 14 tahun, sementara pasangan mereka menikah pada usia paling muda ialah 17 tahun. Dari data tersebut pula dapat disimpulkan bahwa 14,55% perempuan yang bercerai di Sawahlunto telah menikah pada rentang usia 14-18 tahun dan persentase usia pernikahan paling tinggi sebanyak 39,09% perempuan telah menikah pada rentang usia 19-23 tahun. Sementara persentase usia pernikahan laki-laki paling tinggi sebanyak 33,18% yang diceraikan di Sawahlunto telah menikah di rentang usia 22-26 tahun.

Selain menikah di usia muda, kebanyakan pasangan tersebut menikah tanpa memiliki pekerjaan yang layak. Ada pun perbandingan jenis pekerjaan pada kasus cerai gugat di Sawahlunto ialah sebagai berikut.

**Tabel 2.**  
**Perbandingan Jenis Pekerjaan Pasangan Bercerai di Sawahlunto**

No	Pekerjaan Penggugat (Istri)	Jumlah	Persentase	No	Pekerjaan Tergugat (Suami)	Jumlah	Persentase
1	Buruh	6	2,73	1	Buruh	41	18,64
2	Pegawai Honor	16	7,27	2	Pegawai Honor	3	1,36
3	Ibu Rumah Tangga	97	44,09	3	Karyawan Swasta	55	25,00
4	Karyawan Swasta	15	6,82	4	Pedagang/Wirusaha	26	11,82
5	Pedagang/Wirusaha	36	16,36	5	Pegawai BUMN/BUMD	4	1,82
6	Pegawai BUMN/BUMD	1	0,45	6	Pensiunan	4	1,82

No	Pekerjaan Penggugat (Istri)	Jumlah	Persentase	No	Pekerjaan Tergugat (Suami)	Jumlah	Persentase
7	Petani	9	4,09	7	Petani	16	7,27
8	PNS	6	2,73	8	PNS	3	1,36
9	Tidak disebutkan	34	15,45	9	Satpam	2	0,91
				10	Supir	21	9,55
				11	Tidak bekerja	3	1,36
				12	Tidak disebutkan	38	17,27
				13	Ojek	3	1,36
				14	Wartawan	1	0,45
Total		220	100	Total		220	100

Sumber: Data Putusan Cerai Gugat PA Sawahlunto Tahun 2022-2023 yang diolah penulis

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 44,09% perempuan yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sawahlunto adalah perempuan yang tidak mandiri secara ekonomi, mereka berprofesi sebagai ibu rumah tangga tanpa memiliki penghasilan yang tetap. Sementara 25% laki-laki yang diceraikan oleh perempuan di Sawahlunto berprofesi sebagai karyawan swasta, sementara 38,42% merupakan total persentase dari laki-laki yang diceraikan yang mana mereka berprofesi sebagai buruh harian lepas yang tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak bekerja sama sekali, tukang ojek, supir, dan petani dengan penghasilan rendah. Artinya, kasus cerai gugat yang terjadi di Sawahlunto terjadi karena kondisi perekonomian mereka yang buruk ketika menikah.

Selain itu, faktor yang juga mempengaruhi kondisi rumah tangga dan buruknya perekonomian mereka ialah karena rendahnya tingkat pendidikan pada pasangan tersebut. Ada pun tabel statistik mengenai data pendidikan ialah sebagai berikut.

**Tabel 3.**

**Perbandingan Tingkat Pendidikan Pasangan Bercerai di Sawahlunto**

No	Tingkat Pendidikan Penggugat (Istri)	Jumlah	Persentasi	No	Tingkat Pendidikan Tergugat (Suami)	Jumlah	Persentasi
1	SD	63	28,64	1	SD	36	16,36
2	SMP/Sederajat	45	20,45	2	SMP/Sederajat	55	25,00
3	SMA/Sederajat	86	39,09	3	SMA/Sederajat	88	40,00
4	Diploma	6	2,73	4	Diploma	19	8,64
5	Sarjana	8	3,64	5	Sarjana	19	8,64
6	Pascasarjana	2	0,91	6	Pascasarjana	1	0,45

7	Tidak sekolah Tidak	9	4,09	7	Tidak sekolah	2	0,91
8	disebutkan	1	0,45				
Total		220	100	Total		220	100

*Sumber: Data Putusan Cerai Gugat PA Sawahlunto Tahun 2022-2023 yang diolah penulis*

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa sebanyak 39,09% perempuan yang mengajukan gugatan cerai di Sawahlunto memiliki tingkat pendidikan menengah yaitu SMA/ sederajat. Namun, sebanyak 28,64% perempuan yang mengajukan gugatan cerai di Sawahlunto memiliki tingkat pendidikan SD, 20,45% memiliki tingkat pendidikan SMP, dan 4,09% tidak pernah menempuh pendidikan sama sekali. Artinya sebanyak 53,18% perempuan yang mengajukan gugatan cerai di Sawahlunto memiliki tingkat pendidikan rendah yaitu tidak pernah menempuh pendidikan formal, lulusan SD, dan SMP/ Sederajat. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari 50% perempuan yang bercerai di Sawahlunto hanya memiliki pendidikan rendah.

Sementara, 40% laki-laki yang diceraikan di Sawahlunto memiliki tingkat pendidikan SMA/ Sederajat dan 42,27% laki-laki yang diceraikan di Sawahlunto hanya memiliki tingkat pendidikan rendah yaitu 0,91% tidak pernah bersekolah, 16,36% merupakan lulusan SD, dan 16,36% merupakan lulusan SMP/ Sederajat. Artinya orang-orang dengan pendidikan rendah di Sawahlunto lebih rentan untuk bercerai dan memiliki masalah rumahtangga yang pelik. Selain itu, ketidaksetaraan pendidikan pada pasangan yang bercerai juga mempengaruhi akses pekerjaan yang akan mereka miliki. Sebanyak 40,91% perempuan yang mengajukan perceraian di Sawahlunto memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari pasangan mereka. Namun, mereka justru tidak memiliki akses untuk memiliki karir yang baik karena mereka memilih untuk menjadi ibu rumahtangga dan suami merekalah yang mencari nafkah. Ada pun gambaran mengenai kesetaraan tingkat pendidikan antara pasangan yang bercerai di Sawahlunto akan dijabarkan sebagai berikut.

**Tabel 4.**

**Status Tingkat Pendidikan Pasangan Bercerai di Sawahlunto**

No.	Status Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Pendidikan suami lebih tinggi dari istri	39	17,73
2	Pendidikan istri lebih tinggi dari suami	90	40,91
3	Pendidikan istri setara dengan suami	91	41,36
Total		220	100

*Sumber: Data Putusan Cerai Gugat PA Sawahlunto Tahun 2022-2023 yang diolah penulis*

Dari table di atas terlihat bahwa sebanyak 40,91% perempuan yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sawahlunto adalah perempuan yang memiliki pendidikan lebih tinggi dari suaminya. Ada pun rincian jenis pendidikan tersebut ialah sebanyak 35 perempuan atau 15,9% memiliki pendidikan dua tingkat atau lebih tinggi dari pasangan mereka, misalnya si perempuan memiliki pendidikan sarjana dan suaminya hanya merupakan lulusan SD tetapi pihak perempuan yang miliki pendidikan tinggi ini hanya bekerja di sektor domestik sebagai ibu rumahtangga dan suaminya yang bekerja di sektor public sebagai pencari nafkah utama. Kemudian sebanyak 55 perempuan atau 25% di antara mereka memiliki satu tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari suami mereka, misalnya si perempuan merupakan lulusan SMA dan suaminya merupakan lulusan SMP.

## 1.2 Kondisi Rumah Tangga Sebelum Bercerai

Sebelum memutuskan untuk mengajukan cerai gugat, semua pasangan menikah pasti mengami masalah rumahtangga. Kondisi permasalahan rumahtangga yang dialami oleh pasangan menikah akan berbeda-beda. Namun, dalam penelitian ini penmenemukan bahwa tidak ada rumahtangga yang hanya memiliki satu permasalahan saja, melainkan masalah rumahtangga yang terjadi merupakan masalah multi dimensi yang mana ada lebih dari satu jenis masalah yang terjadi dalam rumahtangga tersebut. Ada pun gambaran permasalahan rumahtangga yang terjadi dalam kasus cerai gugat ini ialah sebagai berikut.

**Tabel 5.**

**Permasalahan Rumahtangga Sebelum Bercerai**

No.	Masalah Rumah Tangga	Mengalami	Persentase	Tidak Mengalami	Persentase	Total
1	Suami tidak memberikan nafkah	142	64,55	78	35,45	220
2	Suami meninggalkan rumah/minggat	120	54,55	100	45,45	220
3	Suami berselingkuh	79	35,91	141	64,09	220
4	Suami suka berkata kasar	72	32,73	148	67,27	220
5	Suami melakukan KDRT	70	31,82	150	68,18	220
6	Suami tidak memberikan nafkah bathin	54	24,55	166	75,45	220
7	Tidak dihargai oleh suami	49	22,27	171	77,73	220
8	Suami suka berjudi	40	18,18	202	91,82	220
9	Suami tidak jujur	39	17,73	181	82,27	220
10	Suami tidak peduli dengan anak	39	17,73	181	82,27	220

No.	Masalah Rumah Tangga	Mengalami	Persentase	Tidak Mengalami	Persentase	Total
11	Suami tidak membantu mengurus anak	28	12,73	192	87,27	220
12	Suami tidak menyukai keluarga istri	22	10,00	198	90,00	220
13	Suami menikah siri	21	9,55	199	90,45	220
14	Suami malas/tidak bekerja	19	8,64	201	91,36	220
15	Keluarga suami ikut campur masalah rumahtangga	18	8,18	202	91,82	220
16	Suami menuduh istri selingkuh	18	8,18	202	91,82	220
17	Suami egois	16	7,27	204	92,73	220
18	Suami terlibat kriminal	16	7,27	204	92,73	220
19	Suami lebih mementingkan orangtua/keluarga luasnya	11	5,00	209	95,00	220
20	Suami tidak melibatkan istri dalam mengambil keputusan	10	4,55	210	95,45	220
21	Suami terlibat narkoba	9	4,09	211	95,91	220
22	Suami dipenjara	9	4,09	211	95,91	220
23	Suami tidak menjalankan ibadah	6	2,73	214	97,27	220
24	Suami lebih mementingkan oranglain/teman	5	2,27	215	97,73	220
25	Suami pencemburu	5	2,27	215	97,73	220
26	Suami suka mabuk	3	1,36	217	98,64	220
27	Suami lebih mementingkan pekerjaan	3	1,36	217	98,64	220
28	Suami tidak suka istri membantu keluarga	3	1,36	217	98,64	220
29	Tidak memiliki anak	2	0,91	218	99,09	220
30	Suami mandul	2	0,91	218	99,09	220
31	Suami poligami	1	0,45	219	99,55	220

*Sumber: Data Putusan Cerai Gugat PA Sawahlunto Tahun 2022-2023 yang diolah penulis*

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat beberapa masalah yang paling banyak dialami oleh perempuan dalam rumahtangga mereka seperti 64,55% perempuan yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sawahlunto tidak dinafkahi secara layak oleh suami mereka, 54,55% telah ditinggalkan oleh suami mereka/suaminya minggat, 35,91% telah diselingkuhi oleh suami mereka, 32,73% masalah yang mereka alami adalah karena suami mereka terlalu sering melontarkan kata-kata kasar saat terjadi pertengkaran, 31,82% permasalahan terjadi karena suami mereka melakukan KDRT. Ada pun persentase KDRT yang terjadi dalam rumahtangga

mereka ialah sebanyak 95,71% merupakan KDRT fisik seperti ditampar, ditendang, diinjak, dipukuli, didorong, dan dibanting oleh suami mereka. KDRT fisik ini juga terjadi ke anak-anak mereka, kemudian sebanyak 4,29% KDRT yang terjadi adalah KDRT psikis seperti adanya ancaman yang diterima oleh pihak perempuan.

### 1.3 Penyebab Utama Perceraian

Setelah melihat kondisi permasalahan rumahtangga yang dialami oleh perempuan yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sawahlunto, penulis akan menjabarkan penyebab atau alasan utama pihak perempuan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Dari sebagian besar masalah yang telah mereka alami, ternyata sebagian besar penyebab utama perceraian tidak berbeda jauh dengan sebagian besar masalah masalah yang telah mereka alami ketika masih berumahtangga. Hanya saja sebagian besar rumahtangga yang memiliki permasalahan pelik seperti tidak mendapatkan nafkah yang layak dari suami, suami melakukan KDRT, suami berselingkuh, dll ternyata selama ini alasan mereka mempertahankan rumahtangganya karena mereka tidak mandiri secara ekonomi atau karena suami mereka telah melakukan perselingkuhan. Misalnya saja, selagi suami mereka masih memberikan nafkah, mereka tetap menerima jika suami mereka melakukan KDRT, saat nafkah tidak lagi diberikan atau jumlahnya tidak cukup, maka saat itulah mereka memutuskan untuk bercerai.

Tidak hanya itu, sebanyak 44,09% penggugat yang hanya merupakan ibu rumahtangga ternyata mereka memiliki pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan anak mereka. Artinya, telah terjadi beban ganda yang dialami oleh penggugat, yaitu bekerja di sektor domestic untuk mengurus rumahtangga dan bekerja di sektor public guna mencari nafkah sebagai pedagang kecil, buruh cuci, pembantu rumahtangga, dll. Banyak pula di antara mereka yang baru memutuskan untuk bercerai ketika suami mereka melakukan perselingkuhan, mereka tetap menerima kondisi suaminya yang tidak memberikan nafkah asalkan suami mereka tetap setia. Ada pun penjabaran mengenai penyebab utama perceraian tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 6.**

**Penyebab Utama Perceraian**

No	Penyebab Utama Perceraian	Jumlah	Persentasi
1	Suami tidak memberi nafkah/nafkah tidak mencukupi	41	18,64
2	Suami berselingkuh	38	17,27
3	Suami minggaat	32	14,55
4	Suami menikah siri	13	5,91
5	KDRT	9	4,09
6	Dituduh berselingkuh	13	5,91

No	Penyebab Utama Perceraian	Jumlah	Persentasi
7	Suami tidak peduli dengan anak	7	3,18
8	Suami melakukan tindakan kriminal	6	2,73
9	Suami sering berkata kasar	6	2,73
10	Tidak dihargai oleh suami	6	2,73
11	Diceraikan sepihak tanpa sebab	5	2,27
13	Suami tidak melibatkan istri dalam mengambil keputusan	5	2,27
14	Suami dipenjara	4	1,82
15	Suami tidak menyukai keluarga istri	4	1,82
16	Keluarga suami ikut campur masalah rumahtangga	3	1,36
17	Suami sering berjudi	3	1,36
18	Suami lebih mementingkan keluarga luasnya	2	0,91
19	Suami lebih mementingkan teman	2	0,91
20	Suami lebih mementingkan pekerjaan	2	0,91
21	Suami malas/tidak bekerja	2	0,91
22	Suami suka membandingkan istri dengan oranglain	2	0,91
23	Suami sering mabuk	2	0,91
24	Suami tidak jujur	2	0,91
25	Suami melarang anak tiri jumpa dengan ayah kandungnya	2	0,91
26	Diusir suami dari rumah	1	0,45
27	Istri menolak nafkah dari suami	1	0,45
28	Suami masih berhubungan dengan mantan istri	1	0,45
29	Suami pencemburu	1	0,45
30	Suami gay	1	0,45
31	Game online	1	0,45
32	Suami tidak mampu membayar hutang istri	1	0,45
33	Suami tidak memberikan nafkah bathin	1	0,45
34	Suami tidak sanggup membayar hutang	1	0,45
		220	100

Sumber: Data Putusan Cerai Gugat PA Sawahlunto Tahun 2022-2023 yang diolah penulis

Dari tabel di atas terlihat bahwa sebagian besar penyebab utama perempuan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sawahlunto adalah karena suami mereka tidak memberikan nafkah, suami mereka melakukan perselingkuhan, minggat dari rumah, menikah siri, dan melakukan KDRT.

### **Teori Strukturasi Anthony Giddens**

Fenomena cerai gugat dapat dibahas melalui teori strukturasi Anthony Giddens dimana ia mengemukakan teorinya dengan konsep praktik sosial. Praktik sosial menurut Giddens dipahami sebagai suatu hal yang berulang dan memiliki kaitan erat dengan agen dan struktur. Agen dan struktur tidak dapat dipahami dalam keadaan yang terpisah satu sama lain. Agen dan struktur dapat diibaratkan seperti dua sisi dari mata uang logam. Menurut Giddens, agen dan struktur adalah hal yang bersifat dwi rangkap. Seluruh tindakan sosial akan memerlukan struktur

dan begitu pula sebaliknya seluruh struktur juga memerlukan tindakan sosial. Agen dan struktur akan saling jalin menjalin tanpa terpisah di dalam praktik atau aktivitas manusia (George, Ritzer & Douglas J, 2011).

Agen bagi Giddens adalah aktor atau pelaku. Agen memiliki kekuasaan untuk menciptakan suatu pertentangan dalam kehidupan social. Dalam teorinya Ritzer mempernalkan struktur, yang mana struktur adalah seperangkat aturan dan sumberdaya yang memungkinkan praktik sosial dapat eksis sepanjang ruang dan waktu serta menjadi sistematis. Struktur bisa berupa nilai, norma, mau pun aturan. Struktur ada yang bersifat *enabling* dan ada pula yang bersifat *constraining*. Struktur yang bersifat *enabling* atau memberdayakan memungkinkan terjadinya praktik sosial yang bersifat *constraining* atau mengekang. Maka jika dikaitkan dengan fenomena cerai gugat di kalangan perempuan ada kemungkinan pada diri individu untuk melakukan perceraian karena adanya struktur *enabling* atau hal yang memungkinkan terjadinya perceraian dalam masyarakat itu sendiri. Sementara itu ada pula kemungkinan yang menyebabkan individu tidak melakukan perceraian karena adanya struktur *constraining* yaitu hal yang mengekang untuk tidak melakukan cerai gugat. Dalam melakukan praktik social, agen memiliki kesadaran, kesadaran dibagi menjadi dua hal yaitu kesadaran diskursif dan kesadaran praktis. Kesadaran diskursif adalah kesadaran yang memerlukan kemampuan aktor untuk menjelaskan tindakannya dalam kata-kata. Sementara itu kesadaran praktis adalah kesadaran yang melibatkan tindakan yang dianggap benar oleh aktor, tanpa kemampuan dari aktor tersebut untuk mengungkapkan tidakannya melalui kata-kata mengenai hal yang mereka lakukan.

### **Nilai-Nilai Patriarki yang Menyebabkan Perceraian**

Nilai menurut M.Z Lawang dalam (Adji, 2017) dan (Irwan, Hamsah dkk, 2021) adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, sesuatu yang dianggap pantas, berharga, dan dapat mempengaruhi perilaku sosial seseorang. Sementara menurut Karel J. Veeger nilai adalah pengertian mengenai sesuatu hal yang telah ada di dalam pengetahuan manusia mengenai baik atau tidaknya suatu perbuatan. Jadi, dari sini penulis menyimpulkan bahwa nilai adalah pandangan seseorang mengenai sesuatu seperti baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, dan layak atau pun tidak layak dalam memandang sesuatu hal. Nilai bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang dianggap bernilai atau pun berharga.

Ada pun patriarki adalah relasi kuasa yang mengesampingkan peran perempuan dan menempatkan laki-laki pada posisi utama dan unggul (Mukminto, 2020). Patriarki merupakan sebuah sudut pandang mengenai sesuatu hal hanya berdasarkan perspektif laki-laki saja dan

mengesampingkan perspektif perempuan sehingga laki-laki menjadi posisi utama dalam segala aspek. Tidak dapat dipungkiri bahwa patriarki menyebabkan banyak permasalahan sosial seperti tingginya angka perceraian, kekerasan seksual, KDRT, subornasi, dan dominasi dalam ranah privat mau pun publik. Dalam praktik social menurut Giddens, nilai merupakan bagian dari struktur yang mana struktur menurutnya ialah seperangkat sumberdaya, nilai, dan aturan yang memberdayakan aktor untuk melakukan suatu tindakan.

Perceraian yang terjadi di Sawahlunto tahun 2022-2023 disebabkan oleh factor multidimensi, artinya perceraian tersebut terjadi karena lebih dari satu faktor yang satu sama lain saling mempengaruhi keberlangsungan rumahtangga. Ada pun nilai-nilai patriarki yang menyebabkan terjadinya cerai gugat di Sawahlunto adalah:

### **2.1 Adanya Kontrol Terhadap Akses Ekonomi dan Beban Ganda dalam Rumah Tangga**

Terdapat sebuah norma yang tidak tertulis tetapi sudah menjadi hal yang *taken for granted* (diterima begitu saja tanpa dipikirkan dan dipertanyakan) dalam kebanyakan masyarakat, yaitu adanya sistem pembagian kerja dalam rumahtangga, seperti misalnya perempuan mengurus pekerjaan rumahtangga dan laki-laki mencari nafkah. Setelah menikah, perempuan diharuskan untuk patuh dan taat pada suaminya, termasuk jika suami tidak memberikan izin untuk bekerja di sektor publik. Selama pembagian kerja dalam rumahtangga adil maka perceraian dapat diminimalisir. Namun, masalah yang terjadi adalah ketika pembagian tugas dalam rumahtangga lebih merugikan salah satu pihak dan pihak yang dirugikan disini ialah pihak perempuan. Bentuk kontrol akses ekonomi dalam rumahtangga ini merupakan jenis patriarki di ranah privat (Walby, 1990).

Sesuai dengan data statistik yang telah penulis dapatkan bahwa sebanyak 44,09% perempuan yang mengajukan gugatan cerai hanya memiliki profesi utama sebagai ibu rumahtangga yang mana nafkah utama yang mereka dapatkan ialah dari pemberian suami mereka. Ketika menikah laki-laki akan membacakan taklik talak, dalam formulir tersebut disebutkan bahwa suami menyetujui jatuhnya talak atas istrinya apabila: (1) ia meninggalkan istrinya selama enam bulan atau lebih secara berturut-turut, atau (2) ia tidak memberikan nafkah wajib kepada istrinya selama tiga bulan berturut-turut, atau (3) ia menyakiti badan istrinya, atau (4) ia tidak memperdulikan istrinya selama enam bulan berturut-turut. Dari perjanjian tersebut, bila istri tidak menghendaki salah satu persyaratan yang dilanggar oleh suaminya dan ia tidak rela, kemudian mengadukannya kepada hakim agama, dengan membawa dua orang saksi yang mengetahui kejadian itu, maka hakim agama dapat menyatakan talak suami telah jatuh kepada

istri dan istri tersebut telah dicerai. Ketika suami tidak memberikan nafkah atau jika nafkah yang diberikan oleh suami jumlahnya tidak memadai, maka perempuan dapat mengajukan perceraian ke pengadilan agama karena alasan tersebut (Reftantia, 2020).

Namun, sebelum mereka mengajukan gugatan cerai biasanya mereka akan menjalankan pekerjaan sampingan terlebih dahulu seperti menjadi asisten rumah tangga, berjualan kecil-kecilan di depan rumah, atau bahkan mencari pekerjaan di sektor public tanpa meninggalkan pekerjaan mereka di rumah. Hal ini akan berlangsung dalam beberapa waktu hingga akhirnya perceraian terjadi. Sebenarnya perempuan yang hanya bekerja di sektor domestic bukannya tidak memiliki kapasitas untuk bekerja di sektor public karena 40,91% perempuan yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sawahlunto adalah perempuan yang memiliki pendidikan lebih tinggi dari suaminya. Ada pun rincian jenis pendidikan tersebut ialah sebanyak 35 perempuan atau 15,9% memiliki pendidikan dua tingkat atau lebih tinggi dari pasangan mereka, misalnya si perempuan memiliki pendidikan sarjana dan suaminya hanya merupakan lulusan SD tetapi pihak perempuan yang memiliki pendidikan tinggi ini hanya bekerja di sektor domestik sebagai ibu rumah tangga dan suaminya yang bekerja di sektor public sebagai pencari nafkah utama. Kemudian sebanyak 55 perempuan atau 25% di antara mereka memiliki satu tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari suami mereka, misalnya si perempuan merupakan lulusan SMA dan suaminya merupakan lulusan SMP. Mereka terkendala dalam akses ekonomi karena pembagian tugas rumah tangga yang tidak adil.

Adanya kontrol terhadap akses ekonomi di dalam rumah tangga yang menyebabkan istri hanya boleh bekerja di sektor domestik dan beban ganda di dalam rumah tangga yang dibebankan kepada istri termasuk ke dalam nilai patriarki dan struktur *enabling*. Kondisi ini menjadi faktor penyebab aktor melakukan tindakan dalam praktiknya, tindakan yang dilakukan aktor disini ialah dengan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Rendahnya jumlah partisipasi pekerjaan di sektor publik yang dilakukan oleh perempuan seolah menjadi gambaran bahwa perempuan yang telah menikah sering kali tidak memiliki akses untuk melanjutkan karir mereka di sektor publik meskipun pendidikan mereka lebih memadai dari suami mereka.

Sesuai dengan pernyataan antara tergugat dan penggugat di dalam hasil putusan sidang, hal ini mengindikasikan bahwa kebanyakan pasangan menikah hanya memiliki kesadaran di tingkat diskursif yang mana mereka tidak mampu menjelaskan secara logis mengapa pihak laki-laki membatasi akses ekonomi istrinya dengan cara tidak memberikan istri izin untuk bekerja di sektor publik ketika istri mereka memiliki kapasitas pendidikan yang justru lebih baik dan lebih tinggi dari mereka. Selain itu pula, posisi perempuan yang sering kali hanya dianggap sebagai

pelengkap dan pencari nafkah tambahan menyebabkan pekerjaan tersebut tidak dianggap sebagai sebuah pekerjaan utama.

## **2.2 Adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dialami Oleh Perempuan dan Anak**

Sebanyak 31,82% dari 220 perkara cerai gugat yang telah penulis analisis, salah satu penyebab utama terjadinya perceraian adalah karena suami mereka melakukan KDRT. Ada pun persentase KDRT yang terjadi dalam rumah tangga mereka ialah sebanyak 95,71% merupakan KDRT fisik seperti ditampar, ditendang, diinjak, dipukuli, didorong, dan dibanting oleh suami mereka. KDRT fisik ini juga terjadi ke anak-anak mereka, kemudian sebanyak 4,29% KDRT yang terjadi adalah KDRT psikis seperti adanya ancaman yang diterima oleh pihak perempuan. KDRT merupakan salah satu bentuk dari masih eksistensinya nilai-nilai patriarki dalam kehidupan rumah tangga karena mayoritas korban KDRT adalah istri dan pelakunya adalah suami. Hal ini juga termasuk faktor *enabling* atau pun faktor yang memberdayakan aktor untuk melakukan suatu tindakan dalam praktiknya.

## **2.3 Anggapan Bahwa Urusan Anak Adalah Urusan Istri**

Sebanyak 3,18% penyebab utama perceraian yang terjadi ialah karena suami tidak peduli dengan anak, dalam beberapa sidang putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Sawahlunto telah disebutkan bahwa ketika anak sakit suami sama sekali tidak terlibat dalam pengurusan anak bahkan untuk mengantar anak ke berobat pun suami menolaknya. Selain itu bentuk ketidakpedulian suami lainnya ialah tidak memberikan nafkah pendidikan yang layak ke pada anak mereka seperti enggan memberikan uang untuk biaya sekolah anak padahal dalam keluarga tersebut yang bertugas sebagai pencari nafkah utama ialah suami. Hal ini juga merupakan bentuk dari nilai patriarki yang eksis dalam rumah tangga.

## **2.4 Tidak Melibatkan Istri dalam Mengambil Keputusan**

Sebanyak 2,27% penyebab utama perceraian yang terjadi ialah karena suami tidak pernah melibatkan istri dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini suami bertindak sebagai kepala rumah tangga dan mendominasi seluruh keputusan yang harus diambil tanpa melibatkan istri. Misalnya, suami menikah secara siri tanpa meminta izin kepada istri, mengambil pinjaman di bank tanpa memberitahukan istri, atau meminjam uang, dan memutuskan perkara lainnya tanpa melibatkan istri di dalamnya. Hal ini merupakan kondisi subordinasi bagi perempuan yaitu suatu kondisi dimana urusan perempuan dikesampingkan untuk memenuhi urusan laki-laki. Dalam hal

ini kondisi yang dikesampingkan ialah urusan istri dan yang diutamakan ialah urusan suami. Meski tidak banyak, tetapi hal ini tetaplah sebuah nilai patriarki yang menyebabkan terjadinya perceraian gugat di Pengadilan Agama Sawahlunto.

## **2.5 Keluarga Suami Ikut Campur Urusan Keluarga**

Dari tabel lima yang menggambarkan mengenai permasalahan rumahtangga yang dialami oleh pasangan suami istri di Sawahlunto terlihat bahwa sebanyak 8,18% permasalahan rumahtangga yang terjadi ialah karena adanya campur tangan dari keluarga pihak suami. Namun, hanya sebanyak 1,36% dari pernikahan tersebut yang menjadikan campur tangan keluarga dari pihak suami sebagai penyebab utama perceraian mereka. Meskipun angka ini cenderung rendah, hal ini tetap menjadi salah satu penyebab terjadinya cerai gugat di Kota Sawahlunto.

Dari hasil putusan sidang tersebut penggugat menyatakan bahwa keluarga suami sering kali ikut campur dan menyalahkan serta menyudutkan penggugat atas permasalahan yang terjadi. Hal ini termasuk ke dalam nilai patriarki karena keluarga dari pihak laki-laki sering kali menyalahkan dan menyudutkan istri atas permasalahan dalam rumahtangga seperti menuduh istri boros, tidak bisa mengurus anak, tidak memiliki waktu untuk anak dan keluarga jika pihak istri bekerja di sektor publik, dan banyak menuntut kesempurnaan terhadap istri tanpa mempertimbangkan sudut pandang istri dalam melihat permasalahan rumahtangga yang sedang mereka alami.

## **2.6 Suami Lebih Mementingkan Orang lain**

Dari tabel enam terlihat bahwa sebanyak 0,91% penyebab cerai gugat ialah karena pihak suami lebih mementingkan keluarga luasnya, 0,91% pihak suami lebih mementingkan temannya, dan 0,91% pihak suami lebih mementingkan pekerjaannya dibandingkan dengan anak dan istri mereka. Dalam sudut pandang patriarki, laki-laki seringkali hanya dituntut untuk mencari nafkah dan bekerja di sektor publik tanpa memikirkan bagaimana beban dan peran mereka di sektor domestic. Seringkali pekerjaan rumahtangga hanya dibebankan ke pihak istri. Selain itu pula, istri sering kali pula diwajibkan untuk lebih mendahulukan kepentingan suami. Dari kasus ini terlihat bahwa laki-laki ketika sudah berumahtangga belum memiliki kesadaran praktis yang mana seharusnya mereka bisa lebih seimbang dalam mengurus pekerjaan, kebutuhan oranglain mau pun kebutuhan keluarga intinya sendiri. Kesadaran praktis ialah kesadaran yang dimiliki oleh actor dalam melakukan tindakan dan bisa menjelaskan tindakan tersebut secara logis dan dibarengi oleh pengetahuan yang dimiliki oleh actor itu sendiri.

## Kesimpulan

Penelitian ini dibahas melalui pengalaman dan sudut pandang perempuan pelaku cerai gugat sebagai aktor yang mana aktor menurut Giddens ialah orang yang melakukan praktik sosial. Praktik cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Sawahlunto tahun 2022-2023 disebabkan oleh masalah multi dimensi atau terjadi karena adanya lebih dari satu masalah yang saling berkaitan satu sama lain. Permasalahan yang terjadi tidak terlepas dari pengaruh eksistensi nilai-nilai patriarki dalam kehidupan pernikahan seperti adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan dan anak, adanya kontrol terhadap akses ekonomi dan beban ganda dalam rumah tangga, anggapan bahwa urusan anak adalah urusan istri, adanya campur tangan keluarga suami, suami lebih mementingkan oranglain, dan tidak melibatkan istri dalam mengambil keputusan. Nilai-nilai ini termasuk ke dalam struktur. Struktur ialah seperangkat sumberdaya, nilai, dan aturan yang memberdayakan aktor atau yang memungkinkan atau pun tidak memungkinkan aktor dalam melakukan suatu tindakan.

Penulis berharap penelitian ini dapat dilanjutkan dengan membahas secara lebih mendalam dan melihat praktik tersebut secara keseluruhan, seperti misalnya melihat besar kecilnya pengaruh masing-masing permasalahan terhadap perceraian yang terjadi dan membandingkan kasus cerai gugat dan cerai talak di Pengadilan Agama Sawahlunto.

## Daftar Pustaka

- Adji, W. S. (2017). Penanaman Nilai Sosial Anak Usia Dini Melalui Gerak dan Lagu. *Jurnal Edukasi AUD*, 2(2), 110. <https://doi.org/10.18592/jea.v2i2.1545>
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada.
- Almizan, A., & Amri, M. U. (2021). Ketimpangan Peran Domestik Rumah Tangga dalam Cerai Gugat Pada Masyarakat Minangkabau. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 3(2), 103–110. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v3i2.193>
- Annur, C. M. (2024). *Angka Pernikahan Turun pada 2023, Rekor Terendah Sedekade Terakhir*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/29/angka-pernikahan-turun-pada-2023-rekor-terendah-sedekade-terakhir>
- Bakhtiar, H. (2014). Pengertian Perceraian Dan Dasar Hukum Perceraian. *Pontificia Universidad Catolica Del Peru, October*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15543.21924>
- Dalvi, I., & Hermaleni, T. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perceraian Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi. *Psikologia: Jurnal Psikologi*, 5(1), 21–28. <https://psikologia.umsida.ac.id/index.php/psikologia/article/download/1219/1832>

- Elwijaya, F. (2021). Sistem, Nilai, dan Norma dalam Pendidikan Dasar : Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 1840–1845.  
<https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/1186>
- George, Ritzer & Douglas J, G. (2011). *Teori Sosiologi Modern*. Kencana.
- Ghina, R. (2020). *Praktik Sosial Cerai Gugat di Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi*.  
[http://scholar.unand.ac.id/65871/%0Ahttp://scholar.unand.ac.id/65871/1/Abstrak Baru.pdf](http://scholar.unand.ac.id/65871/%0Ahttp://scholar.unand.ac.id/65871/1/Abstrak%20Baru.pdf)
- Indonesia, B. P. S. (2023). Catalog : 1101001. In *Statistik Indonesia 2020* (Vol. 1101001).  
<https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>
- Indonesia, B. P. S. (2024). Catalog : 1101001. In *Statistik Indonesia 2020* (Vol. 1101001).  
<https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>
- Irwan, Hamsah, Felia Siska, Septi Yulia, Romi Mesra, Syahrul, Resti Juniati, Nur Inayati Saiful, R. (2021). Pengantar Sosiologi Umum. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Issue Mi).
- Maharani, L. (2014). Perkembangan Moral Pada Anak. *KONSELI : Jurnal Bimbingan Dan Konseling (E-Journal)*, 1(2), 93–98. <https://doi.org/10.24042/kons.v1i2.1483>
- Mukminto, E. (2020). Hukum, Ideologi Patriarki, dan Kekerasan Sistematis Atas Perempuan— Suatu Kajian Žižekian. *Nurani Hukum*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8566>
- Novarisa, G. (2019). Dominasi Patriarki Berbentuk Kekerasan Simbolik Terhadap Perempuan Pada Sinetron. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 5(02), 195. <https://doi.org/10.30813/bricolage.v5i02.1888>
- Nurachmana, A., Purwaka, A., Supardi, S., & Yuliani, Y. (2020). Analisis Nilai Edukatif dalam Novel Orang-orang Biasa Karya Andrea Hirata: Tinjauan Sosiologi Sastra. *ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, 1(1), 57–66.  
<https://doi.org/10.37304/enggang.v1i1.2462>
- Putusan Mahkamah Agung*. (2024).  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pasawahlunto/kategori/perceraian.html>
- Rozalinda, N. dan. (2014). PERSEPSI PEREMPUAN TERHADAP PERCERAIAN: Studi Analisis Terhadap Meningkatnya Angka Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Padang. *Kafa'ah*:

*Jurnal Ilmiah Kajian Gender Vol. 4 No. 2 Tahun 2014 PERSEPSI, 4(2), 181–201.*

Sawahlunto, P. A. (2022). *Laporan Kegiatan Tahun 2022*.

Sawahlunto, P. A. (2023). *Laporan Kegiatan Tahun 2023.pdf*.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.

Walby, S. (1990). *Teorisasi Patriarki*. Jalasutra.

## ***Collaborative Governance*** **dalam Pengembangan Agrowisata di Kota Palembang: Studi Kasus** **Agrowisata Edukasi Sungai Jawi Kecamatan Kalidoni Kota Palembang**

**Rahmawati<sup>1</sup>, Rizki Marsalina<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara (email: [rwati6676@gmail.com](mailto:rwati6676@gmail.com))

### ***Abstract***

*The purpose of this research is to determine and analyze the Collaborative Governance Process in Agrotourism Development in Palembang City (Case Study of Sungai Jawi Educational Agrotourism, Sungai Selincah Village, Kalidoni District in Palembang City). The research method used in this research is a qualitative research method. According to Dermadi (2013:153), the research method is a scientific method for obtaining data with several useful purposes. The scientific method refers to research activities that are based on scientific principles, namely rational, experimental, and systematic. Based on the explanation above, it can be concluded that the research method is a scientific method for obtaining data with certain purposes and applications. Based on the results of research regarding the Collaborative Governance Development Process in Palembang City (case study of Sungai Jawi Educational Agrotourism, Kalidoni District), the Collaborative Governance Process in the development of Jawi River Educational Agrotourism has been carried out through the stages of face to face dialogue, trust building, trust, commitment to the process (commitment to the process), and intermediate outcomes (intermediate results achieved) which have been implemented well.*

### ***Keywords:***

*collaborative governance process; agritourism development*

## **Pendahuluan**

Pariwisata di Indonesia merupakan salah satu sektor industri ekonomi penting di Indonesia yang memiliki prospek cerah dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Pariwisata memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan produktivitas Negara.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang harus dimanfaatkan untuk pembangunan kepariwisataan sebagai bagian dari pembangunan Nasional. Indonesia mempunyai banyak peluang karena hal ini didukung oleh ciri-ciri alam seperti letak dan ciri-ciri geografis (lautan dan daratan di sekitar khatulistiwa), lapisan tanah yang subur dan panorama (akibat teknologi terestrial), serta keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang memperkaya struktur tanah dan laut Indonesia.

Undang-Undang Nomor 10 Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa alam, tumbuhan dan satwa satwa merupakan anugerah Tuhan Yang Maha

Esa, begitu pula dengan benda purbakala, warisan budaya sejarah, seni dan budaya masyarakat Indonesia. Sumber daya pengembangan pariwisata dan permodalan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tertuang dalam Pancasila dan Penutup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 dalam pasal 4 menjelaskan kepariwisataan di Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan; mengatasi pengangguran; melestarikan alam lingkungan, dan sumberdaya; memajukan kebudayaan; mengangkat citra bangsa; memupuk rasa cinta tanah air; memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; serta mempererat persahabatan antar bangsa.

Provinsi Sumatera Selatan terletak di bagian selatan Pulau Sumatera dan memiliki ibu kota di Kota Palembang. Kota Palembang, sebagai kota tertua di Indonesia, telah lama dikenal sebagai Kerajaan Sriwijaya. Kota ini sangat kaya akan sejarah dan budaya. Salah satu kawasan di Palembang yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata adalah Agro Wisata Edukasi Sungai Jawi.

Kota Palembang memiliki luas wilayah 400,61 kilometer persegi ini dihuni oleh lebih dari 1,6 juta jiwa pada tahun 2021. Kota Palembang merupakan kota terbesar dan kota terbesar kedua di Pulau Sumatera setelah Medan, kota terbesar keenam di Indonesia setelah Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan kota terbesar ke-19 di Asia Tenggara.

Berdasarkan informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kependudukan (Disdukcapil) Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020, diketahui mayoritas penduduk Kota Palembang menganut agama Islam. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat umum di kota Palembang adalah bahasa Melayu Palembang yang dituturkan oleh mayoritas masyarakatnya.

Dalam pengembangan potensi wisata, Pemerintah Kota Palembang mulai mengembangkan potensi yang ada di kawasan perkampungan untuk menjadi destinasi wisata yang dapat membangun ekonomi masyarakat. Potensi ini dikembangkan dengan membentuk program “Kampung Kreatif” di setiap 18 Kota Palembang mempunyai program kampung kreatif yang dibawah Dinas Pariwisata Kota Palembang yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Camat bersama Lurah setempat. Adanya program ini seluruh potensi sebuah Kawasan perkampungan dapat lebih terekspos, mulai dari potensi alam, seni, budaya, kuliner dan kerajinan khas masyarakat yang dapat menjadi sebuah destinasi wisata.

Berdasarkan data statistik pariwisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018, Kota Palembang memiliki 65 destinasi wisata dan Kecamatan Kalidoni hanya memiliki satu destinasi wisata yaitu Pulau Kemarau.

Kecamatan Kalidoni adalah salah satu kecamatan yang ada di kota Palembang yang terletak di Jalan Talang Gading No.68 Rt. 07 Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang. Kawasan Kalidoni terletak di sepanjang aliran sungai Musi dan mempunyai 5 (lima) kelurahan dengan luas kurang lebih 2.792 hektar. Kecamatan Kalidoni memiliki salah satu daerah perkampungan yang memiliki potensi menjadi destinasi wisata berbasis edukasi pertanian, yakni Agrowisata Edukasi Sungai Jawi.

Di Kota Palembang sendiri sudah memiliki beberapa Agrowisata, diantaranya Kampung Kreatif Sugihwaras di Kecamatan Sukarami, Kampung Wisata Al Munawar di Seberang Ulu Satu dan Agrowisata Edukasi Sungai Jawi yang terletak di Kelurahan Sungaiselincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang.

Agrowisata Sungai Jawi merupakan salah satu desa di pinggiran Kota Palembang yang termasuk dalam wilayah Desa Sungai Selincah, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang. Desa ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyuasin dan Kecamatan Sematang Borang. Sungai Jawi dirancang sebagai destinasi wisata edukasi yang fokus pada pendidikan lingkungan hidup. Diharapkan bahwa dengan hadirnya agrowisata ini, bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat serta mendukung perkembangan pariwisata di Palembang.

Namun dalam perkembangannya masih terdapat beberapa kekurangan, baik akses jalan, penerangan dan perekonomian masyarakat. Dari permasalahan tersebut diharapkan dengan dijadikannya Kawasan Agrowisata ini akan menjadi alternatif kawasan wisata baru berbasis edukasi di Kota Palembang. Kawasan Agrowisata ini didesain akan menjadi "Jendela alam" yang menyajikan sebuah kawasan wisata yang berfokus pada edukasi tentang alam. Dengan hadirnya kawasan Agrowisata ini diharapkan juga dapat meningkatkan taraf kehidupan warga Sungai Jawi yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani agar disamping menjual produk pertanian mereka juga dapat menjual wisata serta edukasi kepada pengunjung.

Dalam pengembangan Agrowisata wisata edukasi di Sungai Jawi, perlu dukungan yang kuat dari pemerintah. Dengan adanya dukungan yang kuat dari pemerintah menjadi hal yang penting bagi pengembangan sebuah destinasi wisata. Daya dukung tidak hanya daya dukung lingkungan tetapi juga daya dukung yang saling berkaitan dengan pembinaan atau pengembangan, anggaran, akses, prasarana umum dan ruang publik. Namun hingga saat ini agrowisata edukasi Sungai Jawi belum mendapat buku panduan atau surat resmi dari Dinas Pariwisata Kota Palembang sebagai produk atau objek pariwisata baru.

Pemerintah Kecamatan Kalidoni dalam hal ini hanya menerbitkan Surat Keputusan No.10/KPTS/KLD/2020 tentang Penetapan Daerah Percontohan Kampung Agrowisata Edukasi Sungai Jawi Kecamatan Kalidoni. Keterbatasan inilah yang menjadi salah satu penghambat dalam pengembangan Agrowisata Edukasi Sungai Jawi. Selain itu terdapat permasalahan lain dalam pembiayaan program inovasi tersebut, sementara inovasi ini sangat diharapkan untuk berjalan sesuai tujuan yang diinginkan.

Diketahui dalam beberapa program kompetisi, Agrowisata Edukasi Sungai Jawi sering diikutsertakan dan mendapatkan juara serta penghargaan seperti dalam Lomba Kampung Kreatif Tahun 2020 dan 2022, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOIN YANLIK) Tahun 2022, Program Kampung Iklim Tahun 2019 dan 2021.

Melihat potensi yang dimiliki Agrowisata Edukasi Sungai Jawi, maka dari itu dalam pengembangan Agrowisata Edukasi Sungai Jawi ini dibutuhkan suatu pengakuan, kerjasama dan integritas aktor-aktor didalamnya. Konsep *Collaborative Governance* sebagai sebuah basis alternatif dinilai mampu mewujudkan percepatan dan implementasi pengembangan Agrowisata Edukasi Sungai Jawi.

Pada dasarnya dalam praktik suatu kerjasama atau kolaborasi dibutuhkan minimal satu atau lebih organisasi atau institusi yang terlibat dalam suatu kerjasama baik pemerintah maupun swasta. Adanya kolaborasi ini diharapkan dapat memecahkan masalah pengembangan program inovasi ini yang mungkin tidak mampu diselesaikan oleh satu organisasi atau instansi saja, namun membutuhkan peran organisasi atau institusi lain untuk menyelesaikan suatu permasalahan dimaksud.

Berdasarkan observasi awal penulis, ada beberapa indikasi masalah yang ditemukan penulis, diantaranya :

- a. Belum maksimalnya dukungan program kegiatan di Agrowisata Edukasi Sungai Jawi dari Dinas Pariwisata Kota Palembang
- b. Belum adanya surat penunjukan atau penetapan dari Dinas Pariwisata Kota Palembang bahwa Agrowisata Edukasi Sungai Jawi sebagai salah satu objek wisata.
- c. *Collaborative governance* ini tidak hanya melibatkan pemerintah dan swasta, namun dalam realisasinya masyarakat juga ikut dilibatkan. Tetapi, masih banyak masyarakat yang kurang paham akan konsep kolaborasi dalam pengembangan agrowisata ini, yang diharapkan dapat mencapai 100 KK namun dari 120 KK yang ada di kawasan Sungai Jawi hanya 7 KK yang dapat mengaplikasikan program Agrowisata Edukasi Sungai Jawi.

- d. Belum maksimalnya kegiatan promosi karena kurangnya tenaga ahli yang menguasai Ilmu Teknologi (IT) dalam pengelolaan akun media sosial dan website sebagai wadah untuk mempromosikan kegiatan dan program di Agrowisata Edukasi Sungai Jawi.
- e. Masih kurangnya sarana dan fasilitas seperti wahana permainan, akomodasi dan transportasi umum yang seharusnya dapat menjadi penunjang daya tarik pengunjung dan masih terdapat kerusakan akses jalan menuju lokasi Agrowisata Edukasi Sungai Jawi seperti berlubang dan ukuran jalan yang terlalu sempit sehingga sulit dilalui kendaraan roda empat.

## Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Dermadi (2013:153), metode penelitian adalah suatu metode ilmiah untuk memperoleh data dan beberapa tujuan yang bermanfaat. Metode ilmiah mengacu pada kegiatan penelitian yang didasarkan pada kaidah ilmiah, yaitu rasional, eksperimental, dan sistematis. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu metode ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan penerapan tertentu.

**Tujuan penelitian** kualitatif adalah mendeskripsikan sesuatu secara akurat dari sudut pandang orang yang diteliti. Penelitian kualitatif berkaitan dengan pemikiran, perasaan, pendapat atau keyakinan orang yang diteliti, bukan sesuatu yang dapat diukur secara numerik. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan alat penelitian yang paling penting. Pada langkah selanjutnya adalah teknik deskriptif digunakan untuk menemukan dan mendeskripsikan Proses *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Agrowisata di Kota Palembang.

## Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis akan membahas mengenai Proses *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Agrowisata Edukasi Sungai Jawi di Kota Palembang, dengan uraian sebagai berikut:

### A. Collaborative Governance

Berdasarkan hasil penelitian penulis, kolaboratif merupakan sebuah indikator yang berperan penting dan berkaitan dengan kepercayaan yang baik, kemudian melakukan dialog secara tatap muka (*face to face dialogue*) dengan baik yang akan membangun kepercayaan (*trust building*) yang akan berpengaruh nantinya terhadap komitmen dalam proses (*commitment to the process*) kolaborasi, selanjutnya komitmen aktor yang baik akan terbentuk rasa saling memahami (*shared understanding*) dalam merumuskan masalah, melakukan identifikasi

terhadap nilai-nilai, menentukan visi dan misi yang jelas.

Ansell dan Gash juga berpendapat bahwa keputusan yang dibuat dalam forum tata kelola kolaboratif tunduk pada konsensus. Meskipun aktor di lembaga publik memiliki otoritas tinggi dalam pengambilan keputusan, tujuan kerjasama disusun untuk mencapai tingkat konsensus tertentu diantara para pemangku kepentingan. Istilah konsensus yang digunakan oleh Ansell dan Gash didorong karena forum tata kelola kolaboratif sering gagal mencapai konsensus. Namun, premis pertemuan bersama dalam forum formal, diskusi dan multilateral adalah upaya menuju konsensus untuk menemukan area kesepakatan.

Dalam proses kolaborasi ada aktor-aktor yang berperan dalam hal memiliki kesamaan dan kesepahaman yang sama, maka akan muncullah sebuah hasil sementara yang akan menentukan rencana selanjutnya dalam menjalankan kolaborasi yang akan dibahas, sebagai berikut :

### **1. Dialog Tatap Muka (Face to Face Dialogue)**

Hasil penelitian penulis maka tahapan proses kolaborasi dengan dialog tatap muka atau *face to face dialog* dalam proses *collaborative governance* pengembangan Agrowisata Edukasi Sungai Jawi di Kota Palembang sudah dilakukan sejak awal dan telah terlaksana dengan baik melalui sosialisasi yang melibatkan masyarakat, pemerintah, kelompok sadar wisata dan juga pihak swasta. Menurut Ansell dan Grash (dalam Syaiful Islamy: 2008), *face to face dialog* atau dialog tatap muka adalah untuk membangun komitmen dan kepercayaan yang dibutuhkan dalam sebuah kolaborasi agar dapat mencapai kesepakatan bersama.

Berdasarkan pernyataan diatas maka penulis menganalisa bahwa dalam pelaksanaan program pengembangan Agrowisata Edukasi Sungai Jawi, maka proses dialog secara tatap muka (*face to face dialogue*) telah dilakukan. Proses ini dilakukan melalui dialog secara langsung dengan aktor-aktor kolaborasi, yang bertujuan untuk terlaksananya visi dan misi erta tujuan bersama dalam proses pengembangan Agrowisata Edukasi Sungai Jawi yaitu melakukan kegiatan rapat koordinasi yang melibatkan Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, Kelompok Sadar Wisata Agrowisata Edukasi Sungai Jawi, masyarakat dan pihak CSR PT Perta-Samtan Gas Litbang Kota Palembang.

### **2. Trust Building (Membangun Kepercayaan)**

Menurut hasil penelitian penulis dapat dikatakan untuk tahapan membangun kepercayaan atau *trust building* dalam kolaborasi pengembangan Agrowisata Edukasi Sungai Jawi ini sudah terlaksana cukup baik antar aktor kolaborasi dilihat dari masyarakat yang bersedia mengalokasikan sebagian lahannya digunakan untuk pengembangan agrowisata ini.

Menurut Ansell dan Grash (dalam Syaiful Islamy: 2008), membangun kepercayaan atau

*trust building* adalah suatu proses yang membutuhkan waktu dan komitmen jangka panjang untuk mencapai hasil kolaborasi yang maksimal.

Berdasarkan pernyataan di atas maka penulis menjabarkan bahwa tahap membangun kepercayaan atau *trust building* dalam proses *collaborative governance* pengembangan Agrowisata Edukasi Sungai Jawi sudah terlaksana dengan baik hal ini disampaikan oleh CSR Pt. Perta-Samtan Gas selaku pihak swasta sehingga dari kepercayaan ini dapat muncul sebuah komitmen kerjasama dalam jangka panjang. Para aktor kolaborasi juga bersepakat bahwa apa yang harus dikelola adalah koordinasi, komunikasi dan informasi. Sebagaimana hal ini sangat diperlukan dalam mewujudkan kesuksesan dalam kolaborasi sehingga tidak dilakukannya pelanggaran komitmen antar aktor kolaborasi.

### **3. Commitment to The Process (Komitmen Terhadap Proses)**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyatakan bahwa komitmen yang dibangun para aktor kolaborasi dalam proses pengembangan Agrowisata Edukasi Sungai Jawi telah dilakukan dengan baik. Komitmen ini berupa perjanjian kerjasamasebagai modal utama dalam realisasi program-program yang sedang dikembangkan atau dijalankan.

Menurut Ansell dan Grash (dalam Syaiful Islamy: 2008), komitmen terhadap proses kolaboratif adalah untuk memastikan bahwa proses negosiasi diyakini akan mengembangkan semua kemungkinan kepentingan dan merupakan sarana untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Berdasarkan pernyataan di atas maka penulis menjabarkan bahwa tahap *commitment to the process* atau komitmen terhadap proses sudah terlaksana dengan baik. Sebagaimana kolaborasi ini dapat bernilai ekonomis dan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Adanya keterlibatan pihak swasta dengan berkomitmen dan mendukung penuh untuk tujuan mengembangkan Agrowisata Edukasi Sungai Jawi. Hal ini dilihat dari dengan adanya kesepakatan berupa nota kesepahaman bersama atau MOU (*Memorandum of Understanding*) secara resmi antara Pemerintah Kecamatan Kalidoni, Kelompok Sadar Wisata dengan pihak swasta yakni PT. Perta Samtan Gas.

### **4. Shared Understanding (Saling Memahami)**

Menurut hasil penelitian, penulis dapat menyatakan bahwa dalam proses *shared understanding* atau saling memahami antar aktor kolaborasi belum dapat terlaksana dengan baik sebagaimana masih kurangnya pemahaman tentang dibentuknya Agrowisata Edukasi Sungai Jawi dikarenakan pembinaan dan pelatihan hanya diberikan pada Kelompok Sadar Wisata, sementara masyarakat hanya diberikan sosialisasi program dan inovasi serta

permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi kedepannya yang disampaikan pada rapat pembinaan

Menurut Ansell dan Grash (dalam Syaiful Islamy: 2008), pada proses kolaboratif aktor kolaborasi **perlu menciptakan** pemahaman bersama mengenai proyek yang sama, tujuan bersama, visi bersama, akal sehat, tujuan **sehat**, tujuan yang jelas, pendekatan dan strategi yang jelas, dan kesepakatan mengenai definisi masalah.

Berdasarkan pernyataan diatas maka penulis mengidentifikasi bahwa tahap *shared understanding* atau saling memahami antar aktor kolaborasi belum terlaksana dengan baik sebagaimana komunikasi sangat penting untuk diperhatikan dan dijaga antara aktor kolaborasi yang terkait. Adanya komunikasi yang baik maka setiap aktor kolaborasi dapat berbagi mengenai pemahaman bersama menyangkut misi yang sama, kesamaan tujuan bersama, tujuan umum, visi bersama yang relevan untuk mengatasi hambatan atau masalah. Pemerintah Kecamatan Kalidoni memberikan pembinaan dengan melakukan rapat koordinasi akan program-program, inovasi baru maupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam satu bulan sekali. Namun dalam pembinaan ini hanya Kelompok Sadar Wisata yang dilibatkan, sementara masyarakat hanya diberikan sosialisasi secara singkat sehingga masih terdapat masyarakat yang kurang memahami maksud dan tujuan dibentuknya Agrowisata Edukasi Sungai Jawi.

### **5. Intermediate Outcomes (Hasil Antara yang Dicapai)**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyatakan bahwa *intermediate outcomes* atau hasil sementara yang dicapai dalam tahapan proses kolaborasi ini telah dapat dilihat dan dirasakan. Hal ini dapat dilihat beberapa pembangunan sarana dan prasana serta produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat setempat. Sebagaimana merupakan hasil yang diperoleh dari kerjasama Pemerintah Kecamatan Kalidoni, kelompok sadar wisata dan pihak swasta melalui pelatihan-pelatihan yang telah diberikan.

Berdasarkan pernyataan diatas maka penulis menganalisa bahwa tahap *intermediate outcomes* atau hasil sementara yang dicapai sudah dapat dilihat dan dirasakan sebagaimana disampaikan oleh Ketua Kelompok Sadar Wisata Agrowisata Edukasi Sungai Jawi hal ini dilihat dari kerjasama yang baik antara pemerintah Pemerintah Kecamatan Kalidoni, kelompok sadar wisata dan pihak swasta melalui pelatihan-pelatihan yang telah diberikan sehingga menghasilkan beberapa pembangunan sebagai daya tarik wisata diantaranya penangkaran keanekaragaman hayati burung simpidan khas sumatra, agro cafe, orchid house serta produksi minuman kesehatan, produksi bibit tanaman dan lain sebagainya.

## **B. Pengembangan Wisata**

Dalam indikator pengembangan wisata, penulis berpedoman pada teori pengembangan wisata yang dikemukakan oleh Robert Christie Mill (2000:168) yang memfokuskan pada empat analisa, sebagai berikut:

### **1. Analisa Pasar**

Menurut hasil penelitian dalam analisa pasar pada pengembangan wisata di Agrowisata Edukasi Sungai Jawi ini telah dilakukan dengan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya promosi secara konvensional maupun digital, perbaikan akses jalan, perbaikan sarana dan prasarana, serta beberapa hal lainnya. Peningkatan ini terus dilakukan pemerintah, kelompok sadar wisata agrowisata bersama dengan pihak swasta sehingga menciptakan pemenuhan syarat sebagai destinasi wisata yang potensial. Menurut Robert Christie Mill (2000:168), analisa pasar dapat dilihat dari beberapa indikator yakni inventaris daya tarik wisatawan, inventaris fasilitas untuk wisatawan, modal transportasi dan pasar.

Berdasarkan pernyataan diatas maka penulis menguraikan bahwa dalam analisa pasar pada pengembangan wisata di Agrowisata Edukasi Sungai Jawi ini belum terlaksana dengan baik sebagaimana dapat dilihat dari tidak ada wahana permainan sebagai fasilitas yang mendukung daya tarik wisata, kondisi akses jalan menuju kawasan agrowisata, serta tingkat promosi yang belum maksimal.

### **2. Analisa Teknik dan Perencanaan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyatakan bahwa analisa teknik dan perencanaan sudah dilakukan dengan sebaik mungkin dari penyediaan lahan, perencanaan yang telah disusun sesuai dengan kesepakatan bersama serta aspek lingkungan dan ekologis yang mendukung pengembangan ini.

Menurut Robert Christie Mill (2000:168), analisa teknik dan perencanaan dapat dilihat dari beberapa indikator yakni komunikasi dan transportasi, ketersediaan lahan untuk pariwisata dan aspek lingkungan dan ekologis. Berdasarkan pernyataan diatas maka penulis menganalisa bahwa dalam analisa teknik dan perencanaan sudah dilakukan dengan baik sebagaimana dapat dilihat dari perencanaan awal yang telah terealisasi serta dukungan masyarakat dengan mengalokasikan lahannya untuk digunakan sebagai pembangunan dalam pengembangan wisata di Agrowisata Edukasi Sungai Jawi.

### **3. Analisa Sosio-Ekonomi**

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyatakan bahwa dalam proses pengembangan wisata dilihat dari analisa sosio ekonomi kondisi sosial masyarakat setempat memiliki pengaruh yang baik namun dalam peningkatan keterampilan belum ada dukungan seperti

pelatihan atau diklat yang dikhususkan untuk masyarakat diluar keanggotaan Kelompok Sadar Wisata Agrowisata Edukasi Sungai Jawi. Menurut Robert Christie Mill (2000:168), analisa sosio ekonomi dapat dilihat dari beberapa indikator yakni penduduk setempat, produk dan pelayanan pendukung.

Berdasarkan pernyataan diatas maka penulis menguraikan bahwa analisa sosio ekonomi di kawasan wisata Agrowisata Edukasi Sungai Jawi belum terlaksana dengan baik meski sudah menghasilkan beberapa produk-produk, namun dari segi keterampilan dan pengetahuan masyarakat masih belum optimal karena dalam praktiknya pelatihan atau diklat hanya diikuti oleh anggota Kelompok Sadar Wisata saja tidak seluruh masyarakat yang berada di kawasan wisata Agrowisata Edukasi Sungai Jawi.

#### **4. Analisa Bisnis dan Hukum**

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyatakan analisa bisnis dan hukum belum dapat terealisasi dengan baik dilihat secara hukum belum adanya legalitas resmi dari pusat yakni Dinas Pariwisata Kota Palembang sebagai destinasi wisata di Kota Palembang. Namun seperti yang disampaikan Kepala Seksi Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Kota Palembang akan segera melakukan observasi langsung dan melakukan peninjauan mengenai beberapa tahapan-tahapan dalam pemenuhan persyaratan penetapan destinasi wisata Agrowisata Edukasi Sungai Jawi secara resmi di Kota Palembang.

Menurut Robert Christie Mill (2000:168), analisa bisnis dan hukum merupakan kegiatan yang meliputi masalah-masalah bisnis dan hukum yang berhubungan dengan pariwisata.

Berdasarkan pernyataan diatas maka penulis menganalisa bahwa dalam analisa bisnis dan hukum belum terlaksana dengan baik secara hukum akan tetapi upaya-upaya legalitas penetapan destinasi wisata secara resmi akan dilakukan kedepannya oleh Dinas Pariwisata Kota Palembang.

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Proses *Collaborative Governance* Pengembangan di Kota Palembang (studi kasus Agrowisata Edukasi Sungai Jawi Kecamatan Kalidoni ), maka dapat disimpulkan bahwa Proses *Collaborative Governance* dalam pengembangan Agrowisata Edukasi Sungai Jawi telah dilakukan dengan melalui tahapan *face to face dialogue* (dialog tatap muka), *trust building* (membangun kepercayaan), *commitment to the process* (komitmen terhadap proses), dan *intermediate outcomes* (hasil antara yang dicapai) yang sudah terlaksana dengan baik. Namun pada tahap *shared understanding* (saling memahami) masih belum terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya pemahaman maksud

dan tujuan dibentuknya Agrowisata Edukasi Sungai Jawi. Sedangkan pengembangan wisata di Agrowisata Edukasi Sungai Jawi telah berjalan dengan adanya korelasi antara Agrowisata dan UMKM dalam pengembangan dan penjualan produk. Tetapi dalam beberapa tahapan pengembangan wisata masih belum terlaksana dengan optimal, karena masih terdapat kekurangan baik dari akses jalan, penawaran-penawaran kerjasama dengan pihak luar dan belum adanya legalitas resmi dari Pemerintah Kota Palembang yakni Dinas Pariwisata Kota Palembang sebagai salah satu destinasi wisata Agrowisata di Kota Palembang.

### Daftar Pustaka

- Fajri, M. 2018. *Collaborative Governnace dalam Perencanaan Ruang Terbuka di Kota Malang Tahun 2017*. Universitas Brawijaya.
- Karsonadi, J. 2019. *Collaborative Governance dalam Pengembangan Agrowisata Dilem Wills di Desa Dompok, Kabupaten Trenggalek*, Universitas Brawijaya.
- Nugroho, M., F. Amar, dan Vishnu Juwono. 2020. *Collaborative Governance and Housing for Low-Income Communities. Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management*. <https://ibima.org/accepted-paper/collaborative-governance-and-housing-for-low-income-communities-in-indonesia/>
- Newman J., Barnes M., Sullivan H. & Knops A. 2004. *Public Participation And Collaborative Governance*. *Journal of Social Policy*, 33 (2), 203–223. <https://doi.org/10.1017/S0047279403007499>
- Paputungan, H.F, Z.Tamod, D.D.Pioh. 2017. *Strategi Pengelolaan Agrowisata Kebun Kopi di Desa Purworejo Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur*. Manado. *Jurnal Agri-Sosio Ekonomi*. Vol. 13 (3A): 77-86.
- Reilly, Thom. 1998. *Communities in Conflict: Resolving Differences Through Collaborative Efforts in Environmental Planning and Human Service Delivery*. *The Journal of Sociology & Social Welfare*: Vol. 25: Iss. 3, Article 8. <https://doi.org/10.15453/0191-5096.2510>
- Reilly, Thom. 2001. *Collaboration in Action: an Uncertain Process*. *Administration in Social Work*, 25 (1). [https://doi.org/10.1300/J147v25n01\\_06](https://doi.org/10.1300/J147v25n01_06)
- Setiawati. 2020. *Collaborative Governance dalam Peningkatan Hasil Produktivitas Kakao di Kecamatan Ngapa Kota Makassar*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Sudarmo. 2009. *Elemen-Elemen Collaborative Leadership dan Hambatan- Hambatan bagi Pencapaian Efektivitas Collaborative Governance*. *Jurnal Spirit Publik*. Volume 5; 2. [https://unsla-dev.uns.ac.id/neounsla/index.php?p=show\\_detail&id=21358&keywords=](https://unsla-dev.uns.ac.id/neounsla/index.php?p=show_detail&id=21358&keywords=)

- Smith, Sarah. 2020. *Building Shared Understanding in Collaborative Governance: A Study of Cross-Sector Partnerships in Canada*. Kanada: Universitas British Columbia.
- Abimanyu, Soli dkk. 2008. *Strategi Pembelajaran*, Jakarta : Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Adisasmita, Rahardjo.2010.*Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*.Yogyakarta: Graha Ilmu
- Agus Suprijono. 2009. *Cooperative Learning, Teori & Aplikasi PAIKEM*.Surabaya: Pustaka Pelajar.
- Arini, T., 2017. *Key Performance Indicator untuk Perusahaan Jasa*. Jakarta: Penerbit Raih Asa Sukses.
- Darmadi, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial* Bandung:Alfabeta.
- Handayaniingrat, Soewarno. 2011. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Islamy, Syaiful. (2018). *Collaborative Governance: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Moleong, Lexy. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Widodo, Joko. 2001. *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. Malang: CV.Citra Malang.
- Yoeti, Oka A, 2008. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Pradnya Paramita: Jakarta.

## ***Collaborative Governance: Model Implementasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Kota Palembang***

**Delfiazi Puji Lestari<sup>1</sup>, Rusdi<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Administrasi Negara STIA & Pemerintahan Annsisa Dwi Salfarizi, Palembang, Indonesia.

<sup>2</sup>Prodi Ilmu Pemerintahan STIA & Pemerintahan Annsisa Dwi Salfarizi, Palembang, Indonesia.  
(email: fiazuhdi@gmail.com; rusdihomci@gmail.com)

### **Abstrak**

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (United Nations, 1996). Terdapat tiga pilar utama pengentasan kemiskinan ekstrem yaitu Pilar Komitmen Pemerintah, Pilar Konvergensi Program, Anggaran dan Sasaran, dengan melakukan Pilar Pemantauan dan Evaluasi. Namun Pada Tahun 2022 terdapat 33.800 ribu keluarga dengan total 167.800 orang kategori miskin ekstrem di kota Palembang. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi pengentasan kemiskinan ekstrem dengan kerangka Collaborative Governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi dengan pendekatan model Hexahelix belum berjalan dengan baik ditandai dengan belum adanya kesepahaman antar stakeholder serta kurangnya komunikasi dan masih tingginya ego sektoral.

### **Kata kunci:**

kemiskinan ekstrem; collaborative governance

### **Pendahuluan**

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB, 1996). Berdasarkan Bank Dunia, Penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity), atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan (Bank Dunia, 2022). Secara sederhana apabila dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), maka jika kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya di bawah Rp1.288.680 per keluarga/bulan, maka keluarga tersebut termasuk kategori miskin ekstrem. Identifikasi penduduk miskin ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi. Istilah collaborative governance muncul ketika Old Public Administration (OPA) diganti dengan paradigma baru yaitu New Public Management (NPM). Istilah pemerintahan kemudian diubah menjadi pemerintah. Perubahan terminologi ini bertujuan

untuk mendemokratisasi administrasi publik, karena penggunaan istilah “pemerintah” lebih menekankan pada lembaga negara, tetapi transisimenuju governance lebih tergantung pada partisipasi lembaga swadaya masyarakat, yaitulembaga swadaya masyarakat. Pemangku kepentingan dan publik. Hal ini senada dengan pendapat Ansell dan Gash (2008) yang dikutip Sunu, dkk (2020:41) bahwa Collaborative adalah gaya manajemen yang melibatkan langsung pemangku kepentingan di luar pemerintah ataunegara, dan berorientasi pada konsensus dan konsultasi dalam proses pengambilan keputusan bersama untuk menetapkan atau melaksanakan kebijakan dan program publik.

Model kolaborasi mencakup partisipasi, motivasi, tujuan bersama, kepercayaan internal, dan komitmen terhadap proses sebagai elemen utama, sementara konsensus, monitoring, transparansi, interdependensi, dan kepemimpinan dianggap sebagai faktor pendukung kolaborasi. Dalam konteks model kolaborasi birokrasi, terdapat beberapa aspek kunci, yaitu: (a) Motivasi; (b) Interdependensi, di mana orang saling bergantung satu sama lain; (c) Kepercayaan, yang mencakup legitimasi internal untuk kepentingan bersama; dan (d) Kepemimpinan, yang merupakan kemampuan seseorang untuk memimpin dan mengajak orang lain (Mulyaningsih, 2023). Kolaborasi merupakan bentuk kerjasama dan interaksi di antara berbagai elemen, termasuk individu, lembaga, dan pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kerjasama ini, mereka saling mengalami akibat dan mendapatkan manfaat. Nilai-nilai yang menjadi dasar kolaborasi meliputi kesamaan tujuan, persepsi yang serupa, kemauan untuk menjalani proses bersama, memberikan manfaat satu sama lain, kejujuran, kasih sayang, dan berlandaskan pada nilai-nilai masyarakat (Astuti, 2020). Pemerintah mengutamakan pengurangan kemiskinan ekstrem. Penyampaian Presiden Republik Indonesia pada Maret 2020 menetapkan tujuan untuk menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada tahun 2024. Ukuran Kemiskinan ekstrem menggunakan metode kemiskinan absolut dengan mengikuti definisi World Bank yaitu nilai PPP di bawah 1,9 dolar per hari (TNP2K, 2022).

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif.

## Hasil dan Pembahasan

### Kondisi awal

Berdasarkan indikator kondisi awal, proses kolaborasi dalam pengentasan kemiskinan ekstrem sudah memenuhi indikator tersebut dalam konteks faktor lingkungan. Hal ini dibuktikan bahwa bentuk kolaborasi yang dibangun dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang penanggulangan kemiskinan. tentang Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan di provinsi Sumatera Selatan dengan demikian struktur TKPK kota Palembang sebetulnya sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, Namun masih ada satu unsur yang belum terdapat dalam Struktur TKPK tersebut yaitu dari unsur media massa. Dengan demikian, dari hasil penelitian dan temuan dilapangan jika dikaitkan dengan teori menurut Bryson, Crosby, dan Stone (2006) dapat disimpulkan bahwa sinergitas yang dibangun pemerintah dalam kolaborasi pengentasan kemiskinan ekstrem di kota Palembang dalam faktor lingkungan ini belum berjalan. Jika dikaitkan dengan pendekatan model hexahelix, kolaborasi tersebut belum bisa dikatakan maksimal, karena belum melibatkan semua pemangku kepentingan seperti media massa. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa adanya faktor kegagalan pengentasan kemiskinan ekstrem sendiri yaitu tidak dijalankannya fungsi dari TKPK tidak dijalankan sesuai dengan regulasi. Jika dilihat dalam konteks kolaborasi yang berjalan dengan adanya regulasi tersebut, belum maksimalnya eksistensi tim tersebut sesuai tupoksi masing-masing lembaga. Oleh karena itu jika dikaitkan dengan teori menurut Bryson, Crosby, dan Stone (2006), maka hasil penelitian dan temuan dilapangan dapat disimpulkan bahwa kolaborasi yang dibentuk dalam pengentasan kemiskinan ekstrem baru sekedar koordinasi, namun fungsi dari tim itu belum terdapat pemberdayaan berdasarkan fungsi dari setiap anggota yang terlibat.

### Komponen Proses

Seluruh stakeholder membuat kesepakatan yang lebih baik dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di kota Palembang melalui penepatan data sasaran yang dilakukan namun keterlibatan stakeholder tersebut belum dilakukan sesuai tupoksi. Temuan lapangan dapat kesimpulan sementara bermuara kesimpulan sementara bahwa dari kesepakatan awal yang dibuat ternyata tidak ada kesepahaman antar stakeholder terkait kolaborasi yang dilakukan. Selanjutnya hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya fungsi koordinasi karena ketua tim tidak pernah melakukan koordinasi secara langsung dalam setiap adanya Rapat Koordinasi. Setiap stakeholder yang terlibat mempunyai pemimpin masing-masing sehingga pemimpin formal ini dapat membantu dalam koordinasi dalam pengentasan kemiskinan ekstrem pada program pengentasan kemiskinan ekstrem di kota Palembang. Hal ini jika dikaitkan dengan

teori menurut Bryson, Crosby, dan Stone (2006) disimpulkan bahwa kepemimpinan yang ada dalam TKPK. Sementara itu berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi yang dibentuk sudah terjalin melalui surat serah terima yang dilakukan oleh kolabolator yaitu antara BAPPEDA kepada BPS. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi yang dilakukan cukup maksimal.

Proses membangun kepercayaan dalam proses kolaborasi antara pihak terlibat dalam pengentasan kemiskinan ekstrem berjalan cukup baik namun terdapat pihak yang tidak dilibatkan seperti Media Massa. Masih ada keraguan dan ketidakpercayaan terhadap informasi maupun usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini didasari akibat kurangnya komunikasi dan masih tingginya ego sektoral dari masing-masing pihak, kedepannya perlu dibangun rasa percaya dan komunikasi saat kolaborasi dilakukan. Pengelolaan konflik ternyata masih belum berjalan dengan baik, beberapa konflik dalam TKPK yang belum diselesaikan, sehingga perlu adanya advokasi ke semua anggota TKPK agar kolaborasi yang dilakukan terjadi secara maksimal. Dari segi perencanaan pengentasan kemiskinan ekstrem telah memiliki perencanaan dari pemerintah sendiri namun dalam pelaksanaan rencana aksi ternyata belum maksimal dalam menjalankan rencana aksinya dalam membantu pengentasan kemiskinan ekstrem. Dengan demikian, berdasarkan teori menurut Bryson, Crosby, dan Stone (2006) dapat disimpulkan perencanaan sudah terbentuk akan tetapi kurang terkonsep oleh kolaborator. Hal ini dikuatkan dengan temuan dilapangan yaitu semua program dalam pengentasan kemiskinan ekstrem dirancang oleh OPD saja, padahal harusnya NGO, Akademi, Media Massa terlibat dalam proses perencanaan sampai dengan laporan.

### **Struktur dan Tata Kelola**

Berdasarkan Konteks Struktur ditemukan bahwa konsep kolaborasi hexahelix masih kurang maksimal dimana keterlibatan dari beberapa stakeholder belum terbentuk secara jelas konteks struktural nya. Hal ini tenggarai karena masih adanya stakeholder yang tidak tau bagaimana tugas dan fungsi dari masing-masing pihak yang terlibat. Selanjutnya Efektivitas dari kolaborasi yang dilakukan sangat kurang. Hal ini didasari oleh komunikasi yang dilakukan oleh para pihak terkait kejelasan dalam TKPK dibentuk dan terlihat dari rapat koordinasi yang dilakukan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sudah terbentuk konfigurasi, namun kejelasan hanya muncul pada hal yang dilakukan oleh OPD dikarenakan komunikasi yang cukup bagus terjadi dalam OPD saja. Kemudian dalam kolaborasi pengentasan kemiskinan ekstrem di kota Palembang tertuang dalam regulasinya dimana fungsi dan tugas yang harusnya dijalankan sesuai dengan wewenang masing-masing. Namun belum tergambar jelas dalam pelaksanaan kegiatannya harusnya sejak awal, proses sampai dengan hasil. Harusnya kejelasan TKPK secara

fungsi harus dijalankan sehingga kolaborasi yang dilakukan dapat dilakukan dengan baik dan terarah.

### **Kontingensi dan Kendala**

Jenis Kolaborasi yang dilakukan oleh TKPK sesuai Surat keputusan bupati dengan konsep pentahelix. Namun dalam kolaborasi yang terjadi dilapangan tidak bisa dikatakan kolaborasi karena fungsi dari TKPK sendiri kurang baik. Selanjutnya Ketidakseimbangan pengaruh/kekuasaan sangat berpengaruh dan kurang baik, hal ini didasari karena profesionalisme antara penasihat dan ketua kurang begitu baik. Selain itu persaingan logika kelembagaan dapat dikatakan tidak terlalu berpengaruh, hal ini didasari karena setiap stakeholder mempunyai program yang sinkron.

### **Hasil dan Akuntabilitas**

Nilai publik harusnya dapat dilihat oleh masyarakat sehingga perlu adanya open source yang dibuka oleh TKPK bersama BAPPEDA sehingga data yang diberikan perlu jelas dalam kevalidannya. Hal ini dilihat dari kondisi awal dari kolaborasi dalam pengentasan kemiskinan efek pertama ini dilihat dari stakeholder yang dilibatkan dalam konsep hexahelix. Kedua dalam proses kolaborasi yang dilakukan harusnya TKPK sesuai dengan tugas dan fungsi namun ternyata fungsi ini belum dilaksanakan dengan baik. Ketiga perlu adanya evaluasi yang dilakukan dalam TKPK ini karena konflik yang terjadi harus dapat diselesaikan dengan baik. Dengan demikian, dari hasil penelitian dan temuan dilapangan jika dikaitkan dengan teori menurut Bryson, Crosby, dan Stone (2006) belum cukup terlihat hasil dari efek pertama, kedua dan ketiga. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak BAPPEDA ditemukan bahwa musyawarah bersama sesama OPD selalu dilakukan namun belum melibatkan stakeholder lain seperti akademisi, media massa, dunia usaha, NGO dan masyarakat. Padahal pihak-pihak terkait jika dilibatkan maka mereka akan membantu dari awal, proses sampai adanya laporan. Jika dilihat dari kondisi awal dari kolaborasi dalam pengentasan kemiskinan berdasarkan konsep pentahelix sudah terjalin akan tetapi dalam prosesnya konsep ini belum berjalan dengan baik dan maksimal. Keharusan stakeholder dalam melakukan berbagai koordinasi yang kompleks memang seringkali menimbulkan berbagai polemic dan tidak mudah dilakukan. Mengingat para stakeholder memiliki posisi dan kepentingan yang beragam (Kumalasari et al., 2019).

### **Kesimpulan**

Berdasarkan kondisi awal sinergitas yang dibangun pemerintah dalam kolaborasi pengentasan kemiskinan ekstrem di kota Palembang dalam faktor lingkungan ini belum berjalan. Jika dikaitkan dengan pendekatan model hexahelix, kolaborasi tersebut belum bisa dikatakan

maksimal, karena belum melibatkan semua pemangku kepentingan seperti media massa. Kolaborasi yang dibentuk dalam pengentasan kemiskinan ekstrem sebatas hubungan koordinasi, akan tetapi fungsi pemberdayaan dari setiap anggota yang terlibat belum dilakukan. Sementara itu mekanisme penghubung kolaborasi sudah berjalan dengan baik.

Jika dilihat dari Komponen Proses, maka ditemukan belum adanya kesepahaman antar stakeholder terkait kolaborasi yang dilakukan. Kepemimpinan yang ada dalam TKPK Masih kurang maksimal karena ketua tim tidak pernah melakukan koordinasi secara langsung dalam setiap rapat Koordinasi. Legitimasi yang dibentuk sudah terjalin melalui surat serah terima yang dilakukan oleh kolaborator. Sementara itu masih terdapat kurangnya akibat kurangnya komunikasi dan masih tingginya ego sektoral dari masing-masing pihak, selanjutnya Pengelolaan konflik belum berjalan baik ditandai masih adanya konflik dalam TKPK yang belum diselesaikan. Perencanaan sudah terbentuk akan tetapi kurang terkonsep oleh kolaborator. Stakeholder seperti NGO, Akademi, Media Massa belum terlibat dalam proses perencanaan sampai dengan laporan. semua program dalam pengentasan kemiskinan ekstrem dirancang oleh OPD saja. Dalam konsep kolaborasi hexahelix masih kurang maksimal. Namun dalam konsep hexahelix belum bisa dikatakan baik, karena keterlibatan dari beberapa stakeholder tidak adanya konteks struktural yang jelas. Struktur sudah terkonfigurasi, namun dalam hal yang dilakukan oleh OPD karena komunikasi yang cukup bagus. Tata Kelola dalam kolaborasi pengentasan kemiskinan ekstrem di kota Palembang belum berjalan baik. Dimana keanggotannya belum tergambar jelas dan kegiatannya harusnya tidak dilakukan dari awal, proses sampai dengan hasil. Jenis Kolaborasi yang dilakukan oleh TKPK adalah konsep pentahelix sementara itu profesionalisme antara penasihat dan ketua kurang begitu baik namun persaingan logika kelembagaan dapat dikatakan tidak terlalu berpengaruh. Perlu adanya opensource yang harus dilakukan oleh TKPK bersama BAPPEDA yang memuat data yang diberikan yang jelas

### Daftar Pustaka

- Anderson, J. (2008). *Developing a route to market strategy for mobile communications in rural India: An interview with Gurdeep Singh, Operations Director, Uttar Pradesh, Hutch India. International Journal of Emerging Markets*, 3(4), 339–347.  
<https://doi.org/10.1108/17468800810906057>
- Anderson, J. E. (2003). *Public policymaking: an introduction*. In *Public policymaking: an introduction*.

- Anggraini, S., Safriyani, E., & Harnawansyah, M. F. (2023). *Pengelolaan Sampah Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Bukit Sulap Kota Lubuklinggau)*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3).
- Badan Pusat Statistik Kota Lubuklinggau. (2024). *Kota Lubuklinggau dalam Angka*. Bryson, J. M. (2004). *Essay 1 Reading Bryson 2004.pdf*. *Public Management Review*, 6(1). Budiarmo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset Memilih Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djani, W. (2022). *Administrasi Publik (Teori dan Pergeseran Paradigma ke era Digital)*. In 1. Freeman, E. R., & Phillips, R. A. (2002). *Stakeholder Theory: A Libertarian Defense*. *Business Ethics Quarterly*, 12(3). <https://doi.org/10.2307/3858020>
- Horton, P. B., & Hunt, C. L. (1999). *Sosiologi, Jilid 1 Edisi Keenam*. Penerbit Erlangga.
- Karjoko, L., Handayani, I. G. A. K. R., Jaelani, A. K., & Hayat, M. J. (2022). *Indonesia's Sustainable Development Goals Resolving Waste Problem: Informal to Formal Policy*. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 17(2). <https://doi.org/10.18280/ijstdp.170230>
- Kingdon, J. W. (2014). *Pearson new international edition : Agendas, Alternatives, and Public Policies John W. Kingdon Second Edition*. In British Library Cataloguing-in-Publication Data.
- Kurniawan, T. (2007). *Pergeseran Paradigma Administrasi Publik: Dari Perilaku Model Klasik dan NPM ke Good Governance*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(23).
- Lindblom, C. E. (1959). *The Science of Muddling Through*. *Public Administration Review*, 77– 88.
- Mahyudin, R. P. (2017a). *Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah Dan Dampak. Teknik Lingkungan*, 3, 3(1).
- Mahyudin, R. P. (2017b). *Study of waste problems and landfill enviromental impact*. In *Jukung Jurnal Teknik Lingkungan* (Vol. 3, Issue 1).
- Maksudi, B. I. (2017). *Dasar-dasar Administrasi Publik, dari Klasik ke Kontemporer*. In Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Melikoglu, M., Lin, C. S. K., & Webb, C. (2013). *Analysing global food waste problem: Pinpointing the facts and estimating the energy content*. *Central European Journal of Engineering*, 3(2). <https://doi.org/10.2478/s13531-012-0058-5>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2016). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. In *Nursing standard (Royal College of Nursing (Great Britain) : 1987)* (Vol. 30, Issue 25).

- Pamungkas, R. C. P., Endah, N., & Satria, T. R. (2021). *Perencanaan Sel Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan Sistem Controlled Landfill Pada TPA Lubuk Binjai - Lubuklinggau*. *Jurnal Teknik ITS*, 10(2). <https://doi.org/10.12962/j23373539.v10i2.68166>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Prasetyo, E. (2023). *Kurangi Tumpukan Sampah, DLH Lubuklinggau Tambah Dua Trip Angkutan*. RMOL SUMSEL. <https://www.rmolsumsel.id/kurangi-tumpukan-sampah-dlh-lubuklinggau-tambah-dua-trip-angkutan>
- Savas, E. (2007). *Privatization and Public-Private Partnerships for Local Services*. In *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy*, Second Edition (Print Version). <https://doi.org/10.1201/noe1420052756.ch318>
- Stewart, Jr., J., Hedge, D. M., & Lester, J. P. (2008). *Public Policy: An Evolutionary Approach*. In *Public Policy: An Evolutionary Approach*.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In Rake Sarasin (Issue March).
- Supriyadi, E. I. (2021). *Pergeseran dalam Paradigma Ilmu Administrasi Publik*. *Jurnal RASI*, 3(1). <https://doi.org/10.52496/rasi.v3i1.117>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. (n.d.).
- Waluyo, & Kharisma, D. B. (2023). *Circular economy and food waste problems in Indonesia: Lessons from the policies of leading Countries*. *Cogent Social Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2202938>
- Winarno, B. (2004). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo.
- Zaili, M. (2024). *Eksekutif DPRD Kota Lubuklinggau Tetapkan Propemperda Kota Lubuklinggau 2024*. *Kilas Nusantara*. <https://kilasnusantara.id/2024/01/eksekutif-dprd-kota-lubuklinggau-tetapkan-propemperda-kota-lubuklinggau-2024/>

## **Collaborative Governance Dinas Perhubungan Kota Palembang: Penerapan dan Penegakkan Retribusi**

**M. Wicky Dwi Nando<sup>1</sup>, Rika Apriliani<sup>2</sup>, Siti Zubaidah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>STIA Bala Putra Dewa, Palembang, Indonesia. (email: muhammadwicky2000@gmail.com)

### **Abstrak**

Perhubungan Kota Palembang melalui pendekatan Collaborative Governance. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dan penegakkan retribusi di Kota Palembang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Kolaborasi antara pihak-pihak tersebut tercermin dalam koordinasi dan komunikasi yang efektif, meskipun masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya dan resistensi dari masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model Collaborative Governance mampu meningkatkan efektivitas penerapan dan penegakkan retribusi, namun membutuhkan komitmen dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait. Rekomendasi yang diberikan mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan regulasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya retribusi sebagai sumber pendapatan daerah.

### **Kata kunci:**

kolaboratif pemerintahan; kota Palembang; dinas perhubungan; retribusi

### **Pendahuluan**

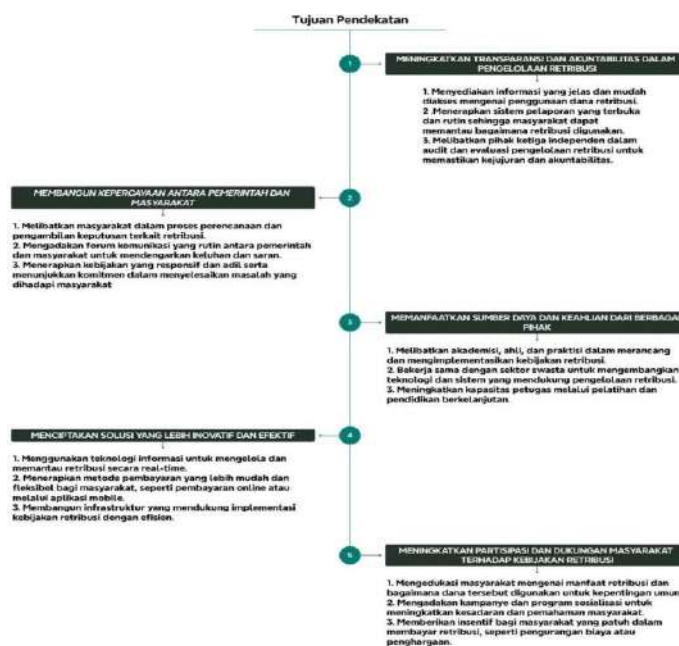
Kota Palembang, sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam pengelolaan transportasi dan lalu lintas. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan ini adalah penerapan dan penegakan retribusi (Meads et al., 2017), yang menjadi tanggung jawab utama Dinas Perhubungan Kota Palembang. Namun, dalam pelaksanaannya, pendekatan tradisional yang bersifat top-down (Gugu & Dal Molin, 2016) dan terpusat pada pemerintah seringkali menghadapi berbagai kendala (Keyim, 2018). Banyak permasalahan yang ada berhubungan kapasitas dengan sistem layanan untuk beradaptasi dan memanfaatkan pengetahuan (Li et al., 2018).

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan dan penegakan retribusi daerah, seperti masyarakat seringkali menolak kebijakan retribusi karena dianggap sebagai beban tambahan. Kurangnya sosialisasi mengenai manfaat retribusi bagi peningkatan pelayanan publik juga dapat menyebabkan resistensi ini, pengawasan yang lemah dan kurangnya penegakan aturan menyebabkan kebijakan retribusi sulit dijalankan secara efektif (Li et al., 2022). Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya petugas pengawas, minimnya teknologi pendukung, dan

ketidakjelasan sanksi bagi pelanggar, sumber daya manusia dan infrastruktur yang terbatas dapat menghambat implementasi kebijakan retribusi (Sandover, 2020). Misalnya, kurangnya tenaga ahli, fasilitas yang tidak memadai, dan minimnya anggaran untuk mendukung operasional kebijakan tersebut, masyarakat mungkin tidak menyadari pentingnya retribusi dalam mendukung pelayanan publik (Widianingsih et al., 2021). Edukasi yang kurang mengenai bagaimana retribusi digunakan untuk pembangunan dan peningkatan layanan publik dapat menyebabkan rendahnya partisipasi dan kepatuhan masyarakat, dan implementasi kebijakan retribusi seringkali memerlukan kerjasama antara berbagai instansi pemerintah. Koordinasi yang lemah dapat menyebabkan kebijakan tidak berjalan optimal, misalnya, kurangnya sinkronisasi data, ketidaksepeahaman mengenai prosedur, dan lambatnya respon dalam menyelesaikan masalah yang muncul (M. Wang & Peng, 2023).

Dalam mendukung pelayanan publik yang terukur, transparan, dan akuntabel, penerapan administrasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sangat penting (Situmeang, 2024). Administrasi sebagai fungsi manajemen birokrasi memicu keseriusan dan ketepatan dalam bekerja (Cabral & Krane, 2018), sehingga dinas perhubungan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan efisien (Ran & Qi, 2018). SOP membantu memastikan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik secara konsisten dan efisien (Hafer, 2018).

Collaborative Governance melibatkan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil (Ansell & Gash, 2008). Pendekatan ini bertujuan untuk:



Dalam konteks Kota Palembang, penerapan Collaborative Governance oleh Dishub dalam hal retribusi merupakan langkah strategis untuk mengatasi tantangan yang ada (Quayle et al., 2019). Ini melibatkan pergeseran dari model pemerintahan tradisional ke pendekatan yang lebih partisipatif dan berorientasi pada kemitraan (Clarke, 2017). Inisiatif ini juga sejalan dengan tren global menuju tata kelola perkotaan yang lebih cerdas dan berkelanjutan (Meijer & Bolívar, 2016). Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, Dishub Kota Palembang berpotensi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan retribusi sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat (Steels, 2015; van der Heijden, 2015).

Namun, implementasi Collaborative Governance bukanlah tanpa tantangan. Diperlukan perubahan mindset (Cheng et al., 2015), peningkatan kapasitas kelembagaan (Kim & Siddiki, 2018), dan komitmen jangka panjang dari semua pihak yang terlibat (Getha-Taylor et al., 2019). Keberhasilan pendekatan ini akan sangat bergantung pada kemampuan Dishub Kota Palembang untuk membangun dan memelihara hubungan yang produktif dengan berbagai pemangku kepentingan (Berends et al., 2016). Selain itu, perlu ada upaya terus-menerus untuk mengatasi hambatan koordinasi antar lembaga dan mengintegrasikan berbagai perspektif guna menciptakan solusi yang efisien (Galloway et al., 2013).

Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa atau layanan tertentu yang disediakan oleh pemerintah (Amoah et al., 2023). Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Rum, 2018) seperti, Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh masyarakat (Massam, 2002). Contohnya retribusi parkir, retribusi pelayanan kesehatan, dan retribusi pemakaian kekayaan daerah (Osborne et al., 2013). Retribusi Jasa Usaha yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta (Klievink et al., 2016). Contohnya seperti retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi pasar grosir dan pertokoan, serta retribusi pemakaian aset daerah (Abbiasov & Sedov, 2023) dan Retribusi Perizinan Tertentu yang dikenakan atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan (Heinze, 2001), pengaturan (Whitelaw et al., 2001), pengendalian (Dougherty, 1995), dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam (Venables, 2016), atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum (Cordes, 1999). Contohnya retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, dan retribusi izin gangguan (Rosa- Jiménez et al., 2017).

Tujuan retribusi meliputi beberapa aspek penting dalam pengelolaan pemerintahan (Type & Milner, 2024) dan pelayanan kepada masyarakat. Pertama, retribusi berfungsi untuk

meningkatkan pendapatan asli daerah (Aas et al., 2018). Dengan mengumpulkan dana dari masyarakat yang memanfaatkan layanan atau fasilitas tertentu (Benjamin et al., n.d.), pemerintah daerah dapat menggunakannya untuk membiayai kegiatan operasional (J. Wang et al., 2021) dan pembangunan daerah (Gennaioli et al., 2011). Hal ini mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat (Xu et al., 2016) dan mendorong kemandirian finansial daerah (Kuroda & Kawai, 2003). Kedua, retribusi bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan public (Perry, 2020). Dana yang terkumpul digunakan untuk pemeliharaan, perbaikan, peningkatan berbagai layanan dan fasilitas publik seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur (Colgrove, 2010). Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati layanan yang lebih baik dan memadai. Ketiga, retribusi berperan dalam mengatur dan mengendalikan aktivitas masyarakat (Aiken et al., 2011). Melalui retribusi perizinan tertentu, pemerintah dapat memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak merugikan kepentingan umum, dan teratur dengan baik (Hamiltont, 1972). Hal ini juga mencakup pengendalian penggunaan sumber daya, alam, pemanfaatan ruang, dan kegiatan usaha (Holling and Meffe.Pdf, 2005). Keempat, retribusi membantu mencapai keadilan social (Bradley, 2004). Dengan membebankan biaya layanan publik kepada mereka yang secara langsung memanfaatkannya, retribusi memastikan bahwa beban biaya tersebut didistribusikan secara adil. Ini berarti bahwa masyarakat yang lebih banyak menggunakan atau memperoleh manfaat dari layanan publik turut berkontribusi lebih besar dalam pembiayaannya (Prihasta & Suswanta, 2020).

## **Metode**

Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi menjelaskan penelitian kualitatif adalah penelitian dengan tujuan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subyek penelitian secara menyeluruh dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa (Dale et al., 2012), pada konteks khusus yang dialami serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Guariso et al., 2023). Metode penelitian kualitatif dengan desain studi kasus akan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kolaborasi antar pihak yang terlibat serta tantangan dan solusi yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dan penegakkan retribusi di Kota Palembang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Start implementation at the Palembang City Transportation Department

Di era modern ini, Collaborative Governance di Dinas Perhubungan Kota Palembang memperlihatkan bagaimana kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dapat menghasilkan sistem yang lebih efektif dan responsif dalam pengelolaan sektor perhubungan, termasuk dalam penerapan dan penegakan retribusi. Collaborative Governance atau Tata Kelola Kolaboratif adalah pendekatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk bekerjasama dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan, dan menegakkan aturan. Dinas Perhubungan Kota Palembang memulai inisiatif dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya retribusi melalui berbagai kampanye informasi, untuk memastikan pemahaman yang mendalam mengenai manfaat dan prosedur pembayaran retribusi. Mereka berkolaborasi dengan perusahaan teknologi untuk menciptakan solusi digital seperti aplikasi pembayaran dan sistem pemantauan, yang mempermudah proses retribusi dan meningkatkan transparansi.

Dinas Perhubungan menyusun dan menerapkan peraturan mengenai tarif, prosedur pembayaran, dan sanksi bagi pelanggaran, untuk memastikan kepatuhan dan ketertiban dalam pengelolaan retribusi. Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, mereka juga melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala serta melakukan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan sistem. Dana yang diperoleh dari retribusi digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur transportasi, yang secara langsung meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat.

### 2. Implementation and Enforcement of the Palembang City Levy

Penegakan retribusi yang efektif sangat bergantung pada konsistensi dalam penerapan sanksi, transparansi dalam proses penegakan hukum, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mematuhi aturan. Adanya sanksi bagi pelanggar yang berfungsi untuk mencegah atau menghalangi tindakan yang tidak diinginkan melalui ancaman dan penerapan hukum. Masih ada tantangan dalam konsistensi penegakan, terutama dalam hal pengawasan dan tindakan terhadap pelanggaran kecil. Pemerintah harus memastikan bahwa semua pelanggar mendapatkan sanksi yang sesuai, tanpa diskriminasi. Transparansi dalam proses penegakan hukum juga harus ditingkatkan untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Dalam konteks Dinas Perhubungan Kota Palembang, penerapan retribusi adalah strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus menjamin keberlanjutan layanan transportasi dan infrastruktur publik. Berikut adalah beberapa aspek penting yang menunjukkan efektivitas kolaborasi:

1. Semua pihak yang terlibat memiliki visi dan misi yang sama dalam meningkatkan layanan transportasi dan mengoptimalkan penerimaan retribusi.
2. Melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga swadaya masyarakat untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel.
3. Menyusun dan menerapkan regulasi yang jelas mengenai retribusi, termasuk tarif, prosedur pembayaran, dan sanksi bagi pelanggaran.
4. Menyediakan informasi yang jelas dan terbuka mengenai proses retribusi dan penggunaan dana yang terkumpul, serta memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif.

### **3. Evaluation of Implementation and Enforcement of Levies**

Penerapan dan penegakan retribusi di Kota Palembang sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk mencapai tingkat efektivitas yang lebih tinggi. Collaborative governance, yang melibatkan berbagai pihak, merupakan kunci dalam menciptakan sistem yang transparan, adil, dan efektif. Konsep ini mengacu pada kerjasama erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengambilan keputusan, perancangan kebijakan, dan pelaksanaan program-program publik. Dalam konteks retribusi, kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan keadilan dalam pemungutan dan penggunaan dana serta untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam prosesnya.

Sebagian besar responden merasa bahwa sanksi yang diterapkan sudah cukup adil, namun ada saran untuk meningkatkan transparansi dalam penegakan hukum. Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan masih dianggap kurang optimal, meskipun Dinas Perhubungan telah berusaha melibatkan masyarakat. Tingkat partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan retribusi perlu ditingkatkan agar mendapatkan masukan yang lebih beragam. Kolaborasi antara Dinas Perhubungan, pihak swasta, dan organisasi masyarakat dianggap baik, tetapi masih ada potensi untuk pengembangan lebih lanjut. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan dapat memberikan masukan berharga, memperkuat sistem, dan mengatasi berbagai tantangan yang ada. Evaluasi rutin terhadap efektivitas penegakan retribusi diperlukan untuk menilai tingkat kepatuhan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penerapan dan penegakan retribusi.

Penegakan retribusi dianggap cukup efektif, dengan sanksi bagi pelanggar berfungsi untuk mencegah tindakan yang tidak diinginkan melalui ancaman dan penerapan hukum. Namun, masih terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi penegakan, terutama dalam hal pengawasan dan penanganan pelanggaran kecil. Sebagian besar responden menilai sanksi yang diberikan cukup adil, tetapi ada saran untuk meningkatkan transparansi dalam proses penegakan

hukum. Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan masih dianggap kurang optimal, meskipun Dinas Perhubungan telah berusaha melibatkan masyarakat. Tingkat partisipasi dalam pembuatan kebijakan retribusi perlu ditingkatkan untuk mendapatkan masukan yang lebih beragam. Kolaborasi antara Dinas Perhubungan, pihak swasta, dan organisasi masyarakat dinilai baik, namun masih ada potensi untuk pengembangan lebih lanjut. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penerapan dan penegakan retribusi.

## Kesimpulan

Collaborative Governance di Dinas Perhubungan Kota Palembang menunjukkan bagaimana kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Kolaborasi antar lembaga pemerintah dan pihak terkait di Kota Palembang dalam penerapan dan penegakkan retribusi oleh Dinas Perhubungan menunjukkan bahwa pendekatan tata kelola yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem retribusi. Melalui mekanisme collaborative governance, Dinas Perhubungan mampu menjalin kerjasama dengan instansi terkait, sektor swasta, dan masyarakat untuk memastikan kepatuhan dan optimalisasi pendapatan daerah dari retribusi. Namun, tantangan seperti koordinasi antar lembaga, transparansi, dan akuntabilitas perlu terus diatasi untuk memperkuat implementasi dan penegakan kebijakan retribusi yang lebih baik.

## Daftar Pustaka

- Aas, E., Email, S., Revenues, C. R., Residency, S., Year, F., Revenue, O., Regions, C., Residency, S., Revenue, O., Regions, C., Residency, S., Regional, C., Revenue, O., Revenue, O., Regions, C., Residency, S., District, O., Revenue, C., Residency, S., & National, B. (2018). Improving Regional Original Income with Tax Receipt, Regional Retribution And. 2018(3), 11–26.
- Abbiasov, T., & Sedov, D. (2023). Do local businesses benefit from sports facilities? The case of major league sports stadiums and arenas. *Regional Science and Urban Economics*, 98, 1–59. <https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2022.103853>
- Aiken, M., Cairns, B., & Taylor, M. (2011). Community organisations controlling assets: a better understanding. June.
- Amoah, A., Kwablah, E., Amoah, B., & Adjei-Mantey, K. (2023). Willingness to pay for electronic transaction levy: empirical evidence from Ghana. *African Journal of Economic and Management Studies*, 14(4), 663–679. <https://doi.org/10.1108/AJEMS-09-2022-0359>

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Benjamin, L., Rubin, J. S., & Zielenbach, S. (n.d.). Community Development Financial Institutions: Current Issues and Future Prospects. 26(2), 177–195.
- Berends, L., Ritter, A., & Chalmers, J. (2016). Collaborative Governance in the Reform of Western Australia's Alcohol and Other Drug Sector. *Australian Journal of Public Administration*, 75(2), 137–148. <https://doi.org/10.1111/1467-8500.12154>
- Bradley, G. V. (2004). Retribution: The Central Aim of Punishment. 19.
- Cabral, S., & Krane, D. (2018). Civic festivals and collaborative governance. *International Review of Administrative Sciences*, 84(1), 185–205. <https://doi.org/10.1177/0020852315615196>
- Cheng, A. S., Gerlak, A. K., Dale, L., & Mattor, K. (2015). Examining the adaptability of collaborative governance associated with publicly managed ecosystems over time: Insights from the front range roundtable, Colorado, USA. *Ecology and Society*, 20(1). <https://doi.org/10.5751/ES-07187-200135>
- Clarke, S. E. (2017). Local Place-Based Collaborative Governance: Comparing State-Centric and Society-Centered Models. *Urban Affairs Review*, 53(3), 578–602. <https://doi.org/10.1177/1078087416637126>
- Colgrove, J. (2010). Schools of Public Health: Essential Infrastructure of a Responsible Society and a 21st-Century Health System. 125(February), 8–14.
- Cordes, M. W. (1999). Property Rights and Land Use Controls: Balancing Private and Public Interest. 19(3).
- Dale, A., Wathan, J., & Higgins, V. (2012). Secondary Analysis of Quantitative Data Sources. In *The SAGE Handbook of Social Research Methods*. <https://doi.org/10.4135/9781446212165.n31>
- Dougherty, T. (1995). Systems and Control. In *Systems and Control*. <https://doi.org/10.1142/2830>
- Galloway, T., Cole, M., & Lewis, C. (2013). ORE Open Research Exeter. *Journal of Cleaner Production*, 0–48.
- Gennaioli, N., Porta, R. La, Lopez-De-Silanes, F., Shleifer, A., Ciarcia, N., Coleman, N., Jaffe, S., Kosenko, K., Queiro, F., Santoni, N., Becker, G., Bloom, N., Carvalho, V., Glaeser, E., Gopinath, G., Gottlieb, J., Helpman, E., Hsieh, C.-T., Kahn, M., ... Weil, D. (2011). NBER WORKING PAPER SERIES HUMAN CAPITAL AND REGIONAL DEVELOPMENT Human Capital and Regional Development.

- Getha-Taylor, H., Grayer, M. J., Kempf, R. J., & O'Leary, R. (2019). Collaborating in the Absence of Trust? What Collaborative Governance Theory and Practice Can Learn From the Literatures of Conflict Resolution, Psychology, and Law. *American Review of Public Administration*, 49(1), 51–64. <https://doi.org/10.1177/0275074018773089>
- Guariso, D., Castañeda, G., & Guerrero, O. A. (2023). Budgeting for SDGs: Quantitative methods to assess the potential impacts of public expenditure. *Development Engineering*, 8. <https://doi.org/10.1016/j.deveng.2023.100113>
- Gugu, S., & Dal Molin, M. (2016). Collaborative Local Cultural Governance: What Works? The Case of Cultural Districts in Italy. *Administration & Society*, 48(2), 237–262. <https://doi.org/10.1177/0095399715581037>
- Hafer, J. A. (2018). Understanding the Emergence and Persistence of Mandated Collaboration: A Policy Feedback Perspective of the United States's Model to Address Homelessness. *American Review of Public Administration*, 48(7), 777–788. <https://doi.org/10.1177/0275074017729877>
- Hamilton, R. W. (1972). Procedures for the Adoption of Rules of General Applicability: The Need for Procedural Innovation in Administrative Rulemaking \*. *553(1970)*, 1276–1338.
- Heinze, B. (2001). Financial Instruments for Nature Conservation in Central and Eastern Europe. May, 1–231. *Holling and Meffe.pdf*. (n.d.).
- Ii, S. S., Fitzgerald, L., Morys-Carter, M. M., Davie, N. L., & Barker, R. (2018). Knowledge translation in tri-sectoral collaborations: An exploration of perceptions of academia, industry and healthcare collaborations in innovation adoption. *Health Policy*, 122(2), 175–183. <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2017.11.010>
- Keyim, P. (2018). Tourism Collaborative Governance and Rural Community Development in Finland: The Case of Vuonisahti. *Journal of Travel Research*, 57(4), 483–494. <https://doi.org/10.1177/0047287517701858>
- Kim, J., & Siddiki, S. (2018). Linking diversity of collaborative policymaking venues with procedural justice perceptions: A study of U.S. marine aquaculture partnerships. *American Review of Public Administration*, 48(2), 159–174. <https://doi.org/10.1177/0275074016669442>
- Klievink, B., Bharosa, N., & Tan, Y. H. (2016). The collaborative realization of public values and business goals: Governance and infrastructure of public-private information platforms. *Government Information Quarterly*, 33(1), 67–79. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.12.002>
- Kuroda, H., & Kawai, M. (2003). Strengthening regional financial cooperation in East Asia. *Financial*

- Governance in East Asia: Policy Dialogue, Surveillance and Cooperation, June 2003, 134–164.  
<https://doi.org/10.4324/9780203356418>
- Li, S., Xia, Y., Xiao, R., & Jiang, H. (2022). Residents' Behavioral Intention of Environmental Governance and Its Influencing Factors: Based on a Multidimensional Willingness Measure Perspective. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(22). <https://doi.org/10.3390/ijerph192214734>
- Massam, B. H. (2002). Quality of life: Public planning and private living. *Progress in Planning*, 58(3), 141–227. [https://doi.org/10.1016/S0305-9006\(02\)00023-5](https://doi.org/10.1016/S0305-9006(02)00023-5)
- Meads, G., Russell, G., & Lees, A. (2017). Community governance in primary health care: towards an international Ideal Type. *International Journal of Health Planning and Management*, 32(4), 554–574. <https://doi.org/10.1002/hpm.2360>
- Meijer, A., & Bolívar, M. P. R. (2016). Governing the smart city: a review of the literature on smart urban governance. *International Review of Administrative Sciences*, 82(2), 392–408. <https://doi.org/10.1177/0020852314564308>
- Osborne, S. P., Radnor, Z., & Nasi, G. (2013). A New Theory for Public Service Management? Toward a (Public) Service-Dominant Approach. *American Review of Public Administration*, 43(2), 135–158. <https://doi.org/10.1177/0275074012466935>
- Perry, J. L. (2020). Bases of The Motivational Public Service. July 2005. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2005.00466.x>
- Prihata, A. K., & Suswanta, S. (2020). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Kaki Langit Padukuhan Mangunan. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 7(2012), 221. <https://doi.org/10.24843/jumpa.2020.v07.i01.p10>
- Quayle, A., Grosvold, J., & Chapple, L. (2019). New modes of managing grand challenges: Cross-sector collaboration and the refugee crisis of the Asia Pacific. *Australian Journal of Management*, 44(4), 665–686. <https://doi.org/10.1177/0312896219872234>
- Ran, B., & Qi, H. (2018). Contingencies of Power Sharing in Collaborative Governance. *American Review of Public Administration*, 48(8), 836–851. <https://doi.org/10.1177/0275074017745355>
- Rosa-Jiménez, C., Nebot, N., García Moreno, A., & Ballesteros, M. J. M. (2017). Near Zero Consumption Building as an Urban Acupuncture for a Vertical Slum. A Case Study in the City of Malaga, Spain. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 245(5). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/245/5/052028>
- Rum, M. (2018). Conversion of Federal Tax Collection to Local Government. *International Research Journal of Finance and ...*, February, 14–22.

- Sandover, R. (2020). Participatory food cities: Scholar activism and the co-production of food knowledge. *Sustainability (Switzerland)*, 12(9). <https://doi.org/10.3390/SU12093548>
- Situmeang, M. (2024). Focus Ilmu Administrasi Pengaruh Administrasi dan Standar Operasional Prosedur terhadap Pelayanan Publik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Selatan The Influence of Administration and Standard Operating Procedures on Public Services at the South Ta. 3, 39–51.
- Steels, S. (2015). Key characteristics of age-friendly cities and communities: A review. *Cities*, 47, 45– 52. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2015.02.004>
- Type, I., & Milner, B. (2024). Some aspects of the dynamics of populations important to the management of the commercial marine fisheries.
- van der Heijden, J. (2015). Interacting State and Non-State Actors in Hybrid Settings of Public Service Delivery. *Administration and Society*, 47(2), 99–121. <https://doi.org/10.1177/0095399713481349>
- Venables, A. J. (2016). Using natural resources for development: Why has it proven so difficult? *Journal of Economic Perspectives*, 30(1), 161–184. <https://doi.org/10.1257/jep.30.1.161>
- Wang, J., Zhao, L., & Huchzermeier, A. (2021). Operations-Finance Interface in Risk Management: Research Evolution and Opportunities. *Production and Operations Management*, 30(2), 355– 389. <https://doi.org/10.1111/poms.13269>
- Wang, M., & Peng, X. (2023). How to Develop Sustainably after Poverty Alleviation in Poverty-Stricken Areas under Paired Assistance: A Quantitative Assessment Framework Based on System Dynamics Model. *Sustainability*, 15(6), 4764. <https://doi.org/10.3390/su15064764>
- Whitelaw, S., Baxendale, A., Bryce, C., MacHardy, L., Young, I., & Witney, E. (2001). “Settings” based health promotion: A review. *Health Promotion International*, 16(4), 339–353. <https://doi.org/10.1093/heapro/16.4.339>
- Widianingsih, I., Paskarina, C., Riswanda, R., & Putera, P. B. (2021). Evolutionary Study of Watershed Governance Research: A Bibliometric Analysis. *Science and Technology Libraries*, 40(4), 416–434. <https://doi.org/10.1080/0194262X.2021.1926401>
- Xu, Z., Wu, Z., Li, Z., Jee, K., Rhee, J., Xiao, X., Xu, F., Wang, H., & Jiang, G. (2016). High fidelity data reduction for big data security dependency analyses. *Proceedings of the ACM Conference on Computer and Communications Security*, 24-28-October-2016, 504–516. <https://doi.org/10.1145/2976749.29783>

## Digitalisasi Pelayanan Publik dalam Sektor Pelayanan Kependudukan

Muhammad Iqbal<sup>1</sup>, Tony Mirza<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Administrasi Negara STIA&Pemerintahan Annisa Dwi Salfarizi

### Abstrak

Pemerintah di Indonesia saat ini sedang mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat terkhusus sektor kependudukan secara efektif dan efisien, perubahan dari tradisional government menjadi *e-government* (electronic government) adalah langkah awal bagi pemerintah merombak keseluruhan sistem pelayanan berbasis *paper-based* ke *paper-less*. Studi ini dibuat untuk menggambarkan perspektif dari masyarakat tentang program digitalisasi yang sangat membantu dan mempermudah mereka dalam mengakses layanan publik, terutama masyarakat yang tinggal di pelosok daerah yang jauh dari perkotaan, serta memberikan saran kepada pemerintah untuk mendukung penuh program digitalisasi bisa terlaksana dan berjalan seiring waktu dan zaman yang semakin terus berkembang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) program digitalisasi pelayanan publik dalam sektor kependudukan adalah hal yang sangat dibutuhkan masyarakat khususnya memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dari unsur-unsur gratifikasi dan pungli, serta memberikan kemudahan kepada masyarakat yang tinggal di pelosok daerah untuk mengakses pelayanan publik dengan lebih cepat tanpa memikirkan ongkos transportasi yang memang menjadi kendala masyarakat desa. (2) teknologi juga meningkatkan layanan publik, menjadikannya lebih tepat guna, efektif, dan relevan. Karena itu, layanan publik menjadi lebih terjangkau dan responsif. Saran dari adanya penelitian ini adalah diharapkan pemerintah juga melakukan digitalisasi di semua sektor pelayanan publik lainnya di Indonesia, memberdayakan generasi muda untuk membantu memajukan transformasi era digital, serta mengawasi program digitalisasi yang telah ada agar tetap transparansi dan bebas dari unsur-unsur gratifikasi dan pungli.

### Kata kunci:

digitalisasi; e-government; pelayanan publik

### Pendahuluan

Pemerintah di Indonesia saat ini sedang mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat terkhusus sektor kependudukan secara efektif dan efisien, perubahan dari tradisional government menjadi *e-government* (electronic government) adalah langkah awal bagi pemerintah merombak keseluruhan sistem pelayanan berbasis *paper-based* ke *paper-less*. Digitalisasi yang telah masuk ke kehidupan sehari-hari juga banyak di manfaatkan oleh sektor swasta untuk mendapatkan keuntungan saat ini dengan mempermudah memberikan pelayanan yang bisa kita lihat di berbagai aplikasi mulai dari pengantar makanan, ojek, pesan antar barang dan jasa juga telah banyak memanfaatkan kemajuan teknologi. Manusia sebagai

pengguna pasti ingin sesuatu yang mempermudah segala kegiatan, semua hal di coba untuk mengefisienkan waktu dan tenaga.

Perkembangan teknologi juga berdampak langsung kepada kegiatan administrasi kantor di lembaga pemerintahan, Karena teknologi selalu berubah dan bahkan revolusioner, kantor harus terus beradaptasi dan menggunakannya. (Suraja, 2018). Definisi Hidayaningrat tentang pelayanan publik dikutip oleh Suwondo. Paradigma pelayanan publik sedang berubah, dengan menempatkan lebih banyak fokus pada manajemen yang berfokus pada pelanggan (pemerintah yang digerakkan oleh kebutuhan warganya), yang sejalan dengan evolusi administrasi negara untuk mencapai pelayanan yang baik dan berkualitas tinggi. Tindakan memberikan kenyamanan dan layanan kepada masyarakat dalam rangka membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya demi efektivitas, efisiensi, dan pemangkasan biaya (Suwondo, 2001).

Pelayanan publik harus mampu memberikan pelayanan yang prima karena tuntutan dari masyarakat yang menginginkan pelayanan harus bisa secara cepat, efektif dan efisien. Seorang birokrasi harus memiliki jiwa melayani dengan cara kerja yang lebih fleksibel dan berorientasi dialogis serta cara kerja yang lebih pragmatis dan realistis, yang Merujuk pada Pasal 23 ayat (1) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan bahwa "Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan Sistem Informasi yang bersifat nasional" sementara di Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Penyelenggara berkewajiban mengelola Sistem Informasi yang terdiri atas Sistem Informasi Elektronik atau Non elektronik yang sekurangkurangnya meliputi; profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelola pengaduan dan penilaian kinerja.

Dengan menerapkan e-government, mempromosikan keterampilan digital karyawan, dan menggabungkan teknologi ke dalam prosedur pengambilan keputusan, pemerintah dapat meningkatkan kemampuan digital mereka. Pengisian data masyarakat menggunakan juga bisa di permudah dengan penggunaan aplikasi. Keuntungan menggunakan aplikasi adalah lebih mudah diakses, hemat waktu, lebih aman untuk dioperasikan, dan meminimalkan terjadinya blackmail (pembayaran ilegal). misal melayani dalam pembuatan identitas diri (akte, kk, dan ktp), mutasi data, dan kependudukan luar (imigran) secara digital.

Teknologi dapat memainkan peran penting dalam memperbaiki proses administrasi, komunikasi, dan pengiriman layanan kepada masyarakat. Mulai dari proses digitalisasi proses administrasi, Menciptakan portal pelayanan publik yang terpusat dan mudah digunakan dapat mempercepat akses masyarakat terhadap layanan dan informasi. pengembangan aplikasi mobile yang user-friendly dan implementasi sistem e-government, digitalisasi adalah proses memasukkan sesuatu

ke dalam bentuk digital (Heiskala dkk, 2016). Keuntungan dari media digital e-government, antara lain:

1. Efektivitas dan efisiensi pengeluaran dan operasi administrasi
2. Memberikan akses kepada semua departemen dan non-departemen terhadap layanan dan jaringan komunikasi untuk konsolidasi dan sosialisasi di semua tingkatan dengan lebih cepat, efektif, dan efisien.
3. Mengembangkan kapasitas untuk menanggapi pertanyaan, saran, pertanyaan, dan keluhan atas layanan publik.
4. Mengedepankan komunikasi, ambisi, akomodasi, sosialisasi, dan informasi sebagai salah satu teknik hubungan masyarakat (humas) pemerintah.
5. Media konsolidasi (pemersatu), partisipasi, dan pelibatan yang memungkinkan masyarakat untuk secara terbuka dan tanpa rasa takut menyampaikan pendapatnya (Davis, 2003).

## **Metode**

Pendekatan penelitian ini mengacu pada analisis dan sintesis informasi dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian. Penyelesaian untuk masalah menggunakan studi kepustakaan atau literatur review yang di dasarkan oleh bahan primer dan skunder yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai bahan dasar, bahan sekunder terdiri dari buku, surat kabar, jurnal, dokumen dan internet/website yang berisi topik yang relevan/terkait dan menitikberatkan pada meningkatkan efisiensi pelayanan publik dengan teknologi di era digital.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pelayanan Publik**

Pelayanan publik adalah tindakan yang dilakukan untuk menawarkan fasilitas dan layanan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut: Pelayanan publik adalah pelayanan yang: a) berkaitan dengan kegiatan yang menawarkan jasa kepada anggota masyarakat sesuai dengan hak-haknya; b) merupakan barang dan jasa yang penting; c) mengikuti prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, dan ekonomis dalam pelaksanaannya (Siagian, 1992). Pejabat, staf, pekerja, dan semua orang yang terlibat dalam organisasi semuanya menjalankan tugas-tugas ini manajer bertanggung jawab untuk melakukan layanan atau kegiatan publik (Aziz et al., 2015).

Pada UU Nomor 25 Tahun 2009 telah memberikan kepastian hukum terhadap hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik, sehingga sangat jelas terlihat komitmen penyelenggara kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Pembina dan penanggung jawab diperlukan untuk memastikan bahwa pelayanan publik berjalan dengan baik. Badan pengawas terdiri dari direktur lembaga negara, direktur kementerian, direktur lembaga negara di luar kementerian, direktur komisi negara atau organisasi lain yang memiliki fungsi serupa, dan direktur lembaga lainnya (Abdullah, 2020; Nugroho, 2011).

### **Teknologi Digital**

Kolaborasi online, jam kerja yang fleksibel, dan pekerjaan jarak jauh dimungkinkan oleh teknologi digital. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menciptakan budaya kerja yang inklusif dan memungkinkan karyawan untuk bekerja dari tempat yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Teknologi digital seperti email, pesan instan, dan platform kolaborasi online memudahkan komunikasi antar karyawan yang berbeda lokasi atau departemen. Ini memungkinkan kolaborasi yang lebih efisien, pertukaran ide yang cepat, dan meningkatkan keterlibatan karyawan. Produk (atau layanan) baru yang menyertakan elemen digital, perangkat lunak, atau materi media yang menawarkan fungsionalitas atau nilai unik kepada pelanggan disebut sebagai "artefak digital." Istilah "platform digital" mengacu pada platform berbasis perangkat lunak yang dibuat dari basis kode yang dapat diperluas dari sistem berbasis perangkat lunak yang menawarkan fungsionalitas mendasar yang dimiliki oleh modul dan antarmuka tempat mereka beroperasi. Alat dan sistem teknologi digital yang memungkinkan komunikasi, kolaborasi, dan/atau kemampuan komputasi disebut sebagai infrastruktur digital.

Transformasi digital adalah sebuah proses Perubahan prosedur, proses dan model bisnis untuk digunakan sama sekali perkembangan teknologi (Fitriasari, 2020; Panourgies, 2015). Transformasi digital di pemerintahan merujuk pada proses adopsi dan penerapan teknologi digital dalam berbagai aspek pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, partisipasi publik, dan menawarkan layanan yang lebih baik kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Contoh yang berguna adalah penggunaan aplikasi atau sistem menganalisis data. Tujuannya adalah untuk mengembangkan perspektif baru yang dapat membantu pengembangan produk dan pembuatan strategi layanan pelanggan (Crawford et al., 2020; suma Vally & Hema Divya, 2018).

Efisiensi Pelayanan Publik di Sektor Kependudukan dengan Tekhnologi Aplikasi  
DUKCAPIL SMART ONLINE



Penggunaan teknologi informasi bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan pelayanan publik dan interaksi kepada masyarakat. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, diharapkan dapat mempermudah dan menjadikan pelayanan menjadi lebih baik, peningkatan interaksi pemerintah-bisnis-industri. Melalui aplikasi yang tersedia di playstore dan appstore yaitu DUKCAPIL SMART ONLINE masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan tersebut baik dalam hal membuat data baru, mutasi data, dan pembaharuan data lama (ktp, e-ktp, akte kelahiran) tanpa perlu datang langsung kesana.

Tugas-tugas administratif yang berulang dan memakan waktu dapat diotomatisasi dengan menggunakan teknologi. Waktu yang diperlukan untuk proses seperti verifikasi dokumen, pengarsipan, dan pemrosesan data, misalnya, dapat dikurangi dengan penggunaan sistem manajemen dokumen elektronik, alat bantu pemrosesan otomatis, dan alat bantu kecerdasan buatan. Meningkatkan efisiensi manajemen dan administrasi pemerintahan sekaligus meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui ketersediaan informasi. Entitas pemerintah dapat menggunakan teknologi informasi untuk mengurangi korupsi, meningkatkan transparansi, meningkatkan kenyamanan, meningkatkan pendapatan, dan/atau di antara keuntungan lainnya, pengurangan korupsi. untuk meningkatkan kenyamanan, meningkatkan penjualan, dan/atau mengurangi biaya.

Dalam rangka Pembangunan daerah dapat menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pemerintah daerah, seperti situs web pemerintah atau pemerintahan elektronik (e-government), untuk mewujudkan demokratisasi, transparansi, partisipasi, evaluasi, kontrol, dan interaksi publik. Selain itu, dapat digunakan sebagai platform digital untuk komunikasi, transmisi, dan sosialisasi informasi serta keterbukaan dan akuntabilitas publik. Dalam pemanfaatan teknologi seperti pembuatan aplikasi seluler khusus pemerintah dapat mempermudah dan mempercepat masyarakat umum dalam menggunakan perangkat seluler untuk mengakses informasi dan layanan publik. Aplikasi-aplikasi ini dapat menawarkan fitur-fitur seperti laporan masalah, pengaduan, pengecekan status aplikasi, atau pemberitahuan penting. Aplikasi seluler mengurangi kebutuhan warga untuk datang ke kantor pemerintah dengan memungkinkan interaksi secara real-time dengan pemerintah.

Salah satu manfaat e-government adalah bahwa tugas-tugas yang sering kali diselesaikan di atas kertas sekarang ditangani oleh sistem elektronik dan lebih sedikit pekerja, yang menurunkan biaya operasional. Berbasis layanan juga meningkatkan layanan publik, menjadikannya lebih tepat guna, efektif, dan relevan. Karena itu, layanan publik menjadi lebih terjangkau dan responsif. E-government menyederhanakan prosedur dan memfasilitasi akses warga negara dan lembaga sektor publik ke program dan layanan informasi pemerintah. Tanpa harus mengunjungi kantor dan lembaga pemerintah secara fisik, warga negara dapat berkomunikasi dengan pemerintah kapan saja dan dari mana saja yang mereka inginkan. Prosedur untuk layanan publik pada umumnya berlarut-larut, memakan waktu, dan tidak jelas. Warga negara dan bisnis sering menghabiskan banyak waktu untuk layanan sederhana (bepergian untuk mendapatkan layanan, bahkan mengantri dan menunggu layanan), yang meningkatkan biaya dan menyebabkan ketidakpuasan, sehingga memunculkan inisiatif e-government. Hal ini mendorong layanan pemerintah secara online, yang mengurangi birokrasi, menawarkan aksesibilitas setiap saat, transaksi yang cepat dan nyaman, dan jelas meningkatkan kualitas layanan dalam hal waktu, konten, dan aksesibilitas.

## **Kesimpulan**

Pemerintah dan institusi publik kini dapat menawarkan layanan yang lebih cepat, harga yang lebih terjangkau dan terbuka untuk seluruh masyarakat berkat berbagai kemajuan teknologi seperti sistem informasi, aplikasi seluler, dan platform digital. Layanan publik menjadi lebih mudah tersedia berkat teknologi, masyarakat tidak perlu lagi mengunjungi suatu tempat secara fisik untuk mendapatkan layanan publik berkat platform digital dan aplikasi mobile. Hal ini menghilangkan hambatan akses untuk penduduk di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan fisik serta menghemat waktu dan biaya. Masyarakat kini dapat memperoleh informasi yang lebih akurat, terkini, dan menyeluruh dari pemerintah berkat teknologi. Masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai layanan publik di sektor kependudukan melalui portal web, media sosial, dan saluran komunikasi elektronik lainnya. Hal ini berkontribusi pada peningkatan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dan peningkatan keterbukaan. Di era digital, teknologi membuat komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah menjadi lebih mudah.

Masyarakat dapat memberikan pendapat, menyampaikan keluhan, dan ikut serta dalam pengambilan keputusan melalui platform media sosial, jajak pendapat daring, atau forum diskusi. Hal ini meningkatkan akuntabilitas dan meningkatkan standar layanan publik sekaligus memperkuat ikatan antara masyarakat dan pemerintah. Penggunaan sumber daya dalam

penyediaan layanan publik juga dapat dioptimalkan oleh pemerintah melalui penerapan teknologi.

### Daftar Pustaka

- Abd Aziz, M. A., Ab Rahman, H., Alam, M. M., & Said, J. (2015). Enhancement of the accountability of public sectors through integrity system, internal control system and leadership practices: A review study. *Journal Procedia Economics and Finance* Volume 28, 2015, hal163-169.
- Suraja, Y. (2018). Pengembangan Karier Profesional Kantor. *Jurnal Administrasi dan Kesekretarisan*, 3(1), 40-50.
- Suwondo. (2001). Peserta Pelayanan Publik: Hubungan Komplementer Antara Sektor Negara, Mekanisme Pasar dan Organisasi. Jakarta, Bumi Aksara.
- Abd Aziz, M. A., Ab Rahman, H., Alam, M. M., & Said, J. (2015). Enhancement of the accountability of public sectors through integrity system, internal control system and leadership practices: A review study. *Journal Procedia Economics and Finance* Volume 28, 2015, hal163-169.
- Siagian, S. P. (1985). *Organisasi kepemimpinan dan perilaku administrasi*. Gunung Agung, Jakarta, Rineka Cipta.
- Sawitri, N. N., Oswari, T., & Hastuti, E. (2017). Analysis of WebQual usefulness information quality and interaction service in cultural sites online. *International Journal of Economic Research*, 14(6), 191-199.
- Nugroho, Y. (2011). Opening the black box: The adoption of innovations in the voluntary sector—The case of Indonesian civil society organisations. *Research Policy*, 40(5), 761-777.
- Sawitri, N. N., & Febrian, E. (2018). Determinants of demand for Islamic banking services: A survey on moslem public servants in Indonesia. *Malaysian Journal of Consumer and Family Economics*, 21(Special Issue 2), 65-73.
- Vally, K. S., & Divya, K. H. (2018). A study on digital payments and demonetization in India: Prospects and challenges. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 10(8 Special Issue), 384-390.

## **Disrupsi Global Pernikahan Sesama Jenis Solusi Pendekatan Sosio Hukum Agama di Indonesia**

**Murry Darmoko Moersidin**

Fakultas Hukum Ubhara, Surabaya, Indonesia. (email: [murry@ubhara.ac.id](mailto:murry@ubhara.ac.id))

### **Abstrak**

Pernikahan sesama jenis di Asia adalah legal pada tiga negara, Taiwan, Nepal dan Thailand melalui hitungan suara mayoritas di parlemen yang menganggap bahwa orientasi seksual adalah bagian dari hak asasi manusia, bukan sebagai sebuah perbuatan terlarang dalam agama atau pelanggaran bahkan kejahatan dalam hukum dan masyarakat. Berbeda dengan Brunei yang secara tegas mengeluarkan peraturan tentang larangan LGBT apalagi Pernikahan sesama jenis sebagai kejahatan kemanusiaan. Indonesia dalam zona abu-abu, Fatwa MUI nomor 57 tahun 2014 dianggap sebagai tameng pembebas dosa pemerintah. Penelitian ini mengupas tentang disrupsi global of same sex marriage dengan tiga pendekatan keilmuan: Sosiologi, Hukum dan Agama dalam dominasi, pengaruh dan ketergantungan antara variabel. IRAC style adalah pola penulisan dalam menemukan kesimpulan. Same sex marriage sebagai issue penelitian, apakah memiliki legal formal di Indonesia dan dianalisa serta aplikasinya dalam kemungkinan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Kesimpulan menunjukkan bahwa Indonesia dengan keberagaman individu pada kelompok agama suku tidak memerlukan peraturan tertulis legal formal yang dikeluarkan pemerintah karena agama di Indonesia lebih mendominasi, mempengaruhi dan dijadikan sebagai tempat ketergantungan dibanding hukum dan masyarakat dalam mengatasi Disrupsi Global.

### **Kata kunci:**

disrupsi global; hak asasi manusia; parlemen; pernikahan sesama

### **Pendahuluan**

Sebelum tahun 2001, pernikahan sesama jenis adalah sebuah kejahatan dan dosa serta menjadi kegelisahan umat manusia, berangkat dari kisah yang terdapat dalam kitab-kitab suci agama tentang nabi Luth dan kaum Sodom yang berakhir pada azab bagi pelakunya. Pengaruh kisah azab ini sangat kuat mengakar bagi negara-negara mayoritas penganut agama yang menerapkan hukum perkawinan secara hukum agama serta adat yang berlaku yang termuat pada kitab suci al-Quran al-Karim dalam ayat 74 surat al-Hijr (Quran.nu.or.id, 2024) dan dalam al-Kitab Kejadian dalam Chapter 19 ayat 24 (SABDA, 2024).

23 tahun yang lalu, parlemen Belanda mengesahkan pernikahan sesama jenis dan bahkan di tahun 2021 lalu diperluas untuk keluarga kerajaan Belanda tanpa kehilangan mahkota (Purnama, 2021). Dalam dua tahun terakhir, saat penelitian ini dilakukan, di benua Asia telah disahkan pernikahan sesama jenis di tiga negara, yaitu Taiwan (Chau, 2023), Nepal (Yong, 2023) dan Thailand (Ratcliffe, 2024) mengikuti 36 negara-negara yang terletak di benua Eropa dan Afrika (Setiawati, 2024). Sebaliknya, Brunei Darussalam menerapkan hukuman rajam bagi kaum LGBT (Taylor, 2019) yang memiliki cita-cita dan keinginan utama untuk dapat menikah sesama jenis dengan ketetapan legal formal, diakui dan dicatat negara.

No	Negara, Tahun Peresmian
1	Belanda, 2001
2	Belgia, 2003
3	Spanyol, 2005
4	Kanada, 2005
5	Afrika Selatan, 2006
6	Norwegia, 2009
7	Swedia, 2009
8	Portugal, 2010
9	Argentina, 2010
10	Islandia, 2010
11	Denmark, 2012
12	Uruguay, 2013
13	Selandia Baru, 2013
14	Brasil, 2013
15	Prancis, 2013
16	England dan Wales, 2014
17	Skotlandia, 2014
18	Irlandia, 2015
19	Luxembourg, 2015
20	Amerika Serikat, 2015
21	Kolumbia, 2016
22	Finlandia, 2017
23	Malta, 2017
24	Jerman, 2017
25	Australia, 2017
26	Austria, 2019
27	Taiwan, 2019
28	Ekuador, 2019
29	Inggris, 2020
30	Kosta Rika, 2020
31	Chili, 2022
32	Swiss, 2022
33	Slovenia, 2022
34	Kuba, 2022
35	Andorra, 2023
36	Estonia, 2024
37	Yunani, 2024
38	Nepal, 2024
39	Thailand, 2024

*Sumber: diolah peneliti dari berbagai sumber*

Tidak seperti Brunei Darussalam, Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar nomor dua di dunia (Waulat, 2024) memilih diam dan abu-abu secara legal formal dalam permasalahan legalitas pernikahan sesama jenis. Tidak satupun pasal dalam peraturan perundang-undangan yang ada sejak Indonesia merdeka sampai kini yang menuliskan kata LGBT dan pernikahan sesama jenis, baik mengesahkan atau melarang serta memberi sanksi dan hukuman (Saptohutomo, 2022), kecuali Propinsi Aceh yang telah memiliki otoritas Qanun dalam otonomi pemerintahan daerah istimewa (Hastanto, 2021). Maka ketiadaan peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang LGBT ini diperlukan secara ilmiah untuk mendapatkan solusi yang tepat mengatasi kegelisahan hukum, baik apakah pertama, adanya

peraturan yang mengikat dan sanksi yang tidak dilaksanakan dengan baik sehingga terjadi terus menerus kejahatan dan pelanggaran seperti tindak pidana korupsi, ada undang-undang tentang korupsi namun koruptor tetap ada dan terus bertambah, atau kedua dengan adanya klaim atas suatu perbuatan yang dianggap sebagai sebuah kejahatan dan pelanggaran namun belum ada peraturan yang melarang dan hukuman bagi mereka yang melakukannya seperti LGBT dan pernikahan sesama jenis.

Kajian literatur melalui ilmu-ilmu sosial hukum dan keagamaan yang berkaitan dengan LGBT sebagai gerbang awal dari pernikahan sesama jenis telah dilakukan peneliti sejak tahun 2017 sampai saat ini. Tulisan-tulisan penulis yang telah dipresentasikan di berbagai kota mulai dari kota Padang Sumatra Barat (Darmoko, 2017a), kota Bandung Jawa Barat sampai ke Radboud University di kota Nijmegen Belanda (Darmoko, 2019).

Peneliti telah mengkaji berbagai literatur dari awal mula adanya budaya pemindahan energi kejantanan melalui sodomi di Kimam Papua bagian selatan, menjaga kekuatan Warok Gemblakan melalui tidak berhubungan lawan jenis dalam mengangkat beban Reog di Ponorogo serta budaya pentas peran perempuan oleh laki-laki dalam Lengger Lanang dan Ludruk serta jenis kelamin bukan hanya 2 kelamin di budaya Bugis Sulawesi Selatan, Kronologi awal terbentuknya komunitas LGBT dan kasus-kasus yang berkaitan dengan kesehatan dan pernikahan sesama jenis yang terjadi di Indonesia (Darmoko, 2017b). Kajian dilanjutkan pada perbandingan penanganan LGBT di Asia Tenggara (Darmoko, 2018a) serta pengelolaan kaum banci dalam pariwisata seks di Bali Indonesia dan Thailand (Darmoko, 2018b) serta penanganan LGBT yang dianggap sebagai cosmopolitan paradox life style di kampus (Darmoko, 2018c).

Rumusan masalah yang muncul dari latar belakang masalah penelitian adalah pertama, apakah ada peraturan yang mengatur tentang pernikahan sesama jenis di Indonesia era disrupsi global yang terjadi saat ini? Kedua, apa solusi pendekatan resiliensi yang dapat diterapkan dalam menghadapi ketiadaan hukum (yang seharusnya dibuat bersama pemerintah dan parlemen) atas perbuatan yang diklaim sebagai sebuah kejahatan atau pelanggaran atau dosa seperti pernikahan sesama jenis?

Tujuan penelitian adalah menjawab dua rumusan masalah yang terlampir sebelumnya, pertama yaitu mengetahui ada atau tidaknya peraturan yang mengatur tentang pernikahan sesama jenis di Indonesia era disrupsi global yang terjadi saat ini. Kedua yaitu memberikan solusi pendekatan yang dapat diterapkan dalam menghadapi ketiadaan hukum (yang seharusnya dibuat bersama pemerintah dan parlemen) atas perbuatan yang diklaim sebagai sebuah kejahatan atau pelanggaran atau dosa seperti pernikahan sesama jenis.

## Metode

Peneliti menggunakan prosedur IRAC Style dalam menjawab rumusan masalah. IRAC adalah singkatan dari Issue, Rule, Analysis, Conclusion. IRAC digunakan oleh para peneliti dalam bidang hukum baik bagi para dosen dan mahasiswa agar memiliki *critical attitude* dan *critical writing skills* dalam menjawab persoalan-persoalan hukum dan sosial yang terjadi baik di dalam dan luar kelas (Arifin et al., 2019) agar memiliki dan meningkatkan skill komunikasi profesional (Aleynikova, 2021) dan efektif (Turner, 2012) serta menjadi salah satu pedoman dasar pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para hakim dalam persidangan (Sinclair, 2005).

Metode yang digunakan adalah kualitatif (berdasarkan opini, pendapat atau catatan pakar dan ahli serta pelapor atau pelaku sebuah kejadian) dan peneliti mengambil sumber bahan penelitian yang berasal dari dokumen-dokumen yang berisikan data-data yang berkaitan langsung dengan penelitian. Dokumen-dokumen ini peneliti pilih dan pilih sesuai dengan urutan IRAC style yaitu tentang resiliensi Indonesia dari disrupsi global, same sex marriage dan kronologinya dalam "Issue", peraturan perundang-undangan atau aturan yang berkaitan dengan same sex marriage atau LGBT dalam "Rule", bagaimana kemudian isu tersebut apakah telah ada peraturannya atau tidak kemudian dianalisa "Analysis" dalam kenyataan yang terjadi di masyarakat dan pemerintah serta disimpulkan dalam "Conclusion" sehingga dapat dinyatakan sebagai sebuah penelitian yang memiliki reliabilitas dan validitas yang memberi solusi.

Isu disrupsi global same sex marriage merupakan bahasan utama dalam penelitian ini. Dalam KBBI, disrupsi berarti hal tercabut dari akarnya. Dalam translate Google Indonesia English, sinonim disrupsi ada 57 kata yang memiliki makna serupa. Global dalam arti tekstual berarti sedunia, sejagat, sesuatu yang berbentuk bulat, sebagaimana bumi. Disrupsi secara bahasa dapat diartikan sebagai gangguan, campur tangan, pengacauan dan perusuhan, yang dapat memiliki konotasi negatif dalam penggunaannya karena dianggap merusak sebuah rencana awal dalam pencapaian sesuatu, walaupun ada penggunaan berkonotasi positif.

Disrupsi global diartikan sebagai situasi di mana terjadi perubahan besar, yang mengakibatkan perubahan pada sebagian besar, jika tidak seluruh tatanan kehidupan masyarakat dunia. Clayton Christensen menciptakan istilah "disrupsi" dalam bukunya tahun 1997, Dilema Sang Inovator. (Sobandi, 2023). Disrupsi terjadi karena kecanggihan teknologi yang mengubah pola dan gaya hidup masyarakat akibat dari terhubungnya informasi secara langsung tanpa batas, melewati batasan negara. Paspor sebagai identitas seseorang hanyalah sebuah identitas kebangsaan, namun secara perilaku dan gaya hidup pribadi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar individu, yang dapat akses langsung pada informasi dan data yang diinginkan

sehingga melahirkan kreatifitas dan inovasi dalam kehidupan, yang salah satunya adalah pernikahan sesama jenis, yang menjadi varian baru dalam pernikahan.

Terlepas dari kisah azab Tuhan pada masa lalu, pernikahan sesama jenis telah nyata adanya dan sah secara hukum di berbagai negara. Jumlah negara yang telah mengesahkan pernikahan sesama jenis sebanyak 39 negara sampai saat penelitian ini ditulis, dari 195 negara yang terdaftar sebagai anggota PBB. Terdapat tiga kelompok besar negara-negara dalam menghadapi pengesahan pernikahan sesama jenis, pertama negara-negara yang mengesahkan, kata lain, menghalalkan, yang berjumlah 39 negara. Kedua, negara-negara yang melarang dan menghukum pernikahan sesama jenis, yang berjumlah sebanyak 70 negara (Check, 2019). Ketiga, negara yang abu-abu atau diam dalam hukum LGBT dan pernikahan sesama jenis, seperti Indonesia. Sebagaimana dinyatakan Mahfud MD, menteri hukum dan ham pada tahun 2022 menyatakan bahwa tidak ada pasal-pasal yang berkaitan dengan LGBT dan pernikahan sesama jenis dalam RKUHP baru yang telah final untuk disahkan menjadi KUHP sebagaimana yang sudah dilaporkan kepada presiden RI (Saputra, 2022).

Rule of same sex marriage, secara garis besar, diperjuangkan melalui parlemen oleh negara-negara yang mengesahkan pernikahan sesama jenis. Pada kronologi keberhasilan Belanda tahun 2001 sebagai negara pertama yang mengesahkan secara legal formal same sex marriage adalah strategi penguasaan parlemen oleh orang-orang yang pro LGBT atau diam (tidak menunjukkan sikap) sama sekali terhadap LGBT. Tanggal 19 Desember 2000, RUU untuk melegalkan pernikahan sesama jenis disahkan di Parlemen Belanda dengan 109 suara berbanding 33 dan Senat dengan 49 suara berbanding 26 pada 19 Desember 2000. Kemudian Undang-undang tersebut disetujui Ratu Beatrix pada tanggal 21 Desember 2000 dan mulai berlaku pada 1 April 2001. Yang kemudian diikuti oleh 38 negara berikutnya, dan parlemen Thailand (Azzahra, 2024) sebagaimana parlemen Taiwan (Yang, 2019) juga melakukan hal yang sama, yaitu memenangkan pertarungan pengesahan hukum pernikahan sesama jenis melalui mayoritas jumlah suara di dalam parlemen.

Analisa tentang pernikahan sesama jenis di Indonesia dilakukan peneliti melalui pendekatan sosiologi, hukum dan agama bahwa peraturan perundang-undangan tidak ditemukan satu pasalpun yang bertuliskan dan berkaitan dengan LGBT dan pernikahan sesama jenis. Pendekatan sosiologi hukum agama fokus pada hubungan yang dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, sosiologi yang memiliki 6 kata kunci utama yaitu lingkungan, individu, kelompok, dominasi, pengaruh dan ketergantungan. Kedua, hukum yang mempunyai 3 kata kunci yaitu aturan, ikatan dan sanksi, dan ketiga, yang terakhir, pendekatan agama yang memiliki kata kunci yaitu Tuhan, makhluk, relasi, ganjaran.

Analisa peneliti tentang disrupsi global pernikahan sesama jenis di Indonesia yang dilakukan melalui penelitian sebagai pengajar dan peneliti kajian yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menemukan beberapa hal sebagai berikut: pertama, pendekatan sosiologi hukum agama terhadap sikap parlemen Indonesia yang abai dan cuek terhadap fatwa MUI nomor 57 tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi dan Pencabulan (MUI, 2014) sebagai salah satu orientasi seksual dari kaum LGBT di Indonesia menunjukkan bahwa dominasi dan pengaruh agama (dengan berbagai komponen organisasi dan ulama pendeta) serta kelompok dalam masyarakat lebih kuat dan dominan serta mengikat daripada peraturan yang ditetapkan pemerintah, hal ini karena kultur budaya yang telah dibentuk dari watak orang Indonesia sebagai resiliensi atas disrupsi global, bukan hanya pada kasus pernikahan sesama jenis dan LGBT, namun juga pada keseluruhan perilaku yang lebih mengutamakan keagamaan dalam hal yang berkaitan dengan hukum perdata, dengan bukti adanya pengadilan agama yang fokus pada masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan keluarga dan masyarakat, terkhusus masalah perkawinan yang hanya memperbolehkan pernikahan satu agama dan beda jenis, yang diatur dalam UU nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua, masyarakat Indonesia yang beragam dalam suku dan ras serta perbedaan kota dan desa yang pada akhirnya juga berpengaruh pada sikap, pola dan perilaku dalam menghadapi LGBT dan pernikahan sesama jenis. Ketiga, hukuman rajam yang akan diterapkan bila ada hubungan LGBT akan sulit dilaksanakan, karena berkaca pada pengalaman sejarah, bahwa di Indonesia sendiri, penyebaran agama Islam dibangun berdasarkan toleransi dan asimilasi budaya, bahkan sejarah Islam nusantara tidak mencatat dan diceritakan tentang hukuman rajam bagi pelaku LGBT, bahkan Aceh belum menghukum mati bagi pelaku homo seksual (Setyadi, 2015), juga Brunei menanggukuhkan hukuman mati bagi kaum LGBT walau sudah tertulis dalam undang-undang (Idrus, 2019).

## **Hasil dan Pembahasan**

Hasil temuan penelitian adalah sebagai berikut, pertama, kekosongan hukum tentang pernikahan sesama jenis karena tidak ada satu pasalpun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menyebut tentang pernikahan sesama jenis dan LGBT. Kedua, walaupun tidak ada pasal yang berkaitan dengan pernikahan sesama jenis, Indonesia memiliki resiliensi yang baik ditunjang dominasi dan pengaruh agama dan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi termasuk atas terjadinya disrupsi global atas legalitas pernikahan

sesama jenis yang telah berlaku di Thailand, Nepal dan Taiwan serta tidak terpengaruh dengan Brunei Darussalam yang bersikap tegas atas kaum LGBT dan pernikahan sesama jenis.

Pemerintah Indonesia memiliki darah DNA non blok, sejak presiden pertama sampai saat ini, yaitu diam dan abu-abu serta toleransi yang tinggi, tidak memihak kepada siapapun dalam setiap kasus pro kontra, termasuk legalitas pernikahan sesama jenis dan LGBT namun memiliki keyakinan dan ketahanan yang kuat terhadap pilihan netral.

## Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ada dua: pertama, LGBT dan Pernikahan sesama Jenis tidak dilarang di Indonesia karena tidak ada peraturannya dan kedua, dominasi dan pengaruh agama yang didukung masyarakat lebih kuat dibanding peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah karena sikap toleransi yang dimiliki rakyat Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Aleynikova, D. V. (2021). Legal Writing as Legal Analysis Tool in the Anglo-Saxon Legal Culture When Teaching Law Students. *Pedagogy. Theory & Practice*, 6(3). <https://doi.org/10.30853/ped210051>
- Arifin, R., Alkadri, R., Sari, D. P., Resthiningsih, L., & Holish, A. M. (2019). Improving Law Student Ability on Legal Writing through Critical and Logical Thinking by IRAC Method. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 1(1). <https://doi.org/10.15294/ijals.v1i1.33706>
- Azzahra, N. (2024). *Thailand Jadi Negara Asia Tenggara Pertama yang Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis*. Tempo.Co. <https://dunia.tempo.co/read/1881417/thailand-jadi-negara-asia-tenggara-pertama-yang-legalisasi-pernikahan-sesama-jenis>
- Chau, T. (2023). *Taiwan recognizes transnational same-sex marriage*. Nikkei Asia. <https://asia.nikkei.com/Spotlight/Gender/Taiwan-recognizes-transnational-same-sex-marriage>
- Check, R. (2019). *Selain Brunei, negara mana saja yang berlakukan hukuman mati bagi LGBT?* BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-47796268>
- Darmoko, M. (2017a). *Facebook*. [https://www.facebook.com/photo/?fbid=1563128757041377&set=a.153675581320042&rdid=oSa61bQgpCEac6zf&share\\_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2FunNVUFReABUyxGS6%2F](https://www.facebook.com/photo/?fbid=1563128757041377&set=a.153675581320042&rdid=oSa61bQgpCEac6zf&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2FunNVUFReABUyxGS6%2F)

- Darmoko, M. (2017b). LGBT Effect and its Impact in Indonesia (Sociology of Law's Perspective ). In Handoko & D. T. Iman (Eds.), *1st International Conference on Culture, Arts and Humanities (ICCAH)* (pp. 209–219). Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi (LPTIK) Universitas Andalas. [http://repo.unand.ac.id/5109/1/ICCAH Prosiding 2.pdf](http://repo.unand.ac.id/5109/1/ICCAH%20Prosiding%202.pdf)
- Darmoko, M. (2018a). Application of Islamic Law in Handling LGBT (ASEAN Religious Social Harmonization). *International Conference on Law, Environment, Culture and Globalization Faculty of Law University of Bengkulu, Indonesia, October*.
- Darmoko, M. (2018b). Transvestite: Tourism Law Perspective. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, 282(February), 101–103. <https://doi.org/10.2991/icblt-18.2018.25>
- Darmoko, M. (2018c). Lesbian Gay Bisexual Transgender (LGBT) Sebagai Cosmopolitan Paradox Life Style Dan Penanganannya Melalui PENDIDIKAN TINGGI. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 16(2), 177. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v16i2.2324>
- Darmoko, M. (2019). *Facebook*. <https://www.facebook.com/photo?fbid=2385065004847744&set=pcb.2385066138180964>
- Hastanto, I. (2021). *Aceh Terus Mencambuk Pasangan LGBTQ, Meski Bertentangan dengan Konstitusi*. Vice.Com. <https://www.vice.com/id/article/7k9meq/dua-lelaki-gay-kembali-dicambuk-di-aceh-dikritik-komnas-ham>
- Idrus, P. G. (2019). *Brunei tunda penerapan hukuman mati bagi LGBT*. AA.Com.Tr. <https://www.aa.com.tr/id/regional/brunei-tunda-penerapan-hukuman-mati-bagi-lgbt/1471241#>
- MUI. (2014). *Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014*. MUI. <https://mui.or.id/baca/fatwa/lesbian-gay-sodomi-dan-pencabulan>
- Purnama, B. E. (2021). *Belanda Izinkan Pernikahan Gay untuk Anggota Keluarga Kerajaan*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/internasional/439831/belanda-izinkan-pernikahan-gay-untuk-anggota-keluarga-kerajaan>
- Quran.nu.or.id. (2024). *Surat Al-Hijr Ayat 74*. <https://quran.nu.or.id/al-hijr/74>
- Ratcliffe, R. (2024). Thailand passes historic bill recognising marriage equality | Thailand | *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/world/article/2024/jun/18/thailand-same-sex-marriage-equality-vote-bill-legislation>
- Sabda, A. (2024). *Kejadian 19:24 (Versi Paralel)*. <https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Kej&chapter=19&verse=24>

- Saptohutomo, A. P. (2022). *Pemerintah Tegaskan Tak Ada Pasal Pidana LGBT di KUHP Baru*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/16/06284131/pemerintah-tegaskan-tak-ada-pasal-pidana-lgbt-di-kuhp-baru>
- Saputra, A. (2022). *LGBT di RKUHP Bukan Tindak Pidana*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-6434563/lgbt-di-rkuhp-bukan-tindak-pidana>
- Setiawati, S. (2024). *Bukan Hanya Thailand, 38 Negara Ini Legalkan Pernikahan Sesama Jenis*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240619113754-128-547418/bukan-hanya-thailand-38-negara-ini-legalkan-pernikahan-sesama-jenis>
- Setyadi, A. (2015). *Hukum Jinayah Berlaku, Gay dan Lesbi di Aceh Bakal Dihukum Cambuk 100 Kali*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-3050578/hukum-jinayah-berlaku-gay-dan-lesbi-di-aceh-bakal-dihukum-cambuk-100-kali>
- Sinclair, M. (2005). What is the “R” in “IRAC.” *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.347401>
- Sobandi. (2023). *Paradigma Disrupsi dalam Dunia Peradilan Indonesia*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/5922/paradigma-disrupsi-dalam-dunia-peradilan-indonesia>
- Taylor, M. (2019). *Ahead of LGBT+ crackdown, fleeing Bruneians fear for friends back home*/ Reuters. Reuters. <https://www.reuters.com/article/world/ahead-of-lgbt-crackdown-fleeing-bruneians-fear-for-friends-back-home-idUSKCN1RD2F0/>
- Turner, T. (2012). Finding Consensus in Legal Writing Discourse Regarding Organizational Structure: A Review and Analysis of the Use of IRAC and Its Progenies. *Journal of the Association of Legal Writing Directors*, 9.
- Waulat, J. E. (2024). *Pakistan Geser Indonesia Sebagai Negara dengan Jumlah Muslim Terbanyak di Dunia*. Rri.Co.Id. <https://www.rri.co.id/lain-lain/622944/pakistan-geser-indonesia-sebagai-negara-dengan-jumlah-muslim-terbanyak-di-dunia>
- Yang, W. (2019). *Taiwan Sahkan Pernikahan Sesama Jenis*. Dw.Com. <https://www.dw.com/id/taiwan-sahkan-pernikahan-sesama-jenis/a-48770374>
- Yong, N. (2023). *Nepal registers first same-sex marriage hailed as win for LGBT rights*. BBC Nepali. <https://www.bbc.com/news/world-asia-67574710>

## Efektivitas Kinerja Pegawai pada Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Ilir Timur Satu Palembang

Ainun Aisyah<sup>1</sup>, Ade Uswatun Hasanah<sup>2</sup>, Wina Aurelia<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>STIA & Pemerintahan Annisa Dwi Salfarizi, Palembang, Indonesia.

(email: ginun0408@gmail.com,ade.uswatun@gmail.com)

### Abstrak

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah mencakup pelayanan masyarakat dan pelayanan administrasi, keduanya beriringan dalam mewujudkan kinerja pelayanan yang baik (*good performance*) dalam pemerintahan. Efektivitas kinerja pegawai dalam melaksanakan pelayanan publik dengan kualitas yang baik diharapkan mampu untuk menjamin percepatan, kelancaran, pelayanan terhadap masyarakat baik dan tepat. Sebagai sebuah organisasi administratif yang hidup dan melayani masyarakat yang penuh dinamika, tentunya akan banyak mengalami masalah. Tujuan dari penelitian ini yaitu menguji dan menganalisis serta untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat efektivitas kinerja pegawai. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Fokus penelitian ini yaitu untuk menganalisa efektivitas kinerja pegawai pada pelayanan administrasi di Kecamatan Ilir Satu Palembang. Pada penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data dan informasi yang valid. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan pada layanan yang diberikan oleh pegawai di Kecamatan Ilir Timur Satu masih belum optimal, dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana yang tidak memadai sehingga sulit menyelesaikan pekerjaan yang baik dan cepat. Saran dari penulis agar pemerintah memberikan kualitas terhadap pelayanan publik dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan pada masyarakat berjalan dengan lancar.

### Kata kunci:

administrasi; kinerja; pelayanan

### Pendahuluan

Pemerintah daerah diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur rumah tangganya sendiri salah satu organisasi birokrasi tersebut adalah kecamatan yang merupakan bagian dari pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa atau kelurahan. Performa pegawai dalam memberikan pelayanan publik melalui efektivitas kinerja selalu menjadi fokus utama adalah kualitas kerja pegawai hal ini dipandang penting guna meningkatkan kinerja pegawai yang komprehensif. Kinerja merupakan produk dari melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu pekerjaan, jabatan, atau peranan dalam organisasi dengan penuh rasa tanggung jawab, dedikasi dan loyalitas yang maksimum. Tugas seorang pegawai sebagai aparatur negara merupakan penentu dalam menentukan, mengembangkan dan memajukan organisasi pemerintahan. Peran sentral pegawai

dalam melayani kepentingan administrasi masyarakat ditingkat kecamatan diharapkan sebagai kekuatan yang dapat menggerakkan roda kehidupan masyarakat. Instansi pemerintahan dapat mengevaluasi kinerja sebagai dasar atau standar untuk membuat keputusan tentang kondisi kerja pegawai termasuk mengimplementasikan prinsip-prinsip intergratif efektivitas sebagai budaya dan kinerja organisasi, empat sifat utama yang disebut *main cultural traits* yang mencakup keterlibatan (*involment*), konsistensi (*consistency*), adaptabilitas (*adaptability*), dan misi (*mision*). Tujuan dari penelitian ini menguji dan menganalisis serta untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat efektivitas kinerja pegawai Kecamatan Ilir Timur Satu Palembang.

## Metode

Penelitian ini melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pegawai layanan administrasi. Metode pendekatan kualitatif deskriptif penulis langsung terjun ke lapangan dalam rangka meneliti objek kajiannya dan mengadakan interaksi secara langsung dengan dengan Pemerintah Kecamatan Ilir Timur Satu dengan tujuan mendapatkan informasi yang mendalam mengenai Efektivitas Kinerja Pegawai Pada Pelayanan Administrasi Kependudukan.

## Hasil dan Pembahasan

Menurut Denison ada empat prinsip intergratif mengenai efektivitas yang berhubungan dengan budaya organisasi dan kinerja organisasi. Keempat prinsip ini diberi nama empat sifat utama (*main cultural traits*) yang mencakup diantaranya, sebagai berikut :

1. Keterlibatan (*involvement*), keterlibatan merupakan faktor kunci yang tampak dan dapat dirasakan dalam setiap budaya organisasi. Adanya keterlibatan karyawan dalam budaya dan kaitannya dengan efektivitas sebenarnya bukan gagasan baru. Tentang topik mengenai ini dipublikasikan, meskipun sebagian dari fungsi keterlibatan dari partisipasi para anggota dalam sebuah organisasi.
2. Konsistensi menekankan adanya dampak positif budaya yang kuat pada efektivitas organisasi, teori ini sistem keyakinan, nilai, simbol dan peraturan-peraturan yang dimengerti dampak positif terhadap pencapaian konsensus dalam dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terkoordinasikan. Untuk itu adanya konsisten dalam suatu organisasi itu ditandai antara lain oleh:
  - a) Para pegawai merasa terikat (*committed*) tinggi.
  - b) Ada nilai-nilai inti sebagai kunci.

- c) Tendensi promosi dari dalam.
  - d) Ada kejelasan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus tidak dilakukan.
3. Adaptabilitas, untuk memformulasikan teori budaya organisasi yang lebih proaktif tentang adaptabilitas organisasi, seseorang harus mampu menjabarkan sistem keyakinan-keyakinan dan norma-norma yang dapat mendukung kapasitas dari suatu organisasi agar dapat mendukung kapasitas dari suatu organisasi agar dapat menyelaraskan perubahan-perubahan perilaku internal yang terjadi dilingkungan organisasi yaitu:
- a) Kemampuan untuk menyadari dan beraksi pada lingkungan eksternal.
  - b) Kemampuan untuk menyadari dari beraksi pada lingkungan internal.
  - c) Kemampuan untuk menyadari dari beraksi pada lingkungan eksternal dan internal yang membutuhkan kemampuan untuk mengatur dan melembagakan kembali sejumlah perilaku dan proses dalam organisasi untuk beradaptasi. Ketiga aspek tersebut merupakan hasil dari perkembangan asumsi nilai-nilai dan norma-norma dasar yang memberikan struktur dan arah bagi organisasi.
4. Misi, penghayatan misi memberi dua pengaruh besar pada fungsi organisasi yaitu:
- a) Menentukan manfaat dan makna dengan cara mendefinisikan para individu yang dengan peran institusi.
  - b) Memberikan kejelasan dan arah/aturan.

Hasil penelitian dan pengumpulan data dengan cara observasi secara kompleks mengamati atau melihat kinerja pegawai berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa kinerja pegawai kurang baik hal tersebut terlihat dari masih adanya pegawai yang keluar kantor diwaktu jam kerja dengan kepentingan pribadi serta terdapat sarana dan prasarana yang kurang memadai. Faktor pendukung dan penghambat tentunya mempengaruhi dalam pelaksanaan pelayanan publik.

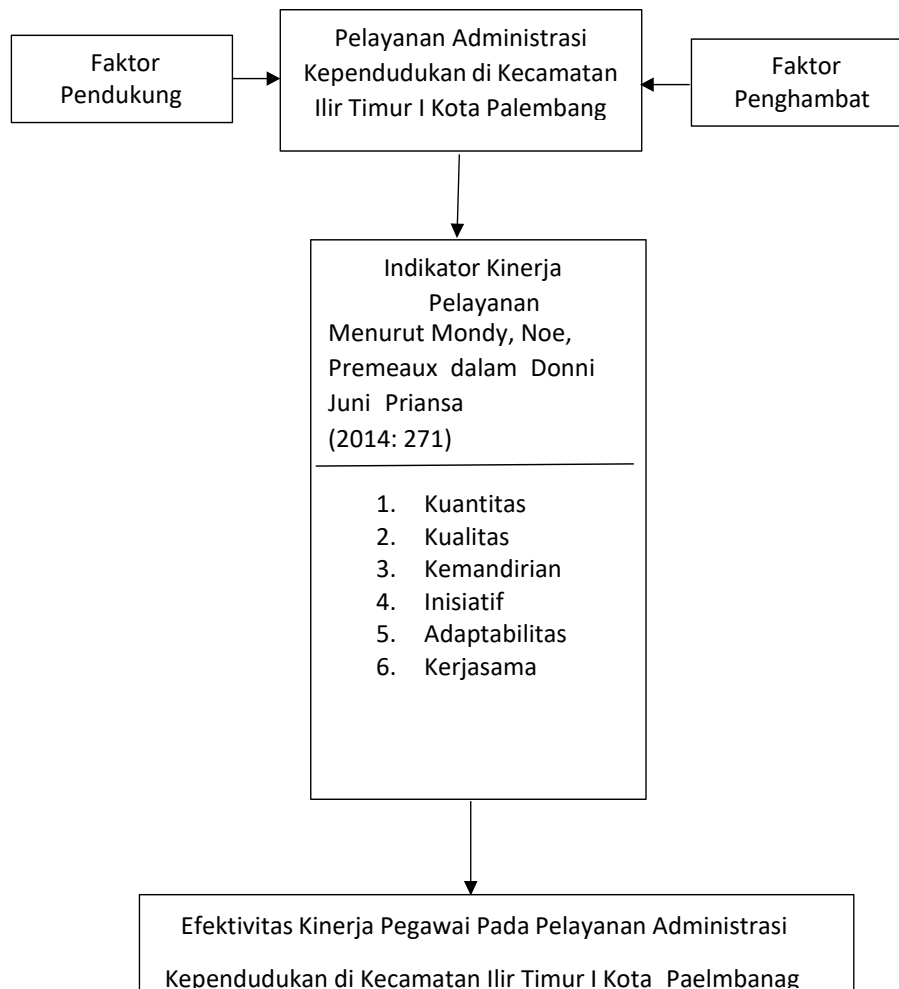
Faktor pendukung tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan mempunyai keahlian di bidang masing-masing sedangkan faktor penghambat kurangnya sarana seperti komputer masih belum memadai dan printer yang masih kurang sehingga kinerja pegawai yang ada di kecamatan ilir timur satu Palembang sulit menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan baik.

**Tabel 1.**  
**Data Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah
1	Sekretaris Camat	1
2	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	1
3	Pegawai	2
4	Masyarakat	7
	Jumlah	11

*Sumber: Peneliti, 2023*

**Gambar 2.**  
**Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Efektivitas kinerja Pegawai Pada Pelayanan Adminisrasi Kependudukan Di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang**



*Sumber: Mondy, Noe, Premeaux dalam Donni Juni Priansa (2014: 271)*

## Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan kinerja pelayanan masyarakat di Ilir Timur Satu Palembang pada layanan yang diberikan oleh pegawai masih belum optimal, dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana yang tidak memadai sehingga sulit menyelesaikan pekerjaan yang baik dan cepat, serta tidak adanya keterlibatan dan partisipasi dari para anggotanya untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam sebuah organisasi.

Dari penelitian ini, kami mengharapkan untuk agar pegawai lebih mengutamakan pelayanan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi masing-masing pada saat waktu kerja masih berlangsung dan mengharapkan perhatian dari pemerintah agar lebih meningkatkan fasilitas pelayanan masyarakat untuk mendukung kelancaran kinerja pegawai.

## Daftar Pustaka

- Yanaernawan. S.E., MM & Nanang Wahidin, S.E (2017). Website: Neliti. *Pengaruh Kompetensi, Motivasi dan Jiwa Intrapreneurship Terhadap Kinerja Karyawan*.  
<https://media.neliti.com/media/publications/282023-pengaruh-kompetensi-motivasi-dan-jiwa-in-5d1262b7.doc>
- Dr. Muhdar HM., ST., SE., MM (1990). Website: Researchgate. *Organizational Citizenship Behavior Perusahaan*.  
[https://www.researchgate.net/profile/Muhdar\\_Hm4/publication/323832978\\_Organizational\\_Citizenship\\_Behavior\\_Perusahaan/links/5aadad000f7e9b4897be9afa/Organizational-Citizenship-Behavior-Perusahaan.pdf?origin=publication\\_detail](https://www.researchgate.net/profile/Muhdar_Hm4/publication/323832978_Organizational_Citizenship_Behavior_Perusahaan/links/5aadad000f7e9b4897be9afa/Organizational-Citizenship-Behavior-Perusahaan.pdf?origin=publication_detail)

## Peran Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Lais

Trecy Austin<sup>1</sup>, Febby Shamudra<sup>2</sup>, Arif Rahman Hakim<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya, Indonesia.

<sup>2,3</sup>Ilmu Administrasi Negara, STISIPOL Candradimuka, Indonesia.

(email: [trecy.austin@gmail.com](mailto:trecy.austin@gmail.com), [febbyshamudraadhitya@stisipolcandradimuka.ac.id](mailto:febbyshamudraadhitya@stisipolcandradimuka.ac.id))

### Abstrak

Stunting disebabkan karena permasalahan berkaitan dengan meningkatnya risiko terjadinya kondisi yang kurang baik dan perkembangan otak yang lemah. Tujuan penelitian untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam penanganan penurunan stunting di Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin. Menggunakan jenis penelitian kualitatif menggunakan wawancara mendalam, dokumentasi dan berupaya observasi langsung. Teori yang digunakan adalah teori peran Mintzberg yaitu, *Interpersonal Role*/peran hubungan antarpribadi, *Informational Role*/peran yang berhubungan dengan informasi, dan *Decisional Role*/peranan membuat keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin sudah cukup baik. Berdasarkan peran masing-masing setiap instansi yang ada di wilayah pemerintah Kecamatan Lais dalam percepatan penurunan stunting dan dibantu oleh Dinas kesehatan Musi Banyuasin wilayah pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam penyelenggaraan program nasional percepatan penurunan stunting yang menjadi lokasi penelitian sudah baik, namun masih ada orang tua balita stunting tidak mengikuti program perbaikan gizi anak. Hal ini, diharapkan dengan adanya peran pemerintah daerah dalam percepatan penurunan stunting yang difokuskan di wilayah Kecamatan Lais orang tua balita mendapatkan bantuan dan penjelasan dari berbagai elemen yang ada di wilayah pemangku kepentingan, dan orang tua balita tidak lagi takut dengan angka kematian akibat stunting yang mereka tidak sadari.

### Kata kunci:

pemerintah daerah; penurunan stunting; peran

### Pendahuluan

Mayoritas anak-anak di dunia yang berusia di bawah lima tahun dengan pertumbuhan terhambat tinggal di Asia (de Onis et al., 2004). Negara Vietnam, di mana anemia, malnutrisi, dan infeksi cacing tambang telah meluas (Arild Vaktskjold et al., 2010). Sebuah rencana untuk mengurangi malnutrisi anak juga diluncurkan pada tahun 2001 (Khan et al., 2008). Oleh karena itu, studi yang menggunakan standar baru WHO untuk menilai situasi dan perkembangan terkait pertumbuhan anak-anak di Vietnam sangat diperlukan dan data spesifik provinsi serta distrik diperlukan. Kekurangan gizi di negara-negara maju, sayangnya, masih lebih umum terjadi dalam situasi kemiskinan, isolasi sosial, dan penyalahgunaan zat. Namun, sebagian besar

malnutrisi pada orang dewasa terkait dengan penyakit dan dapat muncul karena: asupan diet yang berkurang penyerapan makro dan/atau mikronutrien yang berkurang kerugian yang meningkat atau kebutuhan yang berubah peningkatan pengeluaran energi (dalam proses penyakit tertentu)(Stratton et al., 2003). Masalah ini dapat diperburuk pada pasien yang dirawat di rumah sakit karena kurangnya penyediaan makanan bergizi secara teratur di lingkungan di mana mereka dilindungi dari aktivitas klinis rutin, dan di mana mereka ditawarkan bantuan dan dukungan dengan makanan ketika mereka membutuhkannya(Age Concern, 2006).

Negara Indonesia telah banyak program untuk menangani stunting yang dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dan bahkan pihak swasta dan masyarakat telah berpartisipasi. Oleh karena itu, penelitian ini akan menampilkan berbagai upaya penanganan stunting di Indonesia yang telah dipublikasikan secara ilmiah untuk menjawab masalah penanganan stunting di Indonesia. Stunting merupakan gejala kekurangan gizi pada janin atau usia dini akan berdampak pada perkembangan otak, rendahnya kemampuan kognitif atau daya tanggap akan mempengaruhi prestasi sekolah dan keberhasilan pendidikan yang akan mereka jalani di masa mendatang(Pratiwi et al., 2021). Hal ini bisa disebabkan karena ibu yang mengalami kualitas tidur yang buruk dan bekerja sepanjang waktu tanpa istirahat cukup(Takeuchi et al., 2014). Menurut Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting(Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, 2018) pelaksanaan percepatan penurunan stunting ini memfokuskan pada kelompok sasaran, remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia berusia 0-59 bulan. Pemerintah pusat agar mempercepat keberlangsungan penurunan stunting menjadi terlaksana dengan baik(Peraturan Presiden Tentang Percepatan Penurunan Stunting, 2021).

Peran pemerintah daerah pada masyarakat sangat besar, diawali dengan layanan kebutuhan pada hal yang bersifat ideologi dan mental maka peran pemerintah daerah mempunyai hak, wewenang dan kemampuan tersendiri untuk melaksanakan kewajiban yang mendasar dari seorang pemimpin(Soares et al., 2015). Penyelesaian permasalahan stunting merupakan program nasional, masih banyak pemerintah daerah yang belum mengetahui secara menyeluruh percepatan penurunan stunting di Indonesia sehingga banyak pemerintah daerah masih belum menyelesaikan masalah stunting dan hal-hal yang dihadapi di dunia, khususnya di negara-negara miskin dan tertinggal (Kementerian PPN, 2018).

Stunting meliputi suatu keadaan berkaitan dengan tingginya tingkat gizi buruk dan kematian, lambatnya berpikir sehingga perkembangan motorik menjadi kurang, dan rendahnya

kepercayaan diri (Yadika et al., 2019). Penelitian kohort prospektif di Jamaika, dilakukan pada kelompok usia 9-24 bulan, diikuti perkembangan psikologisnya ketika 17 tahun, diperoleh bahwa remaja yang terhambat pertumbuhan lebih tinggi tingkat kecemasan, gejala depresi dan memiliki harga diri (*Self Esteem*) yang rendah dibandingkan dengan remaja yang tidak terhambat pertumbuhannya. Maka dari itu, perkembangan anak tingkat lanjut usia diperhatikan agar pertumbuhannya sesuai dengan usia anak. Anak-anak tertentu yang terlambat perkembangan sebelum usia 0-23 bulan mempunyai kondisi buruk dalam mental dan keadannya pada masa puber atau remaja (Mustika & Syamsul, 2018).

Hasil Riset Kesehatan Dasar 2010, prevalensi stunting di Indonesia masih tinggi, yaitu 36,5%. Lima provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia adalah Nusa Tenggara Timur (58,4%), Papua Barat (49,2%), Nusa Tenggara Barat (48,2%), Jawa Timur (42,3%), dan Sulawesi Barat (41,6%). Di Provinsi Aceh, prevalensi yang cukup tinggi juga ditemukan, yaitu 39%. Sementara itu, dalam hasil penelitian kesehatan dasar tahun 2013, prevalensi nasional stunting di kalangan anak usia sekolah adalah 30,7% (12,3% sangat stunting dan 18,4% stunting). Ada penurunan prevalensi dibandingkan dengan tahun 2010, sebesar 36,5% (Wardani et al., 2023). Sementara itu, lebih dari sepertiga (36,1%) anak-anak usia sekolah di Indonesia diklasifikasikan sebagai pendek, yang merupakan indikator malnutrisi kronis dan terjadinya penyakit infeksi berulang (Asih et al., 2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi asupan protein dan dapat dilihat dari konsumsi makanan sehari-hari dan kebiasaan makan. Masalah asupan gizi yang tidak memadai umum terjadi di daerah terpencil, yang disebabkan oleh pemahaman yang buruk tentang pengetahuan gizi, sehingga banyak jenis makanan di daerah ini tidak digunakan untuk konsumsi anak-anak. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai permasalahan kekurangan gizi yang paling lengkap. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (2015), stunting merupakan kondisi lemah pertumbuhan dan gizi buruk anak akibat asupan vitamin yang kurang dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badanya berada di bawah standar. Masa perkembangan yang terjadi karena keadaan *irreversible* akibat karena gizi yang tidak tercukupi atau makanan yang tidak bervitamin tinggi sesuai dengan kebutuhan tubuh yang terjadi dalam 1000HPK (Kementerian Kesehatan, 2022). Perbaikan kondisi kesehatan sampai saat memiliki batasan, sama halnya pada kesehatan orang tua selama masa kehamilan (*Antenatal Care*), serta pelayanan kesehatan setelah melahirkan (*Post Natal Care*), serta pelayanan imunisasi dan konseling gizi pada anak puskesmas (Siregar et al., 2023).

Penyebab utama stunting termasuk pertumbuhan terhambat di dalam rahim, asupan nutrisi yang tidak cukup untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang cepat pada

masa bayi dan anak-anak, serta infeksi yang sering terjadi pada masa awal kehidupan (A Vaktskjold et al., 2010). Jika tidak ditangani, kondisi ini akan berlanjut hingga anak tersebut menjadi remaja. Remaja diklasifikasikan sebagai rentan terhadap masalah gizi karena pertama, remaja membutuhkan nutrisi yang lebih tinggi akibat peningkatan pertumbuhan fisik, kognitif, dan psikososial. Kedua, perubahan gaya hidup dan kebiasaan makan remaja akan mempengaruhi baik asupan maupun kebutuhan nutrisi mereka. Ketiga, remaja yang memiliki kebutuhan nutrisi khusus seperti remaja yang aktif dalam kegiatan olahraga, sedang hamil, menderita penyakit kronis, melakukan diet berlebihan, atau kecanduan alkohol atau narkoba (Almatsier, 2019). Untuk meningkatkan kebiasaan makan remaja, program pendidikan gizi dapat dilaksanakan dengan melengkapi media yang diperlukan sehingga kualitas generasi yang lebih produktif dan akan melahirkan anak-anak berkualitas dapat diperoleh.

Terkait peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang sudah dituangkan dalam keputusan presiden oleh bapak Jokowi Dodo selaku Presiden Republik Indonesia. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Musi Banyuasin, Musi Banyuasin atau lebih dikenal dengan Muba memiliki percepatan penurunan stunting yang drastis yang mencapai 5% dari 23% ke 17,70%. Prevalensi stunting pada balita di kabupaten Musi Banyuasin pada hasil Survei SSGI yang dilihat dari objek balita pada tahun 2019 berada pada angka 23,% dan pada tahun 2021 di angka 23%. Maka dari itu, hasil penelitian status gizi balita diambil dari data pertimbangan dari data penimbangan balita di Posyandu yang dilaporkan melalui e-PPGBM pada 2019 prevalensi balita stunting sebesar 8,9%, dan 2021 prevalensi balita stunting berada pada angka 2,2%, sedangkan pada tahun 2022 prevalensi stunting pada balita berada pada angka 1,58% (JDIH Kabupaten Musi Banyuasin, 2023), dapat dilihat pada Gambar 1.

**Gambar 1.**  
**Angka Stunting SSGI 2022**



Sumber: Kementerian Kesehatan, 2023

Berdasarkan pemaparan diatas, adanya keberhasilan beberapa intervensi yang dilakukan dan hal ini terjalin kovergensi program yang dilakukan pada usaha percepatan penurunan stunting di Kabupaten Musi Banyuasin. Penurunan yang signifikan pada wilayah Kabupaten Musi Banyuasin diiringi suatu hal yang besar, namun dari 11 kecamatan menyatakan bahwa, Kecamatan Babat Toman dan Bayung Lincir mengalami peningkatan prevalensi stunting di wilayahnya pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Beberapa prevalensi stunting tahun 2022 memiliki kondisi cukup kurang, namun masih terlihat penyebaran prevalensi stunting di wilayah yang tinggi di atas angka kecamatan yang sudah menurunkan angka prevalensi yang ada, seperti Kecamatan Babat Toman, Plakat Tinggi, Sungai Keruh dan Bayung Lincir. Kabupaten Musi Banyuasin memfokuskan adanya formulasi kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengatasi permasalahan adanya formulasi yang ada, antaranya ialah audit kasus stunting. Kegiatan audit kasus stunting jilid 2 telah dilaksanakan 4 fokus desa/kelurahan audit kasus stunting yakni **Desa Petaling Kecamatan Lais**, Desa Bukit Pangkuas Kecamatan Batang Hari Leko, Desa Dawas dan Karya Maju Kecamatan Keluang dengan sasaran perbaikan orang tua stunting, ibu hamil, dan ibu nifas yang berisiko stunting dan calon pengantin. Penduduk di Kecamatan Lais didominasi penduduk usia produktif sebanyak 36.044 jiwa. Penduduk usia (0-14) tahun dengan penduduk yang berusia 65 tahun ke atas yang diasumsikan sebagai penduduk non-produktif atau diartikan tidak mampu melakukan kegiatan yang bernilai secara ekonomis yang berjumlah 18.038 jiwa(BPS Musi Banyuasin, 2023).

**Gambar 2.**  
**Pemberian Bantuan Biskuit ke Orang Tua Balita**



*Sumber: Pegawai Puskesmas Teluk Kijing II Kecamatan lais*

Terlihat pada Gambar 2, Anak 0-23 bulan mendapatkan pertemuan langsung ke rumah secara langsung minimal satu bulan sekali yang dilakukan oleh pegawai puskesmas untuk memberikan arahan maupun bantuan. Maka dari itu, pemberian makan bayi dan anak yang

selanjutnya disingkat PMBA merupakan ilmu yang menguraikan tentang inisiasi menyusui dini harus dapat dipahami oleh ibu-ibu di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin khususnya di Kecamatan Lais (Fitri & Esem, 2020). Ibu hamil dengan kondisi risiko tinggi dan/atau keadaan yang lemah menyebabkan kelelahan sepanjang hari walaupun sudah istirahat yang cukup (Haris et al., 2022) dan disebutkan tidur kurang dari 6 jam setiap malam adalah masalah utama yang terjadi pada 21% ibu hamil selama trimester ketiga (Hall, 2009).

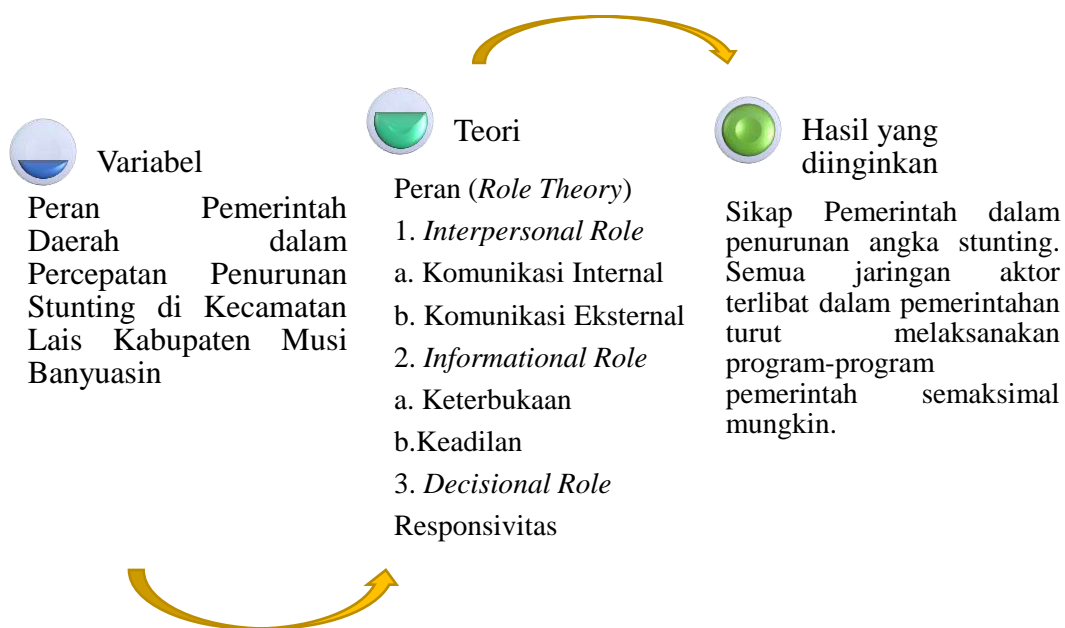
Ibu baru lebih yakin dengan nasihat dari ibu mereka sendiri, mertua, atau suami daripada petugas kesehatan mengenai praktik menyusui. Persepsi ibu adalah bahwa menyusui eksklusif akan membuat bayi sakit, tetapi sayuran hijau, ikan, dan telur akan membuat anak aktif dan kebal terhadap penyakit. Beberapa orang percaya bahwa kolostrum berbahaya bagi bayi. Hambatan untuk menyusui eksklusif sangat dipengaruhi oleh keyakinan masyarakat tertentu. Ibu baru lebih percaya pada nasihat dari ibu mereka sendiri, mertua, atau suami daripada petugas kesehatan mengenai praktik menyusui. Persepsi ibu adalah bahwa menyusui eksklusif akan membuat bayi sakit, tetapi sayuran hijau, ikan, dan telur akan membuat anak aktif dan kebal terhadap penyakit. Beberapa orang percaya bahwa kolostrum berbahaya bagi bayi. Hambatan untuk menyusui eksklusif sangat dipengaruhi oleh keyakinan masyarakat tertentu (Fatimah et al., 2021).

Selama proses pertumbuhan, akan terjadi peningkatan ukuran, jumlah sel dan jaringan antar sel, ukuran fisik, dan struktur tubuh akan meningkat sebagian atau sepenuhnya. Jadi, pertumbuhan ini dapat diukur dalam satuan panjang dan berat, yang dinilai melalui pemeriksaan antropometri, yaitu berat badan dan tinggi badan. (BB, TB). Di sisi lain, perkembangan anak adalah peningkatan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks seperti keterampilan motorik kasar, keterampilan motorik halus, bicara dan bahasa, sosialisasi, dan kemandirian pada anak-anak. Proses ini dapat diperoleh secara optimal selama periode emas, yang disebut Periode Emas. Fase krusial ini berlangsung selama 1000 hari pertama atau dari kehamilan hingga anak berusia dua tahun dan hanya terjadi sekali dalam hidup seorang anak. Salah satu indikator kualitas sumber daya manusia adalah pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal, yang mencerminkan status gizi dan kesehatan populasi di suatu daerah. Stunting adalah salah satu masalah pertumbuhan dan perkembangan yang paling umum (Laily & Indarjo, 2023).

Menurut Soerjono Soekanto peran adalah aspek dinamis kedudukan (status) yaitu apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban maka ia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2002). Menurut Sarbin T.R dan Allen V.L, peran sebagai hal yang dirangkai sebagai perilaku yang teratur, yang di timbulkan karena suatu jawaban tertentu karena adanya

aktor yang ditemui yang menjadi sebuah pengaruh dalam individu untuk menjalankan peranan tersebut (Brigette Lantaeda et al., 2002). Menurut Mintzberg dalam Miftah Thoha ada 3 peranan utama yang dilakukan oleh pemimpin sebuah lembaga yakni, [1] Peran Hubungan Antarpribadi (*Interpersonal Role*). [2] Peranan yang Berhubungan dengan Informasi (*Informational Role*). Dan [3] Peranan Membuat Keputusan (*Decisional Role*) (Thoha, 2019). Peneliti menjadikan teori Mintzberg sebagai ukuran dalam capaian penelitian yang dapat dilihat pada Gambar 3.

**Gambar 3.**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber: diadopsi dari teori Mintzberg (Thoha, 2019)

Tampak Gambar 3, bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam penurunan stunting yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Lais. Seberapa jauh peranan yang diambil pemerintahan daerah dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin.

### Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif yang berorientasi pada makna, karakteristik, gejala, fakta maupun kejadian serta deskripsi terhadap suatu fenomena secara sistematis (Cresswell, John W, 2016). Penelitian kualitatif didasarkan dengan teori dan konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, hubungan

seperangkat data dengan seperangkat data lainnya yang ditunjukkan oleh peneliti(Sugiyono, 2019).

Informan pada penelitian ini yaitu Bapak Camat Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin, Dinas Kesehatan Musi Banyuasin, Pegawai Puskesmas Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin, dan masyarakat yang ditemui di puskesmas dan orang tua dari anak yang mengalami stunting. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dokumentasi yang dimaksudkan yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari subjek penelitian serta data setiap file tertulis, bukan catatan, dan lain-lain. Fokus penelitian berdasarkan teori Mintzberg kemudian menyesuaikan dengan kondisi objek penelitian, dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.**  
**Fokus Penelitian**

Variabel	Dimensi	Aspek
Peran Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin	1. <i>Interpersonal Role/Peran Hubungan Antarpribadi</i>	1. Komunikasi Internal 2. Komunikasi Eksternal
	2. <i>Informational Role/Peran yang Berhubungan dengan Informasi</i>	1. Keterbukaan 2. Keadilan
	3. <i>Decisional Role/Peranan membuat Keputusan</i>	Responsivitas

Sumber: diadopsi dari teori Mintzberg(Thoha, 2019)

## Hasil dan Pembahasan

Peran diambil sebagai salah satu jenis mekanisme abstraksi dalam pemodelan. Menyebut model-model ini sebagai model berbasis peran dan peran-peran di dalamnya sebagai peran-peran pemodelan. Model berbasis peran, peran pemodelan dianggap sebagai mekanisme abstraksi dan dekomposisi yang terkait dengan objek. Ketika sebuah objek memainkan peran, ia menerima pesan dan menyediakan layanan yang terkait dengan perannya. Sebuah peran merupakan bagian dari perilaku objek yang diperoleh dengan mempertimbangkan hanya interaksi dari peran tersebut dan menyembunyikan semua interaksi lainnya.

Peran pemerintah daerah dalam percepatan penurunan stunting di Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2022 tentang percepatan penurunan stunting di Kabupaten Musi Banyuasin, penelitian ini mengacu kepada beberapa aspek yang diadopsi dari Teori Mintzberg.

## 1. Peran Hubungan Antar Pribadi (*Interpersonal Role*)

### a. Komunikasi Internal

Menurut (Moffat et al., 2022) dalam upaya mencegah stunting, penting untuk meningkatkan frekuensi paparan kampanye komunikasi baik melalui media maupun komunikasi interpersonal. Sejalan dengan penelitian ini (Rahayu et al., 2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi interpersonal memiliki peran penting dan secara signifikan terkait dengan peningkatan pengetahuan ibu tentang stunting dan malnutrisi. Selain itu, (Soofi, Sajid Bashir, Nawaz, Gul Khan et al., 2021) dalam hasil penelitiannya, ia mengatakan bahwa intervensi komunikasi intensif adalah salah satu upaya perubahan perilaku untuk mencegah stunting dan malnutrisi pada anak-anak. Hasil penelitian yang sama ditunjukkan oleh (Maulida & Suriani, 2021) yang mengatakan pentingnya komunikasi dan mobilisasi kader dalam upaya pencegahan stunting, terutama dalam aspek perubahan perilaku. Komunikasi internal dengan pertukaran gagasan atau pendapat sesama pegawai pemerintahan kecamatan Lais memiliki serangkaian komunikasi yang saling berkaitan (Agustini & Purnaningsih, 2018) dengan sesama dinas terkait tentang percepatan penurunan stunting di kabupaten Musi Banyuasin.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Kepala Camat Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin, beliau mengungkapkan:

*"Pemerintahan Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin tidak terlepas dari kerja sama melalui konferensi (pertemuan) dari pihak Dinas Kesehatan dalam rangka percepatan penurunan stunting di wilayah kecamatan yang mana dinas kesehatan ini sebagai lini sektor untuk penanganan percepatan penurunan stunting ini. Namun, kecamatan ini adalah suatu wilayah dimana wilayah pemangku kepentingan kecamatan yang didalamnya ada masyarakat yang terindikasi stunting. Menambahkan, kalau dari kecamatan Lais sangat mendukung dalam rangka program nasional kita dukung kita bersama-sama Dinas Kesehatan melakukan upaya-upaya, kegiatan-kegiatan maupun program untuk menurunkan percepatan penurunan stunting." (Wawancara, Selasa 23 April 2024).*

Secara umum, ibu menghabiskan lebih banyak waktu di rumah daripada ayah, dan ibu memainkan peran penting dalam kehidupan keluarga, terutama bagi anak-anak mereka. Anak-anak menerima lebih banyak pendidikan dari ibu sejak lahir hingga mereka tumbuh dewasa dan menerima pendidikan formal. Pengetahuan dan tingkat pendidikan ibu adalah faktor utama yang menentukan karakteristik maternal. Tingkat pendidikan ibu adalah faktor risiko untuk

stunting, dan pendidikan ibu yang rendah terkait dengan stunting di Indonesia. Untuk menggambarkan, seorang ibu yang sehat akan bersedia mengandung janin yang dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat di dalam rahim, kemudian janin tersebut akan lahir sebagai anak yang sehat dengan berat badan ideal. Selain itu, seorang ibu yang sehat akan menyusui bayinya sesuai dengan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia yaitu 6 bulan menyusui eksklusif dan melanjutkan menyusui hingga 24 bulan setelah bayi lahir (Fajar et al., 2023).

Pemerintah Kecamatan Lais sangat mendukung adanya percepatan penurunan stunting yang dilakukan di wilayah kecamatan lais dikarenakan suatu program nasional yang harus didukung secara bersama-sama pada pemerintah kabupaten atau kecamatan dan dinas-dinas terkait dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Musi Banyuasin.

#### b. Komunikasi Eksternal

Komunikasi Eksternal menjelaskan hubungan antar pribadi memiliki upaya untuk berkomunikasi dengan dinas terkait tentang cara mereka saling memberikan informasi terkait apa yang akan mereka lakukan dan aktivitas-aktivitas yang sering dilaksanakan dalam kegiatan-kegiatan untuk mewakili organisasi melalui tugas yang akan dilakukan (Novianti et al., 2017). Berikut hasil wawancara peneliti dengan Dinas Kesehatan Musi Banyuasin bagian Kesga dan Gizi Masyarakat, beliau menyatakan:

*"Pada Dinas Kesehatan ini selalu ada program yang namanya pertemuan, rapat, dan disitulah ada satu program di Dinas Kesehatan ini disebut sebagai pengelolaan gizi buruk masyarakat di dalamnya ada aktivitas kegiatan berupa rapat jejaring dan jaringan percepatan penurunan stunting nah disitulah melibatkan lintas sektor salah satunya Kecamatan untuk menghadiri rapat tersebut. Apa yang kita bahas dalam rapat tersebut, yang pertama kita bahas dalam rapat tersebut yang pertama itu kita memaparkan capaian terbaru atau ter-update angka stunting di setiap kecamatan dan puskesmas dan peran apa, upaya apa yang sudah dilakukan di masing-masing kecamatan." (Wawancara, Senin 22 April 2024).*

Adanya peran organisasi masing-masing yang menjadikan tugas pokok setiap instansi atau dinas terkait untuk pencegahan dalam percepatan penurunan stunting yang ada di kecamatan lais dapat dilihat pada Gambar 4.

**Gambar 4.**  
**Penyampaian Bahaya Stunting ke Orang tua Balita**



*Sumber: diolah oleh peneliti, 2024*

Deutsch (2011) mengusulkan asumsi dua arah terhadap makna hubungan antarpribadi, yaitu; orientasi psikologis dan saling ketergantungan. Orientasi psikologis adalah latar belakang yang konsisten, rumit, motivasional, dan moral yang terlibat dalam situasi apa pun yang berfungsi untuk membimbing perilaku dan respons individu dalam situasi tersebut. Asumsi lebih lanjut adalah bahwa individu berbeda dalam kemampuan dan kesiapan mereka untuk terlibat dengan orientasi yang berbeda, dan bahwa keterlibatan mereka mungkin mempengaruhi hasil mereka (*outcomes*). Deutsch (2011) menggambarkan saling ketergantungan sebagai persepsi kekuatan suatu hubungan; misalnya, apakah suatu hubungan itu dingin, jauh, dangkal, atau dangkal, seperti hubungan dalam persahabatan kasual. Peran pemain dan probabilitas waktu hubungan menentukan kekuatan hubungan tersebut (Wish et al., 1976).

## **2. Peran yang Berhubungan dengan Informasi (*Informational Role*)**

Peranan yang berhubungan dengan informasi untuk mendapatkan informasi yang spesial atau berguna dari lingkungan luar dan kegiatan-kegiatan organisasi sebagai kelanjutan dari peranan interpersonal. Hubungan yang saling mempengaruhi dalam mendapatkan akses informasi kegiatan sebagai akses informasi bagi para anggota organisasi atau instansi terkait yang dipimpinya melibatkan berinteraksi dengan pihak eksternal seperti klien, badan regulasi, dan media. Komunikasi eksternal yang efektif membantu dalam mengelola hubungan dengan entitas-entitas ini dan menyelaraskan harapan mereka dengan tujuan proyek. Komunikasi eksternal memainkan peran penting dalam manajemen proyek, mempengaruhi bagaimana pihak luar memandang proyek dan hasilnya. Manajer harus menyampaikan informasi dengan akurat dan profesional untuk menjaga hubungan positif dengan pemangku kepentingan eksternal. Menjaga semua pihak terinformasi dan terlibat, manajer dapat mengurangi risiko,

menyelesaikan konflik secara proaktif, dan memastikan pelaksanaan proyek berjalan lancar (Young, 2024).

#### *a. Keterbukaan*

Keterbukaan yang dimaksudkan disini bahwa informasi yang diberikan dan dipublikasikan sudah sangat baik dan teratur sesuai dengan kaidah pengaksesan (Rahimallah & Ricky, 2023). Mudah dilihat oleh masyarakat yang memiliki gawai agar bisa membuka informasi terkait organisasi atau instansi di pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Camat Kecamatan Lais tentang informasi yang berhubungan percepatan penurunan stunting di wilayah kecamatan Lais, beliau mengungkapkan bahwa:

*“Untuk akses maupun informasi-informasi dalam penurunan stunting ini mudah, oleh karena di kecamatan Lais ini jaringan komunikasinya seperti internet dan hal ini karena ada internet desa tidak masalah bagi kita untuk penanganan stunting maupun menyampaikan informasi-informasi kepada warga kita, kepala desa, ketua tim ibu PKK, maupun lintas sektor terkait dalam rangka percepatan penurunan stunting ini tidak ada masalah. Kita sudah berkerja sama dengan kita dibantu juga dari pihak kominfo untuk membuat informasi-informasi agar apabila anak yang terjangkit stunting cepat dilaporkan kepada petugas kesehatan yang nantinya bersama-sama dengan tim percepatan untuk melihat langsung kondisi anak yang ada di wilayah desa kecamatan.” (Wawancara, Selasa 23 April 2024).*

Selama observasi lapangan dan berdasarkan hasil wawancara bersama orang tua balita stunting Desa Teluk Kijing I Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin menyatakan, bahwa perawat sangat sopan dan mudah dimengerti saat melakukan kunjungan ke rumah.

#### *b. Keadilan*

Wawancara dengan berbagai sumber yang ada, baik dari informan yang ada membahas bagaimana informasi yang dibagikan merata baik dari masyarakat Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin. Selanjutnya peneliti bertanya lebih lanjut kepada Puskesmas Lais dan Puskesmas Teluk Kijing II, apakah puskesmas melakukan pelayanan pada orang tua balita stunting tidak membedakan orang tua balita, pegawai puskesmas bagian Nutrisi Puskesmas Lais, mengungkapkan bahwa:

*“Tentu tidak membedakan baik dia mampu atau dari suku yang berbeda-beda atau agama yang berbeda. Pokoknya disamakan maupun beda pendidikan tetap disamakan.” (Wawancara, Rabu 24 April 2024).*

Keadilan dalam mendapatkan informasi yang ada di wilayah pemerintahan kecamatan maupun kabupaten sudah sangat baik, Kepala Camat Kecamatan Lais, dan Dinas Kesehatan Musi Banyuasin bagian Kesga dan Gizi Masyarakat sudah melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing untuk mencapai penyebaran merata.

### 3. Peranan Membuat Keputusan (*Decisional Role*)

Pembuatan keputusan merupakan peranan yang harus dijalankan. Posisi atasan dari suatu hubungan harus bertindak sebagai tokoh penghubung atau pemimpin dari organisasi yang dikelolanya agar tetap berjalan dengan terstruktur (Hanif & Azzuhri, 2018). Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Camat Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin apakah Keputusan yang selalu dibuat pemerintah kecamatan melalui diskusi sesama pemerintahan, beliau mengungkapkan bahwa:

*“Memang, stunting ini adalah program nasional. Jadi, program nasional ini sudah tentu tidak bisa kita mengambik keputusan secara sendiri jadi apabila ada laporan. Kami meminta laporan 3 (tiga) puskesmas ini tentang data-data anak yang terindikasi stunting jadi kami setiap bulan itu bersama dalam rapat triwulan. Rapat koordinasi bersama kepala desa yang ada di kecamatan lais, staf kecamatan lais melalui undangan setiap kepala desa, kemudian kepala-kepala puskesmas untuk rapat koordinasi dan ada pemaparan dari petugas kesehatan puskesmas tentang pasal permasalahan stunting apakah memang anak-anak terjangkit stunting sudah terdata semua ataukah masih ada yang belum terdata. Dan, kami mengambil yaitu 1 (satu) data dan disatukan baik dari Dinas KB maupun dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas jadi satu data.” (wawancara, Selasa 23 April 2024).*

Adapun rapat koordinasi yang di katakan bapak camat dalam penurunan stunting dapat dilihat pada Gambar 5.

**Gambar 5.**

#### **Rapat Koordinasi Lintas Sektor (Percepatan Penurunan Stunting)**



*Sumber: dokumentasi Kantor Kecamatan Lais Kabupaten Muba, 2024*

Terkait hal tersebut, keputusan yang dibuat sudah memenuhi aturan yang ada dibagian bidang masing-masing agar tetap sesuai dengan aturan yang ada, meskipun pembuatan keputusan melibatkan semua sektor, keputusan yang dibuat sudah sangat baik dari pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Masyarakat memiliki hak untuk merespon adanya keputusan yang dibuat oleh pemerintah kecamatan maupun kabupaten, responsivitas harus sesuai dengan tupoksi masing-masing dari organisasi yang mereka tuju agar mendapatkan jawaban dan penerimaan yang baik dan jelas (Dwi Permana, 2017). Berikut wawancara peneliti dengan kepala Camat Kecamatan Lais bagaimana kecamatan lais menerima pendapat atau aspirasi masyarakat, beliau mengatakan bahwa:

*“Kalau informasi stunting inikan kita memang butuh kalau untuk mendapatkan informasi dari masyarakat itu kan ada melalui Dasawisma, dasawisma ini digerkan oleh ibu-ibu PKK dan dipandu oleh ketua tim penggerak PKK kecamatan bersama mengkonfirmasi atau memberikan tugas kepada ketua tim ibu pkk desa itu, ibu kepada desa agar setiap bulan rutinitas untuk turun ketempat atau daerah posyandu dan pelayanan-pelayanan kesehatan yang ada di desa yaitu untuk menerima pendapat informasi-informasi penyakit stunting yang ada di desa.” (wawancara, Selasa 23 April 2024).*

Berikut wawancara peneliti dengan Dinas Kesehatan Musi Banyuasin tentang menanggapi kritikan yang ditujukan ke Dinas Kesehatan Musi Banyuasin, beliau mengungkapkan:

*“Selama paradigma stunting ini selalu dikaitkan dengan kesehatan tapi ternyata tidak jika berbicara stunting teman-teman harus melihat terlebih dahulu alur terjadinya stunting ternyata dinas kesehatan itu hanya menyumbang 30% kejadian stunting sisanya itu lintas sektor. Nah, ini kami tidak mau dijadikan kambing hitam, tetapi ternyata di masyarakat kalau berbicara stunting masih balik ke dinas kesehatan. harapannya, tolong diberikan sosialisasi atau upaya perubahan bahwasanya memang stunting itu akhirnya memang kesehatan tapi penyebab hulu-nya itu banyak faktornya utama ia kemiskinan. Jadi kalau kritiknya masih pada memang menajdi Tupoksi kami dari Dinas Kesehatan kami akan terima dan evaluasi. (wawancara, Senin 22 April 2024).*

Selanjutnya wawancara peneliti dengan nutrisionis puskesmas Kecamatan Lais Musi Banyuasin bagaimana menerima kritikan orang tua balita stunting, beliau mengatakan:

*“iya, untuk kritikan kami terima dan terus kami cari solusi orang tua-nya mau bagaimana dan kita juga ingin bagaimana. Misalnya, orang tuanya tidak anaknya dapat tindakan atau penanggulangan stunting kami akan pasti akan memberikan surat kalau orang tua itu tidak mau anaknya ditanggulangi stunting jadi orang tua tersebut menolak tindakan kami.” (wawancara, Rabu 24 April 2024).*

Menangani berbagai masalah stunting, peran tenaga kesehatan sangat penting untuk mengurangi stunting di Puskesmas. Hasil survei awal yang dilakukan di lapangan menunjukkan bahwa program nutrisi spesifik telah dilaksanakan, tetapi pelaksanaannya masih belum optimal. Salah satu hambatan yang dihadapi adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan gizi tertentu. Meskipun program tersebut telah disosialisasikan dan diinformasikan kepada masyarakat, masih ada tantangan dalam mendapatkan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya nutrisi tertentu, akses terbatas terhadap informasi, dan faktor budaya dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Menghadapi hambatan-hambatan ini, kader kesehatan dan tim pelaksana program perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui intensifikasi sosialisasi, pendekatan pribadi dan kelompok, serta menyesuaikan kegiatan dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat setempat. Selain itu, melibatkan pemimpin komunitas, kelompok ibu-ibu, dan pihak-pihak relevan lainnya juga dapat menjadi cara yang efektif untuk mendorong partisipasi komunitas dalam kegiatan spesifik gizi. Dengan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan pelaksanaan kegiatan spesifik gizi dapat mencapai hasil yang lebih optimal dan memberikan manfaat signifikan bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat (Harahap & Hasibuan, 2023). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan program pencegahan stunting oleh sektor kesehatan di Kecamatan Lais Musi Banyuasin mengidentifikasi masalah dan memberikan rekomendasi yang mungkin untuk meningkatkan program pencegahan stunting.

## **Pembahasan**

Penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa Peran Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan teori Peran (*Role Theory*) menurut Mintzberg dalam buku Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya yang ditulis oleh Miftah Thoha dapat diambil kesimpulan bahwa

Peran Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan:

1. Peran Hubungan Antarpribadi

Peran ayah juga turut andil dalam mendorong perilaku sehat. Ayah juga harus melindungi keluarga dari ancaman/risiko kesehatan. Peran seorang ayah yang baik juga akan mendorong para ayah untuk memiliki perilaku yang baik dalam mencegah stunting pada anak-anak kecil, karena kontak fisik antara ayah dan anak sangat penting untuk meningkatkan interaksi dan membangun kepercayaan diri ayah dalam kemampuannya merawat anaknya (Yunitasari et al., 2021) Keberhasilan menyusui eksklusif bagi ibu remaja memerlukan dukungan terus-menerus dari suami mereka mulai dari kehamilan hingga pasca melahirkan (Salasibew et al., 2019) Efek kognitif dan perilaku spesifik, khususnya peran ayah biologis, secara langsung terkait dengan tindakan yang mendukung kesehatan, termasuk persepsi positif terhadap hasil yang diinginkan dan diharapkan, hambatan minimal untuk bertindak, perasaan efektif dan kompeten, perasaan positif terhadap perilaku sehat, adanya dukungan sosial dari keluarga dan teman, panutan positif, serta ketersediaan lingkungan yang sesuai, aman, dan menyenangkan (Liem, 2019) Sebagian besar ayah memainkan peran aktif dalam keluarga, termasuk menjadi pengambil keputusan, melindungi dari bahaya atau risiko, dan memberikan dukungan kepada istri mereka, sementara beberapa ayah mengambil peran pasif dalam keluarga dan tidak memenuhi peran perlindungan mereka yang berbahaya atau berisiko, kecuali bahwa ayah memainkan peran pasif dan tidak berpartisipasi dalam merawat anak ketika anak sakit.

Keluarga memiliki peran penting dalam mencegah dan mengatasi masalah stunting pada anak-anak. Oleh karena itu, upaya untuk memberdayakan keluarga sangat diperlukan. Keluarga memainkan peran penting dalam mencegah stunting di setiap tahap kehidupan dari janin dalam kandungan hingga bayi baru lahir, balita, remaja, dewasa yang sudah menikah, dewasa yang hamil, dan seterusnya. Pengasuhan memainkan peran penting dalam mencegah anak-anak tumbuh dengan buruk atau terhambat pertumbuhannya akibat malnutrisi. Orang tua harus memastikan bahwa anak-anak mereka makan makanan yang bergizi seimbang dan menjaga kebersihan lingkungan mereka (Fajar et al., 2023).

Komunikasi adalah proses dalam menyampaikan informasi. Komunikasi juga dapat dilakukan secara lisan yang dapat dipahami oleh pengirim dan penerima pesan. Komunikasi juga dapat dilakukan dengan menggunakan gerakan tubuh, menunjukkan sikap tertentu, yang disebut komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal dilakukan jika secara verbal penerima pesan belum dapat memahami informasi yang diberikan oleh pengirim pesan (Firdausiyah,

2017). Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan secara tatap muka, yang dilaksanakan secara verbal dan non-verbal. Sebuah komunikasi akan berhasil jika para peserta dalam komunikasi tersebut kooperatif dan pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh penerima pesan. Komunikasi interpersonal yang dilakukan secara tatap muka akan membangun kedekatan antara komunikator dan penerima pesan (Firdausiyah, 2017). Mencapai komunikasi yang efektif, diperlukan strategi dalam komunikasi yang dapat menjadi panduan atau petunjuk dalam arah perubahan perilaku yang diharapkan. Strategi komunikasi dapat dilakukan oleh Kader dan petugas Puskesmas. Komunikasi harus disampaikan dengan baik agar proses komunikasi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan penerima pesan dapat menerima dan memahami pesan yang diberikan oleh Kader atau petugas Puskesmas (Yunus et al., 2021).

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, peran pemerintah daerah dapat dikategorikan sangat baik dan memuaskan, baik itu pemerintah kecamatan, dinas kesehatan, puskesmas-puskesmas yang ada di wilayah pemerintahan Kecamatan Lais saling berkaitan dengan adanya program nasional seperti percepatan penurunan stunting di Kabupaten Musi Banyuasin. Mereka juga memiliki tupoksi atau tugas pokok dan fungsi masing-masing hal tersebut membuat peran-peran yang mereka ambil menjadi sangat membantu masyarakat yang ada di wilayah pemerintahan. Pelaksanaan dilapangan terkait tentang komunikasi internal maupun eksternal sudah berjalan baik.

## 2. Peran yang Berhubungan dengan Informasi

Sebagai kata umum, "peran" mudah dipahami dan semua orang dapat memberikan contoh untuk menjelaskan apa itu peran. Namun, sebagai sebuah konsep, tidak ada definisi yang diterima secara umum (Zhu & Zhou, 2008). Meskipun ada kepercayaan umum bahwa peran adalah konsep penting, hingga saat ini belum ada konsensus tentang bagaimana peran harus direpresentasikan dan diintegrasikan ke dalam sistem informasi. Peran diberikan makna khusus di berbagai bidang penelitian, dan para peneliti menggunakan pemahaman khusus mereka untuk mendukung proyek penelitian dan pengembangan spesifik mereka. Banyak konsep peran yang berbeda telah diterapkan di berbagai bidang dan dibahas dari berbagai sudut pandang. Situasi sebenarnya dari aplikasi peran dalam sistem informasi pasti dalam kekacauan. Tidak ada pernyataan yang jelas tentang peran apa yang ada dalam makalah yang terlalu banyak untuk dicantumkan dalam referensi. Kami menghadapi banyak kesulitan dalam mengklasifikasikan hubungan konsep peran dan mekanisme di berbagai bidang aplikasi. Tidak banyak hubungan dan pewarisan antara mekanisme peran yang diterapkan dalam berbagai

studi dan aplikasi. Banyak makalah sistem informasi awal yang menggunakan peran tidak merujuk pada penelitian tentang peran dalam psikologi sosial di mana teori peran telah diselidiki secara sistematis. Peran tampaknya seperti hantu. Mereka ada di mana-mana dan setiap penjelasan tampak masuk akal, tetapi sulit untuk memahami, mengidentifikasi, dan sepenuhnya menentukan mereka. Oleh karena itu, masih ada kebutuhan untuk memperjelas konsep peran guna mendukung desain sistem informasi yang lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, peran pemerintah daerah dalam percepatan penurunan stunting di Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin ditinjau dari keterbukaan dan keadilan dalam mendapatkan informasi yang ada di wilayah pemerintahan kecamatan maupun kabupaten sudah sangat baik, dimana Kepala Camat Kecamatan Lais, dan Dinas Kesehatan Musi Banyuasin bagian Kesga dan Gizi Masyarakat sudah melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing untuk mencapai penyebaran merata dibantu dengan puskesmas-puskesmas seperti puskesmas Lais maupun puskesmas Teluk Kijing II dalam informasi yang ada di wilayah pemerintahan. Namun ada sebagian orang tua balita stunting di wilayah pemerintah Kecamatan Lais tidak mengikuti sosialisasi tentang bahaya stunting, pihak-pihak terkait harus bersama-sama mendorong orang tua dalam peduli kesehatan diri dan anak serta orang tua balita wajib pengecekan di puskesmas.

### 3. Peran Pembuat Keputusan

Setiap keputusan yang mereka ambil pasti mengikutsertakan lintas sektor agar keputusan menjadi lebih baik, baik itu koordinasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi agar berdampak ke semua sektor yang memiliki tugas yang sama dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Musi Banyuasin agar sesuai yang diharapkan dan semestinya.

Sistem dukungan ini tidak hanya berfokus pada keluarga utama itu sendiri tetapi juga pada anggota komunitas lainnya. Temuan menunjukkan bahwa banyak keputusan yang diambil oleh wanita hamil dan menyusui terkait nutrisi dipengaruhi oleh ibu mereka, mertua, suami, kerabat dekat, dan sistem dukungan lainnya. Peran sistem dukungan sangat penting karena dapat memberikan kenyamanan bagi para ibu baru. Selain pengasuhan yang baik, stimulasi psikososial juga diperlukan, termasuk simulasi oleh orang tua untuk bayi dan anak-anak kecil. Kebersihan dan sanitasi yang baik juga merupakan faktor penting dalam mempromosikan pertumbuhan dan perkembangan optimal anak-anak. Misalnya, sebuah studi menyimpulkan bahwa ketidakhadiran fisik ayah dalam pengasuhan anak berdampak negatif pada perkembangan emosional, sosial, psikologis, dan fisik anak. Ibu-ibu akan stres dan depresi jika mereka mengambil banyak tanggung jawab tanpa bantuan suami mereka (Zhu & Zhou, 2008).

Kami percaya bahwa sistem dukungan untuk ibu hamil atau menyusui dapat menjadi target utama dalam memberikan informasi kesehatan.

## **Kesimpulan**

Menerapkan konsep peran, masalah utamanya adalah bagaimana menentukan peran dan bagaimana menerapkan peran dalam sebuah sistem. Mekanisme peran tradisional dan konsep peran tidak memenuhi syarat untuk menyelesaikan tugas-tugas ini. Kita perlu mengembangkan mekanisme peran baru untuk mendukung spesifikasi peran yang lebih mudah dan jelas. Ada banyak topik penting yang masih belum dieksplorasi, memerlukan penelitian tambahan yang komprehensif. Sebuah peran dapat dianggap sebagai sekumpulan pesan masuk dan keluar. Kita masih perlu menemukan cara yang praktis dan efisien untuk membentuk antarmuka pengguna berdasarkan kumpulan pesan ini. Lebih banyak penelitian diperlukan untuk menyediakan alat spesifikasi peran. Kita perlu cara yang lebih struktural dan efisien untuk mengikat pesan ke sebuah peran. Seringkali sulit untuk memisahkan dampak buruk malnutrisi dari proses penyakit yang mendasarinya, terutama karena masing-masing dampak dapat menjadi penyebab dan/atau akibat dari dampak lainnya.

Peran pemerintah daerah dalam percepatan penurunan stunting di pemerintahan Kecamatan Lais memiliki kerja sama yang sudah sangat berkompeten dan sangat baik dalam menangani percepatan penurunan stunting yang ada di wilayah kecamatan Lais. Walaupun ada sebagai masyarakat atau orang tua balita stunting ini tidak mengikuti kegiatan dalam perbaikan gizi dan pemberian penjelasan tentang bahaya stunting. Pemerintahan Kecamatan Lais memiliki kegiatan bersama-sama dengan puskesmas dan Tim Ibu PKK mengunjungi rumah sasaran yang terjangkit gizi buruk atau stunting dan hal tersebut sangat sesuai dengan harapan dan tanggungjawab dari pemangku kepentingan di wilayah Kecamatan Lais.

Peran yang begitu penting juga melibatkan berbagai sektor seperti Dinas Kesehatan Musi Banyuasin bagian Kesga dan Gizi Masyarakat, puskesmas-puskesmas di wilayah Kecamatan Lais dalam rangka penurunan stunting. Puskesmas memiliki peran yang penting dalam penyampaian informasi tentang bahaya stunting pada orang tua balita yang ada di setiap desa di Kecamatan Lais tersebut. Namun, masih ada sebagian orang tua balita tidak memiliki kesadaran penyebab dari stunting dan bahaya stunting.

Adapun saran kepada pemerintahan Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin, untuk ditingkatkan lagi penyuluhan dan tetap konsisten dalam menjalankan setiap program nasional di wilayah pemerintahan khususnya pemerintahan Kecamatan Lais.

1. Dinas Kesehatan Musi Banyuasin, melaksanakan program nasional seperti percepatan penurunan stunting di Kabupaten Musi Banyuasin dijalankan sesuai peraturan terkait. Mengevaluasi, koordinasi, dan penganggaran melibatkan semua lintas sektor untuk terlibat dalam program percepatan penurunan stunting.
2. Puskesmas Lais dan Puskesmas Teluk Kijing II, dalam melaksanakan penyampaian informasi dan bantuan tentang bahaya stunting secepat mungkin ke orang tua balita. Program seperti kunjungan rumah yang dilakukan oleh puskesmas-puskesmas menunjukkan keseriusan menangani gizi buruk atau stunting yang disampaikan baik dari dinas kesehatan maupun pemerintahan Kecamatan Lais. Walaupun harus mengunjungi rumah di pelosok desa dan memakan waktu yang terbilang cukup lama.

### Daftar Pustaka

- Age Concern. (2006). *Hungry to be Heard: The scandal of malnourished older people in hospital*. Age Concern.
- Agustini, N. A., & Purnaningsih, N. (2018). Pengaruh Komunikasi Internal dalam Membangun Budaya Organisasi. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 16(1), 89–108. <https://doi.org/10.46937/16201825198>
- Almatsier, S. (2019). *Basic Principles of Nutrition Science*. PT. Main Library Gramedia.
- Asih, S. H. M., Nuraeni, A., Ratnasari, & Istiqomah, A. D. (2017). Pengaruh Sarapan Pagi terhadap Status Gizi Anak Usia Sekolah di SDN Gisikdrono 01 Semarang. *Urecol*, 215–222.
- BPS Musi Banyuasin. (2023). *Kecamatan Lais dalam Angka 2023*. CV. Grafika Sukses Mandiri.
- Brigitte Lantaeda, S., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2002). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 04(048), 243.
- Cresswell. John W. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- de Onis, M., Blössner, M., Borghi, E., Morris, R., & Frongillo, E. A. (2004). Methodology for estimating regional and global trends of child malnutrition. *International Journal of Epidemiology*, 33(6), 1260–1270. <https://doi.org/10.1093/ije/dyh202>
- Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI. (2018). *Mengenal Stunting dan Gizi Buruk. Penyebab, Gejala, dan Mencegah*. Kementerian Kesehatan Direktorat Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat. <https://promkes.kemkes.go.id/content/?p=8486>
- Dwi Permana, H. (2017). *Administrative Responsibility (Studi Tentang Tanggung Jawab*

- Administratif Terkait Upaya Perencanaan Pengembangan Penerangan Jalan Umum di Kota Surabaya*). 1-14. <https://www.kompasiana.com/ridwansaleh/pungli->
- Fajar, N. A., Zulkarnain, M., Taqwa, R., Sulaningsi, K., Ananingsih, E. S., Rachmayanti, R. D., & Sin, S. C. (2023). Family Roles and Support in Preventing Stunting: A Systematic Review. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 19(1), 50-57. <https://doi.org/10.14710/jpki.19.1.50-57>
- Fatimah, F., Massi, M. N., Febriani, A. D. B., Hatta Mochammad, Permatasari, T. A. E., Hidayati, E., Hamidah, H., Khumaidi, M. A., Akaputra, R., Turrahmi, H., & Anggraini, R. P. (2021). Effect of breastfeeding on children ' s health and its relationship to NRAMP1 expression : A crosssectional study. *Ann Med Surg*. <https://doi.org/10.1016/j.amsu.2021.103017>
- Firdausiyah, J. (2017). Konsep Diri Dalam Komunikasi Antar Pribadi. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 1-77.
- Fitri, H. N., & Esem, O. (2020). Pendidikan Gizi dengan Audio Visual Meningkatkan Pengetahuan Ibu Menyusui tentang Pemberian Makan pada Bayi dan Anak. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 9(04), 200-207. <https://doi.org/10.33221/jikm.v9i04.794>
- Hall, W. et al. (2009). Childbirth Fear, Anxiety, Fatigue, and Sleep Deprivation in Pregnant Women. *Obstet Gynecol Neonatal Nurs*.
- Hanif, M. K., & Azzuhri, M. (2018). Peran Antarpribadi, Pengelola Informasi, dan Pengambilan Keputusan dari Manajer dalam Mendorong Produktivitas Kerja Karyawan (Studi Kasus PSDM PT. Pupuk Kalimantan Timur). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 7(1), 1-21. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5396/4743>
- Harahap, M. U., & Hasibuan, R. (2023). Analysis Implementation of The Stunting Prevention Programme. *Journal of Health Science and Prevention*, 7(2). <https://doi.org/10.29080/jhsp.v7i2.1048>
- Haris, M., Prihayati, & Cornelis, N. (2022). Pengaruh Kelelahan Pada Ibu Hamil yang Bekerja. *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, 6(2), 289-295.
- JDIH Kabupaten Musi Banyuasin. (2023). *Pj Bupati: Lakukan Konvergensi Program untuk Cegah Stunting dan Hapus Kemiskinan Ekstrem*. JDIH Kabupaten Musi Banyuasin. <https://jdih.mubakab.com/berita-pj-bupati--lakukan-konvergensi-program-untuk-cegah-stunting-dan-hapus-kemiskinan-ekstrem.html>
- Kementerian Kesehatan. (2022). *Mengenal Apa itu Stunting*. Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/1388/mengenal-apa-itu-stunting](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1388/mengenal-apa-itu-stunting)
- Kementerian Kesehatan. (2023). *Prevalensi Stunting di Indonesia Turun ke 21,6% dari 24,4%*.

- <https://ayosehat.kemkes.go.id/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244>  
Kementerian PPN. (2018). *Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota*. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
- Khan, Z. R., Amudavi, D. M., Midega, C. A. O., Wanyama, J. M., & Pickett, J. A. (2008). Farmers' perceptions of a "push-pull" technology for control of cereal stemborers and Striga weed in western Kenya. *Crop Protection*, 27(6), 976–987. <https://doi.org/10.1016/j.cropro.2007.12.001>
- Laily, L. A., & Indarjo, S. (2023). Literature Review: Dampak Stunting terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Anak. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 7(3), 354–364. <https://doi.org/10.15294/higeia.v7i3.63544>
- Liem, A. (2019). Beliefs, attitudes towards, and experiences of using complementary and alternative medicine: A qualitative study of clinical psychologists in Indonesia. *European Journal of Integrative Medicine*, 26(August 2018), 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.eujim.2019.01.003>
- Maulida, M., & Suriani, S. (2021). Pengaruh Komunikasi Dan Mobilisasi Kader Posyandu Terhadap Upaya Pencegahan Stunting. *Jurnal Keperawatan Sriwijaya*, 8(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.32539/jks.v8i1.15734>
- Moffat, R., Sayer, A., DeCook, K., Cornia, A., Linehan, M., Torres, S., Mulokozi, Generose Crookston, Benjamin Hall, C., & West, J. (2022). A National Communications Campaign to Decrease Childhood Stunting in Tanzania: An Analysis of the Factors Associated with Exposure. *BMC Public Health*, 22(1), 1-1-. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12889-022-12930-6>
- Mustika, W., & Syamsul, D. (2018). Permasalahan Anak Pendek (Stunting) dan Intervensi untuk Mencegah Terjadinya Stunting (Suatu Kajian Kepustakaan). *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 2(6), 254–261. <https://doi.org/10.33085/jkg.v1i3.3952>
- Novianti, R. D., Sondakh, M., & Rembang, M. (2017). Komunikasi Antarpribadi dalam Menciptakan Harmonisasi (Suami dan Istri) Keluarga di Desa Sagea Kabupaten Halmahera Tengah. *Acta Diurna*, 6(2), 5.
- Pratiwi, R., Sari, R. S., & Ratnasari, F. (2021). Dampak status gizi pendek (stunting) terhadap prestasi belajar: A literature review. *Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan*, 12(2), 10–23. <https://stikes-nhm.e-journal.id/NU/article/view/317/284>
- Rahayu, I., Musthofa, S. B., Kartini, A. ", & Kartini, A. (2022). Interpersonal Communication Strategy (ICS) in Overcoming Stunting: A Review. *International Journal of Health, Education and Social (IJHES)*, 5(7), 43–54. [www.ijhes.com](http://www.ijhes.com)

- Rahimallah, M. T. A., & Ricky, R. (2023). Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi). *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2), 62–75. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i2.2911>
- Peraturan Presiden tentang Percepatan Penurunan Stunting, Pub. L. No. 72 (2021).
- Salasibew, M. M., Moss, C., Ayana, G., Kuche, D., Eshetu, S., & Dangour, A. D. (2019). The fidelity and dose of message delivery on infant and young child feeding practice and nutrition sensitive agriculture in Ethiopia: A qualitative study from the Sustainable Undernutrition Reduction in Ethiopia (SURE) programme. *Journal of Health, Population and Nutrition*, 38(1), 1–12. <https://doi.org/10.1186/s41043-019-0187-z>
- Siregar, A. E., Sinaga, R., Surbakti, I. S., Sari, J., Sari, R. P., & Sari, D. P. (2023). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Minat Kunjungan Ulang Antenatal Care di Klinik Pratama Sahabat Bunda Tahun 2022. *Jurnal Medika Husada*, 3(1), 10–24. <https://doi.org/10.59744/jumeha.v3i1.37>
- Soares, A., Nurpratiwi, R., & Makmur, M. (2015). Peranan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(2), 231–236.
- Soekanto, S. (2002). *Teori Peranan*. Bumi Aksara.
- Soofi, Sajid Bashir, Nawaz, Gul Khan, Ariff, S., Rizvi, Arjumand Hussainyar, M. A., Garzon, C., Ahimbisibwe, Martin Sadeed, R., & Reshad, A. (2021). Effectiveness of Specialized Nutritious Foods and Social and Behavior Change Communication Interventions to Prevent Stunting among Children in Badakhshan, Afghanistan: Protocol for a Quasi-Experimental Study. *Methods and Protocols*, 4(3), 1–13.
- Stratton, R. J., Ceri J. Green, & Elia, M. (2003). *Disease-related malnutrition: an evidence-based approach to treatment*. Oxon:Cabi Publishing.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Takeuchi, M., Rahman, M., Ishiguro, A., & Nomura, K. (2014). Long Working Hours and Pregnancy Complications: Women Physicians Survey in Japan. *BMC Pregnancy and Childbirth*. <https://doi.org/10.1186/1471-2393-14-245>
- Thoha, M. (2019). *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Rajawali Pers.
- Vaktskjold, A, Tri, D. Van, Phi, D. T., & Sandanger, T. (2010). Stunted growth in a cohort of two-year olds in the Khanh Hoa province in Vietnam - a follow-up study. *Journal of Rural and Tropical Public Health*, 9, 77–81. [http://www.jcu.edu.au/jrtph/vol/JRTPH\\_vol9\\_p77-81\\_Vaktskjold.pdf](http://www.jcu.edu.au/jrtph/vol/JRTPH_vol9_p77-81_Vaktskjold.pdf)
- Vaktskjold, Arild, Tri, D. Van, Odland, J. O., & Sandanger, T. (2010). Parity and Birth Weight in the

- Khanh Hoa Province, Vietnam. *The Open Women's Health Journal*, 4(1), 1–4.  
<https://doi.org/10.2174/1874291201004010001>
- Wardani, L. K., Aulia, V., Hadhikul, M., & Kardila, M. (2023). Risks of Stunting and Interventions to prevent Stunting. *Journal of Community Engagement in Health*, 6(2), 79–83.  
<https://doi.org/10.30994/jceh.v6i2.528>
- Wish, M., Deutsch, M., & Kaplan, S. J. (1976). Perceived dimensions of interpersonal relations. *Journal of Personality and Social Psychology*, 33(4), 409–420.  
<https://doi.org/10.1037//0022-3514.33.4.409>
- Yadika, A. D. N., Berawi, K. N., & Nasution, S. H. (2019). Pengaruh Stunting terhadap Perkembangan Kognitif dan Prestasi Belajar. *Jurnal Majority*, 8(2), 273–282.
- Young, J. (2024). *Informational Roles for Managerial Leadership in Project Management*. Project Widgets. <https://projectwidgets.com/informational-roles-for-managerial-leadership-in-project-management/>
- Yunitasari, E., Pradanie, R., Arifin, H., Fajrianti, D., & Lee, B. O. (2021). Determinants of stunting prevention among mothers with children aged 6–24 months. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 9, 378–384. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2021.6106>
- Yunus, M. R., Utami, A. K., & Aliah, M. N. (2021). Strategi Komunikasi Puskesmas Pasi Kepada Masyarakat Kampung Samberpasi dalam Mencegah Stunting pada Anak Usia Dini melalui Program 1 Rumah 1 Kelor. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(4), 1538–1543. <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2603>
- Zhu, H., & Zhou, M. C. (2008). Roles in information systems: A survey. *IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics Part C: Applications and Reviews*, 38(3), 377–396.  
<https://doi.org/10.1109/TSMCC.2008.919168>

## Evaluasi Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Era Revolusi Industri 4.0

Alvina Sevtiani<sup>1</sup>, Zailani Surya Marpaung<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Indonesia  
(email: sevtianialvina05@gmail.com)

### Abstrak

Tulisan ini bertujuan menjelaskan evaluasi kinerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Era Revolusi Industri 4.0, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan pendorong kinerja pada organisasi ini. Dalam upaya mencapai tujuan bersama dan meningkatkan eksistensi organisasi diperlukan manajemen dalam suatu organisasi. Manajemen sebagai pengendali atau pengelola dalam suatu organisasi saja tidaklah cukup, dianjurkan perlu dilakukannya evaluasi kinerja terutama pada era revolusi industri 4.0. Kinerja pada organisasi berbeda antara satu dengan lainnya. Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih terdapat kekurangan yaitu ketidakdisiplinan dalam bekerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi dan wawancara. Pemilihan informan pada penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan dimensi kuantitas dan kualitas kerja sudah cukup baik. Namun pada dimensi ketepatan waktu dalam bekerja belum optimal.

### Kata kunci:

organisasi; manajemen; evaluasi; kinerja; revolusi

### Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari organisasi sering kita jumpai terutama di era revolusi 4.0 saat ini. Menurut Ismail (2022), era revolusi industri 4.0 adalah era penggabungan teknologi otomatisasi dengan teknologi siber. Organisasi membantu kita melaksanakan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik sebagai individu. Organisasi didirikan karena beberapa tujuan tertentu yang hanya dapat dicapai apabila dilakukan bersama-sama, apakah tujuan itu berupa pemberian pendidikan, sosial dan lain-lain. Menurut Mooney dalam Manullang (2012), organisasi adalah setiap bentuk perserikatan manusia guna mencapai tujuan bersama.

Dalam upaya mencapai tujuan bersama dan meningkatkan eksistensi organisasi diperlukan manajemen dalam suatu organisasi. Menurut Hasibuan (2022), manajemen berasal dari kata *to manage*, yang artinya mengatur. "Manajemen adalah suatu ilmu atau seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumberdaya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu" (Hasibuan, 2022:1).

Menurut Vecchio dalam Wibowo (2016:379), manajemen sebagai pengendali atau pengelola dalam suatu organisasi saja tidaklah cukup, dianjurkan perlu dilakukannya evaluasi kinerja. "...Evaluasi kinerja dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap hasil kerja atau prestasi kerja yang diperoleh suatu organisasi, tim, atau individu" (Wibowo, 2016:189). Evaluasi kinerja pada suatu organisasi umumnya bersifat tahunan sehingga dapat memperoleh gambaran kinerja organisasi selama satu tahun.

"Secara sederhana, kinerja dapat diartikan sebagai sebuah pencapaian hasil atau *degree of accomplishment*" (Pardede et., al 2023). Kinerja menjelaskan capaian pelaksanaan tugas oleh seluruh komponen organisasi" (Tsauri, 2014). "...Kinerja merupakan catatan yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi pekerjaan tertentu atau aktivitas-aktivitas selama periode tertentu dan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi" (Sudarmanto, 2009:25). Nazmah et al., dalam Damanik (2023) mengemukakan bahwa bagi suatu kinerja organisasi merupakan hasil dari serangkaian kegiatan kerjasama antar anggota atau unit organisasi untuk mencapai tujuan bersama organisasi.

Adapun dasar hukum yang menaungi kinerja terkait dengan pelaksanaan pemerintahan yang baik dari suatu organisasi sektor publik ialah tertuang dalam butir pertama Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menerangkan bahwa diwajibkan kepada setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya.

Menurut Soesilo dalam Nogi (2005:180), kinerja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: (a) struktur organisasi, (b) kebijakan pengelolaan seperti visi misi, (c) sumber daya manusia, (d) sistem informasi manajemen berkenaan dengan pengelolaan *database* yang mempertinggi kinerja organisasi, dan (e) sarana prasarana yang berhubungan dengan penggunaan teknologi dalam aktivitas organisasi. Kasmir (2016) mengatakan bahwa kinerja dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain: (a) kemampuan dan keahlian, (b) pengetahuan, (c) rancangan kerja, (d) kepribadian, (e) Motivasi kerja, (f) kepemimpinan, (g) gaya kepemimpinan, (h) budaya organisasi, (i) kepuasan kerja, (j) lingkungan kerja, (k) loyalitas, (l) komitmen, (m) disiplin kerja.

Dasar hukum yang melatarbelakangi terbentuknya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ialah Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang menyatakan bahwa

perangkat daerah provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, organisasi ini merupakan penyelenggara di bidang kearsipan dan perpustakaan, secara teknis berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pada bidangnya, organisasi ini berupaya memberikan kinerja terbaiknya melalui sasaran startegis yang telah ditetapkan.

Berikut hasil ketercapaian kinerja sasaran strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2020 (seperti pada Tabel 1).

**Tabel 1.**

**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis**

**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020**

Tahun	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	79	81,07
2020	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Persentase minat baca masyarakat	10	63,70
	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Persentase Kelembagaan Kearsipan yang Mengelola Arsip sesuai Standar	30	28,21
	Meningkatnya Tata Kelola arsip daerah	Persentase arsip yang terkelola	20	66,40

*Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2022)*

Berdasarkan Tabel 1, diketahui terdapat capaian kinerja untuk sasaran strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 belum mencapai target sesuai dengan yang diharapkan, yaitu pada sasaran strategis: meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan kearsipan dengan realisasi hanya 28,21% dari target sebesar 30%.

Sebagaimana dikemukakan oleh Nanawi dalam Pardede (2023), kinerja organisasi sebagai fungsi hasil-hasil pekerjaan atau kegiatan dalam suatu organisasi dapat dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkannya selama periode waktu tertentu. Kinerja organisasi tentu melibatkan berbagai macam unsur manajemen termasuk sumber daya manusia dengan perilaku yang relevan terhadap tujuan organisasi. Sumber daya yang baik secara tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja organisasi, begitu pula sebaliknya. Contohnya apabila sumber daya manusia melakukan

tindakan yang kurang diharapkan oleh organisasi terkait kedisiplinan kerja. Hal ini dapat kita ketahui melalui tingkat kehadiran sumber daya manusia dalam bekerja. Berikut gambaran tingkat kehadiran sumber daya manusia Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 (seperti pada Tabel 2).

**Tabel 2.**  
**Tingkat Absensi Pegawai**

**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020**

Bulan	Jumlah Pegawai	Jumlah Hari Kerja	Jumlah Tidak Hadir (Orang)					Rata-rata Kehadiran Pegawai (Hari)	Hadir (%)	Tidak Hadir (%)
			C	DL	TD	DKLT	TK			
Januari										
Februari										
Maret										
April										
Mei										
Juni										
Juli	63	22	20	0	0	0	9	20	89,54	10,46
Agustus	63	18	23	12	0	0	1	15	84,57	15,43
September	62	22	20	16	0	0	4	18	79,69	20,31
Oktober	64	19	22	20	0	2	3	14	74,51	25,49
November	64	21	21	35	0	10	10	13	67,25	32,75
Desember	63	19	28	28	0	3	8	13	67,25	32,75
								15,50	77,14	22,87

*Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2022)*

Berdasarkan Tabel 2, diketahui pada tahun 2020 masih ada sumber daya manusia atau pegawai pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang absensinya kehadirannya belum optimal atau belum sesuai harapan. Hal ini dilihat dari banyaknya data tingkat absensi “tanpa keterangan” pada bulan Juli s.d Desember, dengan rincian absensi tanpa keterangan sebagai berikut: pada bulan Juli sebanyak 9 orang, bulan Agustus sebanyak 1 orang, bulan September sebanyak 4 orang, bulan Oktober sebanyak 3 orang, serta bulan November sebanyak 10 orang, dan bulan Desember sebanyak 8 orang yang absensi kehadirannya tanpa keterangan. Rata-rata kehadiran pegawai terendah terjadi di bulan November dan Desember, masing-masing berjumlah sebanyak 13 hari kerja. Cuti terbanyak diambil oleh 28 orang pegawai pada bulan Desember. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat absensi pegawai “tanpa keterangan” dan “cuti” yang cukup tinggi diatas tentu dapat berdampak pada jam kerja yang berkurang. Dari kondisi tersebut diasumsikan bahwa pada

realisasinya meskipun di era revolusi industri 4.0 saat ini telah tersedia peralatan teknologi canggih melalui mesin absensi dengan menggunakan *fingerprint* sebagai alat elektronik untuk memonitor kehadiran pegawai, absensi sumber daya manusia di organisasi ini masih belum cukup baik. Teknologi belum dapat dimanifestasikan dengan baik apabila hanya sekelompok orang saja yang mempunyai keterlibatan didalamnya.

Evaluasi Kinerja di era revolusi industri 4.0 perlu dilakukan agar Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat membuat terobosan dan strategi baru untuk memperbaiki kinerja organisasinya dalam menghadapi ancaman disrupsi global era saat ini. Berdasarkan latar belakang di atas, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Era Revolusi Industri 4.0?
2. Apa faktor penghambat Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Era Revolusi Industri 4.0?

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan evaluasi kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di era revolusi industri 4.0 serta mengidentifikasi faktor penghambatnya.

Penelitian mengenai kinerja organisasi juga dilakukan oleh Pradita dengan judul Analisis Kinerja Pegawai Pada Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017, menunjukkan bahwa kinerja pegawai pada instansi ini belum optimal. Faktor penghambat kinerja Badan Kepegawaian Daerah pada Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 adalah bersumber dari faktor eksternal, yaitu masih terdapat ketidaksesuaian formasi pekerjaan dengan kompetensi individu. Kinerja organisasi juga diteliti oleh Destriasari dengan judul Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, menunjukkan bahwa kinerja pegawai di Kantor tersebut belum optimal. Faktor yang menghambat kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang antara lain: (a) masih ada tumpang tindih pekerjaan, pegawai mengerjakan pekerjaan yang bukan tupoksi dan tanggungjawabnya, (b) kualitas kerja yang dicapai kurang optimal karena masih ada ketidakdisiplinan dalam bekerja, dan (c) kurangnya ketegasan pimpinan terhadap kinerja pegawai.

## Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan menjelaskan evaluasi kinerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Era Revolusi 4.0, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan pendorong kinerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Era

Revolusi 4.0. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti kondisi pada obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*. Langkah-langkah penelitian menghasilkan data deskriptif kualitatif dalam bentuk kata-kata tertulis/lisan dari orang-orang dan perilaku yang bermaksud untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat serta hubungan antar fenomena dalam kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di era revolusi industri 4.0.

### **1. Informan Penelitian**

Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang dapat memberikan informasi terkait, dianggap perlu serta berkaitan utama dengan kinerja Dinas Kearsipan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada era revolusi industri 4.0. Pemilihan informan pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu dimana informan sengaja ditentukan berdasarkan pertimbangan peran dan fungsi informan sesuai fokus masalah penelitian, sehingga dapat memudahkan instrumen penelitian memahami situasi sosial yang diteliti. Bungin dalam Destriasari (2015) mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif, penentuan informan yang terpenting adalah bagaimana menentukan informan kunci atau situasi sosial tertentu yang syarat dengan fokus penelitian. Berikut informan dalam penelitian ini:

- 1) *Key Informant* (informan kunci) adalah Sekertaris Dinas, Pegawai Sub Koordinator Perencanaan, Kabid Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, Kabid Pelestarian Koleksi Nasional dan Pelestarian Naskah kuno, Kabid Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, Kabid Pengelolaan Arsip Daerah Provinsi.
- 2) Informan tambahan terdiri atas Pegawai Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, Pegawai Bidang Pelestarian Koleksi Nasional dan Pelestarian Naskah kuno, Pegawai Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, dan Pegawai Bidang Pengelolaan Arsip Daerah Provinsi.

### **2. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data**

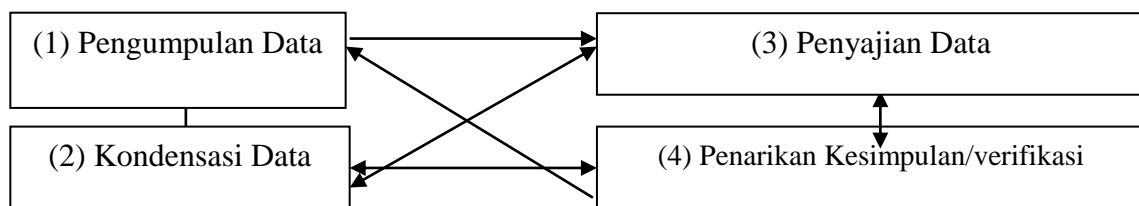
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan selama pelaksanaan maupun setelah selesai penelitian di lapangan. Analisis data pada penelitian ini menggunakan model interaktif oleh

Miles & Huberman (2014). Miles & Huberman (2014) menterjemahkan analisis data sebagai aktivitas analisis yang dilakukan secara interaktif, berlangsung terus menerus hingga tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data model interaktif pada penelitian ini dilakukan dengan kegiatan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berikut gambaran model interaktif Miles & Huberman (2014) (Gambar 1)

**Gambar 1.**

**Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman (2014)**



Sumber: Diolah Penulis, 2022

### 3. Teknik Keabsahan data

“...Teknik keabsahan data pada penelitian kualitatif dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan merupakan penelitian ilmiah atau tidak sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif antara lain adalah *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*” (Sugiono, 2016). Prosedur pengujian keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji *credibility* atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian, agar hasil penelitian yang dilakukan tidak diragukan. Pengecekan uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi teknik dan sumber. Triangulasi teknik adalah pengecekan dengan menggunakan beragam teknik atau cara dan waktu untuk mengungkap data. Triangulasi ini dilakukan kepada sumber data dengan membandingkan data-data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara triangulasi sumber adalah pengecekan dilakukan dengan cara mencari data dari sumber-sumber yang beragam, masih terkait satu sama lain atau dengan membandingkan data-data yang diperoleh dari wawancara dengan subjek penelitian. Triangulasi sumber dilakukan dengan wawancara kepada sumber daya manusia Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dianggap sesuai dengan topik atau permasalahan, untuk pengecekan terhadap kebenaran data.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Deskripsi Hasil Penelitian

Emerson dalam Putra (2022) menjelaskan bahwa manajemen terdiri atas 5 unsur, antara lain (a) manusia, (b) *money*, (c) *materials*, (d) *machines*, dan (e) *methods*.

(a) *Man* (manusia)

*Man* adalah unsur mutlak dan penting bagi manajemen suatu organisasi. Organisasi tidak akan berjalan tanpa adanya manusia. Manusia mengelola segala proses dalam kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi bahkan dalam memajukan organisasi. Berikut jumlah pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut jenis kelamin pada tahun 2020 (seperti pada Tabel 3).

**Tabel 3.**

**Jumlah Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020**

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	45
Perempuan	48
Jumlah	93

*Sumber: LAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020*

Berdasarkan Tabel 3, diketahui Jumlah sumber daya manusia hingga tahun 2020 sebanyak 93 orang, terdiri atas 45 laki-laki dan 48 perempuan. Pradita (2017) mengemukakan bahwa kunci utama kesuksesan sebuah organisasi adalah pada manusia sebagai sumber daya pelaksana semua kegiatannya. "...Manusia yang berpengetahuan, berkualitas dan berkapasitas merupakan aset penting organisasi, sehingga mampu mempertahankan posisi organisasi dalam suatu lingkungan yang kompetitif" (Pradita, 2017:1). Dari pernyataan ini dapat ditunjukkan bahwa peran sumber daya manusia tentu berpengaruh besar untuk kinerja suatu organisasi. Berikut sumber daya manusia Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut tingkat pendidikan pada tahun 2020 (seperti pada Tabel 4)

Berdasarkan Tabel 4, diketahui pada tahun 2020 jumlah sumber daya manusia/pegawai dengan kriteria pendidikan: tingkat pendidikan S3 sebanyak 1 orang, S2 5 orang, S1 51 orang, D3 sebanyak 12 orang, serta SLTA 23 orang, dan SD 1 orang.

**Tabel 4.**  
**Jumlah Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**  
**Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020**

Uraian	Tingkat Pendidikan							Jumlah	
	S3	S2	S1	D3	D2/D1	SLTA	SLTP		SD
Laki-Laki	1	2	25	3	-	14	-	-	45
Perempuan	-	3	26	9	-	9	-	1	48
Jumlah	1	5	51	12	-	23	-	1	93

Sumber: LAKIP DKPUS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

Dari Tabel ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan pegawai cukup baik, akan tetapi untuk menghadapi situasi kondisi sosial, ekonomi, dan permasalahan yang terjadi di masyarakat yang sangat kompleks seperti dampak dari perkembangan industri 4.0, dalam hal mengembangkan dan mempertahankan posisi organisasi dalam suatu lingkungan yang kompetitif, organisasi tetap harus berupaya memberikan pendidikan dan pelatihan kepada sumber daya manusianya. Dengan menempuh tingkat pendidikan atau mengikuti pelatihan tertentu, sumber daya manusia dapat mempunyai pengetahuan tertentu, yaitu cakap dalam melaksanakan tugas dan mudah mengembangkan diri pada bidang kerjanya juga dapat berpotensi bekerja lebih maksimal untuk meningkatkan kinerja organisasi.

(b) *Money*

*Money* (uang) adalah unsur penggerak yang mendukung pembiayaan kegiatan suatu organisasi dalam membeli peralatan atau material yang dibutuhkan dan membiayai gaji tenaga kerja. Keuangan disebut juga dengan anggaran. Menurut Nadjib (2021:69), anggaran adalah instrumen penting bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan publik untuk tercapainya tujuan bernegara. Berikut ditampilkan pagu anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 (seperti pada Tabel 5).

**Tabel 5.**  
**Pagu Anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**  
**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020**

Program	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Total (Rp)
Peningkatan Pelayanan Pemerintah		2.412.658.500,00	8.497.873.863,00
Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan		307.618.790,00	307.618.790,00
Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan		114.268.460,00	114.268.460,00
Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan		119.030.000,00	119.030.000,00
Peningkatan Pengelolaan dan Pelestarian Arsip		129.938.000,-	129.938.000,00
Jumlah	8.497.873.863,00	3.083.513.750,00	11.581.387.613,00

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2022)

Berdasarkan Tabel 5, diketahui bahwa pada tahun 2020 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengelola anggaran atau dana APBD dengan alokasi sebesar Rp. 11.581.387.613, terdiri atas belanja tidak langsung yaitu sebesar Rp.8.497.873.863, dan belanja langsung sebesar Rp. 3.083.513.750.

(c) *Materials*

*Materials* atau bahan baku adalah unsur utama dalam manajemen suatu organisasi untuk diolah sampai menjadi produk akhir untuk diserahkan pada konsumen. ..."Konsep layanan informasi perpustakaan dapat menjangkau seluruh elemen, sehingga mendorong peningkatan kompetensi setiap individu hingga dapat menghidupkan ekonomi kreatif masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat" (Prasetyo & Utami, 2020). Berikut jam pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (seperti pada Tabel 6).

**Tabel 6.**  
**Jadwal Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**  
**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

No.	Hari	Waktu Layanan	Keterangan
1	Senin-Jumat	08.00-16.00	Buka
2	Sabtu-Minggu	Tidak ada	Tutup
3	Libur Nasional/Cuti	Tidak ada	Tutup

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2022)

(d) *Machines* (Mesin)

*Machines* ini maksudnya adalah peralatan, teknologi ataupun fasilitas penunjang yang berguna untuk mengelola dan membantu mempercepat proses kerja organisasi, sehingga membawa banyak kemudahan dan keuntungan maksimal dalam bekerja. Unsur *machines* disebut juga sarana prasana. Berikut sarana dan prasarana Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (seperti pada Tabel 7).

**Tabel 7.**

**Aset Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

No.	Aset yang Tersedia	Jumlah	Keterangan
1.	Ruang Administrasi	1	Ruang
2.	Ruang Pelayanan	1	Ruang
3.	Ruang Pengolahan Bahan Pustaka	1	Ruang
4.	Mobil Dinas	2	Unit
5.	Mobil Perpustakaan Keliling	2	Unit
6.	Mobil Sadar Arsip	1	Unit
7.	Sepeda Motor Dinas	2	Unit
8.	V.S.W.R <i>Standing Review</i>	1	Set
9.	Lemari Penyimpanan	2	Unit
10.	Rak Penyimpanan	1	Set
11.	Mesin Tik Manual	3	Unit
12.	Mesin Tik Elektronik	1	Unit
13.	Mesin <i>Calculator</i>	4	Buah
14.	Mesin <i>Fotocopy</i>	2	Unit
15.	Lemari Besi	3	Buah
16.	Rak Buku Perpustakaan	1	Paket
17.	<i>Filling</i> Besi/Metal	6	Buah
18.	<i>Filling</i> Kayu	1	Unit
19.	Lemari Kayu	2	Unit
20.	Lemari Refrensi	1	Unit
21.	Papan Visual	1	Unit
22.	Genset	3	Unit
23.	Mesin Laminating	1	Unit
24.	Rak Kayu	4	Buah
25.	Meja Katalog Elektronik	1	Buah
26.	Meja Rapat	2	Buah
27.	Meja Resepsionis	1	Unit
28.	Kursi Rapat	60	Buah
29.	Kursi Tamu	1	Set
30.	Kursi Putar	1	Paket
31.	Kursi Biaya	2	Paket
32.	Meja Komputer	3	Paket
33.	Meja Biro	3	Paket
34.	Sofa	1	Set
35.	Almari Katalog	1	Set
36.	Almari Buku Referensi	1	Set
37.	Almari Buku Anak-anak	1	SEt
38.	Kursi Layanan	1	Set
39.	Kursi Kerja	19	Paket
40.	Meja Baca	2	Paket
41.	Rak TV	1	Unit
42.	Karpet	1	Set

No.	Aset yang Tersedia	Jumlah	Keterangan
43.	Vacum Cleaner	4	Set
44.	Mesin Potong Rumput	1	Buah
45.	Lemari Es	2	Unit

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2022)

Berdasarkan Tabel 7, diketahui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai mempunyai 88 sarana dan prasarana sebagai aset yang tersedia.

(e) *Methods*

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Organisasi ini menyelenggarakan fungsi:

(a) Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan provinsi; (b) Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan provinsi; (c) Penyelenggaraan administrasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; (d) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dan (e) Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

**2. Pembahasan**

Era revolusi industri 4.0 mendatangkan inovasi teknologi disruptif mengaburkan batas antara fisik, digital, dan biologis di semua sektor, serta mengubah cara manusia hidup dan bekerja. Terobosan teknologi ini memang dapat menciptakan peluang di bidang ekonomi, sosial, dan pengembangan diri, namun kecerdasan buatan ini juga akan dapat mengambil alih pekerjaan manusia. Pengaruh era revolusi industri 4.0 bagi suatu organisasi mengharuskannya untuk dapat memberikan kesempatan kepada pegawai, yaitu kesempatan untuk terus mengembangkan potensi sehingga mampu dan siap bersaing di era revolusi industri 4.0. sumber daya manusia pada era ini perlu meningkatkan kompetensi dan meningkatkan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi digital seperti big data, *internet of things*, *Artificial Intelligence* dan *lain-lain* untuk menjawab tuntutan perkembangan zaman. Menghadapi perubahan sekaligus tantangan era disrupsi 4.0, kesiapan pembangunan sumber daya manusia pada suatu organisasi sangat diperlukan.

...” Era revolusi 4.0 melalui teknologi informasi dan komunikasi memberi dampak perubahan pada kebutuhan pengguna, sehingga perpustakaan haruslah memaksa untuk beralih dari lingkungan manual ke otomatis sama halnya juga kepada Dinas Kearsipan dan perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung “(Syamsuddin, 2023). Organisasi ini harus

berusaha untuk terus meningkatkan kinerja organisasinya. Menurut Mathis dan Jackson (2013), kinerja adalah proses evaluasi berapa baik kinerja organisasi dapat dilaksanakan terkait pekerjaan pada suatu organisasi dibandingkan dengan satu set standar dan dapat dikomunikasikan dengan para pegawai yang bekerja pada organisasi tersebut. Beberapa dimensi yang dapat digunakan untuk menjelaskan mengenai kinerja antara lain: (a) kuantitas kerja, (b) kualitas kerja, dan (c) ketepatan waktu dalam bekerja.

**a. Analisis Evaluasi Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada Era Revolusi Industri 4.0 Dilihat Dari Dimensi Kuantitas Kerja**

Kuantitas kerja suatu organisasi dapat diketahui melalui jumlah aktivitas yang ditugaskan beserta hasilnya dalam kurun waktu tertentu sesuai tanggung jawab dan waktu yang telah ditentukan. Kuantitas hasil kerja dari suatu kegiatan tentunya menggunakan sumber daya dengan tepat sasaran, atau secara efektif dan efisien. Kuantitas hasil kerja dapat diupayakan dengan melaksanakan program kerja organisasi yang telah disepakati. Setelah kegiatan kerja organisasi selesai dilaksanakan, maka diperoleh gambaran jumlah (kuantitas) hasil kerjanya, apakah para pegawai dapat membantu pemberian hasil terbaik bagi kinerja organisasinya seperti yang diharapkan atau tidak.

Hasil lainnya menyatakan bahwa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyelenggarakan berbagai program, seperti pada tahun 2020, organisasi ini telah menyelenggarakan 4 program dengan turunan sebanyak 11 kegiatan kerja. Berikut keluaran dari masing-masing program

- (1) program pengembangan bahan pustaka dan layanan perpustakaan, dilaksanakan dengan 2 kegiatan kerja yaitu pertama: kegiatan penyusunan bibliografi induk daerah dan kegiatan katalog induk daerah dengan keluaran 2 dokumen pada setiap kegiatannya, dan kedua: kegiatan koleksi hasil terbitan daerah dengan keluaran sebanyak 376 bahan pustaka yang terkelola dan terpelihara; Sedangkan layanan perpustakaan, dilaksanakan dengan 2 kegiatan kerja yaitu pertama: kegiatan pelayanan perpustakaan keliling menghasilkan keluaran yakni fasilitas layanan perpustakaan keliling bagi masyarakat, pelajar atau mahasiswa di 4 kabupaten seperti Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka dan sebagainya. Kedua: kegiatan pengembangan minat dan budaya baca pemerintah provinsi menghasilkan keluaran sebanyak 200 orang peserta lomba, terdiri dari lomba bercerita bahasa daerah, menulis puisi untuk anak SD, penulisan cerita rakyat daerah dan lainnya;
- (2) program pengembangan sumber daya perpustakaan, dilaksanakan dengan 2 kegiatan kerja diantaranya yaitu kegiatan lomba pustakawan terbaik tingkat provinsi yang menghasilkan keluaran sebanyak 13 sekolah yang mengikuti lomba pengelolaan perpustakaan sekolah

tingkat provinsi. Namun untuk kegiatan lomba pustakawan terbaik tingkat provinsi tidak dapat dilaksanakan karena telah terlaksana di APBN;

- (3) program peningkatan pembinaan dan pengawasan kearsipan, dilaksanakan dengan 2 kegiatan kerja yaitu pertama: kegiatan lomba kearsipan di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghasilkan keluaran 4 organisasi perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku, dan kedua: kegiatan pengawasan kearsipan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghasilkan keluaran 8 organisasi perangkat daerah yang mengelola arsip sesuai standar;
- (4) program peningkatan pengelolaan dan pelestarian arsip, dilaksanakan dengan 3 kegiatan kerja yaitu pertama: kegiatan pemeliharaan rutin atau berkala arsip daerah dengan keluaran 251 arsip yang terkelola, kedua: kegiatan penelurusan sejarah pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan keluaran sebanyak 150 buku terkait sejarah pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan ketiga: kegiatan pendampingan pengelolaan arsip dinamis di kabupaten/kota, namun kegiatan ini dilaksanakan oleh pihak lain/dirasionalisasi. Rasionalisasi adalah suatu upaya untuk mengubah alur kerja ad hoc/panitia/organisasi yang dibentuk dalam jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan program khusus yang membutuhkan panitia khusus.

Semua kuantitas kerja tersebut tidak lepas dari peran kepala dinas bersama setiap kepala bidang. Peran mereka yaitu memberikan surat perintah tugas kepada pegawai yang dianggap perlu atau penting untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan agar dapat meningkatkan kinerjanya. Setiap kepala bidang memberikan arahan dan masukan terkait program kerja yang telah disepakati, dan mengontrol pengeluaran sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan program.

#### **b. Analisis Evaluasi Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada Era Revolusi Industri 4.0 Dilihat Dari Dimensi Kualitas Kerja**

Kualitas merupakan mutu atau tingkat dari bagus tidaknya, dalam arti tinggi rendahnya atau baik buruknya sesuatu. Kualitas kerja adalah suatu proses menilai prestasi kerja organisasi, apakah bekerja dengan baik, tertib, benar. Kualitas kerja organisasi dapat dilihat dari capaian kinerja sasaran strategis organisasi. Capaian kinerja diperoleh pada akhir pelaksanaan kegiatan kerja. Berikut gambaran capaian sasaran startegis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 (seperti pada Tabel 8).

**Tabel 8.**  
**Capaian Sasaran Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**  
**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020**

Sasaran	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan	Indeks kepuasan layanan perpustakaan	79	81,07	102,6
Meningkatnya minat baca masyarakat	Persentase minat baca masyarakat	10	63,70	636,96
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan kearsipan	Persentase kelembagaan kearsipan yang mengelola arsip sesuai standar	30	28,21	94,03
Meningkatnya tata kelola arsip daerah	Persentase arsip yang terkelola	20	66,40	332,01

Sumber: LAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 8, diketahui pada tahun 2020 telah memperoleh capaian sasaran strategis yang baik. Hal ini dapat dilihat dari setiap butir sasaran strategis yang ditargetkan dapat terealisasi dengan baik. Adapun sasaran strategis terbesar diperoleh pada sasaran strategis: minat baca masyarakat, yaitu sebesar 636,96%. Namun terdapat satu sasaran strategis yang tidak mencapai target pada realisasinya di tahun tersebut, yakni pada sasaran: meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan kearsipan. Sasaran startegis tersebut hanya mampu terealisasi 28,21% dari yang ditargetkan. Meskipun demikian, sasaran tersebut masih mampu memperoleh capaian kinerja sasaran startegis yang baik, yakni sebesar 94,03%.

Hasil lainnya menyatakan bahwa pada sasaran strategis “meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan”, target indeks kepuasan layanan perpustakaan adalah sebesar 79%, diperoleh realisasi capaian sekitar 81,07% (lebih dari target). Capaian sasaran ini juga sangat tinggi yaitu sebesar 102,6%. Hal tersebut tidak lepas dari peran kepala bidang pembinaan dan pengembangan perpustakaan yang meninstruksikan kepada pegawai bidang pembinaan dan pengembangan perpustakaan untuk membuat SKM (Survei Kepuasan Masyarakat). *Survey* tersebut dibuat sesuai dengan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hasil survei dikumpulkan dan dianalisa sesuai dengan butir-butir dalam rujukan dan diolah menggunakan aplikasi SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*), yaitu aplikasi yang digunakan untuk pengolahan dan menganalisis data yang memiliki kemampuan analisis statistik serta sistem manajemen data dengan lingkungan grafis. Survei ini relatif atau dilakukan minimal satu tahun sekali. Kepala Dinas juga menugaskan kepada para pegawai untuk mengikuti berbagai

sosialisasi, sehingga dapat mendukung tercapainya sasaran startegis untuk dapat terlaksana dengan baik. Dalam upaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, Kepala Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan juga menerapkan jadwal piket penjagaan perpustakaan bagi para pustakawannya, sehingga layanan perpustakaan tidak pernah kosong.

Dari pernyataan diatas, dapat diartikan bahwa sumber daya manusia pada bidang pembinaan dan pengembangan perpustakaan telah memiliki kompetensi work 4.0 sebagai kombinasi *hard skill*, *soft skill*, keahlian mengolah teknologi informasi komunikasi dan pengetahuan untuk menyongsong revolusi industri 4.0 dengan memanfaatkan dampak positif dari perkembangannya. Menurut Tahar, et al., kompetensi yang harus dimiliki sumber daya manusia *work* 4.0 diantaranya: (1) digitilisasi lingkungan kerja berdasarkan teknologi, (2), kolaborasi dengan sistem *cyber*, (3) Proses kerja fleksibel dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna, (4) Tugas-tugas mental, dan (5) Tim kerja.

Hasil lainnya menyatakan bahwa kualitas kerja organisasi ini belum maksimal yaitu pada sasaran meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan kearsipan. Sasaran startegis ini hanya mencapai 28,21% dari target 30%. Penyebabnya ketidaktercapaian ini terjadi karena jumlah Organisasi Perangkat Daerah, SMA/SMK, maupun SLB yang dapat mengelola arsip secara baku hanya sebanyak 11 Perangkat Daerah dari total sebesar 39 Perangkat Daerah. Meskipun demikian, sasaran ini masih dapat dikatakan cukup baik karena memperoleh persentase capaian sebesar 94,03%".

Terkait kualitas kerja suatu organisasi, perkembangan era revolusi industri 4.0 tentu mengharuskan organisasi berbasis digital dan inklusi sosial. Bondar (2019) menyatakan bahwa paradigma baru pengelolaan perpustakaan adalah perpustakaan menjadi ruang interaksi terbuka melalui strategi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

..."perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah perpustakaan yang memberikan fasilitas kepada masyarakat mengembangkan potensi dengan keragaman budaya, keinginan untuk menerima perubahan, hingga menawarkan kesempatan berusaha melindungi dan memperjuangkan hak asasi manusia" (Tebai, 2022).

Bondar (2019), kebijakan dan startegi bidang perpustakaan fokus pada tranformasi berbasis inklusi dengan melakukan: a) pembangunan, peningkatan konektivitas infrastruktur perpustakaan, b) peningkatan sumber bacaan terapan/praksis, dan c) peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan sebagai pendamping literasi bagi masyarakat. Sehingga, melalui budaya literasi indikator pembangunan makro dapat diselaraskan melalui rencana pembangunan nasional, provinsi, kabupaten.kota, dan desa serta dapat mewujudkan gerakan budaya nasional

dan memperkuat ekosistem literasi dengan konsep perpustakaan berbasis inklusi sosial sosial tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun perpustakaan berbasis inklusi sosial diantaranya: a) tersedianya kegiatan pemberdayaan masyarakat, b) hak memperoleh layanan perpustakaan, dan c) adanya akses transformasi perpustakaan. ...”Faktor SDM seperti kinerja, sikap profesional, memberi respon yang baik, ikut menentukan dalam memberikan pengaruh agar pelayanan perpustakaan kepada pemsutaka berkualitas” (Karim & Tigubu, 2022).

Seperti dalam hal meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan, hasil lainnya menyatakan bahwa organisasi ini melaunchingkan sebuah aplikasi perpustakaan digital yang diberi nama e-Pusda Provinsi Babel dan iPusda Babel sebagai media teknologi terkini mereka untuk *searching* bahan pustaka digitalnya secara *real time*.

Dalam rangka meningkatnya tata kelola arsip daerah, organisasi ini memanfaatkan aplikasi Srikandi untuk menciptakan kelancaran persyaratan kearsipan secara elektronik sehingga dapat efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Srikandi dapat memenuhi kebutuhan pembuatan surat menyurat dan arsip elektronik secara online, terintegrasi dan terekam oleh pusat data nasional. Dengan adanya aplikasi-aplikasi ini publik dapat mengakses layanan kapanpun dan dimanapun tanpa terkendala ruang dan waktu bahkan distribusi. Fasilitas digital ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat lokal namun juga masyarakat dunia maya pada umumnya.

### **c. Analisis Evaluasi Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada Era Revolusi Industri 4.0 Dilihat Dari Dimensi Ketepatan Waktu Dalam Bekerja**

Penggunaan atau ketepatan waktu dalam bekerja merupakan tingkat kehadiran atau keterlambatan, ataupun waktu kerja yang efektif. Kedisiplinan adalah kesadaran dan ketersediaan seseorang mentaati segala peraturan dan tugas yang menjadi tanggungjawabnya dalam suatu organisasi. “...Disiplin merupakan kegiatan manajemen untuk menjalankan standar organisasional” (Handoko, 2018:208). Menurut Handoko (2018), terdapat 2 tipe kegiatan kedisiplinan yaitu disiplin preventif dan disiplin korektif. Disiplin preventif adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendorong para staf atau pegawai mengikuti berbagai standar dan aturan yang ada sehingga dapat mencegah penyelewengan. Sedangkan disiplin korektif adalah kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ada dan mencoba untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut.

Hasil lainnya menyatakan bahwa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memuat absensi pegawai secara manual yaitu dengan tanda

tangan. Tujuannya agar para pegawai lebih berkomitmen dan bertanggungjawab terhadap penggunaan waktu kerjanya, serta diharapkan dapat membuat rekapan absensi menjadi lebih lengkap selain menggunakan *fingerprint*. Namun, kontras dengan pernyataan ini, berikut ditampilkan gambaran absensi sumber daya aparatur organisasi ini pada tahun 2021 (seperti pada Tabel 9).

Berdasarkan Tabel 9, diketahui pada tahun 2021 masih ada sumber daya manusia atau sumber daya aparatur Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang absensinya kehadirannya belum optimal dan masih belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut dilihat dari masih adanya aparatur dengan absensi kerja “tanpa keterangan” pada bulan Desember, yaitu sebanyak 17 orang. Rata-rata kehadiran pegawai tertinggi terjadi pada bulan Desember, yaitu sebanyak 22 hari total jumlah hari kerja, sedangkan rata-rata jumlah waktu kehadiran aparatur terendah terjadi pada bulan Mei, yaitu 16 hari kerja. Bulan Desember merupakan bulan dinas luar tertinggi yang diikuti oleh aparatur pada dinas ini pada tahun 2021 (17 orang), dan bulan Juni merupakan bulan cuti tertinggi aparatur pada tahun 2021, dengan jumlah sebanyak 20 orang. Presentase kehadiran terendah terjadi pada bulan Maret yaitu sebesar 85,16%.

**Tabel 9.**  
**Tingkat Absensi Sumber Daya Aparatur**  
**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**  
**Tahun 2021**

Bulan	Jumlah Pegawai	Jumlah Hari Kerja	Jumlah Tidak Hadir (Orang)					Rata-rata Kehadiran Pegawai (Hari)	Hadir (%)	Tidak Hadir (%)
			C	DL	TD	DKLT	TK			
Januari	60	20	7	1	0	0	0	19	96,58	3,42
Februari	60	19	16	0	0	3	1	17	90,96	9,04
Maret	64	22	19	0	0	8	0	19	85,16	14,84
April	63	21	18	3	0	4	0	19	91,31	8,69
Mei	66	17	9	5	0	0	0	16	94,56	5,44
Juni	67	21	20	2	0	0	0	19	89,69	10,31
Juli	66	21	10	1	0	0	0	20	94,59	5,41
Agustus	66	20	2	5	0	0	0	19	96,89	3,11
September	67	22	15	4	0	0	0	21	93,28	6,72
Oktober	67	20	11	8	0	2	1	19	95,37	4,63

Bulan	Jumlah Pegawai	Jumlah Hari Kerja	Jumlah Tidak Hadir (Orang)					Rata-rata Kehadiran Pegawai (Hari)	Hadir (%)	Tidak Hadir (%)
			C	DL	TD	DKLT	TK			
November	67	22	14	17	0	3	0	20	91,11	8,89
Desember	67	23	16	1	0	0	17	22	95,26	4,74
								19,17	92,90	7,10

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2022)

Selain itu, diketahui masih terdapat ketidakdisiplinan kerja oleh para staf pada tahun 2022 (seperti pada Tabel 10). Berdasarkan Tabel 10, diketahui hingga tahun 2022 ketidakdisiplinan pada jam kerja masih terjadi. Hal ini dilihat dari banyaknya data tingkat absensi “tanpa keterangan” pada bulan Januari s.d Desember, dengan rincian absensi tanpa keterangan sebagai berikut: pada bulan Januari sebanyak 7 orang, bulan Februari sebanyak 1 orang, bulan Maret 6 orang, bulan April dan Juni 9 orang, bulan Juli 25 orang, bulan Agustus 7 orang, bulan September 11 orang, bulan Oktober 6 orang, serta bulan November 5 orang, dan bulan Desember 33 orang yang absensi kehadirannya tanpa keterangan. Ketidakhadiran pada tahun ini disebabkan oleh banyaknya pegawai yang mengambil cuti, dinas luar dan diklat.

**Tabel 10.**  
**Tingkat Absensi Sumber Daya Aparatur**  
**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**  
**Tahun 2022**

Bulan	Jumlah Pegawai	Jumlah Hari Kerja	Jumlah Tidak Hadir (Orang)					Rata-rata Kehadiran Pegawai (Hari)	Hadir (%)	Tidak Hadir (%)
			C	DL	TD	DKLT	TK			
Januari	65	21	20	0	0	0	7	38	58,46	41,54
Februari	65	18	26	5	0	2	1	57	87,69	52,31
Maret	65	22	20	8	0	5	6	26	40,00	60,00
April	64	19	12	5	0	13	9	25	39,06	60,94
Mei	64	15	17	7	0	0	0	40	62,50	37,50
Juni	65	21	18	24	0	3	9	11	16,92	83,08
Juli	65	21	21	7	0	3	25	55	84,62	86,15
Agustus	65	22	27	23	0	0	8	7	10,77	89,23
September	65	22	21	25	0	0	8	11	16,92	83,08
Oktober	65	21	18	31	0	0	10	6	9,23	90,77

Bulan	Jumlah Pegawai	Jumlah Hari Kerja	Jumlah Tidak Hadir (Orang)					Rata-rata Kehadiran Pegawai (Hari)	Hadir (%)	Tidak Hadir (%)
			C	DL	TD	DKLT	TK			
November	64	22	18	31	0	0	10	5	7,81	92,19
Desember	64	22	12	16	0	3	0	33	51,56	48,44
									40,46	68,64

Sumber: Dnas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2022)

Hasil lainnya menyatakan bahwa pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Dinas telah menerapkan kegiatan kedisiplinan preventif untuk mencegah ketidakdisiplinan yaitu dengan cara memberikan arahan dan dorongan kepada para pegawai untuk mengikuti standar operasional prosedur dan peraturan yang berlaku pada organisasinya. Pimpinan menerapkan penggunaan mesin absensi sidik jari /*absensi by system* sesuai perkembangan teknologi revolusi industri 4.0 untuk menghindari manipulasi data dan menghemat waktu dalam melakukan absensi. Bahkan terdapat absen secara manual dengan tanda tangan sehingga dapat diketahui dan diberikan sanksi apabila ada pegawai yang melanggar aturan jam kerja. Absensi Apel Harian Pegawai.

Sedangkan terkait kedisiplinan korektif, Kepala Dinas maupun beberapa kepala bidang kerap memberikan teguran dan pemanggilan kepada para pegawainya yang terindikasi tidak disiplin, dan menerapkan umpan balik dengan memberikan surat peringatan kepada pegawai yang tidak disiplin. Mencegah ketidakdisiplinan tidak cukup hanya menunggu arahan dan dorongan dari pimpinan saja. Ketidakdisiplinan hanya dapat dihindari apabila pegawai mengikuti aturan/prosedur yang berlaku.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan bahwa kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di era revolusi industri 4.0 sudah cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Dimensi ketepatan waktu dalam bekerja terkait kedisiplinan belum cukup baik. Hasil rekapitulasi presensi pegawai pada tahun 2020 s.d 2022 menunjukkan bahwa masih ada pegawai yang tidak disiplin. Presentase ketidakhadiran sebesar 22,87% hingga masih 7,10%.

Faktor pendorong kinerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di era revolusi industri 4.0 adalah sistem informasi manajemen, sarana

prasarana, kemampuan dan keahlian, serta kepemimpinan, secara langsung maupun tidak langsung mendukung dan memudahkan organisasi ini mencapai sasarannya. Sedangkan faktor penghambatnya adalah disiplin kerja. Berikut rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kinerja organisasi tersebut: a) Kepala daerah juga tetap memajukan kualitas kearsipan maupun perpustakaan daerahnya, b) pimpinan bersama setiap kepala bidang memonitoring secara berjenjang dan *continue* setiap hasil maupun perilaku pegawai agar tetap relevan dengan tujuan organisasi, misalnya dengan memonitoring daftar rekapitulasi presensi pegawai, sehingga dapat diberikan sanksi apabila ada pegawai yang melanggar aturan jam kerja, c) Setiap kepala bidang harus menerapkan *behaviorial technique* dengan menggunakan *brainstorming* atau pendekatan partisipatif terhadap penemuan fakta atau identifikasi terkait ketidakdisiplinan, misalnya dengan duduk bersama mendiskusikan kendala yang melatarbelakangi ketidakdisiplinan dan individu yang harus berkomitmen tidak melakukan pelanggaran kembali. Pimpinan perlu merekrut pegawai yang *growth mindset*, yaitu terbuka terhadap informasi, merangkul tantangan dan melihat peluang baru dalam setiap perubahan. Pegawai harus melakukan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi tim yang baik dengan meminta arahan kepada rekan kerja yang memiliki kemampuan, keterampilan dan kreativitas memadai sesuai bidang penugasan dan tuntutan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kinerja. Pegawai harus meningkatkan kemampuan literasi data dan memanfaatkan informasi big data digital seperti *internet of things*, *networking* antar bidang guna mempercepat integrasi data. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

### Daftar Pustaka

- Bondar, Adin. (2019). Analisis Pembangunan bidang perpustakaan terhadap peningkatan kualitas manusia dan penurunan kemiskinan. Universitas Indonesia Library The Crystal of Knowledge. *Media Pustakawan*, 26 (2), <https://doi.org/10.37014/medpus.v26i2.178>
- Damanik, Maharani Iviola Adithia., Indra, Muda., Lubis, Yurial Arief. (2024). Analisis Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana di Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan JIAPP*, 20(1), <https://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/jiapp/article/view/1169>
- Destiasari, S. (2015). *Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang*. [Skripsi Ilmu Administrasi Negara. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa]. <http://eprints.untirta.ac.id/592/>.

- Hasibuan, Malayu SP. (2022). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ismail, M., Sahabuddin. (2022). Faktor Mempengaruhi Keputusan Pembelian pada Online Marketplace pada Mahasiswa Universitas Hasanuddin. *SEIKO: Jurnal of Management & Business*, 5(1), <https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i1.1831> .
- Karim, M.S., & Tigubu, J. (2022). Penerapan Pencatatan Akuntansi Keuangan Pada UKM Lokal Kota Tidore Kepulauan Berdasarkan Akuntansu Entitas. *Jurnal Mirai Manahement*, 7(2), <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/view/2046/0>
- Kasmir. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Mathis & Jackson. (2013). *Pengelolaan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Miles, M.B, Huberman, A. M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, (edition ) 3. USA: Sage Publications. (Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Manullang. (2012). *Dasar-Dasar Manajemen Bagi Pimpinan Perusahaan*. Jakarta: Gajah Mada Press.
- Nadjib, Abdul. (2021). *Manajemen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan*. Yogyakarta: Idea Press.
- Tebai, Neli, D. (2022). Kualitas Pelayanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Waropen di Era Revolusi 4.0. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 4(3), <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/2361>
- Syamsuddin, Indah. (2022). Analisis Kinerja Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Barat Tahun 2018-2020. *YUME Journal of Management*, 5(2), <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume/article/view/1557>
- Pardede, Putri Hertin Andika., Trimurni, Februati. (2023). Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Medan. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/10521/5815> .
- Pemerintah Indonesia. (1999). *Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia. Jakarta.
- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2021). *Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021, Nomor 13 Seri D. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: Pangkalpinang.

- Praditya, A. R. (2017). *Analisis Kinerja Pegawai Pada Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017* [Thesis, Magister Manajemen, Stie Widya Wiwaha, Yogyakarta]. <http://eprint.stieww.ac.id/793/>.
- Prasetyo, W.D., Utami, D. (2020). Penguatan Perpustakaan Untuk Pembangunan: sebuah konsep transformasi berbasis inklusi sosial. *Jurnal IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia)*, 5 (2), <https://doi.org/10.1234/jurnal%20ipi.v5i2.45>
- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2020). *Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Lembaran daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020, Nomor 1 Seri D. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Republik Indonesia.(2007). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Hessel, Nogi. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sudarmanto. (2009). *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tahar, Achmad., Setiadi, Pompong. B., Rahayu, Sri. (2022). Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0. *Jurnal Pendidikan Tambusai Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan*, 6 (2), <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/4428> .
- Tsauri, S. (2014). *Manajemen Kinerja (Performance Management)*. Jember: STAIN Jember Press.
- Wahyuningtyas, Yunita Fitri., Valena. (2023). Implementasi Budaya Kerja, Motivasi dan Kinerja Karyawan di Era Revolusi Industri 4.0 pada Otopay Yogyakarta. *JRABI Journal Riset Akutansi dan Bisnis Indonesia Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 3 (1), <https://jurnal.stieww.ac.id/index.php/jrabi/article/view/555> .
- Wibowo. (2016). *Manajemen Kinerja*, Edisi kedua. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

## Hegemoni “Clash of Champions Ruang Guru” di Tengah Maraknya Tayangan Non Edukatif

Kurnia Asni Sari<sup>1</sup>, Ghina Reftantia<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Sosiologi, FISIP, Universitas Sriwijaya, Indonesia. (email: kurniaasnisari@fisip.unsri.ac.id)

<sup>2</sup>Sosiologi, FISIP, Universitas Sriwijaya, Indonesia (email: ghinareftantia@fisip.unsri.ac.id)

### Abstrak

Artikel ini menganalisis hegemoni tayangan edukatif "Clash of Champions" yang disajikan oleh platform edukasi digital Ruangguru di tengah maraknya tayangan non-edukatif di era digital. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan eksplanasi berdasarkan analisis teori hegemoni Antonio Gramsci, penelitian ini menunjukkan bagaimana tayangan edukatif yang dikemas dalam bentuk kompetisi siswa berprestasi mampu menarik minat remaja. Artikel ini mengeksplorasi strategi kreatif dan pemasaran yang digunakan oleh Ruangguru serta implikasinya terhadap perubahan preferensi remaja terhadap tayangan edukatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui hegemoni yang tepat, konten edukatif dapat menggeser dominasi tayangan non-edukatif di platform media digital, memberikan manfaat bagi perkembangan intelektual remaja dan kepribadiannya, meningkatkan keinginan mereka untuk memperdalam kemampuan kognitif, serta remaja dapat memilih secara rasional tayangan yang bermanfaat bagi mereka.

### Kata Kunci:

hegemoni; preferensi tontonan; tontonan edukatif

### Pendahuluan

Di era digital ini, kehidupan remaja telah mengalami perubahan yang sangat signifikan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Berbagai perkembangan teknologi telah mempengaruhi cara berkomunikasi, berinteraksi dan mendapatkan informasi bagi remaja (Freska, et.al, 2023). Teknologi melalui internet menawarkan manfaat dan dampak buruk sekaligus bagi remaja. Pada sisi positif, internet dapat digunakan untuk meningkatkan keterhubungan dengan orang lain, memfasilitasi pengembangan kognitif dan sosial remaja, serta memberikan akses untuk sumber belajar dan konektivitas secara global (Kimball et al., 2023) (Rachmayani, 2017). Kemudahan pada akses ke berbagai platform digital memungkinkan remaja dapat terhubung dengan orang lain di seluruh dunia secara instan. Kemudahan ini bukan tidak mungkin dapat memberikan dampak negatif bagi remaja. Kecanduan media sosial. Cyberbullying dan FOMO (fear of missing out) merupakan dampak negatif dari kemudahan akses teknologi pada remaja. Remaja yang merupakan anak usia sekolah juga mulai mengalami perubahan pola belajar dan hiburan mereka. Biasanya remaja mendapatkan pembelajaran secara tatap muka dan real time berganti ke pembelajaran dalam jaringan secara online. Perubahan-

perubahan ini secara langsung dapat mempengaruhi cara remaja membangun identitas diri dalam menghadapi tantangan teknologi.

Menurut hasil studi Kominfo, Kementerian PPPA dan UNICEF setidaknya 30 juta anak-anak dan remaja di Indonesia merupakan pengguna internet, sedangkan media digital menjadi pilihan utama saluran komunikasi yang mereka gunakan. Muller et al (2024) mengungkapkan dalam penelitiannya, bahwa remaja di Indonesia menggunakan internet secara ekstensif untuk mendapatkan hiburan, berkomunikasi, dan sebagai sumber informasi tanpa adanya kesadaran yang memadai tentang adanya bahaya penggunaan internet itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri, penggunaan internet juga memberikan dampak positif bagi perkembangan pendidikan remaja, menurut sebuah laporan dari jurnal pendidikan (2022) menerangkan bahwa penggunaan internet berkorelasi positif dengan prestasi akademik sebanyak 26,1% ("Penggunaan Internet dan Prestasi Akademik Siswa Sekolah Menengah di Indonesia", 2022). Namun, banyak anak yang menghadapi resiko perundungan siber dan eksploitasi daring (Dhahir, 2018) sehingga diperlukan peningkatan literasi digital dan bimbingan orang tua dalam mengatasi tantangan tersebut.

Melalui internet remaja dapat mengakses informasi dan berbagai hiburan dengan mudah. Kemudahan akses tersebut membuat remaja cenderung tidak dapat memfilter tayangan yang akan mereka konsumsi. Menurut Kominfo remaja yang dapat mengakses internet tidak setuju dengan isi pornografi yang ada di internet, namun sejumlah besar mereka telah terekspos dengan konten pornografi melalui tayangan pornografi yang muncul secara tidak sengaja atau iklan yang memiliki nuansa vulgar. Tayangan-tayangan yang didapatkan melalui berbagai platform media sosial seperti youtube, tiktok, instagram, twitter dan lainnya tidak hanya menampilkan tayangan yang memiliki nilai pendidikan namun banyak juga yang mengandung tayangan non edukatif seperti kekerasan, adegan dewasa, SARA, dan hoax.

Tayangan non edukatif tentu tidak akan berdampak bagi orang dewasa yang mampu memfilter apa yang ditontonnya. Mereka dapat memilah mana informasi positif dan mana informasi sampah yang tidak perlu mereka ikuti. Tetapi hal ini tentu berbeda dengan remaja. Kemampuan kognitif dan psikologis mereka belum berkembang, sehingga tayangan yang ada di media sosial menjadi hiburan sekaligus tutor kehidupan mereka (Hamzah, 2015). Cho dan Cheon (2010) menyebutkan bahwa remaja lebih banyak terpapar konten negatif di internet daripada perkiraan orang tua.

Jika remaja setiap saat dapat mengakses media sosial tanpa batas dan kontrol orang tua, bukan sebuah keniscayaan mereka dapat melakukan hal-hal negatif yang ditayangkan media sosial. Menurut psikolog, Albert Bandura, seseorang dapat meniru (*modelling*) sesuatu dari apa

yang ditontonnya. Johnston et.al (2011) juga menjelaskan bahwa konten negatif yang diterima oleh seseorang dapat semakin memperburuk berbagai kekhawatiran pribadi yang dialaminya. Penelitian oleh Johnston menjelaskan apabila seseorang yang sedang mengalami kecemasan mendapatkan informasi negatif, maka kecemasan yang dialaminya akan semakin memburuk walaupun apa yang dialaminya tidak spesifik sama dengan informasi yang didupakannya. Jika informasi yang didupatkan dari tayangan yang ada adalah positif, remaja akan bertingkah positif pula. Sebaliknya jika jejalan modelnya memiliki banyak konten negatif maka remaja akan bertingkah negatif juga.

Walaupun media sosial yang menyuguhkan tayangan untuk remaja bukan satu-satunya sarana yang membentuk perilaku dan pandangan seseorang termasuk remaja, namun media sosial merupakan salah satu media yang paling ampuh untuk membentuk hal tersebut. Media sosial menawarkan berbagai konten yang dapat diakses dan ditonton dengan mudah dan cepat. Algoritma media sosial juga didesain oleh foundernya untuk memberikan tayangan sesuai preferensi yang pernah di unggah atau di cari di kolom pencarian oleh penggunanya. Hal ini menjadikan media sosial sebagai platform yang paling kuat mempengaruhi perilaku, sikap dan pola pikir remaja. Karena dewasa ini remaja sangat terhubung dengan media digital dan dapat menghabiskan waktu berjam-jam setiap harinya untuk mengonsumsi konten yang mereka inginkan. Tayangan yang disaksikan ini secara langsung maupun tidak mempengaruhi cara pandang mereka terhadap dunia, termasuk pendidikan.

Selain menyajikan berbagai konten hiburan, media sosial juga memiliki difat interaktif yang memungkinkan penggunanya tidak hanya pasif dalam menonton setiap tayangannya. Platform ini memungkinkan remaja dapat terlibat aktif dalam menyukai, berkomentar bahkan membagikan konten tersebut pada orang lain. Interaksi ini membantu memperkuat pengaruh media sosial dalam pembentukan norma-norma baru yang diikuti oleh banyak remaja. Bahkan mereka membuat konten juga berdasarkan konten yang mereka sukai tanpa filter. Pada akhirnya, media sosial berperan aktif dalam membentuk persepsi remaja tentang dunia sekitar.

Dilihat dari kacamata sosiologi, peran media sosial ini bisa membuat hegemony baru dalam memberikan contoh berperilaku bagi remaja. Hegemony lebih mudah dipahami sebagai upaya yang dilakukan oleh kelompok berkepentingan untuk mentransfer ideologi yang dia kehendaki pada masyarakat yang ia tuju. Melihat pada tayangan-tayangan yang ada saat ini, tayangan yang disajikan untuk *user* media sosial sudah dikelompokkan oleh masing-masing media sosial tersebut. Sebagai contoh saat seseorang suka menonton konten kekerasan, algoritma media sosial tersebut menerima data dari *user* kemudian menyajikan lebih banyak konten kekerasan, sama halnya dengan konten pornografi, hoax dan sebagainya. Terlihat bahwa

saat kelompok yang melakukan hegemony melihat algoritma pengguna platform mengakses konten non edukasi, maka tayangan non edukasi akan semakin banyak direkomendasikan dan sebaliknya. Jika *user* mengakses konten edukasi maka algoritma media sosial juga akan menyajikan lebih banyak tayangan edukasi.

Melalui teori hegemony, Antonio Gramsci berpendapat bahwa kelompok yang berkepentingan akan menggunakan konsensus dan paksaan dalam mendiktekan ideologi yang ia inginkan. Walaupun paksaan disini tidak terlalu terlihat karena dipaksakan secara halus melalui algoritma yang didesain sedemikian rupa untuk mengelompokkan apa yang disukai *user* nya. Seperti yang diungkapkan Gramsci (dalam Ives, 2004: 81) " ....Gramsci argues are important to understanding why people consent to rule and how they adopt values and attitudes towards life and politics. These include religious ideas and religious institutions, school systems, folklore, family structures, tradition and what Gramsci generally labels 'common sense'..."["... "Gramsci berpendapat bahwa hal-hal yang penting untuk memahami mengapa orang memberikan persetujuan kepada kekuasaan dan bagaimana mereka mengadopsi nilai-nilai serta sikap terhadap kehidupan dan politik. Ini termasuk ide-ide agama dan institusi keagamaan, sistem sekolah, folklor, struktur keluarga, tradisi, dan apa yang secara umum disebut Gramsci sebagai 'akal sehat'."]]. Menilik serangkaian penjelasan di atas, kiranya upaya yang dilakukan oleh pemangku kepentingan, dalam hal ini media sosial, dapat memberikan hegemony atau pengaruhnya melalui konsensus dan paksaan pada setiap tayangannya.

Di tengah dominasi tayangan non edukatif yang digemari remaja, hadir tayangan edukatif dengan format dan strategi yang matang. Diselenggarakan dengan memodifikasi salah satu tayangan edukasi sukses di Korea Selatan yaitu *University War* tayangan *Clash of Champions* diproduksi. Dikemas dengan visual, suara, serta strategi marketing yang menarik membuat tayangan ini menjadi gebrakan baru bagi tayangan media sosial remaja. Diprakarsai oleh salah satu platform e-commerce pendidikan bernama Ruangguru, acara ini menampilkan remaja-remaja berprestasi Indonesia dari perguruan tinggi dalam dan luar negeri.

Dalam acara *Clash of Champions* para mahasiswa mahasiswi berprestasi tersebut bersaing dalam kemampuan logika, hafalan dan hitungan. Ada 40 mahasiswa mahasiswi berprestasi dari seluruh perguruan tinggi Indonesia dan 10 mahasiswa mahasiswi berprestasi Indonesia yang berasal dari universitas luar negeri. Mereka berasal dari 13 kampus dalam negeri yaitu Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, IPB University, UIN Syarif Hidayatullah, BINUS University, Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Institut Teknologi Sepuluh November, Universitas Andalas, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Udayana. Sedangkan peserta yang berasal dari kampus luar negeri

berasal dari *National University of Singapore, Nanyang Technological University, Singapore University of Technology and Design, University of Oxford, University of California San Diego, Yale University, dan Korea Advanced Institute of Science and Technology.*

*Clash of Champions* Indonesia mengkombinasi pertarungan individu dan kelompok mahasiswa Indonesia yang berprestasi, berbeda dengan konsep *University War* di Korea Selatan yang menampilkan pertarungan mahasiswa berprestasi antar universitas di Korea Selatan. Kedua acara ini sukses menarik perhatian remaja di masing-masing negaranya. Untuk *Clash of Champions* Indonesia saja, per tanggal 20 Juli 2024 di youtube Ruangguru, dalam waktu dua minggu tayang, pada episode pertama sudah mendapatkan sembilan juta penonton dan 16.397 komentar aktif. Sedangkan untuk episode kelima yang tayang baru enam hari, sudah mendapatkan hampir enam juta viewers dengan 8.748 komentar. Bukan hanya di youtube, di kanal tiktok melalui potongan-potongan kompetisi, acara ini dipromosikan tidak saja oleh Ruangguru, namun juga oleh akun-akun yang mengomentari positif acara ini. Di twitter acara ini juga mendapatkan predikat *trending topic* pada setiap penayangan perdananya.

Ruangguru sebagai konseptor disini berperan dalam menghadirkan hegemony baru bagi tayangan remaja di Indonesia. Melihat keberhasilan tayangan yang disajikan, penulis melihat ada segenap asa pada tayangan edukatif di Indonesia. Dimana penelitian-penelitian sebelumnya banyak yang meneliti bagaimana tayangan non edukatif memberikan dampak buruk bagi remaja Indonesia. Mulai dari tayangan televisi yang memuat konten non edukatif hingga konten tidak berpendidikan di berbagai media sosial. Banyak penelitian yang membahas dampak buruk dari media sosial, penelitian mengenai dampak tayangan edukatif serta strategi yang digunakan masih sangat sedikit. Untuk itu, melalui penelitian ini penulis bertujuan untuk menjelaskan dengan hegemoni yang tepat dapat mengubah preferensi tayangan remaja ke arah yang lebih positif.

Dengan hadirnya acara ini besar Harapan nantinya bisa menjadi modelling bagi remaja Indonesia dalam bertransformasi menjadi masyarakat yang lebih baik. Dalam artikel ini saya berpendapat bahwa salah satu cara yang dapat ditempuh guna menggeser tayangan non edukatif adalah dengan menghadirkan "hegemony" tayangan edukatif. Penelitian ini dikatakanSebab aneh jika kita mengharapkan generasi emas 2045 di tengah pusaran globalisasi namun tanpa disertai pendekatan pada media sosial sebagai salah satu hal yang dapat membentuk perilaku dan kognitif remaja.

## Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitatif konten analisis. Konten analisis kualitatif merupakan metode penelitin yang menggunakan metode interpretasi

dan analisis data tekstual, yang berfokus pada pemaknaan dan konteks dari konten yang diteliti. Penelitian dengan metode ini memungkinkan peneliti dapat mengidentifikasi tema, pola, dan pandangan dari data kualitatif. Melalui teknik deskriptif, penulis berusaha untuk dapat mengkaji secara mendalam strategi apa yang digunakan oleh Ruangguru untuk dapat menarik minat remaja pada tontonan edukatif. Melalui teknik ini peneliti dapat mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi saat sekarang (Sudjana dan Ibrahim, 1986). Selain itu penelitian ini juga dapat menjadi *practically problemsolving* yang dapat dikembangkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

Menurut Holsti (dalam Asfar), dengan menggunakan alat pengumpul data berupa analisis data, peneliti dapat mengambil kesimpulan dengan cara mengidentifikasi berbagai karakteristik pesan secara objektif, sistematis dan generalis. Objektif dalam hal ini berarti menurut aturan dan prosedur yang apabila dilaksanakan oleh peneliti lain dapat menghasilkan kesimpulan yang sama. Dalam menganalisis data, penulis menganalisis berbagai data dan narasi yang tertulis dalam artikel jurnal, berita online, dan menganalisis komentar youtube acara *Clash of Champions* Ruangguru untuk memperoleh data mendalam mengenai masalah penelitian yang diteliti.

Menggunakan metode kualitatif konten analisis dengan teknik deskriptif, penulis berharap dapat menyajikan pemahaman mendalam mengenai masalah yang diteliti, dan memberikan kontribusi dan saran bagi perkembangan tayangan edukatif di masa mendatang.

## Hasil dan Pembahasan

- **Strategi Marketing Ruangguru**

Tayangan *Clash of Champions* yang diproduksi oleh Ruangguru berhasil menarik minat remaja untuk menonton tayangan edukatif. Melalui pengemasan yang menarik dan strategi pemasaran yang cerdas, tayangan ini bisa mengubah preferensi tontonan remaja. Di tanggal 15-19 Juni 2024, kira-kira dua minggu sebelum penayangan perdananya (29 Juni 2024), Ruangguru memperkenalkan peserta *batch 1-5* dari acara *Clash Of Champions* melalui media sosial Instagram dan Tiktok. Dengan tampilan yang kreatif, Ruangguru menampilkan profil mahasiswa dan mahasiswi yang memiliki nilai IPK yang nyaris sempurna dari kampus terbaik Indonesia. Dalam tampilan profil dipaparkan foto, jurusan, asal universitas, IPK, dan raihan olimpiade peserta. Di postingan pertama Instagram, Ruangguru mendapatkan 95.337 *likes* 995 komentar positif (Diakses: 3 agustus 2024), jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan postingan-postingan yang tidak membahas acara ini. Acara ini mendapatkan atensi yang cukup besar saat pengguna media sosial mulai memperbincangkannya di berbagai platform, seperti Instagram, Tiktok dan Twitter.

Menggunakan target marketing remaja sebagai pengguna internet dan juga media sosial aktif, Ruangguru menggunakan strategi pemasaran yang cerdas dalam mempromosikan acara ini di berbagai platform media sosial. Pendekatan ini menciptakan tren positif baru di kalangan remaja yang dewasa ini cenderung terpapar oleh tayangan-tayangan non edukatif. Acara *Clash of Champions* mampu menggeser minat remaja dan menjadikan tayangan edukatif sebagai alternatif yang jauh lebih menarik jika dibandingkan dengan tayangan-tayangan digital yang ada.

Melalui hegemoni yang diciptakan oleh Ruangguru ini menjadi pembuka jalan bagi konten-konten sejenisnya untuk dapat menciptakan tayangan-tayangan serupa atau lebih kreatif. Perlu adanya kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, berbagai platform ataupun institusi pendidikan dan media sosial. Dengan pengemasan yang menarik dan pemilihan audiens yang tepat untuk tayangan edukatif tersebut dapat membantu penyebaran tayangan edukatif untuk lingkup yang lebih besar.

- **Popularitas *Clash of Champions***

Keberhasilan yang cukup signifikan diraih oleh tayangan edukasi ini semenjak pertama kali diluncurkan di kanal youtubenya. Setiap episode yang ditayangkan mendapatkan atensi yang besar. Berikut gambaran data penonton dan komentator dari acara tersebut,

**Tabel 1.**

**Jumlah Penonton dan Komentator 'Clash of Champions'**

Episode	Tanggal Penayangan	Jumlah Penonton	Jumlah Komentar
1	29 Juni 2024	9,694,315	16,724
2	29 Juni 2024	7,830,138	14,754
3	6 Juli 2024	8,181,780	11,172
4	6 Juli 2024	7,724,724	11,226
5	12 Juli 2024	6,877,500	8,966
6	19 Juli 2024	5,256,634	8,286
7	26 Juli 2024	3,772,687	4,346
8	27 Juli 2024	2,879,820	3,110

*Sumber: Data Youtube Ruangguru pada 2 Agustus 2024 yang diolah penulis*

Dari data di atas terlihat bahwa tayangan ini memperoleh jumlah penonton yang besar. Dalam satu bulan penayangan acara ini sudah mendapatkan rerata delapan juta kali penayangan dan 14 ribu lebih komentar. Sedangkan jika dilihat di dua episode terakhir sebelum dua episode penutupnya yaitu episode tujuh dan delapan, sudah mendapatkan rata-rata tiga juta lebih penonton.

Selain jumlah penayangan, hal lain yang disoroti oleh penulis adalah berbagai komentar positif yang diberikan oleh penonton youtube. Di minggu awal, episode pertama dan kedua

ditayangkan akun @destipramesti5010 berkomentar, *"PLEASEEEEE VIRALIN ACARA INI, BIAR INDONESIA SEMAKIN BANYAK LAGI ACARA BERKUALITAS KAYAK BEGINI."* komentar ini mendapatkan 53,000 suka dan 229 komentar bernada positif yang berisi dukungan terhadap acara ini dan juga meminta agar admin Ruangguru memberikan penjelasan cara menjawab soal yang diberikan pada peserta di tayangan tersebut. Hal ini disampaikan oleh @ellepatra, *"Miin, tolong jabarin cara hitung nya juga dong atau tips trik nya gitu.. biar penonton ikut hitung"*. Bukti berdampaknya acara ini juga didukung oleh komentar dari akun @aywinneverlose, *"Sumpah ini acara luar biasa di era tahun di mana anak2 muda di penuh dengan jedagjedug di sosmed dan sekarang muncul acara begini berasa nonton acara luar negeri, nonton nya terbawa situasi ada di posisi mereka dan merasa keren ngeliat mereka menang setiap babak. Padahal cuma penonton doank"*. Selanjutnya komentar dari @pertym.paembang5240, *"Acara2 berkualitas gini yang perlu di perbanyak biar memotivasi anak muda Indonesia ke arah yang positif, kalau bisa jangan cuma untuk mahasiswa saja tapi mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA juga"*. Kemudian @SyaifulFatah menambahkan, *"Ya Allah.. merinding lihat acara ini.. Mereka datang dengan kehormatannya masing-masing. Bukan tentang siapa yang menang. Tapi integritas dan kematangan berfikir. SAYA BANGGA JADI INDONESIA."*

Pada minggu kedua, di episode ketiga dan keempat, berbagai komentar yang dituliskan mulai berkembang pada keinginan penonton untuk *modelling*, melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan aktor pada tayangan tersebut. Seperti yang dituliskan oleh @akari8175, *"Ada yang sama ga si semenjak nonton clash of champion jiwa ambis itu langsung keluar kayak"aku harus bisa juga kayak mereka"*. Komentar ini disukai oleh 36ribu pengguna dan 740 komentar yang menyetujui komentar ini. Mereka yang menyaksikan acara ini juga berambisi dan terdorong untuk menyelesaikan soal-soal yang diberikan pada peserta. Hal ini dilakukan oleh salah satu komentator @lauraruseno dan disukai oleh 160 pengguna lain, berikut kutipan komentarnya, *"Iseng2 ngerjain soalnya di- print screen dan di-crop, pasang timer 30 mnit, alhamdulillah masih bisa ngerjain sampe board 4, lalu lelah bgt krn pas lg ngantuk. Kok skrg jadi gampang yaa, pdhl dlu jaman kuliah paling benci matematika wkkwkk. Ngerjain d rumah pasti beda adrenalin nya sama yg di acara sambil deg2an. Atau jaman skrg udh beda sama dlu ya, 1 kodi berapa, satuan luas itu apa aduhh ingin rasanya kuteriak ngasih tau. Nonton ini jiwa ambis masa muda kembali lagi"*. Hal lain yang disampaikan komentator di minggu kedua penayangan ini adalah saran untuk memberikan wadah kepada anak cerdas untuk muncul dan memberikan semangat juang kepada anak-anak lainnya. Saran tersebut disampaikan oleh @otoko7773, *"Di Indonesia itu bukan kekurangan anak-anak cerdas,, tapi kekurangan wadah yang biasa memberikan kesempatan untuk anak cerdas muncul dan berprestasi kemudian membagikan semangat juangnya untuk anak-anak"*

*lainnya sehingga semuanya bisa termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Andai acara seperti ini diperbanyak mungkin fyp di medsos kita bukan anak-anak yang joget joget lagi".* Komentar ini disukai oleh 3.600 orang dan disetujui oleh 31 komentar. *User* lain yang berasal dari kalangan orang tua juga semakin sadar untuk meningkatkan kemampuan kognitif anaknya. Seperti @aishasalvyana8403 yang berkomentar, *"Sem ejak ada ini, gw jd semangat nyari duit biar ank gw bisa gw sekolahin setinggi"nya, les apapun sebanyak banyaknya, support smua impiannya".* Harapan ini disukai oleh 6,1ribu *user* dan dibalas oleh 94 orang yang rata-rata adalah orang tua yang menyetujui dan menginginkan hal yang sama dalam pengembangan intelektual anak-anaknya.

Selanjutnya di minggu ketiga, di episode kelima dan keenam, komentar penonton tayangan ini lebih bersifat personal pada tiap-tiap peserta walaupun ada beberapa yang berkomentar secara umum. Umumnya mereka memberikan dukungan pada peserta dan belajar karakter peserta yang selain pintar juga memiliki pribadi yang baik. Terlihat dari komentar @chaungsyach5929, *"omongan nya orang pintar adem bgt, gada nyalah2in tapi introspeksi diri dan nyemanggti diri sendiri".* Komentar ini disukai oleh 11ribu orang dan dibalas dengan 55 komentar. @deanabuka4672 juga berkomentar hal yang sama, *"Dari awal mereka ngebentuk tim gak pernah nemu ada yg nyalahin sesama tim nya malah adem liatnya di situ kita bisa tau parenting yg orang tua mereka terapin gimana karna emang sengaruh itu".* Selain pribadi peserta yang baik dan tenang, peserta juga dikomentari memiliki kemampuan tim management yang baik. Seperti @heriwidayanto8055, *"Nabil dan Kevin ini tipe orang yang tenang banget g grusa grusu dan positif vibes. Dan ini juga yang ngebuat Yaya sama Ghaza jadi improve. Saya suka tim ini".*

Pada minggu keempat, di episode ketujuh dan kedelapan, komentar *user* youtube menelisik pada strategi dari setiap peserta untuk menyelesaikan soal-soal yang diberikan pada setiap tantangan. Bagaimana penonton tayangan ini melihat dan memahami strategi tiap peserta terlihat bahwa kemampuan penonton juga terasah. Pada awal penayangan mereka mengomentari acara secara keseluruhan, di minggu ini komentator berusaha untuk belajar secara mendalam lewat peserta-peserta cerdas tersebut. Diantaranya ada akun @devisseptiyanti8570, *"Yg lain pada fokus ke sandy & axel padahal kadit juga diem2 strateginya selalu bagus sejauh ini".* Hal serupa juga disampaikan oleh @jazzmeanne, *"ini epsnya kadit, jessica vs nabil degdegan bgt, sandy vs axel ga buat degdegan, tp malah buat sedih krna ngeliat mereka kena pressure dan ngeblank".* @deviandriyani4129 juga berkomentar, *"kayanya baru pada notic kadit ya, pdahal menurutku dri awal kadit paling stabil, dia ga jdi no 1 tpi dia selalu dalam posisi aman karna pembawaanya juga tenang, semngat kalian hebattt"*

Popularitas acara ini secara langsung maupun tidak memberikan dampak pada tayangan remaja. Dari data yang ada dapat dilihat bahwa mereka yang menonton acara ini dan memberikan komentar berpandangan bahwa mereka ingin seperti tokoh-tokoh edukatif yang ditayangkan pada acara ini atau ingin agar anak muda menjadikan acara ini sebagai preferensi tayangan mereka. Popularitas tayangan ini juga tidak berhenti pada mereka yang menjadikan tayangan ini sebagai konsumsi gradual. Para penonton mulai membuat parodi dan memberikan apresiasi pada acara dan mahasiswa-mahasiswi yang menjadi aktor di acara ini. Dampak yang dihasilkan dari penonton ini melalui konten-konten digital yang mereka buat, membuat orang lain atau user yang secara tidak sengaja mengakses konten mengenai acara ini juga tertarik untuk menonton video full dari *clash of Champions*.

- **Hegemoni Tayangan Edukasi**

Tayangan *Clash of Champions* Ruangguru sebagai lembaga profit dalam hal ini “penguasa” mampu menciptakan hegemoni baru dalam mengemas konten edukatif dalam format kompetisi yang menarik. Kehadiran tayangan ini menunjukkan bahwa remaja tidak hanya tertarik pada konten hiburan, tetapi juga pada konten pendidikan yang dikemas secara menarik. Perubahan preferensi remaja ini memperlihatkan adanya konsensus antara penguasa dan pihak yang ingin dikuasai. Melalui konsensus, hegemoni yang diciptakan oleh Ruangguru mampu menunjukkan bahwa konten yang berkualitas mampu bersaing dengan konten non edukatif yang biasanya lebih populer.

Jika perubahan dalam bidang pendidikan sebelumnya ditanamkan melalui sekolah dengan berbagai peraturan tertulis yang bersifat memaksa. Kehadiran tayangan edukatif *Clash of Champions* dapat mendominasi melalui nilai moral dan intelektualitas yang dibawa dari segi acara dan peserta-peserta yang ada didalamnya. Ruangguru yang menjadi kelompok dominan dapat mempertahankan dominasinya selama tayangan ini ditayangkan di platform digital. Dalam mempromosikan tayangannya, Ruangguru bukan hanya menampilkan pertarungan antar mahasiswa berprestasi. Ruangguru melalui dominasinya juga memberikan kelas tutorial yang diajar oleh peserta *Clash of Champions* dan dibuka secara umum dengan kuota terbatas. Suksesnya acara ini juga didukung oleh pengikut mereka yang membuat berbagai konten yang membahas acara ini, memberikan pembahasan mengenai cara penyelesaian soal-soal yang ada pada setiap kompetisi, mengulas profil setiap peserta, hingga peserta yang memberikan tips dan trik cara mereka meraih prestasi saat ini. Hal ini tentu menguatkan dominasi Ruangguru dalam membuat nilai-nilai, kepercayaan, dan ideologi tayangan edukatif dapat diterima oleh

masyarakat luas. Menurut Gramsci, hegemoni dicapai melalui konsensus yang diperoleh melalui pengaruh budaya, pendidikan, media, agama dan institusi-institusi sosial lainnya.

Meninjau bagaimana interaksi yang dijalankan oleh Ruangguru dalam mendapatkan atensi masyarakat, terlihat bahwa Ruangguru dan pengguna media sosial saling berinteraksi. Ruangguru menggunakan berbagai media sosial untuk dapat menyebarkan ideologi pada pengguna media sosial yang mendukung kepentingan ia sebagai penguasa. Hal ini pada akhirnya dapat menciptakan persetujuan atau konsensus dan tidak ada paksaan didalamnya. Konsensus ini yang pada akhirnya membuat dominasi Ruangguru dalam memberikan tayangan edukasi nampak alami dan sah.

Merujuk tayangan edukasi dari Korea Selatan yang juga mendapatkan atensi besar, Ruangguru berhasil menyesuaikan diri secara kreatif dengan mengadopsi tayangan tersebut. Tidak dapat dipungkiri banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh kelompok kepentingan lain untuk menjalankan bisnis tayangan edukasi, namun tidak berhasil dalam dominasinya. Usaha Ruangguru sebagai salah satu kelompok tersebut untuk mendominasi tayangan remaja dalam bidang edukasi disebut oleh Gramsci sebagai intelektual organik (De Orrelana, 2015), dimana sebuah kelompok dalam hal ini Ruangguru muncul dari kelompok sosial tertentu untuk mengartikulasikan dan memajukan kepentingan kelompok tersebut. Bagi Gramsci, kelompok intelektual organik ini memainkan peranan penting dalam menciptakan dan menyebarkan hegemoni.

Ruangguru sebagai kelompok yang akan menghegemoni tidak dapat berdiri sendiri untuk dapat menyebarkan ideologinya. Ruangguru perlu membentuk aliansi dengan kelompok sosial lain dalam hal ini pengguna media sosial yang memiliki kepentingan yang sama atau mirip dalam mengubah tatanan sosial (De Orrelana, 2015). Tatanan sosial yang diubah adalah kecenderungan remaja saat ini yang lebih banyak mengakses dan terpapar tayangan non edukatif. Aliansi atau konsensus dan juga kerjasama ini akan membantu memperkuat posisi Ruangguru dalam membangun kekuatan kolektif yang besar untuk menantang tayangan-tayangan non edukatif yang ada dan akhirnya diharapkan dapat merubah preferensi remaja dan secara mandiri dapat menyaring tayangan yang akan mereka konsumsi.

- **Pengaruh Tayangan Edukasi pada Remaja**

Menurut West dan Turner (2007) melalui kontak dengan apa yang dilihatnya, manusia belajar tentang dunia, orang-orangnya, nilai-nilai, serta adat kebiasaannya. Dengan kata lain melalui tayangan edukatif, remaja diharapkan dapat belajar tentang masyarakat dan kultur lingkungannya (Hamzah, 2015). Hal ini sejalan dengan pendapat Lee & Kim (2011) konten

pendidikan yang etis dapat mendorong pembelajaran yang memotivasi diri dan dapat meningkatkan interkasi antara siswa dan pendidik. Sehingga persepsi apa yang terbangun dari remaja mengenai masyarakat dan budaya adalah apa yang mereka dapat melalui tayangan edukatif. Hal ini sejalan dengan teori modelling yang disampaikan oleh Elbert Bandura bahwa seseorang berperilaku sesuai dengan apa yang dilihatnya.

Pengaruh tayangan *Clash of Clans* pada remaja dapat penulis kelompokkan menjadi empat hal. *Pertama*, remaja lebih tertarik untuk menyaksikan tayangan edukatif, sehingga preferensi tontonannya menjadi berubah. Sebelumnya, remaja lebih banyak menyaksikan konten hiburan ringan atau non-edukatif, namun dengan hadirnya acara *Clash of Clans*, remaja mulai tertarik dengan tayangan yang memiliki perpaduan menarik antara nilai edukasi dan hiburan. Menampilkan kompetisi sengit dengan peserta jenius membuat acara ini digemari remaja. Profil peserta berupa nama, IPK, asal universitas, prestasi, yang berulang kali ditampilkan membuat mereka menjadi *role model* dan idola baru bagi remaja. Tayangan ini sekaligus memberikan gambaran bagaimana orang-orang jenius berpikir keras, berhitung cepat, mengingat simbol dan angka, serta kemampuan manajerial tim dari beberapa permainan yang dipertandingkan. Hal ini tentu menjadi oase di tengah banyaknya tayangan non edukatif seperti cek khodam dan penonton setia Mama Gufon dengan bahasa Suryaninya di Tiktok.

*Kedua*, remaja memiliki keinginan yang tinggi untuk dapat mengembangkan kemampuan kognitif dan intelektualnya. Aspek edukatif yang ditawarkan sangat menarik minat remaja yang haus akan tantangan, dan acara ini memberikan tantangan intelektual yang tinggi dengan kemasan yang menarik. *Clash of Champions* memperlihatkan bagaimana para peserta berjuang menggunakan kemampuan berpikir yang cepat, analisis kritis, serta perhitungan matematis yang mapan dalam setiap permainan. Kompetisi semacam ini membuat remaja tidak hanya terhibur, namun juga menjadi terdorong untuk mengasah kemampuan kognitif mereka sendiri.

Dari berbagai komentar positif yang ada di media sosial memperlihatkan bahwa mereka sangat terdorong untuk lebih berprestasi dan terlibat dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat seperti mahasiswa-mahasiswi berprestasi yang ditampilkan pada acara tersebut. *Clash of Champions* memperlihatkan pada remaja bahwa belajar dengan giat merupakan sesuatu yang menyenangkan, terlihat bahwa role model yang ada di acara ini bukan merupakan orang-orang kurang pergaulan dan kaku. Mereka tetap berjejaring dan mengikuti perkembangan zaman. Seperti beberapa orang peserta yang masih menggandrungi dan menghadiri konser Girl Group Korea, membuat konten di Tiktok dan Instagram, serta berbagi *a day in my life* di sosial media mereka.

*Ketiga*, remaja yang menonton tayangan ini mengalami pengembangan kognitif dan afektif. Mereka menganalisis strategi yang digunakan peserta, serta berusaha menemukan pola yang sesuai dengan kemampuan mereka. Remaja mulai berkomentar terkait cara penyelesaian soal-soal pada kompetisi ini, dan mengomentari berbagai strategi peserta. Selain itu, mereka juga berusaha untuk menjawab berbagai soal yang diberikan dan remodelling format kompetisi tersebut, baik dari segi waktu dan soal yang sama persis dengan bentuk kompetisi. Kemampuan matematis yang mereka dapatkan pada acara ini mendorong mereka untuk berpikir cepat dan berusaha memecahkan masalah dalam waktu singkat. Beberapa remaja seperti yang dijelaskan diatas melakukan *remodelling*, yakni mereplikasi format kompetisi yang mereka tonton dengan menggunakan soal-soal yang serupa dan mengatur waktu sama persis dengan format yang ditampilkan pada acara tersebut. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kemampuan kognitif remaja, namun juga dapat mengembangkan kemampuan manajerial dalam mengelola strategi dan waktu.

Selain mengalami pengembangan kemampuan kognitif, remaja yang mengonsumsi tayangan ini juga belajar tentang aspek afektif peserta yang tampil. Bagaimana peserta menghargai serta mengapresiasi lawanandingnya, tidak merendahkan peserta lain, tidak menganggap dirinya lebih hebat saat mengungguli lawan mainnya dan secara suportif mengakui kekalahannya. Hal ini memperlihatkan bahwa kecerdasan tidak hanya dilihat dari kemampuan intelektual yang dimiliki seseorang, namun juga dari bagaimana seseorang bersikap dalam situasi kompetisi. Peserta yang berkompetisi dalam acara ini memperlihatkan bahwa kemenangan yang diperoleh bukan tujuan utama, mereka memperlihatkan bahwa mengakui keunggulan lawan, dan menerima kekalahan tanpa meremehkan orang lain merupakan suatu tujuan lain yang mereka dapatkan. Hal ini merupakan contoh penting bagi remaja di ranah akademik, bagaimana remaja di sekolah dapat dengan sabar menerima kekalahan dan kekurangannya dan mengakui kelebihan serta keunggulan temannya yang lain. Contoh perilaku ini juga dapat meningkatkan hubungan positif remaja dalam dunia akademik dan lingkungan sehari-hari. Sehingga budaya saling menghargai, mendorong orang lain untuk lebih baik, tidak merendahkan teman, mengakui bahwa setiap orang memiliki kelebihan yang berbeda-beda dapat menghilangkan budaya perundungan di sekolah. Kedua aspek tersebut membuat tokoh yang di contoh menjadi pribadi yang tidak hanya pintar namun memiliki kepribadian yang baik untuk dicontoh remaja.

*Keempat*, meminjam teori James Coleman dengan Pilihan rasionalnya, remaja yang menyaksikan tayangan ini secara jelas menyebutkan ketertarikan mereka pada tayangan edukatif. Mereka menerangkan bahwa tayangan yang ada di media sosial kebanyakan tidak berpendidikan atau amoral. Dalam teori Coleman, aktor rasional bertindak berdasarkan

pertimbangan untuk memaksimalkan kepuasan atau utilitas yang mereka peroleh dari suatu tindakan. Dalam hal ini, remaja sebagai aktor rasional bertindak secara rasional untuk memaksimalkan utilitas atau kepuasan mereka pada tayangan yang mereka anggap bermanfaat. Mereka sadar, bahwa tontonan tersebut memberikan manfaat yang lebih besar pada perkembangan intelektual mereka jika dibandingkan dengan konten lain. Tayangan ini juga membuat daya atau kemampuan berpikir rasional remaja meningkat, karena secara tidak langsung acara tersebut mengasah kemampuan analisis mereka mengenai tontonan yang baik atau tidak untuk mereka konsumsi. Hal ini menggambarkan bagaimana remaja, dalam hal ini sebagai aktor rasional bertindak untuk memaksimalkan manfaat dari setiap tontonan yang mereka pilih

## Kesimpulan

Ruangguru melalui acara *Clash of Champion* yang ditayangkan di berbagai platform media sosial, dalam hal ini yang paling banyak diteliti adalah Youtube Ruangguru, memberikan hegemoni baru untuk tayangan remaja. Dengan tampilan yang kreatif dan strategi marketing yang tepat, Ruangguru melalui hegemoninya berhasil mendistribusikan ideologi untuk merubah preferensi remaja dalam memilih tayangan yang bernilai edukasi. Tentu hegemoni ini memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi perkembangan remaja. Ada empat pengaruh positif yang ditemukan dalam penelitian ini; *pertama*, remaja lebih tertarik untuk menyaksikan tayangan edukatif, sehingga preferensi tontonannya menjadi berubah. *Kedua*, remaja memiliki keinginan yang tinggi untuk dapat mengembangkan kemampuan kognitif dan intelektualnya. *Ketiga*, remaja yang menonton tayangan ini mengalami pengembangan kognitif dan afektif. Dan *keempat*, remaja secara rasional dapat memilih tayangan yang baik untuk dikonsumsi.

Tulisan ini menunjukkan bahwa tayangan edukatif (dalam hal ini *Clash of Champions*) memberikan dampak positif bagi perkembangan kognitif dan afektif remaja. Tayangan ini tidak hanya menarik remaja melalui tayangan kompetisi saja, namun juga mengubah preferensi tayangan mereka jauh kepada tayangan yang memiliki nilai positif. Remaja yang cenderung memilih tayangan hiburan yang cenderung ringan dan tidak memiliki nilai pendidikan kini mulai tertarik pada tayangan yang menggabungkan unsur pendidikan yang dikemas dalam bentuk hiburan yang menarik. Tayangan ini tentunya memberikan dampak positif dan memberikan motivasi untuk meningkatkan kemampuan intelektual dan keterampilan berpikir kritis remaja.

Pengaruh tayangan ini juga terlihat dari pengembangan aspek sosial dan emosional, dimana remaja belajar mengenai sportifitas, menghargai kompetitor, dan mengakui kekalahan dengan bijak. Hal ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya seseorang di posisi

kalah atau menang untuk memiliki sikap rendah hati dan mengakui keunggulan lawannya dan juga tidak merendahkan kompetitornya. Pengembangan kemampuan sosial dan emosional ini diharapkan dapat memberikan pengaruh pada perilaku sosial remaja baik itu di lingkungan akademik maupun di kehidupan sehari-hari.

### Daftar Pustaka

- Asfar, I. T., & Taufan, I. (2019). Analisis naratif, analisis konten, dan analisis semiotik (Penelitian kualitatif). *no. January*, 1-13.
- Cho, C. H., & Cheon, H. J. (2005). Children's exposure to negative Internet content: Effects of family context. *Journal of Broadcasting & Electronic Media*, 49(4), 488-509.
- Darman, Fauzan, Dhahir. (2018). Internet Parenting Upon Indonesian Children. 3(2):169-178. doi: 10.30818/JPKM.2018.2030206
- Dita, Rachmayani. (2017). Internet for Children: A Review Study. 141-146. doi: 10.2991/ICECE-16.2017.24
- Freska, N. W., Kep, M., Fitra Yeni, S., & Kp, M. A. (2023). *Detoks Digital Remaja*. CV. Mitra Edukasi Negeri.
- Hamzah, N. (2015). Anarkisme dan Sensualisme Televisi Indonesia.
- Harry, Graff, Kimball., Francesca, Fernandez., Kathleen, Moskowit., Minji, Kang., Lindsay, M, Alexander., Kevin, P, Conway., Kathleen, R., Merikangas., G., A., Salum., Michael, P., Milham. (2023). Parent-Perceived Benefits and Harms Associated With Internet Use by Adolescent Offspring. *JAMA network open*, 6 doi: 10.1001/jamanetworkopen.2023.39851
- Ives, P. (2004). *Language and hegemony in Gramsci* (pp. 144-160). London: Pluto Press.
- Johnston, W. M., & Davey, G. C. (1997). The psychological impact of negative TV news bulletins: The catastrophizing of personal worries. *British journal of psychology*, 88(1), 85-91.
- De Orellana, J. C. (2015). Gramsci on hegemony.
- Rahardjo, M. (2018). Studi Teks dalam Penelitian Kualitatif.
- Turner, L. H., & Richard, W. (2007). *Introducing communication theory: Analysis and application*. McGraw-hill.
- Soendari, T. (2012). Metode penelitian deskriptif. *Bandung, UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka*, 17, 75.
- (2022). Internet Usage and Academic Performance of Secondary School Students in Indonesia. *Journal of education*, 5(2):27-36. doi: 10.53819/81018102t5067
- Kementrian Komunikasi dan Informatikan (2014). Riset Kominfo dan Unicef Mengenai Perilaku Anak dan Remaja dalam Menggunakan Internet. Retrieved August 2nd, 2024, from

[https://www.kominfo.go.id/content/detail/3834/siaran-pers-no-17pihkominfo22014-tentang-riset-kominfo-dan-unicef-mengenai-perilaku-anak-dan-remaja-dalam-menggunakan-internet/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/3834/siaran-pers-no-17pihkominfo22014-tentang-riset-kominfo-dan-unicef-mengenai-perilaku-anak-dan-remaja-dalam-menggunakan-internet/0/siaran_pers)

Suprpto, Puspo Laili (2024). Clash of Champions Ruangguru, Orang Indonesia Benci Lihat Orang Cerdas. Retrieved July 24, 2024, from (<https://www.kompasiana.com/puspololailiksuprpto8259/6693867ec925c459026b3a92/clash-of-champions-ruangguru-orang-indonesia-benci-lihat-orang-cerdas>)

## **Hiperrealitas Pengunjung Objek Wisata Ala Luar Negeri di Instagram**

**Hayana Muslimah<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia. (email: [hayanamuslimah@gmail.com](mailto:hayanamuslimah@gmail.com))

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses terjadinya hiperrealitas yang dilakukan oleh pengunjung obyek wisata ala luar negeri di Instagram. Penelitian ini menggunakan teori hiperrealitas, simulakra dan simulasi oleh Jean Baudrillard. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dan observasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penarik hiperrealitas yang dilakukan oleh pengunjung pada obyek wisata ala luar negeri di Instagram, diantaranya adalah tren postingan foto instagramable, pengaruh lingkungan pertemanan, maraknya pembangunan obyek wisata swafoto, dan hobi travelling. Sedangkan bentuk-bentuk hiperrealitas yang dilakukan oleh pengujung diantaranya, 1) mengkonsumsi tanda; atraksi berswafoto selama wisata, mengunggah foto di Instagram, 2) peningkatan pengetahuan estetika dalam menggunakan Instagram; menggunakan editing foto, membuat caption yang menarik, 3) budaya konsumen; kecanduan mengunjungi spot foto Instagramable dan berwisata sebagai bagian dari gaya hidup.

### **Kata kunci:**

hiperrealitas; instagram; simulakra; simulasi

### **Pendahuluan**

Perkembangan teknologi dan kemunculan Instagram dengan berbagai fitur edit foto yang menarik dan kemudahan berbagi foto, menciptakan sebuah fenomena baru di tengah masyarakat modern, yakni kebiasaan berswafoto dan mengunggah fotonya ke media sosial (Rosalina et al., 2019:3). Melalui Instagram orang-orang dengan mudah membagikan kegiatannya untuk dikonsumsi oleh publik, termasuk berwisata merupakan salah satu kegiatan yang paling sering diunggah pengguna di Instagram. Akibat masifnya unggahan foto wisata di Instagram yang esthetic, meningkatkan hasrat pengguna Instagram lainnya untuk berburu spot-spot foto Instagramable (Listiono,2017 dalam Arsana, 2019:331).

Hal ini mendorong munculnya objek wisata swafoto ala luar negeri di beberapa daerah di Indonesia. Pariwisata ini menyediakan bangunan-bangunan replika ala luar negeri yang sudah populer, seperti menara Eiffel, menara Pisa, kincir angin Belanda serta bangunan- bangunan tradisional Jepang dan Korea yang tengah diminati oleh kalangan milenial dan pasca milenial saat ini.

Pada tahun 2020 lalu, objek wisata serupa telah dibangun juga di Kabupaten Kerinci, tepatnya di Desa Baru Semerah, Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci, Jambi. Obyek wisata tersebut diberi nama kawasan wisata Hutan Buluh Perindu. Keberadaan objek wisata Hutan Buluh Perindu ini, mengingatkan kita pada *Sagano Bamboo Forest*, wisata hutan Buluh yang sangat populer di Jepang. Desain obyek pariwisata ini, juga hampir sama persis dengan beberapa objek wisata swafoto lainnya yang serupa. Dimana terdapat replika bangunan- bangunan budaya asing yang mengabaikan unsur otentisitas, atau yang disebut oleh Baudrillard sebagai penciptaan model-model realitas yang tidak ada referensinya pada realitas; simulasi (Baudrillard, 1993 dalam Piliang, 2004)

Simulasi agar lebih terasa nyata, pihak pengelola menyiapkan baju Jepang lengkap dengan kimono, samurai, dan juga payung ala Jepang untuk pengunjung yang ingin berfoto dengan latar belakang gerbang dan jembatan di beberapa sudut hutan buluh, yang dibuat dengan konsep Jepang. Semua keseolah-olahan itu sangat menarik untuk difoto dan diunggah di media sosial. Tujuan pengunjung tidak lagi menikmati pemandangan alam yang ada, tapi lebih untuk menikmati spot-spot artifisial yang memberi sensasi seolah-olah sedang berada di luar negeri (Scientia.id, n.d.).

Sebagai konsekuensinya, menurut Baudrillard, kita hidup dalam apa yang disebutnya realitas hiper (hyper-realitas), di mana segala sesuatu adalah tiruan, atau tiruan dari sebuah tiruan, dan yang palsu tampaknya lebih nyata daripada kenyataan (Lury, 1998:99). Akibatnya plesir bukan lagi masalah mencari pengalaman otentik di sebuah tempat tapi juga mengambil foto, mengunggahnya di sosial media untuk pencarian pengakuan (theconversation.com, n.d.). Tren berwisata mulai berubah, dari yang dulunya berwisata karena ingin mengisi waktu luang, sekarang berwisata merupakan gaya hidup (Tempo.co, 2011). Kemunculan obyek wisata itu merupakan sebuah produk yang disebut Baudrillard sebagai produk dari simulakra dan simulasi, sebagai konsekuensinya, kita hidup dalam dunia hiperrealitas (Lury, 1998:99).

Dari fenomena tersebut penulis tertarik mengkaji lebih dalam bagaimana fenomena hiperrealitas yang dilakukan pengunjung obyek wisata Hutan Buluh Perindu terjadi dan bagaimana bentuk-bentuk hiperrealitas yang dilakukan oleh pengunjung di Instagram.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini dipilih peneliti untuk memperoleh pengetahuan mendalam dan menghimpun fakta dengan cermat mengenai fenomena hiperrealitas pengunjung obyek wisata ala luar negeri di Instagram. Sedangkan tipe penelitian ini

deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan berbagai kondisi dan sesuatu hal seperti apa adanya (Fachrina & Pramono, 2012:33). Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan proses terjadinya fenomena hiperrealitas oleh pengunjung di Instagram secara apa adanya berdasarkan pada hasil observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah wawancara mendalam dan observasi. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2014:231). Wawancara mendalam dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelum melakukan wawancara, tetapi pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak terperinci dan berbentuk pertanyaan terbuka (tidak ada alternatif jawaban) (Afrizal, 2014:20-21). Wawancara mendalam dilakukan karena dalam penelitian ini peneliti ingin memberikan kesempatan kepada informan untuk bercerita atau memberikan informasi mengenai hal yang mendorong informan berwisata serta alasan informan mengunggah swafoto tersebut di instagramnya. Wawancara mendalam dilakukan melalui *direct message* di platform Instagram. Wawancara mendalam pertama dilakukan menghabiskan waktu rata-rata lebih dan kurang dua jam. Wawancara mendalam, dalam penelitian ini dilakukan dua kali periode wawancara untuk memperkaya informasi yang diperoleh dari informan penelitian (Bungin, 2014:100). Alat yang digunakan untuk melakukan wawancara mendalam diantaranya alat tulis, buku catatan, pedoman wawancara dan handphone untuk merekam suara, melakukan wawancara, mengambil gambar, dan menelusuri akun Instagram informan. Wawancara dalam penelitian ini bersifat informal, interaktif, dan dilakukan melalui pertanyaan terbuka. Peneliti tetap membuat daftar pertanyaan, namun dalam praktiknya tidak secara ketat mengikuti daftar pertanyaan yang diajukan sebelumnya. Sehingga wawancara akan dilakukan mengalir sesuai dengan jawaban subjek. Hal terpenting dalam wawancara adalah mampu menggali data sedalam-dalamnya (Farid, 2018:47).

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data penelitian melalui proses pengamatan langsung di lapangan dengan menggunakan panca indra (Moleong, 2016:175). Untuk melakukan observasi, peneliti turun kelapangan untuk mengamati setiap hal yang dilakukan oleh pengunjung wisata, mengamati suasana wisata itu sendiri serta mengalami apa yang wisatawan lakukan di obyek wisata tersebut seperti ikut menyewa baju tradisional Jepang. Selain itu peneliti juga melakukan observasi pada laman (*feed*) Instagram informan untuk mengamati kebiasaan informan selama bermain Instagram, foto yang sering diunggah baik pada *feed* ataupun *story* Instagramnya, serta berapa lama waktu rata-rata yang dihabiskan oleh

informan pada platform tersebut. Alat pengamatan yang digunakan oleh peneliti diantaranya alat tulis, buku catatan dan handphone untuk merekam suara, mengambil gambar, dan menelusuri akun Instagram informan.

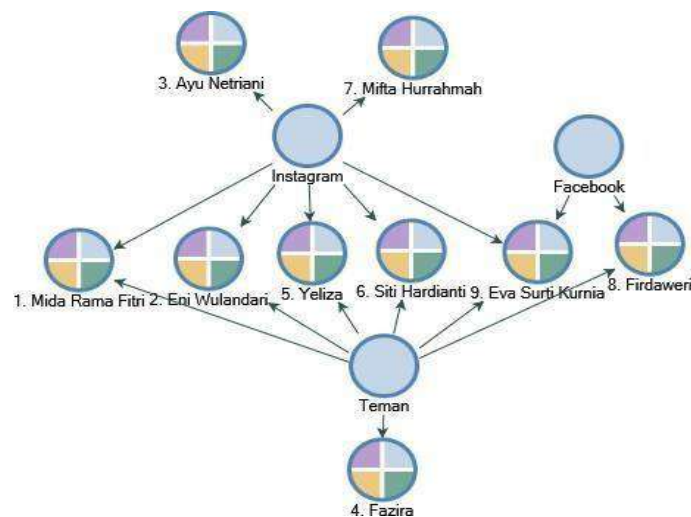
## Hasil dan Pembahasan

### 1. Faktor Penarik Terjadinya Hiperrealitas Swafoto Ala Luar Negeri di Instagram

#### a. Unggahan Foto Wisata di Instagram

Berdasarkan temuan hasil wawancara mendalam dengan sembilan orang informan, diketahui bahwa unggahan foto berwisata di instagram menjadi referensi utama penarik informan untuk berkunjung ke obyek wisata Hutan Buluh Perindu. Foto unggahan teman sebaya serta foto-foto wisata yang diunggah oleh akun khusus explore wisata di instagram memudahkan informan untuk memperoleh informasi wisata. Selain faktor maraknya unggahan foto wisata di instagram, pengaruh usia dan lingkungan pertemanan juga menjadi faktor penarik berikutnya bagi beberapa informan untuk berkunjung ke obyek wisata Hutan Buluh Perindu. Sebagaimana hasil wawancara mendalam divisualisasikan berikut ini:

**Gambar 1.**  
**Referensi Wisata**



*Sumber: Data Primer 2021*

Temuan di atas memperlihatkan bahwa dari sembilan informan yang diwawancarai, terdapat delapan orang informan yang menjadikan media sosial, seperti instagram dan facebook sebagai sumber referensi berwisata. Tujuh dari delapan informan memperoleh informasi terkait tempat-tempat wisata dari instagram, sedangkan satu orang lainnya berasal dari facebook. Foto-

foto yang diunggah pengguna instagram saat berwisata dengan spot foto yang instagramable menjadi faktor utama yang menarik informan untuk berwisata ke Hutan Buluh Perindu. Foto wisata Instagramable yang diunggah di platform Instagram tersebut merupakan bagian dari simulasi, yang mana foto wisata Instagramable tersebut sudah menjadi sebuah referensi tersendiri yang diluar dari sumber acuannya. Pengunjung datang bukan hanya dikarenakan wisata swafoto tersebut menyajikan duplikasi atau tiruan wisata ala Jepang, tetapi tempat wisata itu menyajikan tempat berswafoto yang Instagramable dan estetik untuk diunggah di feed Instagramnya. Mereka datang bukan untuk merasakan keseolah-olahan saja, tetapi lebih dari itu, untuk mengambil gambar, mengunggahnya di media sosial untuk mendapatkan branding atau simbol/petanda atau pengakuan.

#### **b. Pengaruh Usia dan Lingkungan Teman Sebaya**

Dari wawancara mendalam dan observasi, penulis menemukan bahwa sebagian besar informan yang diwawancarai mulai tertarik untuk berburu spot foto Instagramable pada usia berkisar antara 15 tahun hingga usia 18 tahun. Informan rata-rata mulai menyukai kegiatan berburu spot foto pada usia remaja atau ketika informan duduk di bangku SMP atau SMA. Rata-rata pengunjung obyek wisata Hutan Buluh Perindu mulai menyukai kegiatan berburu spot foto Instagramable, tengah berada pada kategori usia remaja madya (14-16 tahun) menuju masa transisi ke remaja akhir. Karakteristik remaja madya bisa menjadi salah satu faktor para informan untuk tertarik berburu spot foto bersama teman-temannya. Sebab pada tahap tersebut remaja madya sangat membutuhkan temannya dan juga mudah dipengaruhi oleh ajakan teman sebaya mereka, dikarenakan perilaku mereka yang masih labil dan masih bingung dalam mengambil keputusan. Remaja ini sering disebut dengan ABG (anak baru gede) yang tengah gelisah mencari identitas dan citra diri (Chaney, 1996:9). Seperti ungkapan salah satu informan berikut ini:

“Kira-kira sejak kelas 2 SMK kak, kalau dulu sih gak terlalu suka berfoto. Awal mulanya itu Mida diajak sama teman ke suatu tempat wisata, nah jadi waktu itu Mida kan masih gak terlalu suka berfoto kan kak. Terus Mereka memaksa Mida untuk berfoto. Nah dengan terpaksa Mida pun Berfoto dengan gaya yang canggung gitu. Nah pas pulang dari tempat wisata tersebut Mida dan teman-teman lihat-lihat hasil fotonya, nah disana Mida mulai berfikir tuh „*wah bagus juga yah hasil fotonya*’. Nah dari situ Mida mulai merasa penasaran dengan Spot-spot foto bagus lainnya” (Wawancara dengan Mida, 25 Mei 2021).

### **c. Maraknya Pembangunan Obyek Wisata Swafoto Ala Luar Negeri**

Obyek wisata Hutan Buluh Perindu hadir untuk memberikan atraksi berswafoto ala Jepang bagi pengunjungnya, di mana para wisatawan datang berkunjung bukan lagi untuk fungsi dan makna dari wisata pada idealnya, seperti sebagai tempat refreshing ataupun untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru. Namun pengunjung berwisata dikarenakan ia tertarik dengan spot foto yang Instagramable. Seperti yang disampaikan oleh beberapa informan sebagai berikut :

“Yang membuat saya tertarik ke sana karena tempatnya menarik sih. Dulukan di sana itu hanya pohon bambu biasa tapi oleh warga nya atau dari BUMDES nya ya kalo ngak salah itu bisa menyulap tempat yang dulu biasa aja bisa dibuat menjadi tempat wisata yang sangat menarik dan Instagramable buat anak muda kaya saya kak,” (Wawancara dengan Eni, 30 Maret 2021).

“Untuk jadikan background foto kayaknya menarik. Lokasi juga dekat jadi jalan-jalan santai bisalah kesana gitu. Kebetulan sore itu kakak dan tante lagi jalan-jalan sore aja. Berhenti sejenak kesana,” (Wawancara dengan Firda, 22 April 2021).

Dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa spot foto Instagramable menjadi salah satu faktor penarik wisatawan untuk berwisata ke obyek wisata Hutan Buluh Perindu. Para wisatawan datang berkunjung untuk mengambil foto di beberapa spot foto untuk dibagikan di Instagram mereka. Spot foto yang Instagramable menambahkan kesan yang estetik untuk tampilan foto mereka di Instagram. Proses terjadinya dunia hiperrealitas, tidak akan terjadi tanpa adanya simulakra dan simulasi yang mendukungnya. Maka kehadiran dari wisata swafoto yang merupakan simulakra dan sekaligus merupakan simulasi.

### **d. Hobi Jalan-Jalan (*Travelling*)**

Berdasarkan wawancara mendalam, ditemukan faktor lainnya yang menjadi penarik pengunjung wisata Hutan Buluh Perindu melakukan hiperrealitas di Instagram, yaitu diketahui bahwa sebagian besar pengunjung wisata Hutan Buluh Perindu mengaku suka mengunjungi wisata spot foto Instagramable dikarenakan mereka hobi travelling atau jalan-jalan. Hobi *travelling* yang dimaksudkan oleh para informan dalam penelitian ini merupakan kegembiraan atau kesenangan mengunjungi suatu tempat, baik tempat yang belum pernah dikunjungi maupun yang sudah dikunjungi tetapi tidak sering dengan tujuan tertentu. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan semua informan mengaku suka berburu spot foto Instagramable atau berwisata karena sudah menjadi bagian dari hobi mereka.

## **2. Bentuk-Bentuk Hiperrealitas Swafoto Ala Luar Negeri yang Dilakukan Oleh Pengunjung Obyek Wisata Hutan Buluh Perindu**

### **a. Mengonsumsi Simbol**

#### **1) Atraksi Berswafoto yang Dinikmati Selama Berwisata**

Di tempat-tempat wisata kegiatan berswafoto sudah menjadi banal dilakukan oleh para wisatawan terutama generasi milenial dan gen-Z, hingga muncullah wisata swafoto yang khusus memberikan atraksi wisata dengan spot-spot foto bagi pengunjungnya. Motif dan makna berwisata pun menjadi bergeser, dari yang mulanya aktivitas berwisata untuk tujuan menghilangkan rasa penat dari kesibukan dunia kerja (*refreshing*), kini trennya berubah didominasi oleh aktivitas berfoto untuk keperluan pamer dan mengisi konten di media sosial (Sujibto & Sholeh, 2021).

#### **2) Mengunggah Foto di Instagram**

Pengalaman berwisata bisa menjadi salah satu cara generasi muda untuk memperoleh penanda diri mereka (*image/citra*) melalui unggahan foto di akun Instagramnya. Akibatnya kegiatan berwisata bukan lagi sekedar cara untuk menyegarkan pikiran (*refreshing*), tetapi pada gilirannya ia menjadi sebuah ajang untuk mendapatkan nilai tanda yang perlu disiarkan kepada orang lain melalui Instagram. Hal ini bertendensi menjadikan pengalaman- pengalaman berwisata sebagai sebuah komoditi baru di media sosial yang patut untuk dinikmati oleh pengguna Instagram lainnya.

### **b. Peningkatan Pengetahuan Estetika dalam Menggunakan Instagram**

#### **1) Menggunakan Editing Fotografi**

Instagram merupakan media sosial yang mengutamakan tampilan foto yang aesthetic dan tampak professional. Akibat kehadiran Instagram kata esthetic menjadi banal digunakan oleh generasi milenial dan generasi Z dan esthetic menjadi bagian yang penting dari setiap unggahan foto/video yang dibagikannya di Instagram. Kata esthetic tersebut berhubungan dengan hal-hal yang indah dan seni yang dapat dinikmati dengan panca indra manusia.

Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa estetika telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat postmodern saat ini. Dengan kehadiran Instagram, estetika menjadi semakin mudah untuk diciptakan oleh siapa saja dengan fitur-fitur editing fotografi yang disediakan. Foto-foto biasa menjadi lebih terlihat indah dan professional, sehingga foto/video menjadi komoditas yang dapat dinikmati oleh pengguna Instagram lainnya.

Foto tersebut diperindah atau disimulasikan dengan menggunakan editing fotografi. Berbagai aplikasi editing video ataupun foto yang saat ini populer serta dapat di-download secara

gratis melalui Appstore untuk pengguna IOS dan Playstore untuk pengguna Android. Adapun aplikasi foto tersebut seperti Lightroom, VN, Picsart, Inshoot, Capcut, dan Snapsheet. Selain itu fitur story pada Instagram, juga dipilih informan untuk membuat Instagram story yang menarik ataupun karena dapat menggabungkan foto, video dan musik menjadi satu.

## **2) Membuat *Caption* yang Menarik**

Platform Instagram tidak hanya menyediakan tempat untuk berbagi foto dan video saja, juga memberikan ruang untuk berbagi cerita melalui caption yang terletak di bawah foto atau video yang diunggah. Fungsi caption adalah untuk memberikan keterangan mengenai foto/video yang diunggah oleh pengguna di Instagram.

Caption pada Instagram biasanya berbentuk kalimat singkat ataupun kalimat panjang yang menjelaskan maksud atau pesan tertentu dari yang membuat caption. Di Instagram jumlah kata pada caption dibatasi maksimal 2200 karakter. Meskipun caption seharusnya mendeskripsikan isi yang tertera pada gambar, namun di Instagram caption dapat bebas digunakan dengan berbagai gaya sesuai keinginan penggunanya. Caption bisa jauh berbeda dengan makna foto yang diunggahnya. Kehadiran caption, juga merupakan bagian dari estetikasi, yang tujuannya untuk menambahkan kesan keindahan pada foto yang mereka bagikan. Sehingga caption tidak lagi sebatas teks pelengkap keterangan gambar, namun sebuah kata-kata yang dirangkai dengan indah oleh pengguna untuk menambah nilai estetika pada foto/video yang dibagikannya.

Caption yang sering dibagikan oleh pengguna Instagram biasanya berupa caption; kata-kata ringkas, puitis, emoticon, dan sebagainya. Dengan hanya memotret satu foto terbaik, lalu membubuhkan keterangan spot di mana foto itu diambil, lalu diunggah dengan caption yang rada alay dan bikin baper dan lengkap dengan tagar (hashtag), follower dan pengguna Instagram secara bebas bisa menikmati unggahan tersebut dengan tanpa ada batas waktu (Sujibto & Sholeh, 2021).

## **c. Budaya Konsumen dan Hiperrealitas Pengunjung Wisata Hutan Buluh Perindu**

### **1) Frekuensi Kunjungan Wisata**

Empat dari Sembilan informan yang diwawancarai mengaku telah melakukan kunjungan wisata lebih dari satu kali ke obyek wisata Hutan Buluh Perindu. Lima informan lainnya mengaku baru berkunjung satu kali, sebagian besar informan berkeinginan untuk kembali berkunjung ke obyek wisata tersebut.

Minimnya jumlah spot foto yang disediakan, menjadi faktor utama yang menyebabkan pengunjung kurang puas dengan fasilitas wisata tersebut dan menjadi alasan utama para

informan untuk kembali berkunjung jika wisata direnovasi lebih baik lagi (Mida, Firda, Eva). Sedangkan alasan lainnya para informan ingin kembali berkunjung adalah ingin mencoba mengenakan kimono sambil berfoto karena pada kunjungan pertama mereka tidak sempat menyewa baju tradisional Jepang tersebut dikarenakan saat itu ramai pengunjung (Ayu, Mifta), ada juga disebabkan cuaca kurang mendukung saat kunjungan pertamanya (Yeliza) dan ingin kembali menikmati suasana di wisata tersebut (Siti), serta alasan jika ada teman yang mengajak kembali berkunjung (Eni, Firda). Dan ada juga dikarenakan ketagihan dengan spot-spot foto Instagramable karena bagus untuk diposting di Instagram.

## **2) Kecanduan Berburu Spot Foto Instagramable**

Rata-rata informan yang diwawancarai mengaku menyukai kegiatan berburu (hunting) spot foto Instagramable. Mereka hampir mengunjungi semua obyek wisata Instagramable yang baru dibangun di wilayah sekitar Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Beberapa diantaranya mengaku berkunjung lebih dari satu kali ke tempat wisata yang pernah dikunjungi. Berikut jumlah obyek wisata Instagramable yang pernah dikunjungi oleh informan.

Kegiatan berburu spot foto ini, tujuan utamanya untuk berswafoto dan membagikan foto-foto dengan latar yang estetik tersebut ke akun Instagram mereka. Di sanalah kesan, citra, atau image mereka peroleh dari tanggapan atau komentar, jumlah likes dan followers mereka. Arus image dan simulasi yang mempesona yang tidak ada akhirnya itu, membentuk kesenangan estetik yang tidak terbatas oleh pengguna Instagram. Akibatnya pengguna Instagram menjadi kecanduan untuk terus-menerus mencari spot foto Instagramable terbaru atau kekinian. Hal itu merupakan konsekuensi dari dunia hiperrealitas, yakni di dalamnya imajinasi dan realitas saling berbaur dan menjadi kabur. Sehingga orang-orang sulit membedakan mana yang mereka butuhkan dengan mana yang sekedar mereka diinginkan.

## **3) Berwisata Sebagai Gaya Hidup**

Kemunculan Instagram, mendorong semua orang untuk mengunggah gaya hidup bersenang-senang (*have fun*) tersebut di Instagram, yang dapat bebas diakses oleh siapa saja. Postingan itu lalu ditonton oleh pengguna Instagram lainnya, yang mana tentunya akan ditonton oleh orang-orang di lingkungan sekitar kehidupannya, seperti keluarga dan teman-teman sebaya. Seperti yang juga disampaikan oleh sebagian besar informan, bahwa hasrat atau keinginan mereka untuk berkunjung ke Wisata Hutan Buluh Perindu, distimulasikan oleh postingan teman-temannya melalui platform Instagram. Oleh sebab itu mereka pun akhirnya memutuskan untuk berkunjung ke obyek tersebut.

Dari penjelasan itu kita dapat memahami bahwa berwisata saat ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Mereka sebenarnya berwisata bukan karena kebutuhan untuk menyegarkan pikiran dari padatnya aktivitas sehari-hari atau hanya sekedar untuk mengisi waktu luang, namun mereka berwisata dikarenakan keinginan, hasrat, atau seductive yang ditawarkan oleh media sosial Instagram, dalam bentuk foto-foto wisata yang estetik, yang menawarkan citra palsu pada pengguna Instagram lainnya. Berwisata akhirnya menjadi komoditi posisional, yang layak untuk dikonsumsi atau dipertontonkan kepada orang banyak untuk mendapatkan nilai penanda dari citra foto yang dibagikan tersebut.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan interpretasi data pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Alasan penarik terjadinya hiperrealitas pengunjung wisata ala luar negeri di Instagram adalah maraknya postingan foto dengan spot Instagramable, pengaruh lingkungan perteman, maraknya pembangunan obyek wisata swafoto, serta wisatawan memiliki hobi jalan-jalan. Unggahan foto Instagramable di Instagram merupakan faktor utama yang mempengaruhi pengguna Instagram untuk tertarik berwisata. Selanjutnya adalah pengaruh teman sebaya menjadi faktor kedua yang mempengaruhi informan untuk melakukan kegiatan berwisata. Dengan memperoleh informasi wisata melalui Instagram, para wisatawan biasanya datang berkunjung tidak sendiri, mereka akan mengajak untuk berwisata. Maraknya pembangunan obyek wisata swafoto mulai tahun 2018 hingga sekarang, menjadi faktor selanjutnya yang menarik wisatawan untuk berwisata. Serta wisatawan mengakui tertarik berwisata dikarenakan mereka sendiri memiliki kegemaran atau hobi travelling.

Bentuk-bentuk hiperrealitas swafoto ala luar negeri yang dilakukan oleh wisatawan di antaranya ialah mengkonsumsi tanda, pengunjung yang datang berwisata cenderung hanya untuk berswafoto dan mengunggahnya di Instagram untuk mendapatkan pengakuan. Bentuk hiperrealitas selanjutnya ialah peningkatan pengetahuan estetika dalam menggunakan Instagram, di mana sebelum mengunggah fotonya ke Instagram, pengguna akan terlebih dahulu mengedit foto tersebut agar terlihat lebih esthetic, serta menambahkan caption berupa kata-kata mutiara, puitis, bahasa asing, motivasi, galau dan sebagainya untuk menambah kesan esthetic pada foto tersebut. Konsekuensi hiperrealitas adalah budaya konsumen berupa kecanduan mengunjungi spot foto Instagramable, berkunjung lebih dari satu kali serta berwisata sebagai gaya hidup, berwisata bukan lagi untuk mengkonsumsi fungsi dan makna, namun untuk mengkonsumsi simbol-simbol.

### Daftar Pustaka

- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Arsana, I. G. N. W. (2019). Fenomena Pengelolaan atraksi Wisata Swafoto Dan Implikasinya Bagi Masyarakat Di Desa Wanagiri Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng. *Pariwisata, Fakultas Udayana, Universitas*, 05(02), 330–347.
- Bungin, M. B. (2014). *Penelitian Kualitatif*. Kencana Prenada Media Grup. Chaney, D. (1996). *Life Style: Sebuah Pengantar Komprehensif*. Jalasutra.
- Fachrina, & Pramono, W. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Sosial*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.
- Farid, M. (2018). *Fenomenologi Dalam Penelitian Sosial*. Prenadamedia Group. Lury, C. (1998). *Budaya Konsumen*. Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Piliang, Y. A. (2004). *Post Realitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Post Metafisika*. Jalansutra.
- Rosalina, D. P., Luh, E. S., & Widya, P. M. (2019). Preferensi Wisatawan Milenial Nusantara Pada Daya Tarik Wisata Swafoto Di Bali. *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, 10(1), 1–9. <https://doi.org/10.22334/jihm.v10i1.156>
- Scientia.id. (n.d.). *Menikmati Keseolah-olahan*. Alfitri. Retrieved March 2, 2021, from <https://scientia.id/2021/01/25/menikmati-keseolah-olahan/>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Sujibto, B. J., & Sholeh, S. T. (2021). Dari Nature ke Pamer : Makna dan Motivasi Berwisata Generasi Muda. *Sosiologi Reflektif, Volume 15, No. 2, Sosiologi, Program Studi Sunan, U I N Yogyakarta, Kalijaga*, 15(2), 406–423.
- Tempo.co. (2011). *Wisata Sudah Jadi Gaya Hidup*. Fikri, Ahmad. <https://travel.tempo.co/read/330284/wisata-sudah-jadi-gaya-hidup/full&view=ok>
- Theconversation.com. (n.d.). *Tidak perlu yang asli, yang penting selfie: fenomena di balik Rabbit Town*. Holy Rafika Dhona. Retrieved September 30, 2020, from <https://theconversation.com/tidak-perlu-yang-asli-yang-penting-selfie-fenomena-di-balik-rabbit-town-94857>

## **Implementasi dan Tantangan Anggaran Responsif Gender: Studi Literature**

**Harrey Hadi**

Program Doktor Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya, Indonesia.

### **Abstrak**

Anggaran Responsif Gender (ARG) merupakan pendekatan penting dalam pengelolaan anggaran publik yang bertujuan untuk mengintegrasikan dimensi gender dalam proses perencanaan, alokasi, dan penggunaan anggaran. Penulis melakukan Studi Literatur untuk menginvestigasi pendekatan ARG dalam konteks implementasi dan tantangannya di dalam dan luar negeri. Kami menganalisis sepuluh jurnal terdiri dari lima jurnal nasional dan lima jurnal internasional yang membahas implementasi ARG dari tahun 2016 hingga 2023. Temuan kami menunjukkan bahwa ARG memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, serta menjadi wujud dari *good governance* dalam pengelolaan anggaran daerah. Namun, implementasi ARG dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan terkait anggaran, diskriminasi terhadap perempuan, serta kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang gender di kalangan penyusun anggaran dan masyarakat umum. Selain itu, kami menemukan bahwa kurangnya alokasi anggaran yang memadai, ketidakpastian mengenai keefektifan dan keefisienan dalam pengelolaan anggaran daerah, dan resistensi masyarakat terhadap konsep gender juga menjadi hambatan dalam implementasi ARG. Temuan ini menyoroti perlunya upaya yang berkelanjutan dan terkoordinasi untuk mengatasi tantangan-tantangan ini agar ARG dapat mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap gender.

### **Kata kunci:**

anggaran responsive gender; implementasi; tantangan, studi literatur

### **Pendahuluan**

Studi administrasi publik tentang *gender equality* atau kesetaraan gender merupakan bidang yang berkembang pesat dalam ilmu administrasi publik. Ini adalah cabang dari penelitian yang fokus pada cara-cara di mana lembaga-lembaga publik, kebijakan, dan praktik administratif mempengaruhi atau dipengaruhi oleh isu-isu kesetaraan gender (Ratag et al., 2019). Pada dasarnya, kesetaraan gender mengacu pada prinsip bahwa semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak yang sama dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam partisipasi politik, ekonomi, dan sosial (Mahadevia et al., 2017). Studi administrasi publik tentang *gender equality* mencakup analisis kebijakan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan publik, program, dan inisiatif pemerintah berkontribusi pada peningkatan kesetaraan gender atau sebaliknya (Biduri et al., 2022).

Pelayanan publik merupakan aspek krusial dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, yang seharusnya diakses secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk berdasarkan perbedaan gender (Zarefar et al., 2021). Gender menjadi dimensi yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan anggaran pelayanan publik untuk memastikan bahwa kebutuhan dan hak setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, terpenuhi secara proporsional dan berkeadilan (Tommaso et al., 2019). Meskipun telah banyak peraturan dan kebijakan yang menekankan pentingnya integrasi gender dalam perencanaan pembangunan, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam konteks anggaran pelayanan publik (Andi Yusril Cibu, 2021).

Anggaran Responsif Gender (ARG) atau *Gender-Responsive Budgeting* (GRB) telah menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan keadilan gender dan inklusi sosial dalam proses pembangunan (Polzer et al., 2023). Di banyak negara, termasuk Indonesia, ketidaksetaraan gender masih menjadi tantangan serius yang mempengaruhi akses dan pemerataan manfaat pembangunan. Kesenjangan ini termanifestasi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, peluang kerja, serta partisipasi politik dan ekonomi (Andi Yusril Cibu, 2021). Untuk mengatasi tantangan ini, ARG menjadi suatu pendekatan yang penting untuk memastikan bahwa alokasi anggaran publik mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan semua golongan gender, khususnya perempuan, yang sering kali terpinggirkan dalam proses pembangunan.

Pada tingkat global, komitmen untuk mewujudkan ARG telah tercermin dalam berbagai kesepakatan internasional, termasuk Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan yang menekankan pentingnya integrasi gender dalam semua aspek pembangunan (Noviani et al., 2022). Penelitian tentang implementasi dan tantangan anggaran responsif gender menjadi relevan karena meningkatnya kesadaran akan pentingnya inklusi gender dalam pembangunan serta kebutuhan untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat dan merata. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki sejauh mana aspek gender telah diintegrasikan dalam perencanaan anggaran pelayanan publik di dalam dan luar negeri beserta tantangannya.

Pemahaman tentang dinamika gender dalam perencanaan anggaran pelayanan publik tidak hanya untuk memastikan akses dan pemerataan pelayanan publik yang lebih baik, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi untuk memperkuat praktik perencanaan anggaran pelayanan publik yang lebih berpihak pada gender, sehingga mampu memberikan manfaat maksimal bagi seluruh anggota masyarakat, tanpa terkecuali.

## Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah studi literatur di mana hasil dari sintesisnya dapat dijadikan rujukan untuk penelitian mendatang. Penelitian ini menggunakan teknik studi literatur yang tidak sistematis dengan memanfaatkan penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional yang membahas topik perencanaan anggaran berbasis gender dari periode tahun 2014 hingga 2023. Dalam proses pencarian jurnal, digunakan beberapa keyword seperti "implementasi", "tantangan", "pelayanan publik", dan "anggaran responsif gender". Jurnal-jurnal yang ditemukan kemudian disaring dengan membaca keseluruhan isi jurnal, dan dipilihlah sepuluh jurnal yang relevan untuk digunakan dalam studi literatur ini. Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi penelitian tentang perencanaan anggaran berbasis gender di Indonesia dan tantangannya. Studi literatur ini juga dapat digunakan sebagai referensi dan sumber informasi bagi pemangku kepentingan dalam merancang perencanaan anggaran pelayanan publik yang lebih inklusif secara gender.

## Hasil dan Pembahasan

Hasil dari pencarian jurnal didapatkan sepuluh jurnal terdiri dari lima jurnal nasional dan lima jurnal internasional yang relevan dengan kata kunci dan topik studi literatur. Daftar jurnal yang digunakan dalam studi literatur ini ditampilkan dalam Tabel 1.

**Tabel 1.**

**Daftar jurnal yang digunakan dalam studi literatur**

No	Judul Artikel, Penulis dan Tahun	Lokus Kasus	Metode Penelitian	Permasalahan Penelitian dan Hasil Penelitian
1	Urgensi Kebijakan Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Perempuan  <i>Aga Natalis, 2020</i>	Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia	Kualitatif	<b>Permasalahan:</b> rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan terkait anggaran di daerah, serta masih adanya bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan. <b>Hasil:</b> penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam kebijakan penyelenggaraan APBD dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran, serta menjadi wujud dari <i>good governance</i> dalam pengelolaan anggaran daerah. Namun, terdapat hambatan dalam implementasi ARG, seperti kesalahpahaman yang luas, kurangnya SDM, ketiadaan lembaga pengarusutamaan gender, serta ketiadaan alokasi anggaran untuk profil gender dan pelatihan gender

No	Judul Artikel, Penulis dan Tahun	Lokus Kasus	Metode Penelitian	Permasalahan Penelitian dan Hasil Penelitian
2	Integrasi Anggaran Responsif Gender Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah  <i>Nur Khaerah, 2016</i>	Makasar, Indonesia	Kualitatif	<b>Permasalahan:</b> kurangnya integrasi anggaran responsif gender dalam APBD Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun 2014. Kendala kebijakan, struktural, dan kultural menjadi hambatan utama dalam implementasi anggaran responsif gender. Dukungan politik yang minim, kurangnya pemahaman program-program gender, serta norma budaya yang mempengaruhi persepsi terhadap isu gender. <b>Hasil:</b> Adanya dugaan integrasi anggaran responsif gender dalam APBD Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun 2014. Meskipun terdapat peningkatan dalam beberapa indikator kesehatan seperti Usia Harapan Hidup dan Angka Kematian Bayi, masih terdapat kelemahan dalam mencapai target peningkatan Akses Layanan Kesehatan Masyarakat dan Angka Kematian Ibu. Kendala kebijakan, struktural, dan kultural menjadi tantangan utama yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas integrasi anggaran responsif gender di tingkat daerah.
3	Perencanaan dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Berperspektif Gender pada Pemerintah Daerah <i>I Made Pradnya, 2020</i>	Indonesia	Kuantitatif	<b>Permasalahan:</b> kurangnya perhatian terhadap perspektif gender dalam perencanaan dan partisipasi penyusunan anggaran di pemerintah daerah. <b>Hasil:</b> terdapat pengaruh antara perencanaan anggaran terhadap anggaran berperspektif gender. Hal ini mengimplikasikan bahwa keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan anggaran dapat menentukan anggaran yang lebih adil. Namun, tidak ditemukan pengaruh antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap anggaran berperspektif gender. Hal ini mungkin disebabkan oleh sedikitnya peran perempuan sebagai perangkat penyusun anggaran.
4	Persepsi Penyusun Anggaran Mengenai Konsep Kebijakan Anggaran Responsif Gender <i>Galuh Retno Widowati, Unti Ludigdo, Ari Kamayan, 2016</i>	Kota Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia	Kualitatif	<b>Permasalahan:</b> kurangnya pemahaman atau kesadaran dari penyusun anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo mengenai konsep kebijakan Anggaran Responsif Gender ( <i>Gender Responsive Budgeting/GRB</i> ). Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam alokasi anggaran antara laki-laki dan perempuan, serta kurangnya perhatian terhadap kebutuhan dan aspirasi perempuan dalam proses perencanaan anggaran. <b>Hasil:</b> pemahaman penyusun anggaran terkait kebijakan GRB masih perlu ditingkatkan. Implementasi kebijakan GRB di Kota Probolinggo pada tahun pertama belum sepenuhnya responsif gender, dengan

No	Judul Artikel, Penulis dan Tahun	Lokus Kasus	Metode Penelitian	Permasalahan Penelitian dan Hasil Penelitian
				beberapa kegiatan khusus perempuan yang belum dialokasikan. Tantangan yang dihadapi antara lain ketiadaan peraturan daerah yang berlaku, kurangnya kemampuan analisis gender, resistensi masyarakat terhadap konsep gender, dan persepsi penyusun anggaran yang meragukan urgensi kebijakan GRB.
5	Anggaran Responsif Gender Sebagai Suatu Instrumen Negara Untuk Pemenuhan Hak Perempuan Di Indonesia  <i>Syarifah Ida Farida, 2018</i>	Indonesia	Kualitatif	<b>Permasalahan:</b> kurangnya pengungkapan fakta gender dalam dokumen anggaran dan kebijakan terkait, serta kebutuhan akan kemampuan teknis dan advokasi untuk mempengaruhi penyusunan anggaran. <b>Hasil:</b> tantangan dalam implementasi Anggaran Responsif Gender sebagai kebijakan publik yaitu kurangnya kemampuan teknis dalam memahami anggaran pemerintah dan menerapkan perspektif gender ke dalam anggaran, serta kemampuan advokasi dan negosiasi untuk mempengaruhi penyusunan anggaran..
6	Local Government Budgeting For Gender Equality.  <i>Hakan Turan, Ayse Senturk, 2016</i>	Istanbul	<i>Hierarchical Clustering Analysis</i>	<b>Permasalahan:</b> <i>Gender-Responsive Budgeting (GRB)</i> di tingkat pemerintah lokal dianggap krusial untuk memastikan kesetaraan dalam penyediaan layanan, perencanaan, dan penggunaan dana municipal secara efektif dan efisien. <b>Hasil:</b> analisis 39 distrik di Istanbul Metropolitan Municipality, distrik Fatih menjadi yang paling menonjol dalam penerapan GRB. Distrik-distrik lama cenderung lebih luas dalam penerapan GRB dibandingkan dengan distrik-distrik baru.
7	Gender Responsive Budgeting in India  <i>Vibhuti Patel, 2018</i>	India	Kualitatif	<b>Permasalahan:</b> kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya integrasi dimensi gender dalam proses anggaran. Ketidakmampuan dalam mengidentifikasi dan mengukur dampak kebijakan anggaran terhadap perempuan, laki-laki, dan kelompok minoritas seksual. <b>Hasil:</b> diperlukan peningkatan kesadaran tentang isu-isu gender di kalangan pembuat kebijakan dan masyarakat umum. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran publik melalui pendekatan yang responsif terhadap gender. Peningkatan akses perempuan dan kelompok minoritas seksual terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.
8	The implementation of gender equality within the South African	Afrika Selatan	Kualitatif	<b>Permasalahan:</b> adanya laporan dan studi yang menunjukkan bahwa perempuan cenderung menduduki posisi manajemen yang lebih rendah dan mengalami

No	Judul Artikel, Penulis dan Tahun	Lokus Kasus	Metode Penelitian	Permasalahan Penelitian dan Hasil Penelitian
	Public Service (1994–2019)  <i>Ayola Bangani, Shikha Vyas-Doorgapersad, 2021</i>			keterlambatan dalam kemajuan karier mereka dalam sektor publik. <b>Hasil:</b> beberapa rekomendasi yaitu mendorong departemen dan lembaga pemerintah untuk meningkatkan representasi perempuan dalam posisi manajemen tingkat atas, dan memperkuat kebijakan dan kerangka kerja kesetaraan gender dalam pelayanan publik
9	Integrating Gender into Educational Planning and Budgeting  <i>Rabia Tabassum, 2019</i>	Pakistan	Kuantitatif dan Kualitatif	<b>Permasalahan:</b> kebutuhan untuk memahami peran gender dalam perencanaan dan penganggaran pendidikan di Pakistan. Fokusnya adalah pada identifikasi ketimpangan gender dalam akses pendidikan, alokasi anggaran yang responsif terhadap gender, serta kendala-kendala dalam implementasi kebijakan pendidikan yang berpihak pada gender. <b>Hasil:</b> terdapat ketimpangan gender dalam akses pendidikan, dengan persentase anak-anak yang tidak sekolah lebih tinggi di kalangan perempuan dibandingkan laki-laki. Tantangan yaitu kurangnya alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung akses pendidikan perempuan, seperti transportasi sekolah yang aman.
10	Gender budgeting in Slovenia— approaches, achievements, and complexities <i>Tatjana Stanimirović, 2021</i>	Slovenia	Kuantitatif dan Kualitatif	<b>Permasalahan:</b> adanya perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang mungkin mempengaruhi pendekatan gender budgeting di Slovenia. <b>Hasil:</b> Slovenia telah mengambil langkah-langkah awal dalam gender responsive budgeting tanpa regulasi, namun masih terdapat kendala seperti kurangnya keinginan politik, kurangnya keterlibatan dari Kementerian Keuangan, serta kurangnya kapasitas dan pengetahuan untuk

Berdasarkan Tabel 1. yaitu perbandingan hasil dari sepuluh jurnal yang mengulas implementasi Anggaran Responsif Gender (ARG) atau *Gender- Responsive Budgeting* (GRB) di beberapa wilayah, terdapat kesamaan dan perbedaan dalam permasalahan yang dihadapi serta hasil yang dicapai. Secara umum, terdapat permasalahan yang serupa di berbagai wilayah terkait dengan implementasi ARG/GRB, seperti rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan terkait anggaran, diskriminasi terhadap perempuan (Bangani, 2020; Natalis, 2020; Turan & Senturk, 2016), kurangnya perhatian, pemahaman dan kesadaran tentang gender (Farida, 2019; Patel, 2018; Pradnya, 2020), serta kurangnya alokasi anggaran dan lembaga yang mendukung penerapan ARG/GRB (Tabassum et al., 2019). Meskipun terdapat permasalahan yang serupa, terdapat variasi dalam kendala-kendala yang dihadapi di setiap wilayah. Misalnya,

di Kota Makassar, kendala kebijakan, struktural, dan kultural menjadi hambatan utama, sedangkan di Kabupaten Sekadau, kesalahpahaman yang luas dan ketiadaan lembaga pengarusutamaan gender menjadi kendala utama (Khaerah & Mutiarin, 2016).

Implementasi ARG/GRB di beberapa wilayah menghasilkan beberapa kemajuan, namun masih terdapat tantangan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Di Kota Probolinggo, implementasi ARG pada tahun pertama belum sepenuhnya responsif gender (Widowati et al., 2016), sementara di Pakistan, terdapat ketimpangan gender dalam akses pendidikan meskipun telah ada upaya untuk mengalokasikan anggaran yang responsif gender (Tabassum et al., 2019). Beberapa jurnal ini menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan implementasi ARG/GRB, seperti peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang gender, dukungan politik yang lebih kuat, pengembangan kapasitas SDM, dan penguatan lembaga pengarusutamaan gender (Stanimirović & Klun, 2021). Dengan membandingkan hasil dari sepuluh jurnal tersebut, kita dapat melihat pola umum dalam tantangan dan hasil implementasi ARG/GRB di berbagai wilayah, namun juga mengakui variasi dalam konteks dan kendala yang dihadapi di setiap tempat. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan kontekstual dan berbasis bukti dalam merancang dan melaksanakan kebijakan dan program yang responsif gender.

Dalam pandangan penulis, pelaksanaan pelayanan publik harus sesuai dengan tema "*No One Left Behind*" menuntut adanya keadilan dan inklusi dalam penyediaan layanan publik. Artinya, tidak boleh ada individu atau kelompok yang terpinggirkan atau dikesampingkan dalam akses dan pemanfaatan layanan publik. Ini berarti pemerintah harus memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk mereka yang berada dalam kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat, memiliki akses yang sama terhadap layanan publik yang berkualitas. Dalam konteks ini, pelaksanaan pelayanan publik haruslah merujuk pada prinsip kesetaraan, keadilan, dan non diskriminasi.

Selanjutnya, terkait dengan konsep keberlanjutan (*sustainability*), pelaksanaan pelayanan publik harus dirancang dan diimplementasikan secara berkelanjutan agar dapat memenuhi kebutuhan tidak hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga untuk generasi mendatang. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti efisiensi penggunaan sumber daya, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kapasitas institusi untuk memastikan kontinuitas pelayanan publik yang berkelanjutan dari waktu ke waktu. Dengan demikian, keberlanjutan dalam konteks pelayanan publik berarti mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan dan praktik yang diimplementasikan, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dan layanan publik (Kraan et al., 2013).

Anggaran Responsif Gender (ARG) merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah mencerminkan kebutuhan dan kepentingan dari semua golongan gender, baik laki-laki maupun perempuan, serta mengakui dan mengatasi ketimpangan gender yang ada (Rubin & Bartle, 2005). Perbandingan antara ARG di dalam dan di luar negeri berdasarkan Tabel 1. dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti:

1. Kebijakan dan Regulasi. Beberapa negara telah mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendorong integrasi gender dalam perencanaan dan penyediaan pelayanan publik. Banyak negara telah mengadopsi undang-undang dan kebijakan yang lebih kuat terkait pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk pelayanan publik. Misalnya, integrasi gender dalam perencanaan dan penganggaran pendidikan di Pakistan. United Nations Development Programme (UNDP), yang merupakan badan program Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertujuan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan, telah berkolaborasi dengan pemerintah Pakistan untuk memperkenalkan *Gender Responsive Budgeting* (GRB) pada tahun 2005 (Tabassum et al., 2019).
2. Pendanaan dan Anggaran. Perencanaan anggaran pelayanan publik berbasis gender masih menghadapi tantangan dalam pengalokasian dana yang cukup untuk mengimplementasikan program-program yang mendukung kesetaraan gender (Turan & Senturk, 2016). Terdapat upaya untuk meningkatkan alokasi anggaran yang responsif gender. Negara-negara maju cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dan komitmen yang lebih kuat dalam mengalokasikan dana untuk program-program yang mendukung kesetaraan gender dalam pelayanan publik. Mereka sering kali memiliki mekanisme penganggaran khusus atau alokasi anggaran terpisah yang ditujukan secara khusus untuk inisiatif-inisiatif gender.
3. Kesadaran dan Pendidikan. Kesadaran tentang pentingnya ARG telah meningkat di banyak negara, tetapi masih diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran di tingkat masyarakat dan lembaga pemerintahan (Patel, 2018). Negara-negara maju cenderung memiliki tingkat kesadaran dan pemahaman yang lebih tinggi tentang isu-isu gender dan perlunya integrasi gender dalam pelayanan publik. Mereka juga sering kali memiliki program-program pendidikan dan pelatihan yang terstruktur untuk meningkatkan pemahaman tentang ARG di kalangan pejabat pemerintah dan masyarakat.

Sementara ada perbedaan dalam pendekatan dan implementasi antara ARG di dalam dan di luar negeri, ada juga banyak kesamaan dalam upaya untuk mewujudkan anggaran pelayanan publik yang lebih inklusif dan responsif gender di seluruh dunia. Meskipun demikian, ada tantangan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam ARG dapat bervariasi antara negara-negara, tergantung pada konteks sosial, budaya, politik, dan ekonomi masing-masing. Berdasarkan Tabel 1. mengenai sepuluh jurnal yang membahas implementasi ARG di dalam dan luar negeri, terdapat sejumlah tantangan yang umumnya dihadapi dalam konteks implementasi ARG, yaitu:

1. Rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Salah satu tantangan yang umum dihadapi adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan terkait anggaran. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam alokasi anggaran dan kurangnya perhatian terhadap kebutuhan dan aspirasi perempuan dalam proses perencanaan anggaran.
2. Diskriminasi terhadap perempuan. Masih adanya bentuk-bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan juga menjadi tantangan serius dalam implementasi ARG/GRB. Diskriminasi ini dapat menghambat upaya untuk menciptakan anggaran yang adil dan merata antara laki-laki dan perempuan.
3. Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang gender. Tantangan lainnya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang gender di kalangan penyusun anggaran dan masyarakat umum. Hal ini dapat menghambat upaya untuk mengintegrasikan dimensi gender dalam perencanaan dan penganggaran.
4. Kurangnya alokasi anggaran dan lembaga pendukung. Implementasi ARG/GRB seringkali dihadapi dengan kurangnya alokasi anggaran yang memadai dan lembaga pendukung yang mendukung penerapan kebijakan dan program yang responsif gender.
5. Kesalahpahaman dan ketidakpastian. Kesalahpahaman yang luas tentang konsep dan manfaat ARG/GRB juga menjadi tantangan, bersama dengan ketidakpastian mengenai keefektifan dan keefisienan dalam pengelolaan anggaran daerah.
6. Tantangan kebijakan, struktural, dan kultural. Di beberapa wilayah, implementasi ARG/GRB dihambat oleh tantangan kebijakan, struktural, dan kultural yang kompleks, seperti minimnya dukungan politik, kurangnya pemahaman tentang program-program gender, dan norma budaya yang mempengaruhi persepsi terhadap isu gender.

7. Kurangnya kemampuan analisis gender. Tantangan lainnya adalah kurangnya kemampuan analisis gender di kalangan penyusun anggaran, yang dapat menghambat upaya untuk memahami dan mengatasi ketimpangan gender dalam alokasi anggaran.
8. Tantangan keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan. Tantangan yang dihadapi di beberapa wilayah adalah kurangnya peran aktif perempuan sebagai perangkat penyusun anggaran, yang dapat mengurangi representasi dan perspektif gender dalam perencanaan anggaran.
9. Resistensi masyarakat terhadap konsep gender. Resistensi masyarakat terhadap konsep gender juga menjadi tantangan, karena dapat menghambat implementasi kebijakan dan program yang responsif gender.
10. Ketidakmampuan dalam memahami anggaran pemerintah. Beberapa studi juga menyoroti tantangan terkait dengan ketidakmampuan dalam memahami anggaran pemerintah dan menerapkan perspektif gender ke dalam anggaran.

Tantangan-tantangan ini memerlukan upaya yang berkelanjutan dan terkoordinasi untuk diatasi agar implementasi ARG/GRB dapat mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan dalam menciptakan anggaran yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap gender.

## **Kesimpulan**

Dalam menghadapi masa depan, implementasi Anggaran Responsif Gender (ARG) memerlukan gagasan inovatif untuk memastikan kesetaraan gender terwujud dalam pengelolaan anggaran publik. Beberapa gagasan inovatif yang dapat diterapkan di masa yang akan datang yaitu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya ARG di kalangan penyusun kebijakan, praktisi, dan masyarakat umum. Program pendidikan dan pelatihan yang menyeluruh tentang konsep dan manfaat ARG perlu ditingkatkan untuk memperkuat kapasitas dalam menerapkan pendekatan ini. Selain itu perlu dilakukan pengembangan alat dan metode analisis yang inovatif untuk memfasilitasi identifikasi, pengukuran, dan pemantauan dampak kebijakan dan program anggaran terhadap kesetaraan gender. Pendekatan baru dalam pengumpulan dan pengolahan data dapat membantu penyusun anggaran dalam mengambil keputusan yang lebih berbasis bukti.

Dalam konteks ARG, diperlukan juga untuk mengembangkan strategi pemberdayaan perempuan yang holistik dan terpadu. Ini termasuk peningkatan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan terkait anggaran, promosi kewirausahaan perempuan, serta akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan pelatihan. Kolaborasi lintas sektor dan jaringan

kerja yang kuat perlu dibangun untuk memperkuat implementasi ARG. Kerja sama antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga internasional dapat mempercepat pembangunan kapasitas dan penyebaran praktik terbaik terkait ARG.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran dengan pendekatan gender. Pengembangan aplikasi dan platform digital untuk pengumpulan data, pelaporan, dan pemantauan dapat memfasilitasi partisipasi masyarakat dan memperkuat akuntabilitas publik. Dengan menerapkan gagasan-gagasan inovatif ini, diharapkan ARG dapat menjadi lebih efektif dan relevan dalam mengatasi tantangan kesetaraan gender dalam pengelolaan anggaran publik di masa yang akan datang. Inovasi merupakan kunci untuk menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan dan memastikan bahwa pelayanan publik menjadi lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan semua individu.

### Daftar Pustaka

- Andi Yusril Cibu, A. F. A. (2021). Responsive Gender on Budgeting Planning; A Compliance Audit Study on Public Sector. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 6(9), 21–49.
- Bangani, A. (2020). The implementation of gender equality within the South African Public Service (1994–2019). *Africa's Public Service Delivery and Performance Review*, 110. <https://doi.org/10.7551/mitpress/9781906897710.003.0040>
- Biduri, S., Rahma Dewi, S., & Usrotin, I. (2022). Urgensi Penerapan Anggaran Responsif Gender Di Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten Sidoarjo). *Procedia of Social Sciences and Humanities*, 3(Proceedings of the 1st SENARA 2022), 1394–1403. <https://pssh.umsida.ac.id>.
- Farida, S. I. (2019). Anggaran Responsif Gender Sebagai Suatu Instrumen Negara Untuk Pemenuhan Hak Perempuan Di Indonesia. *Jimf (Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma)*, 1(2), 67–86.
- Khaerah, N., & Mutiarin, D. (2016). Integrasi Anggaran Responsif Gender Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. *Journal of Governance and Public Policy*, 3(3), 413–445. <https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0065>
- Kraan, D.-J., von Trapp, L., Kostyleva, V., van Tuinen, J., & Morgner, M. (2013). Budgeting in Ukraine. *OECD Journal on Budgeting*, 12(2), 69–140. <https://doi.org/10.1787/budget-12-5k4c1s8n0br0>

- Mahadevia, D., Bhatia, N., & Sebastian, R. (2017). *Gender Responsive Budget Analysis of Urban Development Sector*. April, 154. [http://files/9/Mahadevia et al. - Gender Responsive Budget Analysis of Urban Develop.pdf](http://files/9/Mahadevia%20et%20al.%20-%20Gender%20Responsive%20Budget%20Analysis%20of%20Urban%20Develop.pdf)
- Natalis, A. (2020). Urgensi Kebijakan Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Perempuan. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 64–73. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.23205>
- Noviani, I., Adnan, M., & Alfirdaus, L. K. (2022). Analisis Hambatan Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(1), 269–283. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/37147>  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/37147/28300>
- Patel, V. (2018). Gender Responsive Budgeting in India. *Journal of Development Research*, 11(3), 1. <https://doi.org/10.54366/jdr.11.3.2018.01-12>
- Polzer, T., Nolte, I. M., & Seiwald, J. (2023). Gender budgeting in public financial management: a literature review and research agenda. *International Review of Administrative Sciences*, 89(2), 450–466. <https://doi.org/10.1177/00208523211031796>
- Pradnya, I. M. (2020). Perencanaan dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Berperspektif Gender pada Pemerintah Daerah. *Public Management and Accounting Review*, 1(1), 45–58. <https://doi.org/10.61656/pmar.v1i1.37>
- Ratag, W. A., Kumenaung, A. G., & Engka, D. S. M. (2019). Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Di Lingkungan Universitas Sam Ratulangi. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(2), 1. <https://doi.org/10.35794/jpek.23845.20.2.2019>
- Rubin, M. M., & Bartle, J. R. (2005). Integrating gender into government budgets: A new perspective. *Public Administration Review*, 65(3), 259–272. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2005.00452.x>
- Stanimirović, T., & Klun, M. (2021). Gender budgeting in Slovenia—approaches, achievements, and complexities. *Public Money and Management*, 41(7), 548–553. <https://doi.org/10.1080/09540962.2021.1936937>
- Tabassum, R., Manzoor, R., Ahmed, V., Zahid, J., Ikram, W., & ... (2019). *Integrating Gender into Educational Planning and Budgeting*. June. <https://www.think-asia.org/handle/11540/10799>
- Tommaso, S., Pastore, P., & ... (2019). Strategic governance and gender budgeting of local governments: Paths and experiences in Italy. *Conference on Gender*, 2006.

<https://search.proquest.com/openview/92fb0c024dc14800eb4627c0aa029646/1?pq-origsite=gscholar&cbl=4451209>

Turan, H., & Senturk, A. (2016). Local Government Budgeting for Gender Equality. *Procedia Economics and Finance*, 38(October 2015), 224–231. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(16\)30194-0](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(16)30194-0)

Widowati, G. R., Ludigdo, U., & Kamayanti, A. (2016). Persepsi Penyusun Anggaran Mengenai Konsep Kebijakan Anggaran Responsif Gender. *Journal of Research and Applications: Accounting and Management*, 2(1), 31. <https://doi.org/10.18382/jraam.v2i1.67>

Zarefar, A., Putra, F. B., & Kennedy. (2021). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pencatatan Administrasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran (Studi pada OPD Provinsi Riau). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 14(2), 221–230. <https://doi.org/10.35143/jakb.v14i2.4401>

## **Implementasi Kebijakan Sosial dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru**

**Masrul Ikhsan<sup>1</sup>, Kamaruddin<sup>2</sup>, Fadhiilatun Nisaa<sup>3</sup>, Resa Vio Vani<sup>4</sup> and Rahmanul<sup>5</sup>**

<sup>1, 3, 4, 5</sup>Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia. (email: masrul.ikhsan@lecturer.unri.ac.id)

<sup>2</sup>UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, Indonesia.

### **Abstrak**

Gelandangan dan pengemis (gepeng) menjadi permasalahan sosial berdampak signifikan di kota-kota besar yang ada di Indonesia, termasuk di Kota Pekanbaru. Gepeng merupakan cerminan jumlah masyarakat miskin yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menanggulangi gepeng, serta melakukan identifikasi kendala dan merekomendasikan solusi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan di masa yang akan datang. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Hasil temuan penelitian menunjukkan kebijakan penertiban, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan ekonomi telah diterapkan di kota Pekanbaru, namun efektivitasnya belum optimal. Ditemukan bahwa masih kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan anggaran, dan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan Sosial. Untuk itu, diperlukan peningkatan koordinasi antarinstansi, alokasi anggaran yang lebih memadai, serta peningkatan edukasi masyarakat untuk meningkatkan efektivitas kebijakan sosial dalam menanggulangi gepeng di Kota Pekanbaru.

### **Kata kunci:**

gelandangan; kebijakan sosial; pengemis

### **Pendahuluan**

Gelandangan dan pengemis (gepeng) adalah bagian dari fenomena sosial yang umum terjadi di banyak kota besar, termasuk di Kota Pekanbaru. Adanya gepeng tersebut merupakan signifikansi jumlah Masyarakat miskin yang ada di kota Pekanbaru. Pada tahun 2023 masyarakat miskin kota Pekanbaru sebanyak 3,08 % dari 1,22 juta penduduk kota Pekanbaru. Setiap tahun rata-rata penduduk miskin kota Pekanbaru meningkat 3-5 ribu jiwa, atau setara 0,4% setiap tahunnya.

**Tabel 1.**  
**Jumlah Masyarakat miskin di kota Pekanbaru tahun 2021-2023**

No	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)		
1	2021	2022	2023
2	32.73	35.96	37.67

*Sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2024*

Selain masalah ini mengganggu ketertiban umum, ini juga mencerminkan fenomena ketidakberdayaan sosial dan ekonomi individu-individu yang terlibat. Oleh karena itu, penanganan yang efektif dan efisien terhadap gepeng memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor penyebab dan pendekatan yang digunakan dalam penanggulangannya. Pengentasan gepeng juga harus dilakukan dengan menggunakan rehabilitasi sosial melalui beberapa tahapan yang dibagi menjadi 3 tahap sebagaimana yang dikemukakan oleh (Yusuf, 1996), yaitu:

1. Rehabilitasi
2. Resosialisasi
3. Pembinaan Lanjut

Peneliti memilih model implementasi kebijakan yang dipelopori oleh Merilee S. Grindle dalam (uswatun Hasanah, 2024) yaitu mengidentifikasi dua variabel utama yang berpengaruh pada implementasi kebijakan, yakni konteks implementasi (*context of implementation*) dan konten kebijakan (*content of policy*).

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan sosial yang telah dilakukan oleh Pemko Pekanbaru dalam penanggulangan gepeng. Penelitian ini juga mempunyai tujuan untuk melakukan identifikasi terhadap kendala-kendala yang dihadapi ketika melakukan implementasi kebijakan sosial dan memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas kebijakan sosial dalam penanggulangan gepeng di Kota Pekanbaru.

## **Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan yang dilakukan sebagai respon terhadap masalah yang umumnya dihadapi oleh administrator atau pengambil keputusan pada suatu organisasi (Muhajirin & Panorama, 2017).

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif (Ibrahim et al., 2023) yang bertujuan untuk menjabarkan dan mendeskripsikan fenomena yang bersifat alami

dan juga buatan manusia, dengan penekanan pada kualitas, karakteristik, dan keterkaitan antara suatu kegiatan dengan kegiatan lainnya.

Metode pengumpulan data (Achjar et al., 2023) yang digunakan meliputi data dengan melakukan wawancara secara mendalam, pengamatan langsung dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisa data yang dikembangkan oleh Miles Huberman dalam (Purwanto, 2022). Data primer didapatkan dari hasil wawancara, selanjutnya data sekunder diperoleh dengan melakukan penelusuran literatur yang relevan dengan topik penelitian. Tahapan dalam analisis data penelitian dimulai dari pengumpulan, reduksi, penyediaan data, dan melakukan penarikan kesimpulan penelitian.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Implementasi Kebijakan Sosial dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru**

Pemerintah kota pekanbaru telah melakukan 3 (tiga) kebijakan sosial dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru, rinciannya dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

#### 1) Penertiban

Pemerintah Kota Pekanbaru secara rutin melakukan penertiban gepeng di berbagai lokasi strategis. Penertiban ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga ketertiban umum dan mengurangi jumlah gepeng di jalanan.

#### 2) Rehabilitasi Sosial

Program rehabilitasi sosial dilakukan untuk memberikan bimbingan dan konseling kepada gepeng dengan harapan mereka dapat kembali berfungsi secara normal di masyarakat. Program ini mencakup pelatihan keterampilan dan penyediaan tempat tinggal sementara.

#### 3) Pemberdayaan Ekonomi

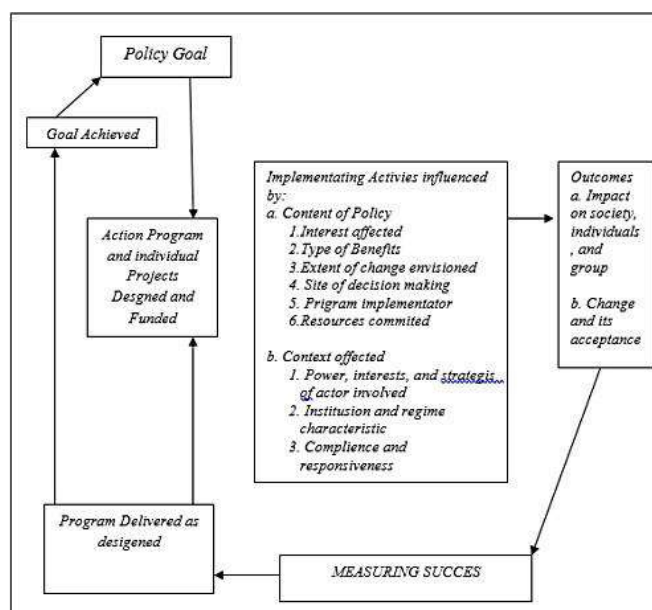
Pemerintah Kota Pekanbaru juga melaksanakan program pemberdayaan ekonomi bagi gepeng dengan memberikan bantuan modal usaha dan pelatihan kewirausahaan. Program ini bertujuan untuk memberikan alternatif mata pencaharian yang lebih berkelanjutan bagi gepeng.

Kemudian akan dilakukan Analisis terkait Implementasi Kebijakan Sosial dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru dengan menggunakan teori Grindle ada 2 kelompok variabel utama yang mempengaruhi keberhasilan

implementasi suatu kebijakan menurut Grindle dalam (Subianto, 2020) yaitu variabel konteks kebijakan (*context of policy*) dan variabel isi kebijakan (*content of policy*).

**Gambar 1.**

**Implementasi Proses Politik dan Administratif**  
**(Implementation as a Policy and Administrative Process)**



Sumber: Marilee S. Grindle dalam (Rahman & Nurzaman, 2023)

Variabel isi memiliki keterkaitan yang kuat dengan kepentingan, tujuan, sumber daya yang dapat dipenuhi, dan latar belakang dari faktor-faktor yang memiliki andil dalam melaksanakan kebijakan. Selanjutnya, variabel konteks memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan tempat kebijakan tersebut dirumuskan dan di mana kegiatan administrasi dilakukan. Analisis menggunakan teori grindle terkait Kebijakan Sosial Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis yang dilakukan di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada uraian dibawah ini:

1) Konten Kebijakan

A. Pihak Kepentingan yang Dipengaruhi

- a. Masyarakat Umum: Terpengaruh dalam hal peningkatan kenyamanan dan keamanan di lingkungan sekitar serta di lampu lalu lintas. Masyarakat juga merupakan garda terdepan yang selalu bertemu dengan gelandangan dan pengemis.

## Gambar 2.

### Pengemis di lalu lintas Simpang Empat Panam Kota Pekanbaru



*Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2024*

- b. Gelandangan dan Pengemis (Gepeng): Terpengaruh langsung oleh kebijakan penanggulangan melalui program penertiban, rehabilitasi dan pemberdayaan, Pemko Pekanbaru sebenarnya sudah di atur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial yang di dalamnya sudah ada larangan dan sanksi bagi masyarakat apabila memberikan uang untuk gepeng. Namun untuk saat ini peraturan daerah tersebut masih terkesan kurang maksimal dalam penerapan/ implementasinya.
- c. Pemerintah Daerah: Terpengaruh dalam hal tanggung jawab untuk menjalankan dan mengawasi implementasi kebijakan yang telah dibuat dan disepakati bersama DPRD Kota Pekanbaru, Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial.
- d. Organisasi Sosial dan LSM: Terlibat dalam pelaksanaan program-program bantuan dan pemberdayaan. Di dalam Perda No. 12 tahun 2008 pada BAB III Pasal 3 menjelaskan terkait larangan mengemis di tempat umum dan di jalan raya, di sekitar area lampu merah, jalur hijau dan jembatan tempat penyeberangan orang. Artinya sumbangan Masyarakat hanya boleh disalurkan melalui Organisasi Sosial dan LSM yang menangani masalah sosial.

#### B. Jenis Manfaat yang Dapat Diperoleh

Peningkatan kesejahteraan sosial (Salsabila et al., 2022) dapat dicapai melalui program rehabilitasi dan pemberdayaan ekonomi untuk gelandangan dan pengemis (gepeng), yang juga berkontribusi pada ketertiban umum dengan mengurangi jumlah gepeng di jalanan, serta meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, sekaligus mendukung pengembangan ekonomi lokal melalui pemberdayaan gepeng dengan pelatihan keterampilan dan bantuan usaha.

#### C. Jangkauan Perubahan yang Diharapkan

Pada jangka pendek, kebijakan ini diharapkan mampu menurunkan jumlah gepeng di area publik (Febriani, 2023), sementara pada jangka menengah, akan terjadi peningkatan keterampilan dan kemampuan ekonomi para gepeng. Untuk jangka panjang, kebijakan ini bertujuan mengintegrasikan gepeng ke dalam masyarakat sebagai individu yang produktif dan mandiri.

#### D. Pelaksanaan Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil oleh pemerintah daerah melalui koordinasi dengan berbagai instansi terkait, termasuk dinas sosial, kepolisian, dan organisasi non-pemerintah (Pratama & Masrich, 2024), dengan melibatkan partisipasi publik melalui forum diskusi dan survei kepuasan masyarakat untuk memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

#### E. Pelaksana-Pelaksana Program

Pemerintah daerah berperan sebagai pengambil keputusan dan pengawas utama, sementara Dinas Sosial bertindak sebagai pelaksana program rehabilitasi dan pemberdayaan (Siti Rohimah, 2024), dengan LSM dan organisasi sosial sebagai mitra dalam pelaksanaan program bantuan dan pemberdayaan, serta masyarakat sebagai penerima manfaat dan partisipan dalam program-program yang dijalankan.

#### F. Ketersediaan sumber daya

Sumber daya pemko Pekanbaru mencakup tenaga profesional dari dinas sosial, pekerja sosial, dan relawan dari LSM sebagai sumber daya manusia (Lendriyono, 2022); anggaran yang dialokasikan dari APBD dan dana bantuan dari organisasi non-pemerintah; fasilitas yang terdiri dari pusat rehabilitasi, tempat penampungan sementara, dan fasilitas pelatihan keterampilan; serta teknologi berupa sistem informasi untuk pemantauan dan evaluasi program.

## 2. Konteks Kebijakan

### A. Otoritas, Kepentingan, dan Strategi dari aktor-aktor yang terlibat

Pemerintah Daerah memiliki kekuasaan untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan dengan kepentingan menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, sementara LSM dan organisasi sosial berperan dalam membantu masyarakat marginal dengan strategi yang memastikan keberlanjutan program pemberdayaan (Triatmanto et al., 2024), serta masyarakat umum memiliki kepentingan dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan berpartisipasi dalam program sosial.

### B. Ciri Kelembagaan dan Rezim

Kelembagaan Pemerintah Daerah, dengan struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan sosial melalui mekanisme koordinasi antarinstansi (Pracelia et al., 2024), dan rezim sosial yang mencakup norma serta aturan yang mendukung pelaksanaan kebijakan penanggulangan gelandangan dan pengemis, serta adanya kerjasama antar lembaga pemerintah dan organisasi sosial (Putra et al., n.d.)

### C. Kepatuhan dan Daya Tanggap

Kepatuhan mengacu pada tingkat ketaatan aktor-aktor yang terlibat terhadap kebijakan dan program yang telah ditetapkan (Purnamaningsih, 2022), sedangkan daya tanggap mencerminkan responsivitas dari pelaksana kebijakan terhadap perubahan situasi dan kebutuhan masyarakat, serta fleksibilitas dalam menyesuaikan program sesuai dengan umpan balik yang diterima (Sari & SH, 2024).

## 2. Kendala Implementasi Kebijakan

Berikut ini merupakan kendala-kendala yang ada Implementasi Kebijakan:

### 1) Kurangnya Koordinasi Antarinstansi

Terdapat kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah yang terlibat dalam penanggulangan gepeng, sehingga menyebabkan ketidakefektifan dalam pelaksanaan program.

### 2) Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran seringkali menjadi kendala utama dalam menjalankan program-program penanggulangan gepeng. Hal ini menyebabkan program tidak dapat berjalan secara maksimal.

### 3) Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan sosial masih rendah. Banyak masyarakat yang masih memberikan uang atau barang kepada gepeng, sehingga memotivasi mereka untuk tetap berada di jalanan.

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun kebijakan sosial dalam penanggulangan gepeng telah diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, efektivitasnya masih belum optimal. Penertiban yang dilakukan hanya memberikan solusi sementara tanpa mengatasi akar permasalahan. Program rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi memiliki potensi untuk

mengurangi jumlah gepeng secara signifikan, namun masih memerlukan peningkatan dalam pelaksanaannya. Seharusnya pemko Pekanbaru melakukan upaya maksimal agar gepeng mendapatkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dimana masyarakat miskin mendapatkan bantuan berbentuk uang, barang dan jasa di bidang pendidikan, kesehatan, subsidi energi, perumahan, ekonomi dan kebutuhan dasar/ pokok pada umumnya (Ikhsan et al., n.d.).

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan sosial dalam penanggulangan gepeng (Rafsanjani et al., 2024), diperlukan peningkatan koordinasi antar instansi yang terlibat. Pemerintah Kota Pekanbaru (Hariadi, 2024) perlu membentuk tim terpadu yang terdiri dari berbagai instansi terkait untuk memastikan program-program penanggulangan dapat berjalan dengan baik. Selain itu, peningkatan anggaran untuk program-program sosial juga diperlukan agar program dapat berjalan secara optimal (Aprillia et al., 2021).

## **Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan sosial dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Upaya penertiban, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan ekonomi telah dilakukan, namun masih memerlukan peningkatan dalam pelaksanaannya. Peningkatan koordinasi antarinstansi, alokasi anggaran yang lebih memadai, serta peningkatan edukasi masyarakat merupakan langkah-langkah yang direkomendasikan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan sosial dalam penanggulangan gepeng di Kota Pekanbaru.

## **Daftar Pustaka**

- Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Febriani, F. (2023). *Kinerja Dinas Sosial Dalam Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Di Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- HARIADI, M. (2024). *Kolaborasi pemerintahan dalam pengentasan kemiskinan di kabupaten aceh tamiang*. IPDN.
- Ibrahim, M. B., Sari, F. P., Kharisma, L. P. I., Kertati, I., Artawan, P., Sudipa, I. G. I., Simanihuruk, P., Rusmayadi, G., Nursanty, E., & Lolang, E. (2023). *Metode Penelitian Berbagai Bidang Keilmuan (Panduan & Referensi)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ikhsan, M., Bedasari, H., & Hadi, A. (n.d.). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbio Jaya. *Jurnal Administrasi*

*Politik Dan Sosial*, 3(3), 171–176.

- Lendriyono, F. (2022). *Manajemen Organisasi Layanan Masyarakat* (Vol. 1). UMM Press.
- Muhajirin, M., & Panorama, M. (2017). *PENDEKATAN PRAKTIS; Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Idea Press.
- Pracelia, V. R., Widodo, D., & Radjikan, R. (2024). Implementasi Program Keluarga Harapan Melalui Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Di Kota Surabaya Jawa Timur. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 4(3), 21–30.
- Purnamaningsih, P. E. (2022). 5.5 Teori Atau Model Dalam Formulasi Kebijakan Publik. *Kebijakan Publik*, 60.
- Purwanto, A. (2022). *Konsep dasar penelitian kualitatif: Teori dan contoh praktis*. Penerbit P4I.
- Putra, F., Sos, S., & Paff, M. (n.d.). *Kebijakan sosial di indonesia*.
- Rafsanjani, M. A. A., Wafa, M. A., & Fuad, N. (2024). Peran Dinas Sosial Dalam Melindungi Masyarakat Dari Kemiskinan Di Kabupaten Jember. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(2), 119–123.
- Rahman, I. N., & Nurzaman, A. (2023). Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi Bidang Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya. *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, Dan Inovasi*, 3(1).
- Salsabila, Q., Purba, G., & Saragih, S. E. (2022). Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 3(3), 132–141.
- Sari, A. R., & SH, M. S. (2024). *Reformasi Pelayanan Publik*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Siti Rohimah, S. (2024). *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan Oleh Dinas Sosial Di Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Brilliant.
- Triatmanto, B., Apriyanto, G., & Hidayatullah, S. (2024). *Model Pemberdayaan Masyarakat Holistik: Berorientasi Potensi Lokal*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Uswatun Hasanah, A. (2024). Analisis Upaya Penguatan Implementasi Kebijakan Netralitas Asn Dalam Pemilu 2024: Analisis Upaya Penguatan Implementasi Kebijakan Netralitas Asn Dalam Pemilu 2024. *Lentera Jurnal Manajemen*, 2(2).
- Yusuf, M. (1996). Pendidikan Tunanetra Dewasa dan Pembinaan Karir. *Jakarta: Proyek Pendidikan Tenaga Guru, Direktorat Jendral Pendidikan Tenaga Akademik, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan*.

## **Implementasi Permendikbudristek No. 17 Tahun 2021 Tentang Ujian ANBK di SD Sumsel Jaya Palembang**

**Solha Dwi Fadillah<sup>1</sup>, Feni Huspita Sari<sup>2</sup>, Gusti Ayu<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Prodi Administrasi Negara, STIA & Pemerintahan Annisa Dwi Salfarizi, Indonesia  
(email: fadillahsolhadwi@gmail.com, fenihuspita@gmail.com)

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Permendikbudristek No. 17 Tahun 2021 tentang Ujian Assesment Nasional Berbasis Komputer (ANBK) di SD Sumsel Jaya Palembang. Manfaat dapat memberikan informasi, masukan, dan bahan acuan bagi sekolah dasar Sumsel Jaya Palembang dalam melaksanakan Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. yaitu memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi/pengamatan serta wawancara tidak terstruktur. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan pada komunikasi di SD Sumsel Jaya sudah tergolong baik dan komunikasi di SD Sumsel Jaya menurut sudah memenuhi teori Edward Ill menunjukkan bahwa kegiatan ANBK terfokus pada kemampuan literasi dan numerasi, namun semua itu tidak mengkerdikan arti penting mata pelajaran lain. Karena justru membantu murid mempelajari bidang ilmu lain terutama untuk berpikir dan mencerna informasi dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk angka. Peserta didik yang dipersiapkan untuk mengikuti ANBK sudah diberikan latihan-latihan dan sosialisasi tentang bagaimana pelaksana ANBK agar peserta didik siap dalam menghadapi asesmen nasional terutama memberikan bimbingan kepada peserta didik dalam menggunakan perangkat komputer/laptop yang dijadikan untuk media ujian ANBK.

### **Kata kunci:**

implementasi; ujian ANBK; permendikbudristek

### **Pendahuluan**

Pendidikan dasar adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan, menumbuhkan sikap dasar yang diperlukan dalam masyarakat, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan dan warga negara yang baik. untuk menjadi warga negara yang baik. berikut pengertian pendidikan dasar termasuk Dalam undang – undang sistem pendidikan nasional bab VI pasal 17 menyebutkan: o Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. o Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTS) atau bentuk lain yang sederajat. Dalam pendidikan ini akan terjadi

peletakan dasar dari pembangunan manusia. Esensi pendidikan yang dialami oleh manusia pada permulaan hidup lebih ditekankan pada fakta dan membaca fakta – fakta dalam pergelaran obyektifitas di alam ini. Maka dalam Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi nomor 17 tahun 2021 (Permendikbudristek No.17 tahun 2021) tentang Asesmen Nasional ini adalah aturan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan maka kementerian perlu mengatur ketentuan mengenai asesmen nasional.<sup>1</sup> Penerapan UU tentang UNBK merupakan langkah penting dalam modernisasi sistem pendidikan di Indonesia, meskipun masih memerlukan upaya dan penyesuaian agar dapat berjalan secara efektif dan merata di seluruh wilayah. Masalah yang muncul pada penerapan UU tentang UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) di Indonesia.<sup>2</sup> Yaitu, Kurangnya kesiapan sekolah terutama dalam ketersediaan sarana prasarana serta belum adanya program sekolah dalam menghadapi Asesmen Nasional. Belum berjalan dengan baik, Masi belum menyampaikan sosialisasi kepada orang tua peserta didik, belum sesuai SOP yang ada, dan fasilitas yang tidak memadai (**Novitasari MK. 2022**). Pelaksanaan UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) di SD biasanya melibatkan persiapan yang matang dari sekolah dan siswa. Seperti, Persiapan Teknis, Pelatihan Siswa, Penjadwalan dan Pengaturan Ruang, Monitor dan Pengawas, Evaluasi dan Pelaporan Hasil.

Asesmen Nasional dilaksanakan dengan tiga instrumen. Pertama, Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika (numerasi) murid.<sup>3</sup> Kedua, Survei Karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. Ketiga, Survei Lingkungan Belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar-mengajar di kelas. Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu. Sedangkan Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari.

---

<sup>1</sup> A Latar Belakang, 'Lestari Eko Wahyudi, Alfian Mulyana, Ajrin Dhiaz, Dewi Ghiandari, Zidan Putra Dinata Muallim Fitoriq, " Mengukur Kualitas Pendidikan Di Indonesia ", Ma'arif Journal of Education, Madrasah Innovation and Aswaja Studies , Vol. 1, No. 1, (2022). 1', 1.1, pp. 1–11.

<sup>2</sup> Muntahanah Muntahanah, Sri Handayani, and Lidia Lidia, 'Penerapan Metode Fuzzy Mamdani Penentuan Strategi Belajar Siswa Pada Persiapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)', *Pseudocode*, 8.2 (2021), pp. 108–17, doi:10.33369/pseudocode.8.2.108-117.

<sup>3</sup> Aifah Fauziah, Enur Fitiriani Dewi Sobari, and Babang Robandi, 'Analisis Pemahaman Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Mengenai Asesmen Kompetensi Minimum (AKM)', *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3.4 (2021), pp. 1550–58 <<https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/608>>.

Walaupun kegiatan ANBK terfokus pada kemampuan literasi dan numerasi, namun semua itu tidak mengkerdilkan arti penting mata pelajaran lain. Karena justru membantu murid mempelajari bidang ilmu lain terutama untuk berpikir dan mencerna informasi dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk angka. Peserta didik yang dipersiapkan untuk mengikuti ANBK sudah diberikan latihan-latihan dan sosialisasi tentang bagaimana pelaksanaan ANBK agar peserta didik siap dalam menghadapi asesmen nasional terutama memberikan bimbingan kepada peserta didik dalam menggunakan perangkat komputer/laptop yang dijadikan untuk media ujian ANBK.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode analisis bibliometrik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh. Data yang dipakai dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer dihimpun langsung oleh peneliti yang diperoleh dari proses wawancara dengan informan-informan kepala sekolah dan para dewan guru. Data sekunder diperoleh melalui proses perolehan dan pengumpulan data yang bersifat studi dokumentasi berupa dokumen resmi kelembagaan dan referensi atau aturan yang relevan dengan fokus permasalahan peneliti jadi data sekunder tersebut bersumber dari bahan kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan ujian ANBK terhadap siswa kelas V di SD Sumsel Jaya Palembang.

## **Hasil dan Pembahasan**

Penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan dan referensi dan sekaligus untuk bahan pembandingan untuk penelitian selanjutnya.

### **1. Kebijakan Publik**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, “kebijakan” adalah terjemahan dari kata (policy). Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

## 2. Implementasi

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna.

### 2.1 Implementasi menurut para ahli

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut : Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, melainkan suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Usman, 2002:70).<sup>4</sup>

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi, yaitu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif (Setiawan, 2004:39).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah bukan hanya sekedar aktivitas, melainkan suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-

---

<sup>4</sup> Fatimah Fatimah, 'Implementasi Budaya Religius Dalam Membina Akhlak Siswa Di MI Rahmatullah Kota Jambi', *Jurnal Pendidikan Guru*, 2.1 (2021), pp. 68–78, doi:10.47783/jurpendigu.v2i1.189.

sungguh berdasarkan acuan aturan tertentu untuk mencapai sebuah tujuan kegiatan dimana untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan jaringan pelaksana yang dapat dipercaya.

Secara induktif peneliti akan mencoba mengolah data yang bersifat kualitatif untuk menarik kesimpulan IMPLEMENTASI PERMENDIKBUDRISTEK NO.17 TAHUN 2021 TENTANG UJIAN ANBK DI SD SUMSEL JAYA PALEMBANG berdasarkan teori George C. Edward III dalam Mulyadi, (2015) berdasarkan 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.<sup>5</sup>

#### 1. Komunikasi

Proses komunikasi terjadi antara pembuat kebijakan, pelaksanaan dan sasaran kebijakan dimana dalam komunikasi tersebut terdapat penekanan pada dua aspek yaitu proses penyampaian dan kejelasan isi program. Kemampuan kerja pelaksanaan diturunkan dari variable sumber daya. Dengan adanya komunikasi, implementor dapat menterjemahkan kebijakan-kebijakan yang ada dengan tepat, akurat, dan konsisten. Jika pemberian informasi mengenai kebijakan kurang jelas, maka akan menimbulkan kesalah pahaman diantara pembuat kebijakan dan implementornya. Pemerintah pusat sudah memberikan sosialisasi terkait UNBK di SD sumsel jaya secara berkala atau dengan jelas, lalu tenaga pendidik pun memberikan penjelasan yang baik kepada siswa untuk melaksanakan UNBK dengan lancar, maka berarti komunikasi di SD sumsel jaya sudah tergolong baik dan komunikasi di SD Sumsel jaya menurut sudah memenuhi teori EDWARD III

#### 2. Sumber daya

Sumber daya meliputi: (1) staf ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan; (2) informasi yang relevan dan cukup tentang tata cara mengimplementasikan kebijakan dan penyesuaian lainnya yang terlibat dalam implementasi; (3) kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan kebijakan dilakukan semuanya; (4) sumber daya yang tidak cukup berarti bahwa undang - undang tidak akan diberlakukan, pelayanan tidak akan diberikan, dan peraturan-peraturan yang layak tidak akan dikembangkan. Selama penelitian di SD Sumsel Jaya tidak pernah mengalami masalah dan proktor berusaha semaksimal mungkin agar tidak terjadi kendala dalam ujian berlangsung dan informasi yang relevan dan cukup tentang tata

---

<sup>5</sup> Siti Fatimah and Eny Haryati, 'Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Di Sd Negeri Kloposepuluh 2 Sukodono - Kabupaten Sidoarjo', *SMIA Edisi Khusus Tema Kebijakan Publik*, 2023, pp. 287-92.

cara mengimplementasikan kebijakan dan penyesuaian lainnya yang terlibat dalam implementasi.

3. Disposisi atau sikap

Sikap merupakan unsur penting dalam implementasi kebijakan. Jika pelaksanaan didasari oleh sikap positif terhadap kebijakan, besar kemungkinan dapat melaksanakan apa yang dikehendaki pembuat kebijakan. Disposisi masih belum terpenuhi terlihat dari sikap mereka yang tidak mendukung adanya UNBK di SD Sumsel Jaya

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi yang terlalu Panjang cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Maka diperlukan struktur birokrasi yang efektif dan efisien. Proses UNBK di SD Sumsel Jaya berlibet-libet dan tidak jelas, sehingga menghambat pelaksanaan UNBK di SD Sumsel Jaya.

### 3. Data Dan Sumber Data

Sumber data salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian ketersediaan sumber data. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya metode kualitatif lebih mengutamakan pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut.

Dalam penelitian ini yang digunakan penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut:

1. Data primer yaitu data yang dihimpun langsung oleh peneliti. Data bersumber langsung dari peneliti yang diperoleh dari proses wawancara dengan informan-informan serta observasi terhadap objek penelitian dalam hal ini sumber data primer dalam penelitian didapat melalui wawancara dengan kepala sekolah dan para dewan guru.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui proses perolehan dan pengumpulan data yang bersifat studi dokumentasi beberapa penilaian terhadap dokumen resmi kelembagaan dan referensi atau aturan yang relevan dengan fokus permasalahan peneliti jadi data sekunder tersebut bersumber dari bahan kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan ujian ANBK terhadap siswa kelas V di SD Sumsel Jaya Palembang.

#### 4. Informan

Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan dalam proses penelitian. Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informan yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat memahami persoalan atau permasalahan tersebut.

Informan dalam penelitian ini adalah siswa, dewan guru dan kepala sekolah adapun tabel informasi penelitian sebagai berikut:

**Tabel 1.**  
**Informan dari SD Sumsel Jaya Palembang**

No	Informan	Keterangan
1	Kepala Sekolah	1 orang
2	Dewan guru	12 orang
3	Siswa kelas V	12 orang
	Jumlah	15 orang

*Sumber: Peneliti, 2023*

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### Observasi

Berdasarkan keterlibatan observer, observasi dibedakan menjadi dua yakni observasi berperan serta dan observasi non partisipan. Dalam penelitian ini penelitian menggunakan teknik observasi berperan serta, artinya dalam proses penelitian ini, peneliti ikut serta dalam kegiatan sesuai kebutuhan peneliti untuk memperoleh data yang benar-benar valid. Pemilihan teknik observasi berperan serta ini dilakukan agar peneliti dapat lebih fokus dalam melakukan pengamatan tentang permendikbudristek ujian ANBK di SD Sumsel Jaya Palembang sehingga data hasil observasi yang diperoleh benar-benar valid sesuai dengan kondisi yang diamati.

#### Kesimpulan

Kesimpulan Menurut George C. Edward III keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, (4) struktur birokrasi. Proses komunikasi terjadi antara pembuat kebijakan, pelaksanaan dan sasaran kebijakan. sumber daya yang tidak cukup berarti bahwa undang - undang tidak akan diberlakukan, pelayanan tidak akan diberikan, dan peraturan-peraturan yang layak tidak akan dikembangkan. sikap merupakan unsur penting dalam implementasi kebijakan, Disposisi adalah

watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis yang ada di SD Sumsel Jaya. struktur birokrasi yang terlalu Panjang cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.

Pemerintah pusat sudah memberikan sosialisasi terkait UNBK di SD sumsel jaya secara berkala atau dengan jelas, lalu tenaga pendidik pun memberikan penjelasan yang baik kepada siswa untuk melaksanakan UNBK dengan lancar, maka komunikasi di SD sumsel jaya sudah tergolong baik dan komunikasi di SD Sumsel jaya sudah memenuhi salah satu teori EDWARD III. Namun teori disposisi dan struktur birokrasi masih belum terpenuhi terlihat dari sikap mereka yang tidak mendukung adanya UNBK dan pada prosesnya berbelit-belit sehingga pelaksanaan UNBK di SD Jaya Palembang menjadi terhambat.

### Daftar Pustaka

- Fatimah, 'Implementasi Budaya Religius Dalam Membina Akhlak Siswa Di MI Rahmatullah Kota Jambi', *Jurnal Pendidikan Guru*, 2.1 (2021), pp. 68–78, doi:10.47783/jurpendigu.v2i1.189
- Fatimah, Siti, and Eny Haryati, 'Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka di Sd Negeri Kloposepuluh 2 Sukodono - Kabupaten Sidoarjo', *SMIA Edisi Khusus Tema Kebijakan Publik*, 2023, pp. 287–92
- Fauziah, Aifah, Enur Fitiriani Dewi Sobari, and Babang Robandi, 'Analisis Pemahaman Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Mengenai Asesmen Kompetensi Minimum (AKM)', *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3.4 (2021), pp. 1550–58  
<<https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/608>>
- Muntahanah, Muntahanah, Sri Handayani, and Lidia Lidia, 'Penerapan Metode Fuzzy Mamdani Penentuan Strategi Belajar Siswa Pada Persiapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)', *Pseudocode*, 8.2 (2021), pp. 108–17, doi:10.33369/pseudocode.8.2.108-117
- Wahyudi, Lestari Eko, Alfian Mulyana, Ajrin Dhiaz, Dewi Ghiandari, Zidan Putra Dinata Muallim Fitoriq, " Mengukur Kualitas Pendidikan Di Indonesia ", *Ma'arif Journal of Education, Madrasah Innovation and Aswaja Studies* , Vol. 1, No. 1, (2022). 1', 1.1, pp. 1–11